



**PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU**

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 - 2029





GUBERNUR MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Maluku periode 20 (dua puluh) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Maluku untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra;
 - b. dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku;
 - c. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) RPJMD wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB II

RPJMD

Pasal 3

- (1) Gubernur melalui Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Pasal 5

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar untuk:
 - a. perumusan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
 - c. penyusunan rencana pembangunan tahunan serta rencana pembangunan jangka menengah berikutnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi dilaporkan oleh BAPPEDA kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD.

Pasal 7

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun pelaksanaan RPJMD disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPD.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR MALUKU,


HENDRIK LEWERISSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (1-140/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka mulai untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka waktu tahunan. Tahapan pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Maluku terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahap I Perkuatan Fondasi (2025-2029), tahap II Akselerasi Transformasi (2030-2034), tahap III Penguatan (2035-2039), dan tahap IV Perwujudan (2040-2045).

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2045, maka dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah setiap tahapan. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama yang diarahkan pada penguatan fondasi untuk transformasi tahap-tahap selanjutnya dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 – 6,1 persen per tahun, pemenuhan layanan dasar kesehatan dan pendidikan serta fokus pada hilirisasi SDA unggulan melalui pengembangan sentra- sentra industri yang memiliki potensi berkembang yang cukup besar.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 cukup terdiri dari 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 146.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi pembangunan, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah untuk kurun waktu tahun 2025 hingga 2029. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, serta acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan mengusung visi *“Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045,”* Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mendorong percepatan transformasi pembangunan di berbagai bidang. Visi ini mencerminkan tekad kuat untuk mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara partisipatif dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan. Proses ini mencerminkan semangat kolaborasi dan sinergi demi memastikan bahwa arah pembangunan Provinsi Maluku lima tahun ke depan sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat dan tantangan global maupun nasional, termasuk kontribusi terhadap visi besar Indonesia Emas 2045.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Maluku yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akhir kata, semoga kerja keras kita bersama dalam melaksanakan pembangunan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.



2.1.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	72
2.1.3.4	Transformasi Digital	72
2.1.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	73
2.1.3.6	Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	74
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	79
2.1.3.8	Aspek Pelayanan Umum	80
2.1.3.9	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	82
2.1.3.10	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	83
2.1.3.11	Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	84
2.2	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	118
2.2.1	Realisasi APBD Periode Tahun 2020 – 2024	118
2.2.2	Neraca Daerah	132
2.2.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan	136
2.2.3.1	Asumsi-Asumsi	136
2.2.4	Arah Kebijakan	138
2.2.5	Kerangka Pendanaan	139
2.3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	142
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	143
2.3.1.1	Infrastruktur Wilayah dan Dasar Belum Merata dan Memadai	143
2.3.1.2	Kesenjangan Antar Wilayah Masih Tinggi	144
2.3.1.3	Aksesibilitas Layanan Kesehatan Belum Optimal	144
2.3.1.4	Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Belum Merata	145
2.3.1.5	Pengembangan IPTEKIN dan Riset Belum Optimal	145
2.3.1.6	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Optimal	146
2.3.1.7	Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Masih Tinggi	147
2.3.1.8	Tingkat Pengangguran Masih Tinggi	148
2.3.1.9	Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial	150
2.3.1.10	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Serta Ancaman Bencana	150



2.3.1.11	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	151
2.3.2	Isu Strategis	152
2.3.2.1	Isu Global	152
2.3.2.2	Isu Nasional dan Daerah	154
2.3.3	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029	155
2.3.3.1	Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar Serta Infrastruktur Transportasi Dan Telekomunikasi Untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau	155
2.3.3.2	Kesenjangan Antar Wilayah	156
2.3.3.3	SDM Yang Berdaya Saing Terbatas	157
2.3.3.4	Belum Optimalnya Pengembangan IPTEKIN dan Riset	157
2.3.3.5	Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Khususnya Hilirisasi komoditas Unggulan	158
2.3.3.6	Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah	158
2.3.3.7	Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	159
2.3.3.8	Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Stabilitas Sosial	160
2.3.3.9	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	160
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	162
3.1	VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN	165
3.1.1	Visi Dan Misi	165
3.1.1.1	Visi	165
3.1.1.2	M i s i	166
3.1.2	Tujuan Dan Sasaran	169
3.1.2.1	Tujuan Dan Sasaran Provinsi Maluku 2025 – 2030	171
3.2	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	180
3.2.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	180
3.2.1.1	Misi 1	180



3.2.1.2	Misi 2	181
3.2.1.3	Misi 3	181
3.2.1.4	Misi 4	182
3.2.1.5	Misi 5	183
3.2.1.6	Misi 6	184
3.2.1.7	Misi 7	185
3.2.2	Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030	191
3.2.3	Pembangunan Kewilayahan	197
3.2.3.1	Proyek Strategis Nasional	197
3.2.4	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota	251
3.2.5	Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	253
3.2.6	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	254
3.3	Agenda Kerja Prioritas Program unggulan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran setiap Misi dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029	257
3.4	Program Prioritas Daerah	264
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	287
4.1	Program Perangkat Daerah	287
4.1.1	Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah	287
4.1.2	Kerangka Pendanaan Dalam Program Perangkat Daerah	287
4.1.3	Daftar Program Perangkat Daerah 2025-2029	288
4.1.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	288
4.1.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	290
4.1.3.3	Urusan Pilihan	293
4.1.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	295
4.1.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	295
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	384
4.2.1	Indikator Makro	384
BAB V	PENUTUP	427



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kabupaten/Kota Provinsi Maluku	15
Tabel 2.2	Kondisi Dataran Rendah di Provinsi Maluku	17
Tabel 2.3	Potensi Sumber Daya Ikan di WPP 714, 715 dan 718	19
Tabel 2. 4	Produksi Perikanan Tangkap Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	20
Tabel 2.5	Luas Area dan Produksi Pala Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.6	Luas Area dan Produksi Komoditas Cengkeh Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.7	Luas Area dan Produksi Komoditas Kelapa Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.8	Sebaran Potensi Pariwisata di Maluku	24
Tabel 2.9	Sebaran Potensi Arus Laut	26
Tabel 2.10	Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kepulauan Maluku	27
Tabel 2.11	Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air Provinsi Maluku dan Kecenderungan Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Periode 1996 - 2020	28
Tabel 2.12	Perhitungan Daya Dukung Air Menggunakan Metode Koefisien Limpasan	28
Tabel 2.13	Produktivitas Komoditas Provinsi Maluku	30
Tabel 2.14	Status daya dukung daya tampung penyediaan pangan di Kepulauan Maluku	31
Tabel 2.15	Ketersediaan Pangan Strategis di Provinsi Maluku	32
Tabel 2.16	Konsumsi Pangan Strategis di Provinsi Maluku	34
Tabel 2.17	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	35
Tabel 2.18	Prevalensi Ketidacukupan Pangan Provinsi Maluku 2020 – 2024	36
Tabel 2.19	Air Minum Layak Provinsi Maluku 2020 – 2024	36
Tabel 2.20	Penggunaan Listrik Provinsi Maluku 2020 – 2024 (KWH/kapita per tahun)	37
Tabel 2.21	Indeks Kualitas Air Provinsi Maluku	38
Tabel 2.22	Indeks Kualitas Udara Provinsi Maluku	39
Tabel 2.23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	39
Tabel 2.24	Jenis Bahaya yang Berpotensi terjadi di Provinsi Maluku	42
Tabel 2.25	Nilai IRB dan Tingkat Risiko Bencana per Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku	43
Tabel 2.26	Nilai IKD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2024	44
Tabel 2.27	Penurunan Emisi GRK Maluku 2020 - 2024	45
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024	48



Tabel 2.29	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Provinsi Maluku Tahun 2024	48
Tabel 2.30	Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	50
Tabel 2.31	Rata-Rata Kontribusi PDRB ADHB dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral	51
Tabel 2.32	Distribusi PDRB Pengeluaran ADHB Provinsi Maluku Menurut Lapangan Usaha (Persen)	52
Tabel 2.33	PDRB Per Kapita Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Di Maluku	53
Tabel 2.34	Prevelansi Stunting Maluku 2020 – 2024	57
Tabel 2.35	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	62
Tabel 2.36	Indeks Kerukunan Umat Beragama Maluku 2021 – 2024	63
Tabel 2.37	Indeks Pembangunan Kebudayaan Maluku 2020 – 2023	64
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Pemuda Maluku	66
Tabel 2.39	Rasio Ketergantungan Tahun 2021-2024 Provinsi Maluku	67
Tabel 2.40	Rasio Lulusan Perguruan Tinggi Provinsi Maluku Tahun 2024	68
Tabel 2.41	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Maluku 2021 – 2024	69
Tabel 2.42	Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Maluku 2020 – 2024	70
Tabel 2.43	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Maluku 2020 – 2024	71
Tabel 2.44	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024	71
Tabel 2.45	Realisasi Investasi PMDN dan PMA, serta Realisasi Proyek di Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024	74
Tabel 2.46	Jumlah Pelabuhan Laut per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	74
Tabel 2.47	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	75
Tabel 2.48	Jumlah Bandar Udara per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	76
Tabel 2.49	Perkembangan Inflasi di Provinsi Maluku	79
Tabel 2.50	Indeks Reformasi Birokrasi Maluku Tahun 2022 – 2024	80
Tabel 2.51	Indeks SPBE Maluku Tahun 2021 – 2024	81
Tabel 2.52	Indeks Demokrasi Indonesia – Maluku, Tahun 2021 – 2023	83
Tabel 2.53	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024	83
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2024	84
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2020 – 2024	85
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan	90



	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 - 2024	
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 – 2024	91
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketrentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024	92
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2020 – 2024	93
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2024	94
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024	95
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024	97
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024	97
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024	98
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 – 2024	99
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024	99
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024	100
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024	100
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024	101
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 – 2024	102
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Tahun 2020 – 2024	102
Tabel 2.72	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Tahun 2020 – 2024	103
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024	103
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Tahun 2020 – 2024	104
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2024	104
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2024	105



Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Tahun 2020 – 2024	105
Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Tahun 2019 – 2024	106
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Tahun 2020 – 2024	107
Tabel 2.80	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024	107
Tabel 2.81	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun 2023 – 2024	108
Tabel 2.82	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Tahun 2023 – 2024	109
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Tahun 2022 – 2024	110
Tabel 2.84	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2024	110
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Perencanaan Tahun 2022 – 2024	111
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Keuangan Tahun 2020 – 2024	112
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pendapatan Tahun 2020 – 2024	113
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pengadaan Tahun 2024	113
Tabel 2.89	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 – 2024	114
Tabel 2.90	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Kepegawaian Tahun 2020 – 2024	114
Tabel 2.91	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 – 2024	115
Tabel 2.92	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Perbatasan Tahun 2020 – 2024	116
Tabel 2.93	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pengelolaan Penghubung Tahun 2022 – 2024	116
Tabel 2.94	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Inspektorat Tahun 2020 – 2024	117
Tabel 2.95	Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 – 2023	118
Tabel 2.96	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)	126
Tabel 2.97	Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024 (ribu rupiah)	127
Tabel 2.98	Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)	129
Tabel 2.99	Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)	130
Tabel 2.100	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)	131
Tabel 2.101	Realisasi Neraca Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024	133
Tabel 2.102	Rasio Lancar Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	134



Tabel 2.103	Rasio Hutang terhadap Aset Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	135
Tabel 2.104	Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	135
Tabel 2.105	Proyeksi Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2025-2030	141
Tabel 2.106	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2030	141
Tabel 2.107	Proyeksi Pembiayaan Provinsi Maluku Tahun 2025-2030	142
Tabel 2.108	Isu Strategis Nasional dan Daerah	154
Tabel 3.1	Sasaran Visi Maluku Emas 2025 - 2045	162
Tabel 3.2	Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029	170
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2030	172
Tabel 3.4	Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029	187
Tabel 3.5	Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.	195
Tabel 3.6	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 – 2029	198
Tabel 3.7	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kepulauan Tanimbar Dalam RPJMN 2025 – 2029	202
Tabel 3.8	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Tanimbar Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	207
Tabel 3.9	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Maluku Tenggara Dalam RPJMN 2025 – 2029	207
Tabel 3.10	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	211
Tabel 3.11	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Maluku Tengah Dalam RPJMN 2025 – 2029	211
Tabel 3.12	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	218
Tabel 3.13	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Buru Dalam RPJMN 2025 – 2029	219
Tabel 3.14	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	222
Tabel 3.15	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kepulauan Aru Dalam RPJMN 2025 – 2029	223
Tabel 3.16	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	227



Tabel 3.17	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Seram Bagian Barat Dalam RPJMN 2025 – 2029	228
Tabel 3.18	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	230
Tabel 3.19	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Seram Bagian Timur Dalam RPJMN 2025 – 2029	231
Tabel 3.20	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	233
Tabel 3.21	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Maluku Barat Daya Dalam RPJMN 2025 – 2029	233
Tabel 3.22	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	236
Tabel 3.23	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Buru Selatan Dalam RPJMN 2025 – 2029	237
Tabel 3.24	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	239
Tabel 3.25	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kota Ambon Dalam RPJMN 2025 – 2029	239
Tabel 3.26	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Ambon Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	244
Tabel 3.27	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kota Tual Dalam RPJMN 2025 – 2029	245
Tabel 3.28	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Tual Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029	250
Tabel 3.29	Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Wilayah Pembangunan Kabupaten/Kota	252
Tabel 3.30	Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama Provinsi Maluku	254
Tabel 3.31	Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan	258
Tabel 3.32	Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku 2025 – 2029	265
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku	297
Tabel 4.1.1	Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2030	385
Tabel 4.2	Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku	386
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Provinsi Maluku	388



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029	3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	9
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah	14
Gambar 2.2	Peta Administrasi Provinsi Maluku	15
Gambar 2.3	Jumlah Kejadian Tsunami di Indonesia dan Maluku Periode 1600-2015 Sumber : UNESCO, 2016	40
Gambar 2.4	Presentasi Kejadian Bencana di Provinsi Maluku Periode 2015 – 2024 Sumber : BNPB	41
Gambar 2.5	Perkembangan Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2015-2024	47
Gambar 2.6	Piramida Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2024	49
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024	54
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024	54
Gambar 2.9	Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2018-2023	55
Gambar 2.10	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023	56
Gambar 2.11	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Maluku	58
Gambar 2.12	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2024	60
Gambar 2.13	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku	60
Gambar 2.14	Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Per Kabupaten/Kota Tahun 2024	61



Gambar 2.15	Jumlah Penerima Bantuan dan Jumlah Anak Terlantar yang Ditanggung dan Dibina dalam Panti Tahun 2024	62
Gambar 2.16	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024	65
Gambar 2.17	Ketersediaan Rumah Layak Huni Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	77
Gambar 2.18	Persentase Luas Kawasan Kumuh Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	78
Gambar 2.19	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024 (milyar rupiah)	120
Gambar 2.20	Perkembangan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	122
Gambar 2.21	Perkembangan Proporsi Dana Transfer Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	124
Gambar 2.22	Perkembangan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	125
Gambar 2.23	Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (Semester 1, 2024)	147
Gambar 2.24	Persentase Penduduk Miskin di Maluku (Semester 1, 2024)	148
Gambar 2.25	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia (Agustus, 2024)	149
Gambar 3.1	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku 2025 – 2045	163
Gambar 3.2	Penahapan Pembangunan Provinsi Maluku 2026 – 2030	191
Gambar.3.3	Rencana Pengembangan (PoD) Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	199
Gambar. 3.4	Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025 – 2029 Di Provinsi Maluku	201
Gambar 3.5	Costal Road Kota Ambon (Jalan Lingkar Teluk Ambon)	245



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD disusun sebagai penjabaran lebih operasional dari RPJPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku tanggal 09 Januari 2025 telah menetapkan pasangan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2030 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kerangka pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh karena itu RPJMD Provinsi Maluku ini merupakan instrumen utama dalam menyinergikan berbagai kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dilakukan dalam momentum yang sangat strategis. Secara aturan Dokumen RPJMD adalah dokumen wajib disusun selama 6 bulan pasca dilantikanya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, jika tidak disusun maka akan berdampak pada sanksi administratif kepada kepala daerah.

Visi Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 adalah **“Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”** dalam rangka mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 7 misi (Sapta Cita) yaitu 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel, 2) Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif, 3) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas, 4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah, 5) Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel), 6) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antarwilayah, 7) Penataan dan Revitalisasi



Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Semangat Hidup Orang Basudara, Berbasis Adat Budaya dan Kearifan Lokal serta Ketaatan dan Kepatuhan Terhadap Hukum.

Memasuki tahun pertama implementasi RPJMD Maluku Tahun 2025 – 2029 Pemerintah Provinsi Maluku telah mengoperasionalkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas yang ditetapkan. Adanya dinamika regulasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersifat mandatori melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2025 tentang Pengendalian Belanja Pemerintah Untuk Efisiensi secara langsung membawa dampak baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD Provinsi Maluku selama 5 (lima) tahun ke depan.

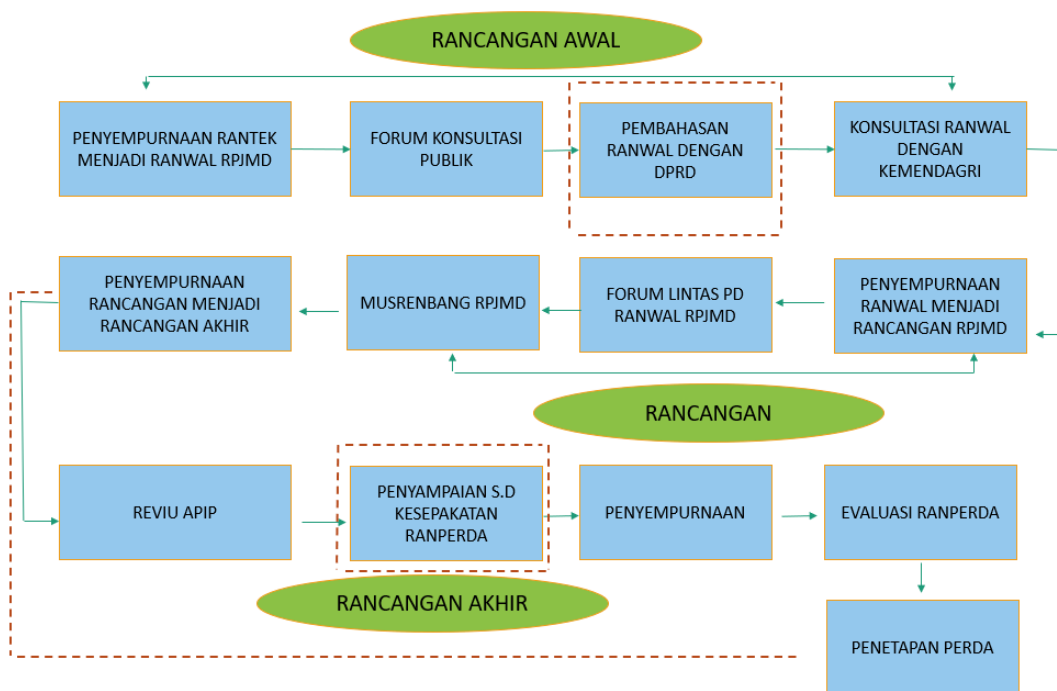
Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen strategis sebagai arah pembangunan daerah 5 (lima) tahun, selain itu juga menjadi dasar penyusunan beberapa dokumen lainnya antara lain :

1. Sebagai penjabaran RPJPD Tahun 2025 - 2045 Tahap pertama (2025 – 2029) yang merupakan tahap penguatan fondasi untuk Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta kesinambungan pemerintah;
2. Sebagai media untuk menguraikan dan merealisasikan janji politik sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disampaikan pada masa kampanye;
3. Sebagai pedoman Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku;
4. Sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
5. Sebagai pedoman penyusunan RKPD dan APBD Tahunan;

Proses penyusunan RPJMD Provinsi Maluku dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk itu muatan substansi dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat dioperasionalkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Alur penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029



Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara berkesinambungan, diawali dengan tahap persiapan hingga berakhir di tahap penetapan melalui PERDA RPJMD. Berikut tahapan penyusunan dirinci sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, sesuai amanat peraturan Menteri dalam negeri meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi, agenda kerja tim, data dan informasi perencanaan Pembangunan untuk penyusunan Rantek (RPJMD) Dimana Rantek RPJMD ini menjadi bagian utama substansi tim penyusun RPJMD dalam Menyusun Rancangan Awal RPJMD;
2. Tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD dilaksanakan dengan penyempurnaan berdasarkan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Maluku, serta hasil konsultasi dengan Kemendagri dan Kementerian PPN Bappenas.
3. Tahap penyusunan Rancangan RPJMD, dilaksanakan dengan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri dan Penyerasian dengan Kementerian PPN Bappenas.
4. Tahapan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, disempurnakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD untuk selanjutnya disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk direviu, hasil reviu menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi RANPERDA RPJMD untuk dievaluasi oleh Kemendagri.
5. Tahapan penetapan, dilaksanakan dengan penyempurnaan RANPERDA hasil evaluasi Kemendagri yang kemudian ditetapkan sebagai Perda RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029.

RPJMD 2025 - 2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPD 2025–2045 yang menandai dimulainya perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, dimana peran dan kontribusi Provinsi Maluku juga sangat diharapkan. Secara garis besar pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, struktur ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan yang inklusif dan adil, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku ini. Selama periode 2019–2024, berbagai hasil pembangunan telah banyak



diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, namun masih juga banyak tantangan yang membutuhkan intervensi kebijakan, termasuk dalam hal kemiskinan, ketimpangan wilayah, rendahnya nilai tambah komoditas unggulan, kualitas layanan dasar, daya saing SDM, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2025–2029 sebagai solusi strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, penerapan pendekatan berbasis data dan kewilayahan, serta pelibatan masyarakat secara aktif dan inklusif.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Provinsi 2025–2029 mengacu pada sejumlah peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6869);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 35. Kepmendagri No. 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13;
 37. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103 Tahun 2020).
 38. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara substantif diarahkan untuk mewujudkan keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi, sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. RPJMD Provinsi Maluku ini merupakan masukan proses



teknokratik untuk dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Hubungan antara RPJMD Provinsi Maluku dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan RPJPD Tahun 2025 – 2045

Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 2025-2045 terutama visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. RPJMD 2025-2029 merupakan tahapan PERTAMA dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode Tahun 2025-2030, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045.

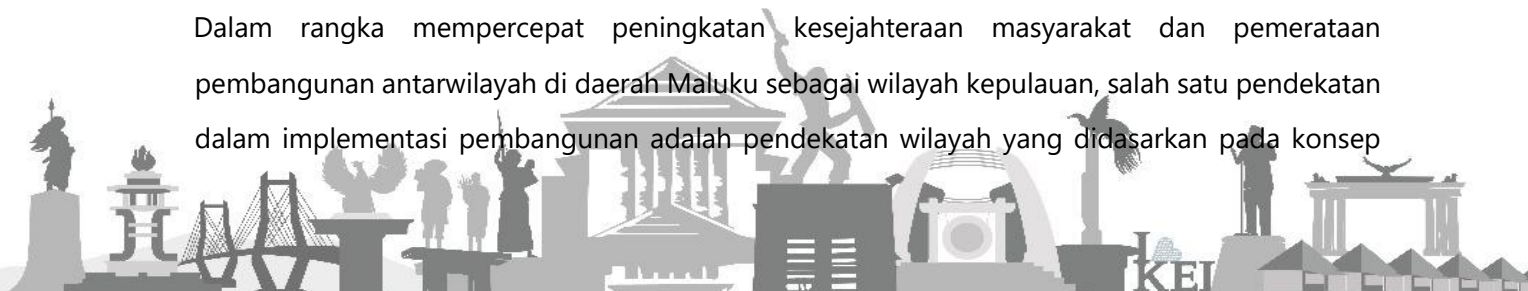
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Maluku yang telah disusun, diarahkan untuk mencapai visi “Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan”. Terdapat 8 Misi Pokok yaitu : (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah, (5) Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, (7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, (8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD 2025 – 2029 dan RTRW Provinsi Maluku

Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku 2013-2033 yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang serta indikasi program 5 tahunan, terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Provinsi Maluku secara berkelanjutan. Untuk itu perlu diperhatikan wilayah Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang produktif dan berkelanjutan berbasis pada perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian (perkebunan rempah-rempah), pariwisata (pariwisata bahari, sejarah dan budaya) dan pertambangan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana.

Rencana struktur ruang Provinsi Maluku dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak (*multigate*) yang diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah di daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep



Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu: (1) Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru; (2) Gugus Pulau II meliputi wilayah Seram Barat; (3) Gugus Pulau III meliputi wilayah Seram Utara; (4) Gugus Pulau IV meliputi wilayah Seram Timur; (5) Gugus Pulau V meliputi wilayah Seram Selatan; (6) Gugus Pulau VI meliputi wilayah Kepulauan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua; (7) Gugus Pulau VII meliputi wilayah Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; (8) Gugus Pulau VIII meliputi wilayah Kepulauan Kei; (9) Gugus Pulau IX meliputi wilayah Kepulauan Aru; (10) Gugus Pulau X meliputi wilayah Kepulauan Tanimbar; (11) Gugus Pulau XI meliputi wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer; dan (12) Gugus Pulau XII meliputi wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah Kepulauan Maluku diharapkan dapat mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Maluku.

Rencana struktur ruang wilayah nasional di Provinsi Maluku meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Provinsi Maluku mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 dan RPJMN 2025 – 2029

Rancangan RPJMD memuat permasalahan dan Isu Strategis Daerah dan belum memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah terpilih, maka pada bagian ini akan disampaikan berbagai permasalahan dan isu Strategis Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMN yang terkait dengan pembangunan wilayah Maluku untuk tahun 2025-2029 dengan tema pembangunan wilayah Maluku pada periode 2025 – 2029 yakni Hub “Kemaritiman Wilayah Kemaritiman Indonesia Timur” wilayah Maluku ditargetkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia mencapai 1% pada tahun 2029 dengan menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar 11,40 – 12,50%. Pembangunan wilayah Maluku difokuskan pada potensi kemaritiman, didukung sektor perkebunan, pertambangan dan pariwisata, serta ditopang kawasan strategis eksisting dan menekankan pada percepatan pembangunan daerah afirmasi. Sementara tema untuk Provinsi Maluku yakni “Pusat Kemaritiman, Sentra Perikanan dan Perkebunan, Lumbung Energi, serta Destinasi Pariwisata Bahari Berkelanjutan”.



1.3.4 Hubungan Antara RPJMD 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah 2025 - 2029

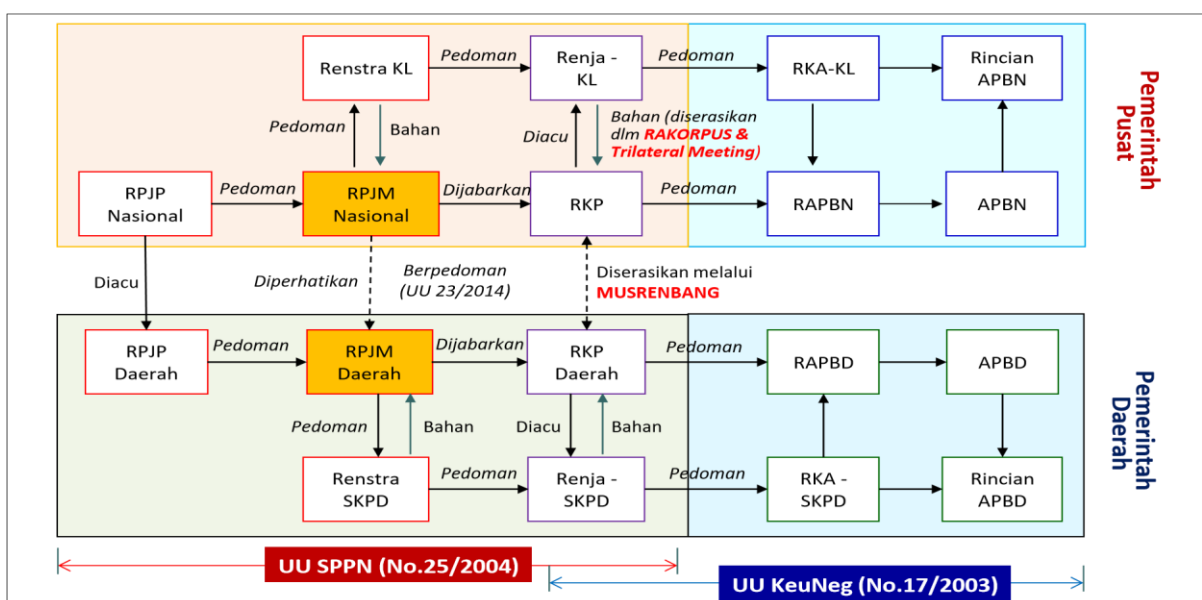
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pada akhirnya, Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Provinsi Maluku 2025 - 2029. Renstra PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Setiap tahun, pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya RKPD akan menjadi bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Maluku yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat Provinsi.

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD 2025 – 2029 dan RPJMD Kabupaten/Kota Serta Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan bagi RPJMD kabupaten/kota untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi juga memperhatikan komitmen nasional dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota 2025-2029 juga memperhatikan, mengacu dan mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: UU 25 Tahun 2004 & UU 17 Tahun 2003 (diolah)

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan, yang mencakup penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD 2025–2029 antara lain:

- Menyediakan arah kebijakan pembangunan daerah yang terukur dan berkelanjutan;
- Menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda nasional dan global (SDGs, transisi energi, dan perubahan iklim);
- Menyusun indikator kinerja pembangunan daerah sebagai dasar evaluasi capaian pembangunan;
- Menjamin kesinambungan pembangunan antar periode pemerintahan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan landasan hukum penyusunan RPJMD. Di dalamnya juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RPJPD, dan RPJMN. Tujuannya adalah memberikan kerangka awal untuk memahami konteks, arah, dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini, yang terdiri dari;

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan potret menyeluruh kondisi daerah yang meliputi karakteristik geografis, demografis, sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup yang menjadi dasar perencanaan pembangunan. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah, termasuk kapasitas fiskal, struktur pendapatan dan belanja daerah, serta kemampuan pembiayaan pembangunan. Di bagian akhir, dijelaskan pula permasalahan utama dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah, yang menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan lima tahunan ke depan, yang terdiri dari:



BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi simpulan dari keseluruhan isi RPJMD serta penegasan komitmen untuk melaksanakan dokumen ini secara konsisten. Bab ini juga berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Disampaikan pula harapan agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah dirancang bersama, serta ajakan untuk menjadikan RPJMD sebagai dokumen hidup yang dapat disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan daerah.



GAMBARAN UMUM

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

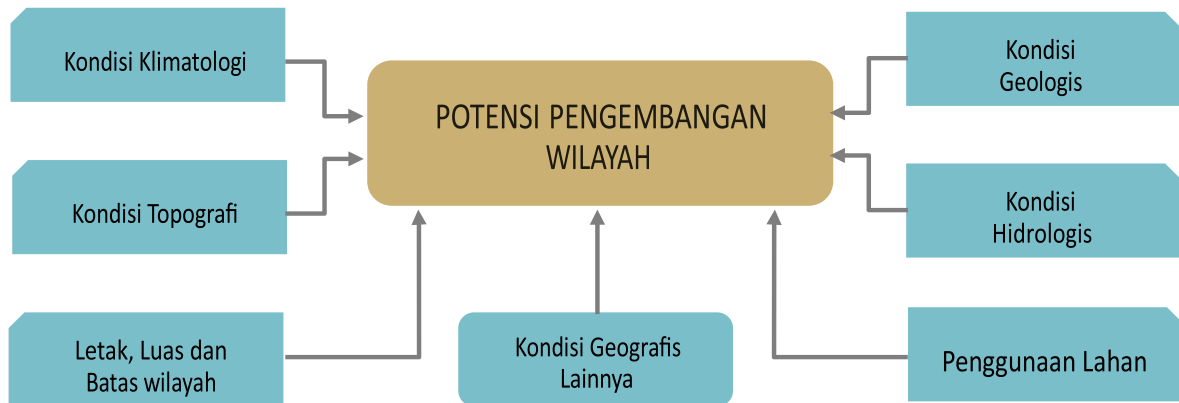
Data dan informasi pembangunan merupakan potret hasil pembangunan periode sebelumnya yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan selama ini, berikut gambaran umum Provinsi Maluku dari berbagai aspek.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografis yang bercirikan kepulauan menjadikan konektivitas antarwilayah, keterjangkauan layanan dasar, serta distribusi logistik menjadi tantangan utama pembangunan daerah. Meskipun demikian, posisi strategis Maluku di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III memberikan potensi besar dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, serta konektivitas perdagangan nasional dan internasional.

Kondisi geografis merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah. Dengan mengetahui aspek geografi dan demografi suatu wilayah, pemangku kebijakan dapat merencanakan dan mengelola pembangunan di masa yang akan datang. Alur pikir potensi pengembangan wilayah dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :





Sumber: Permendagri No. 86 2017

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah

Pada sub bab ini akan dibahas secara rinci mengenai kondisi luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi serta penggunaan lahan sebagaimana digambarkan dalam di atas.

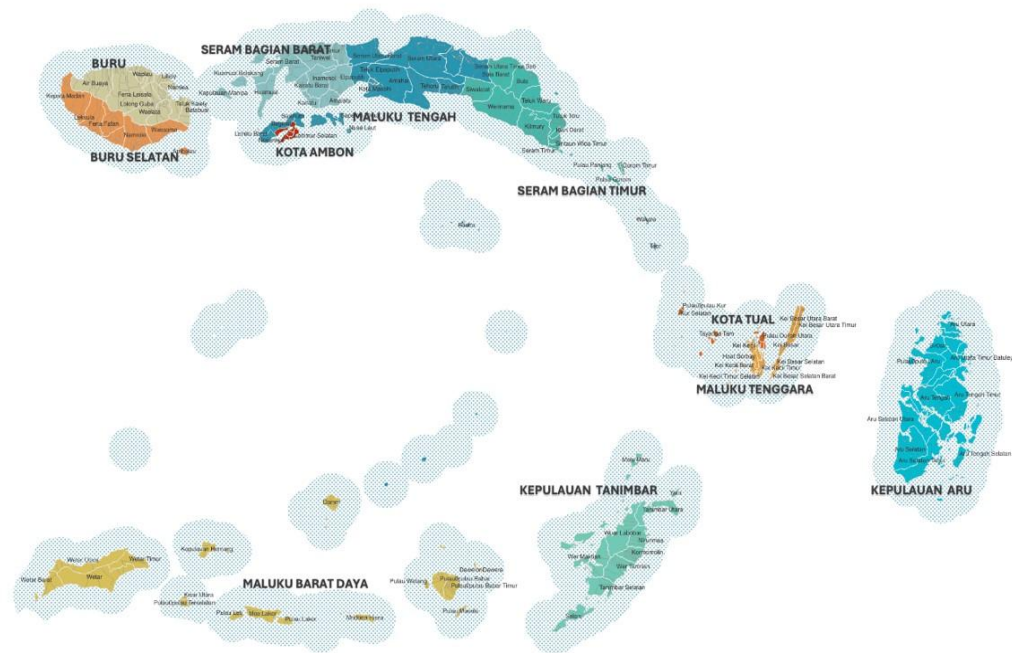
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a) Posisi Geografis

Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 1.388 pulau, dengan luas 46.158,267 km² dan terletak di antara 2°3'-9° Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur.

Secara administrasi, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah selatan, Provinsi Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat.





Gambar 2.2
Peta Administrasi Provinsi Maluku

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

No	Kabupaten / Kota	Luas Area (km ² /sq.km)	Ibukota Kabupaten	Jumlah		
				Kec.	Desa	Kel.
1	Kepulauan Tanimbar	4.431,082	Saumlaki	10	80	2
2	Maluku Tenggara	1.016,924	Langgur	11	190	1
3	Maluku Tengah	8.253,929	Masohi	18	186	6
4	Buru	4.915,566	Namlea	10	82	-
5	Kepulauan Aru	8.096,729	Dobo	10	117	2
6	Seram Bagian Barat	5.017,138	Piru	11	92	-
7	Seram Bagian Timur	5.725,447	Bula	15	198	-
8	Maluku Barat Daya	4.551,676	Tiakur	17	117	1
9	Buru Selatan	3.678,696	Namrole	6	81	-
10	Kota Ambon	236,663	Ambon	5	30	20
11	Kota Tual	234,417	Tual	5	27	3
MALUKU		46.158,267	Ambon	118	1.200	35

Sumber : Kemendagri 100.1.1.6117 Tahun 2022



Secara geostrategis, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

Berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste, Papua Nugini dan Australia, dengan 19 Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan ketiga negara tersebut, menempatkan Maluku sebagai titik sentral dalam kedaulatan integritas teritorial Indonesia di Kawasan Timur, sekaligus berperan sebagai pintu keluar dan masuknya arus barang, jasa dan manusia dari negara-negara Pasifik ke negara-negara Asia Timur maupun sebaliknya.

Posisi geografis Provinsi Maluku sebagai pusat dari "Coral Triangle" (Segitiga Terumbu Karang) dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, disamping kekayaan laut lainnya yang dimiliki, menjadikan Maluku sebagai prioritas pembangunan ekonomi biru (Blue Economy Corridor) dan pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. Posisi yang dimiliki ini, menempatkan Maluku sangat strategis bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara ekonomi, geopolitik dan lingkungan.

b) Peran Strategis

Provinsi Maluku juga memiliki peran strategis baik ekonomi, sosial-budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan. Keberadaan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715 dan 718 di wilayah Provinsi Maluku mengisyaratkan potensi laut yang melimpah, dimana 36,51% dari total potensi perikanan nasional ada di Maluku. Hal ini menjadikan Maluku sebagai penopang utama produksi perikanan dan ketahanan pangan laut nasional.

Disamping itu kekayaan rempah-rempah (pala dan cengkeh) dan komoditas perkebunan lainnya seperti kelapa, dapat dikembangkan melalui hilirisasi industri dan perdagangan. Peran ini mendukung agenda transformasi ekonomi nasional yang berbasis sumber daya lokal dan penguatan rantai nilai komoditas perkebunan. Di sisi lain, warisan sejarah dan budaya maritim Maluku menjadikan provinsi ini sebagai simpul penting dalam penguatan identitas nasional dan pengembangan diplomasi budaya maritim Indonesia.



c) Topografi Kepulauan Maluku

Wilayah Maluku memiliki banyak pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 km²), Pulau Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²). Selain itu, wilayah Maluku juga terdapat 4 (empat) gunung dimana gunung tertinggi adalah Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian 1.036 meter di atas permukaan laut. Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 danau yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dulla, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau Buru.

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan. Pada Tabel 2.2 dapat dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Tabel 2.2
Kondisi Dataran Rendah di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seran Selatan Pasahari	4.000 40.000	Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa Eti Kairatu	10.000 600 1.300	Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo Wai Kating Wai Kumu Wai Mala Rana Samalagi Wai Lo	14.000 1.500 1.250 1.250 1.250 1.000 500	Pulau Buru



No.	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
	Jumlah		83.950	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 mpl, 100-500 mpl dan >500 mpl. Kawasan dengan ketinggian 0-100 mpl tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 mpl banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 mpl, 100-500 mpl dan >500 mpl. Kawasan dengan ketinggian 0-100 mpl tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 mpl pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 mpl terletak di tengah Pulau Seram.

3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 mpl, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 mpl dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 mpl.

4. Kepulauan Aru

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 mpl, ketinggian 100-500 mpl, dan ketinggian >500 mpl.



5. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous). Secara rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%).

Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

a) Perikanan

Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan terbesar di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di wilayah ini mencapai 4.386.223 ton per tahun atau 36,51% dari total potensi perikanan nasional. Potensi ini tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu WPP 714, WPP 715, dan WPP 718, menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat utama perikanan nasional.

Tabel 2.3
Potensi Sumber Daya Ikan di WPP 714, 715 dan 718

Jenis Sumber Daya Ikan	Potensi Per WPP (ton/tahun)			Total
	714	715	718	
Pelagis Kecil	222.881	443.944	836.973	1.503.798
Pelagis Besar	370.653	74.908	818.870	1.264.431
Ikan Demersal	292.000	80.226	876.722	1.248.948
Ikan Karang	121.326	105.336	29.485	256.147



Jenis Sumber Daya Ikan	Potensi Per WPP (ton/tahun)			Total
	714	715	718	
Udang	6.472	5.295	62.842	74.609
Panaeid				
Lobster	724	1217	1.187	3.128
Kepiting	1.145	336	1.498	2.979
Rajungan	4.705	157	775	5.637
Cumi-Cumi	13.460	3.874	9.212	26.546
Total	1.033.366	715.293	2.637.564	4.386.223

Sumber : KepmenKP, 2022

Perkembangan perikanan tangkap dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), menunjukan produksi yang fluktuatif. Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru dan Seram Bagian Barat merupakan penghasil ikan utama di Provinsi Maluku bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2. 4
Produksi Perikanan Tangkap Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Per Tahun (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepulauan Tanimbar	10.097,37	11.090,90	5.155,63	13.941	14.389,59
2	Maluku Tenggara	122.274,40	12.293,10	97.101,34	97.101	97.538,32
3	Maluku Tengah	8.192,04	115.861,40	167.915,81	157.819	152.760,21
4	Buru	177.144,69	19.823,00	12.286,94	12.287	12.789,67
5	Kepulauan Aru	19.676,00	2.813,90	32.560,83	78.409	68.829,44
6	Seram Bagian Barat	9.140,00	187.757,40	67.631,16	67.631	67.732,48
7	Seram Bagian Timur	15.337,59	96.332,20	20.032,89	20.033	21.561,14
8	Maluku Barat Daya	94.907,20	12.091,90	1.118,28	1.191	2.457,65
9	Buru Selatan	33.288,85	32.617,70	5.155,63	12.832	12.956,08
10	Kota Ambon	2.564,74	31.903,90	23.068,82	25.405	27.796,21
11	Kota Tual	30.638,72	19.857,60	30.088,17	31.966	34.237,75
Maluku		523.261,60	542.443,00	462.115,50	518.615,00	513.048,53

Sumber : Maluku Dalam Angka, 2021-2025



b) Perkebunan

- **Pala**

Komoditas pala memiliki peran penting dalam perekonomian Maluku, terutama sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dan sebagai komoditas ekspor andalan. Sebagai tanaman rempah yang tumbuh subur di wilayah Maluku khususnya pada pulau-pulau yang berada di bagian utara kepulauan Maluku, pala berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, pala juga mencerminkan warisan budaya yang kaya, mengingat Maluku telah lama dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sejak masa kolonial. Pengolahan dan hilirisasi produk pala, seperti minyak atsiri dan olahan makanan, membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ini sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Maluku.

Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur merupakan daerah-daerah yang memiliki luasan maupun produksi pala terbanyak di Maluku. Lebih dari setengah luasan tanaman pala terdapat di dua kabupaten ini, dimana Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas tanaman pala sebesar 12.599,84 (34,01%) hektar dan Kabupaten Seram Bagian Timur seluas 10.091,56 hektar (27,32%), dari total luasan tanaman pala di Maluku (36.934,32 hektar).

Tabel 2.5

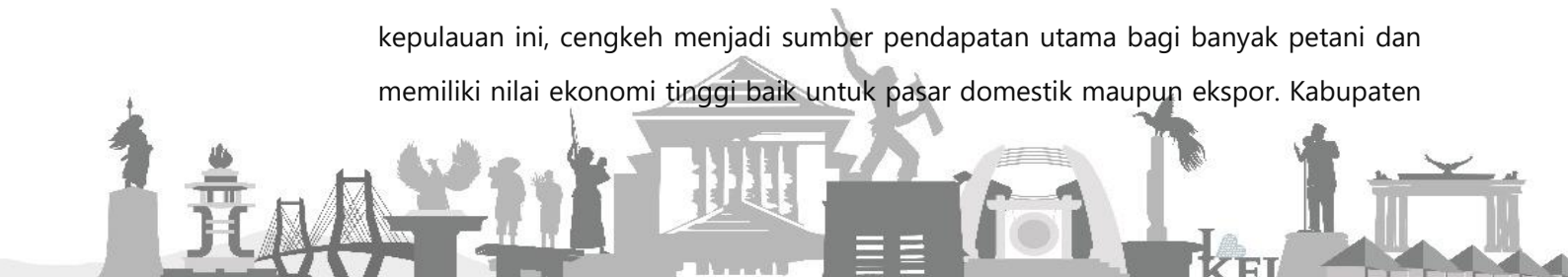
Luas Area dan Produksi Pala Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kabupaten / Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kep.Tanimbar	13,00	1,65	13,00	1,82	13,00	1,82	13,00	1,82	13,00	2,40
2	Maluku Tenggara	2.969,60	419,03	2.969,60	419,35	2.969,60	416,65	3.460,20	419,18	2.986,64	425,65
3	Maluku Tengah	11.941,50	2.463,00	11.941,50	2.515,78	12.276,50	2.531,17	12.461,50	2.491,17	12.559,48	2.295,45
4	B u r u	1.335,34	100,75	1.360,34	126,51	1.410,34	128,39	1.552,54	138,39	1.854,68	204,60
5	Kepulauan Aru	23,00	3,80	23,00	3,95	24,40	4,20	23,00	4,70	23,20	3,74
6	Seram Bagian Barat	2.869,50	253,00	3.294,50	311,18	3.404,50	322,88	3.350,22	353,81	3.350,22	426,82
7	Seram Bagian Timur	9.863,39	1.298,55	9.863,39	1.305,50	9.943,39	1.363,85	9.997,00	1.585,00	10.091,56	1.352,67
8	Maluku Barat Daya	1.515,96	166,70	1.515,96	226,90	1.515,96	231,18	1.536,95	241,53	1.547,91	245,70
9	Buru Selatan	2.954,30	507,35	2.954,30	515,85	3.014,30	537,00	3.079,30	509,20	3.117,48	509,20
10	Ambon	1.763,00	331,00	1.763,00	331,60	1.763,00	342,32	1.245,06	263,28	1.272,39	275,50
11	Tual	97,47	19,40	97,47	19,95	97,47	22,00	108,23	60,73	117,50	26,18
Total		35.346,06	5.564,23	35.796,06	5.778,39	36.432,46	5.901,46	36.827,00	6.068,81	36.934,42	5.767,91

Sumber : Maluku Dalam Angka, 2020-2024

- **Cengkeh**

Komoditas cengkeh merupakan salah satu kekayaan alam Maluku yang berperan penting dalam mendukung ekonomi dan budaya lokal. Sebagai tanaman khas kepulauan ini, cengkeh menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak petani dan memiliki nilai ekonomi tinggi baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kabupaten



Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Buru Selatan merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi komoditas cengkeh terbesar.

Selain digunakan dalam industri rokok kretek yang menjadi andalan Indonesia, cengkeh juga dimanfaatkan dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik. Produk turunannya, seperti minyak cengkeh, memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Cengkeh juga menjadi bagian dari warisan sejarah Maluku sebagai salah satu rempah yang menarik perhatian dunia pada masa kolonial, menjadikannya bagian penting dari identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Meski potensinya besar, pengembangan komoditas ini masih menghadapi tantangan dalam produktivitas, manajemen kualitas, dan penguatan akses pasar.

Tabel 2.6
Luas Area dan Produksi Komoditas Cengkeh Per Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

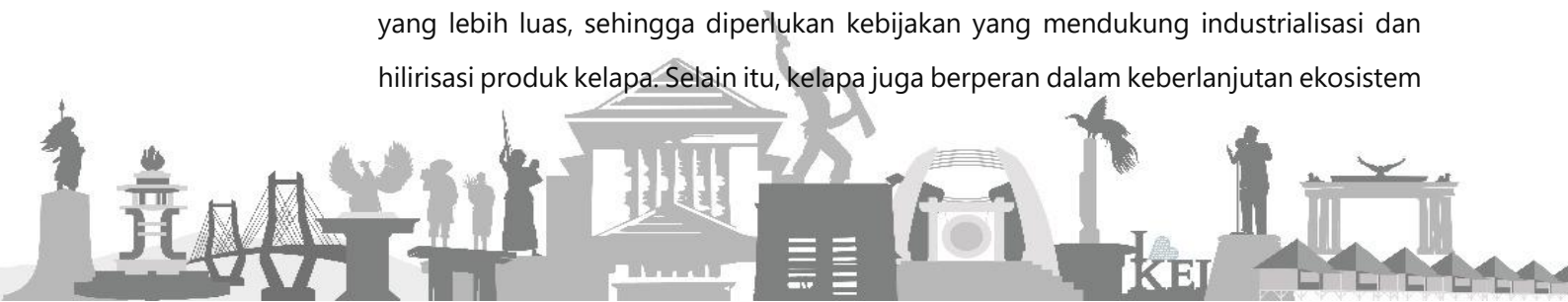
No	Kabupaten / Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kepulauan Tanimbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Maluku Tenggara	20,45	6,98	20,45	7,40	20,45	7,65	22,32	4,65	19,99	7,10
3	Maluku Tengah	18.746,47	9.603,70	18.757,97	9.858,15	18.757,97	9.905,23	18.752,97	9.379,29	18.675,99	10.253,50
4	Buru	1.226,41	435,00	1.278,41	460,45	1.313,41	450,05	1.391,91	499,05	1.395,00	506,87
5	Kepulauan Aru	0,34	-	0,34	0,02	0,33	0,03	0,33	0,05	0,21	0,02
6	Seram Bagian Barat	7.125,55	3.000,00	7.375,55	3.233,00	7.520,55	3.255,85	7513,45	3.202,37	7504,99	3.358,96
7	Seram Bagian Timur	10.072,50	4.963,00	10.072,50	4.995,20	10.072,50	5.046,20	9.927,00	2.461,00	9.976,92	5.003,81
8	Maluku Barat Daya	218,38	56,07	218,38	84,35	218,38	86,40	218,38	78,96	522,59	174,81
9	Buru Selatan	5.607,70	2.278,70	5.607,70	2.246,60	5.607,70	2.299,20	5.653,70	2.277,16	5.679,11	2.272,44
10	Ambon	1.501,00	340,25	1.501,00	349,75	1.501,00	373,40	1.044,93	233,40	1.055,75	214,43
11	Tual	36,09	10,84	36,09	11,90	36,09	12,75	39,38	60,73	41,64	17,40
Total		44.554,89	20.694,54	44.868,39	21.246,82	45.048,38	21.436,76	44.564,37	18.196,66	44.872,19	21.809,34

Sumber : Maluku Dalam Angka, 2021- 2025

- **Kelapa**

Seperti halnya dengan komoditas pala dan cengkeh, komoditas kelapa juga memiliki peran penting dalam perekonomian Maluku, terutama sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat di banyak pulau di wilayah ini. Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah-daerah penghasil utama kelapa.

Komoditas Kelapa mendukung berbagai industri turunan, seperti minyak kelapa, kopra, sabut, dan arang, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan petani lokal. Namun, pengembangan komoditas kelapa di Maluku masih menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, kualitas hasil, dan akses pasar yang lebih luas, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung industrialisasi dan hilirisasi produk kelapa. Selain itu, kelapa juga berperan dalam keberlanjutan ekosistem



pesisir, karena pohon kelapa membantu mencegah erosi dan melindungi pantai dari abrasi.

Tabel 2.7
Luas Area dan Produksi Komoditas Kelapa Per Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten / Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kepulauan Tanimbar	17.245,47	19.139,90	17.313,17	19.455,00	17.316,77	19.399,80	17.059,17	19.896,80	17.316,12	20.112,83
2	Maluku Tenggara	22.970,18	20.917,70	23.010,18	21.303,50	23.010,18	21.364,00	23.211,60	21.415,18	23.209,13	21.813,25
3	Maluku Tengah	20.905,83	19.385,60	20.905,83	20.002,20	20.905,83	20.198,05	20.897,45	20.200,83	20.922,78	20.231,58
4	Buru	4.929,85	3.732,40	4.929,85	3.828,20	4.929,85	3.852,80	5.039,85	4.561,80	5.038,97	4.533,72
5	Kepulauan Aru	3.066,98	1.711,00	3.066,98	1.773,24	3.066,98	1.802,15	3.069,68	1.802,15	3.139,09	1.818,72
6	Seram Bagian Barat	8.261,10	7.829,00	8.261,10	8.346,00	8.261,10	8.416,10	8.270,10	8.465,35	8.270,42	8.349,57
7	Seram Bagian Timur	18.468,39	16.728,70	18.470,39	16.773,00	18.470,39	16.979,30	18.027,10	16.979,30	18.523,50	16.788,00
8	Maluku Barat Daya	6.301,20	5.463,55	6.401,20	5.703,50	6.404,20	5.777,40	7.196,81	5.703,50	6.528,69	5.820,77
9	Buru Selatan	9.424,00	7.792,00	9.424,00	7.892,00	9.424,00	8.066,40	9.524,00	8.090,52	9.524,64	8.103,52
10	Ambon	2.311,70	1.560,00	2.311,70	1.586,00	2.311,70	1.615,10	3.655,81	1.615,10	1.411,34	271,21
11	Tual	938,12	307,80	949,74	320,00	747,73	306,79	716,27	289,48	719,55	225,64
Total		114.822,82	104.567,65	115.044,14	106.982,64	114.848,73	107.777,89	116.667,84	109.020,01	114.604,23	108.068,81

Sumber : Maluku Dalam Angka, 2020-2025

c) Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial Maluku, dengan keindahan alamnya yang meliputi pantai berpasir putih, terumbu karang, dan ekosistem laut yang kaya, serta warisan budaya yang unik. Pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, perhotelan, dan kuliner. Maluku memiliki 1.043 potensi wisata untuk wisata bahari, alam, sejarah/budaya dan buatan yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Selain itu, pariwisata berperan dalam mempromosikan identitas Maluku di kancah global dan mendukung pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Maluku Tengah, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru merupakan daerah-daerah dengan potensi wisata terbanyak. Namun, potensi pariwisata Maluku masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik, dengan peningkatan infrastruktur, promosi, dan keberlanjutan sebagai prioritas utama untuk mencapai dampak jangka panjang yang maksimal.



Tabel 2.8
Sebaran Potensi Pariwisata di Maluku

No	Lokasi	Potensi Wisata				Jumlah
		Bahari	Alam	Sejarah/Budaya	Buatan	
1	Kepulauan Tanimbar	27	44	16	6	93
2	Maluku Tenggara	12	47	17	1	76
3	Maluku Tengah	103	103	82	13	271
4	Buru	12	49	26	2	89
5	Kepulauan Aru	25	38	37	3	103
6	Seram Bagian Barat	12	32	7	5	56
7	Seram Bagian Timur	28	15	-	1	44
8	Maluku Barat Daya	53	39	49	3	144
9	Buru Selatan	8	21	8	-	37
10	Kota Ambon	24	38	26	5	93
11.	Kota Tual	6	19	10	1	36
Jumlah		445	280	278	40	1.043

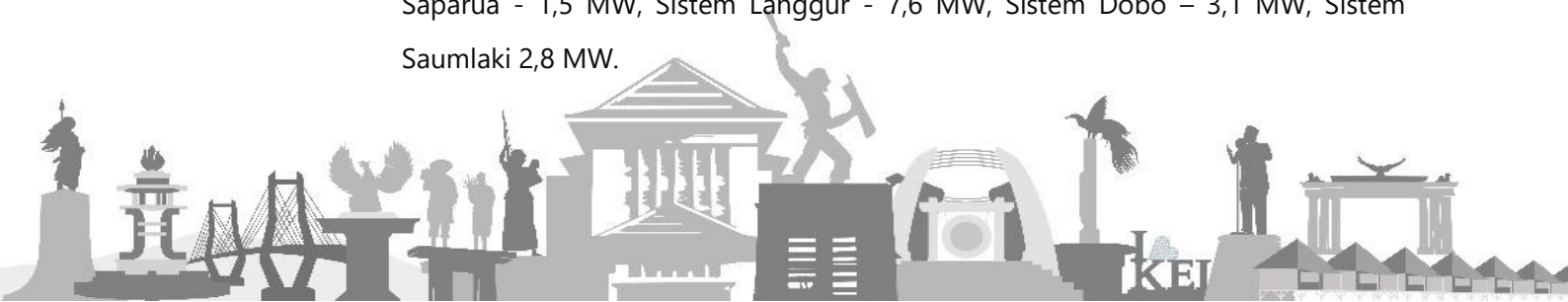
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi, 2024

d) Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Maluku memiliki potensi cukup besar di sektor energi dan sumber daya mineral, dan sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan energi. Dengan potensi sumber daya seperti minyak dan gas bumi, Maluku berkontribusi sebagai salah satu wilayah penghasil energi strategis di Indonesia, terutama melalui Blok Masela yang menjadi proyek gas terbesar di kawasan. Selain itu, sumber daya mineral seperti nikel dan emas juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk mendukung pendapatan daerah dan mendorong investasi. Energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, menjadi peluang besar untuk memperluas akses energi di pulau-pulau terpencil dan mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Namun, optimalisasi sektor ini memerlukan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata dan jangka panjang.

1. Ketenagalistrikan

- Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Maluku terdiri dari 8 sistem kelistrikan dengan beban di atas 2 MW adalah Sistem Ambon- 53 MW, Sistem Masohi-Waipia-Liang - 6,4 MW, Sistem Kairatu-Piru - 2,2 MW, Sistem Namlea-Mako - 7,5 MW, Sistem Saparua - 1,5 MW, Sistem Langgur - 7,6 MW, Sistem Dobo - 3,1 MW, Sistem Saumlaki 2,8 MW.



- Rasio elektrifikasi Provinsi Maluku pada akhir bulan September 2024 mencapai total 98,37% dimana besaran rasio elektrifikasi jaringan PLN mencapai 96,77%, jaringan non PLN mencapai 0,56% dan rasio dari sumber energi baru terbarukan PLTS/LTSHE mencapai 1,05%. Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Maluku tersebut masih dibawah capaian rata-rata nasional yang mencapai 99,78%. Dari total 1.235 desa yang tersebar di 11 kabupaten/kota, 1.098 desa tersambung jaringan PLN, 89 desa berlistrik Non-PLN dan sisanya 48 desa menggunakan LTSHE.

2. Energi Baru Terbarukan

Provinsi Maluku memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, panas bumi, biomassa dan gelombang laut. Berdasarkan inventarisasi, potensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Energi Air : Potensi energi air terinventarisasi di Pulau Seram sebesar 217,4 MW, Pulau Buru sebesar 15 MW. Potensi ini perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan data lengkap dan detail, sehingga dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
- Energi Surya : Berdasarkan letak geografis dan strategis, hampir seluruh daerah di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan PLTS dengan daya mencapai 4 kWh/m². Kawasan timur Indonesia berpotensi penyinaran sekitar 5,1 kWh/m²/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan baik dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik energi surya.
- Energi Bayu : Berdasarkan analisis potensi angin dan pemetaan energi angin yang telah dilakukan oleh kementerian ESDM di wilayah kawasan timur Indonesia termasuk wilayah Maluku terinventarisir diantaranya di Ambon (15 MW), Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) Di lokasi Ambon sedang dilakukan pengembangan oleh pengembang listrik swasta dengan daya 17 MW.
- Energi Panas Bumi : Potensi energi panas bumi di Maluku telah teridentifikasi yaitu di daerah Waisekat (14 MWe), Wapsalit –Waeapo (30 MWe), Batabual (25 MWe), Larike (25 MWe), Tawiri (25 MWe), Tulehu (100 MWe), Oma – Haruku (30 MWe), Saparua (25 MWe), Nusalaut (25 MWe), Tehoru (35 MWe), Banda Naira (33MWe), Pohon Batu (50 MWe), Kelapa Dua (25 MWe), Warmong (30 MWe) dan Esulit (25MWe). Lokasi yang telah memiliki izin adalah Tulehu (2 x 10 MW) yang sekarang telah memasuki tahap pengembangan.



- Energi Arus Laut : Potensi energi arus laut teridentifikasi di tiga lokasi di Kabupaten Kepulauan Aru dan satu lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 2.9
Sebaran Potensi Arus Laut

No	Lokasi Potensi	Kecamatan	Kabupaten
1	Selat Manumbai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
2	Selat Barakai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
3	Selat Sir - Sir	Aru Tengah	Kepulauan Aru
4	Haya Pulau	Waesela	Seram Bagian Barat

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku

3. Minyak dan Gas

Upaya pengembangan potensi sumber daya minyak dan gas (migas) di Provinsi Maluku terus dilaksanakan. Provinsi Maluku memiliki 16 cekungan dengan potensi migas yang besar, dimana ada yang sudah beroperasi, eksplorasi maupun tahapan pengembangan. Saat ini terdapat tiga wilayah kerja migas di Maluku yakni wilayah kerja Bula, Non Bula dan Masela. Pengembangan ini tentu menjadi salah satu penyumbang terhadap perekonomian di Maluku mengingat pemerintah daerah memiliki kesempatan mengelola Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari blok migas di wilayah Maluku.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 973 Tahun 2024 telah menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, diketahui bahwa Kepulauan Maluku dapat mendukung jumlah penduduk paling banyak 19 juta jiwa dengan 10 komoditas yang dapat dipenuhi. Secara rinci status daya dukung daya tampung lingkungan hidup kepulauan maluku dan komoditas yang dapat dipenuhi dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.10
Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
Kepulauan Maluku

Provinsi Maluku	Ambang Batas
Jumlah penduduk Tahun 2022	1.895.070
Jumlah penduduk yang dapat didukung	9.731.145
Kebutuhan lahan untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan (hektar)	329.742
Ketersediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan (hektar)	3.581.656
Ketersediaan lahan untuk hutan lindung, konservasi, badan air, dan cadangan lahan (hektar)	1.034.402
Status	Belum Terlampaui

Sumber: Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional Dan Pulau/Kepulauan

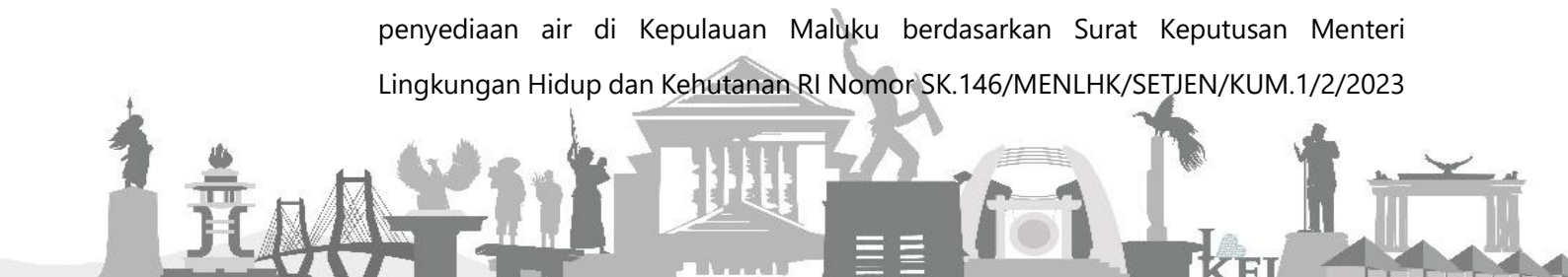
Selain daya dukung daya tampung nasional dan kepulauan, data dan informasi hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung juga dilakukan untuk mengetahui kondisi daya dukung daya tampung air, pangan, lahan pertanian secara kewilayahan di Provinsi Maluku. Pembahasan selanjutnya adalah hasil analisis dalam lingkup Provinsi Maluku secara lengkap.

a) Daya Dukung Daya Tampung Air

Perhitungan Daya Dukung Daya Tampung Air dilakukan dengan dua hasil analisis yang berbeda metode, yang pertama adalah perhitungan dan analisis yang dilakukan oleh P3E Sulawesi dan Maluku, serta yang kedua adalah perhitungan Daya Dukung Air menggunakan Permen LH No 17 Tahun 2009 dengan metode koefisien limpasan.

- Berdasarkan Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air Kepulauan Maluku**

Perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di Kepulauan Maluku. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi potensi air di Kepulauan Maluku. Adapun perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air di Kepulauan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023



Tentang Penetapan Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional disajikan pada tabel dan peta status daya dukung daya tampung air Provinsi Maluku sebagai berikut:

Tabel 2.11
Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air Provinsi Maluku dan Kecenderungan Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Periode 1996 - 2020

Parameter	Satuan	Nilai
Luas Wilayah	Ha	4.652.488,64
Populasi	Jiwa	1.745.907
Ketersediaan Air	m ³ /tahun	31.811.954.033,52
Total Pemanfaatan Air	m ³ /tahun	4.167.859.945,97
Indikasi Status DDDT Air	Status	Belum Terlampaui
Kecenderungan Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) Pengatur Air	Luas (Hektar)	Luas (Persentase)
IJLH Meningkat	504.795,06	6,47%
IJLH Menurun	1.219.687,11	15,63%
IJLH Tetap	5.995.181,82	76,85%
IJLH Tidak Ada Data	81.982,38	1,05%
Total	7.801.646,37	100%

Sumber : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung Daya

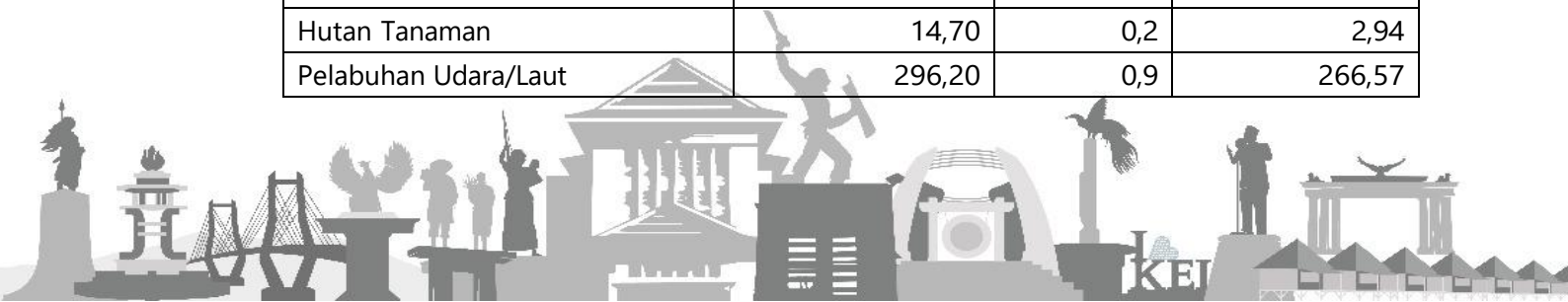
Tampung Air Nasional

Ketersediaan air secara alamiah di Provinsi Maluku sebesar 31.811.954.033,52 m³/tahun, jumlah populasi penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2022 sebesar 1.881.727 jiwa. Dengan asumsi tersebut, maka status DDDT Air Provinsi Maluku masuk ke kategori belum terlampaui.

- Berdasarkan Permen LH No 17 Tahun 2009 Menggunakan Metode Koefisien Limpasan

Tabel 2.12
Perhitungan Daya Dukung Air Menggunakan Metode Koefisien Limpasan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien C	Luas x C
Belukar Rawa	15468,30	0	0
Hutan Lahan Kering Primer	241745,27	0,2	48349,053
Hutan Lahan Kering Sekunder	1600786,84	0,3	480236,052
Hutan Mangrove Primer	80493,77	0	0
Hutan Mangrove Sekunder	117640,49	0	0
Hutan Rawa Primer	722,43	0	0
Hutan Rawa Sekunder	16357,89	0	0
Hutan Tanaman	14,70	0,2	2,94
Pelabuhan Udara/Laut	296,20	0,9	266,57



Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien C	Luas x C
Perkebunan	10918,22	0,4	4367,28
Permukiman	11636,76	0,65	7563,89
Pertambangan	161,41	0,7	112,98
Pertanian Lahan Kering	66937,20	0,42	28113,62
Pertanian Lahan Kering + Semak	317608,61	0,4	127043,44
Rawa	226,08	0	0
Savana/Padang Rumput	160936,25	0,35	56327,68
Sawah	6648,94	0,3	1994,68
Semak/Belukar	363982,85	0,35	127393,99
Tambak	768,12	0	0
Tanah Terbuka	486,99	0,45	219,14
Transmigrasi	5252,69	0,65	3414,24
Tubuh Air	8223,24	0	0
Jumlah	3027313,24		885405,62
Koefisien Run off			0,29
Koefisien Run off Tertimbang			0,71
Ketersediaan Air			38.554.337.087,02
Kebutuhan Air			295.8276.800,00
Daya Dukung Air			13,03

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode yang tertuang di dalam PermenLH No 17 Tahun 2009, diketahui bahwa Provinsi Maluku memiliki Status Daya Dukung Air yang surplus, yaitu dengan nilai 13,03. Ketersediaan air di Provinsi Maluku apabila dihitung dengan menggunakan metode ini adalah 38.554.337.087,02 m³. Berdasarkan standar kebutuhan hidup layak sumber daya air penduduk 1.600m³, kebutuhan air Provinsi Maluku adalah 295.8276.800m³. Metode perhitungan daya dukung air dengan menggunakan koefisien limpasan memiliki keunggulan dalam melihat gambaran umum ketersediaan air atau kebutuhan air secara cepat dan ringkas, akan tetapi memiliki kelemahan karena dalam analisisnya hanya berdasarkan data curah hujan dan penggunaan lahan. Sementara itu faktor-faktor lain dalam siklus hidrologi seperti penguapan, infiltrasi, dan geologi tidak menjadi parameter tambahan dalam proses perhitungannya. Sehingga dalam penggunaannya terbatas untuk melihat gambaran kondisi umum secara cepat (*quick assessment*).



b) Daya Dukung Daya Tampung Lahan Pertanian

Perhitungan ketersediaan lahan dilakukan berdasarkan Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Tabel 2.13
Produktivitas Komoditas Provinsi Maluku

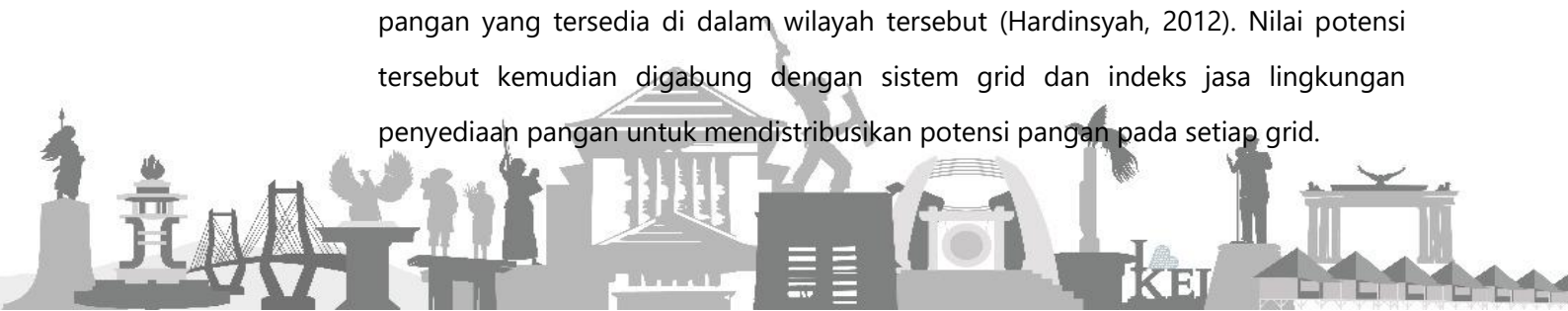
Produktivitas Sektor	Nilai (Rp)
Produktivitas Tanaman Pangan	1.829.273.000.000
Produksi Perikanan Budidaya Laut	374.895.029.000
Perikanan Tangkap Laut	6.007.969.682.000
Perikanan Budidaya Tawar	109.426.772.000
Peternakan	498.584.429.000
Buah-Buahan	1.532.596.600.000
Biofarmaka	24.562.015.000
Perkebunan	223.823.820.000
Produksi Kayu	205.341.943.000
Jumlah	10.806.473.290.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Maluku Dalam Angka

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan data di atas, disimpulkan bahwa daya dukung lahan pertanian Provinsi Maluku masuk kategori defisit. Kategori defisit ini disebabkan oleh kurang maksimalnya nilai produktivitas di berbagai komoditas. Salah satu komoditas yang dapat meningkatkan nilai ketersediaan adalah dengan memaksimalkan hasil pertanian secara lebih efisien. Peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian dengan metode yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

c) Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Pangan

Perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan pangan dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di Kepulauan Maluku. Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pangan dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan dan kelautan dalam satuan berat (kg atau ton). Nilai potensi pangan dalam satuan berat ini kemudian dikonversi ke satuan energi (kkal) berdasarkan jenis pangan yang tersedia di dalam wilayah tersebut (Hardinsyah, 2012). Nilai potensi tersebut kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan pangan untuk mendistribusikan potensi pangan pada setiap grid.



Adapun hasil perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan pangan di Kepulauan Maluku disajikan pada tabel berikut :

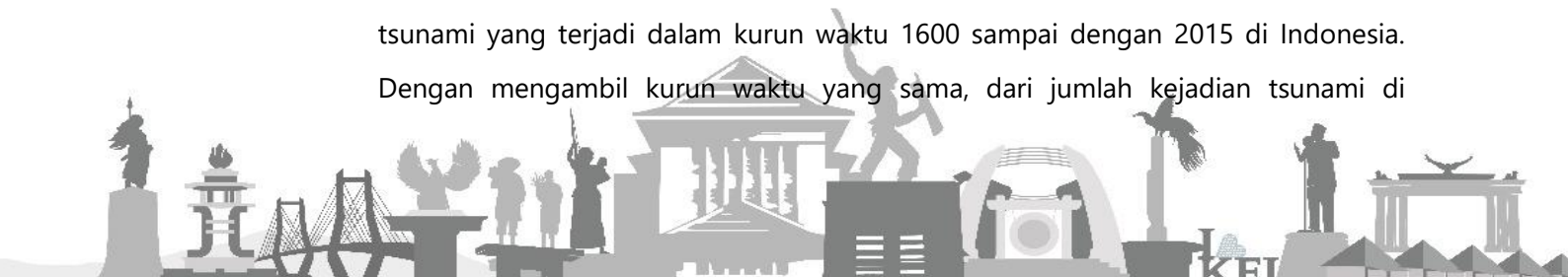
Tabel 2.14
Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Pangan di Kepulauan Maluku

Parameter	Satuan	Nilai
Luas Wilayah	Ha	4.504.965,70
Jumlah Populasi	Jiwa	1.745.907
Ketersediaan	Kkal	3.459.090.592.727,30
Kebutuhan	Kkal	1.370.100.518.250,00
Selisih	Kkal	2.088.990.074.477,12
Ambang	Jiwa	4.409.688
Status Ambang	Jiwa	2.663.781
Luas Wilayah Yang Mendukung	Ha	3.830.537,71
Persentase Wilayah Yang Mendukung	%	85,03%
Luas Wilayah Yang Tidak Mendukung	Ha	674.427,99
Persentase Wilayah Yang Tidak Mendukung	%	14,97%

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif Ekoregion Kepulauan Maluku 2018

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa terdapat 85,03% dari luas wilayah Provinsi Maluku yang masih mampu mendukung penyediaan pangan bagi penduduknya, atau 3.830.537,71 Ha. Sedangkan luas wilayah yang sudah melampaui sebesar 14,97% dari luas Provinsi Maluku atau sebesar 674.427,99 Ha. Ketersediaan bahan pangan secara alamiah sebesar 3.459.090.592.727,30 Kkal, mampu mendukung jumlah populasi maksimal sebesar 4.409.688 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2023 sebesar 1.881.727 jiwa, daya dukung daya tampung pangan bagi penduduk di Provinsi Maluku masuk kategori Belum Terlampaui.

Bencana merupakan ancaman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah dengan risiko bencana tinggi. Ditinjau dari sejarah bencana beraspek geologi, kejadian gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api sudah berulang terjadi di bumi Raja-Raja ini. Berdasarkan catatan sejarah, kurang lebih terdapat 210 kejadian tsunami yang terjadi dalam kurun waktu 1600 sampai dengan 2015 di Indonesia. Dengan mengambil kurun waktu yang sama, dari jumlah kejadian tsunami di



Indonesia tersebut, terdapat 85 kejadian tsunami yang berasal dari wilayah Maluku. Atau secara statistik dapat disampaikan bahwa kurang lebih 40% tsunami di Indonesia bersumber dari Maluku (UNESCO, 2016).

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a) Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan strategis menjadi faktor vital dalam memastikan keamanan pangan suatu negara atau wilayah. Di Provinsi Maluku, seperti halnya di berbagai daerah yang berkembang, berbagai komoditas pangan strategis menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas dan kecukupan pangan bagi penduduknya. Keberhasilan menjaga ketersediaan pangan strategis melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan pertanian yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan, manajemen distribusi yang efisien, hingga penguatan kedaulatan pangan dengan memanfaatkan potensi lokal. Pendekatan holistik ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga keamanan pangan nasional dapat terjaga dengan baik.

Data ini menunjukkan fluktuasi dalam ketersediaan pangan strategis dari tahun ke tahun untuk setiap komoditas. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produksi dalam negeri, impor, kebijakan pangan, dan kondisi pasar global. Analisis terhadap data ini penting untuk memahami dinamika pasokan pangan di Provinsi Maluku, yang merupakan hal krusial untuk keamanan pangan dan kebijakan pertanian nasional.

Tabel 2.15
Ketersediaan Pangan Strategis di Provinsi Maluku

NO	KOMODITAS	Ketersediaan Pangan Strategis			
		2021	2022	2023	2024
1	Beras	2.307.112,44	469.040,01	1.493.629,35	38.555,03
2	Jagung	10.055,40	17.856,79	5.776,58	231,15
3	Bawang Merah	9.984,96	32.969,39	8.851,27	643,87
4	Bawang Putih	11.653,08	24.896,04	15.385,35	700,16
5	Cabai Besar	7.898,16	8.012,25	3.989,74	202,97
6	Cabai Rawit	6.533,76	8.509,92	4.460,80	232,51
7	Daging Sapi	1.222,56	31.550,73	19.658,07	75,23
8	Daging Ayam	20.597,64	68.322,40	395.686,73	3.002,69
9	Telur Ayam	15.042,72	1.761.908,19	247.279,93	1.123,63



10	Gula Pasir	1.217.380,20	118.985,05	2.258.724,34	3.582,65
11	Minyak Goreng	5.062.905,48	883.070,83	25.231.366,83	1.123,63

b) Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan strategis merupakan indikator penting dalam memahami pola makan suatu populasi dan kecukupan pasokan pangan yang dibutuhkan. Pola konsumsi pangan strategis ini tidak hanya mencerminkan kebiasaan makan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan dalam konsumsi dapat tercermin dari perubahan harga, kebijakan pangan, serta perubahan pola hidup masyarakat secara keseluruhan. Analisis terhadap data konsumsi pangan strategis penting untuk menginformasikan kebijakan pertanian, keamanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ketersediaan pangan strategis di Provinsi Maluku, penting untuk mempertimbangkan tantangan infrastruktur dan geografis yang mempengaruhi distribusi dan aksesibilitas pangan. Kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan strategis diperlukan untuk meningkatkan produksi lokal, memperbaiki infrastruktur transportasi, serta meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat Maluku.

Dalam lima tahun terakhir, konsumsi pangan strategis di Indonesia menunjukkan variasi. Komoditi beras tetap menjadi komoditas utama dengan konsumsi rata-rata per kapita sekitar 84-86 kg per tahun, meskipun mengalami sedikit fluktuasi antara tahun 2021 dan 2024. Komoditi jagung konsumsinya lebih rendah dibandingkan beras, menunjukkan tren stabil dengan konsumsi sekitar 1.5-2.8 kg per kapita per tahun. Bawang merah, bawang putih, dan cabai besar serta rawit memiliki pola konsumsi yang serupa, dengan angka konsumsi sekitar 45-46 kg per kapita per tahun dalam empat tahun terakhir.



Tabel 2.16
Konsumsi Pangan Strategis di Provinsi Maluku

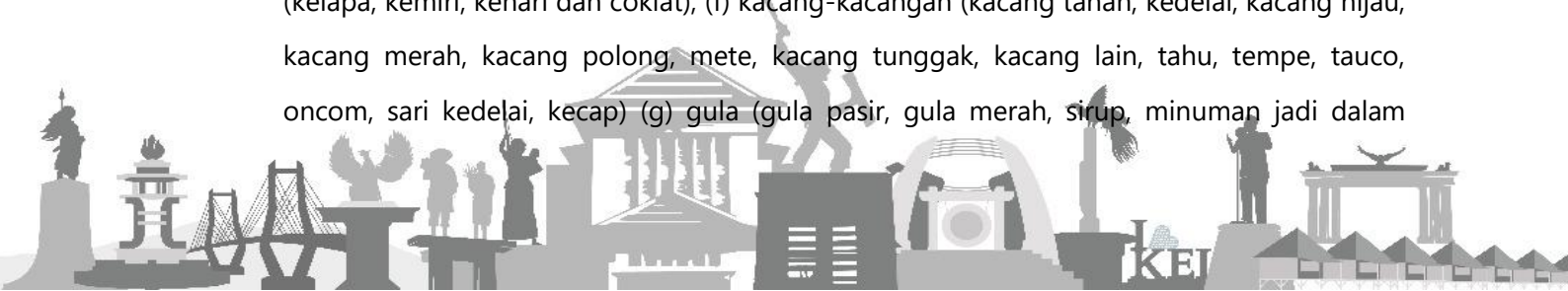
Indikator	Konsumsi Pangan Strategis (Kg/kap/tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beras	83.3	82.0	86.3	84.7	84.4
Jagung	2.8	1.9	1.5	1.9	2.1
Bawang Merah	40.5	40.7	46.1	45.9	2.2
Bawang Putih	40.5	40.7	46.1	45.9	1.98
Cabe Besar	40.5	40.7	46.1	45.9	1.21
Cabe Rawit	40.5	40.7	46.1	45.9	1.39
Daging Sapi	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
Daging Ayam	2.5	2.2	2.7	2.4	3.2
Telur	3.0	3.2	3.3	2.9	3
Minyak Goreng	6.0	6.1	7.0	6.7	7
Gula Pasir	8.0	7.9	7.5	7.8	7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Sementara itu, daging sapi dan ayam menunjukkan angka konsumsi yang relatif rendah tetapi stabil, dengan daging sapi sekitar 1.2-1.3 kg per kapita per tahun dan daging ayam sekitar 2.2-3.2 kg per kapita per tahun. Telur, yang juga merupakan sumber protein penting, menunjukkan variasi antara 2.9 hingga 3.3 kg per kapita per tahun. Minyak goreng dan gula pasir menunjukkan kecenderungan stabil dalam konsumsi, dengan minyak goreng berkisar antara 6.0 hingga 7.0 kg per kapita per tahun dan gula pasir sekitar 7.5 hingga 8.0 kg per kapita per tahun.

c) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH adalah pencerminan kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah yang berdasarkan keragaman dan keseimbangan kelompok pangan. Jumlah energi kelompok pangan adalah jumlah energi sembilan kelompok pangan yaitu kelompok (a) padi-padian (beras, jagung, gandum dan olahannya) (b) umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan olahannya) (c) pangan hewani (daging, ikan dan olahannya), (d) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak sawit, margarin, dan lemak hewani), (e) buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, kenari dan coklat), (f) kacang-kacangan (kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, mete, kacang tunggak, kacang lain, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, kecap) (g) gula (gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam



botol/kaleng. (h) sayuran dan buah-buahan (sayur segar, buah segar dan olahannya termasuk emping), (i) lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman).

Tabel 2.17
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	67,30	70,00	70,07	75,90	76,90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Skor pola pangan harapan (PPH) selama lima tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 skor PPH mencapai 67,30. Angka ini menunjukkan bahwa pola makan yang diharapkan oleh masyarakat pada tahun tersebut turun signifikan jika dibandingkan capaian tahun 2019, Skor PPH yang menurun ini disebabkan kondisi global pandemi COVID-19 yang mempengaruhi akses terhadap pangan dan pola konsumsi masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan kondisi capaian PPH pada tahun 2021 dan 2022 relatif sama. Pada tahun 2023: menunjukan adanya peningkatan, dengan Skor PPH mencapai 75,90 dan 2024 terjadi peningkatan menjadi 76,90. Peningkatan ini bisa mengindikasikan adanya kondisi pemulihan dan meningkatkan kembali pola makan yang diharapkan oleh masyarakat.

Data Skor PPH ini tidak hanya mencerminkan kualitas pola makan secara keseluruhan, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan program-program kesehatan masyarakat, kebijakan pangan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan pangan.

d) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (KKP) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan persentase penduduk suatu wilayah yang asupan energinya (kalori) lebih rendah dari kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk menjalani aktivitas normal sehari-hari. Semakin rendah prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, semakin baik kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 2.18
Prevalensi Ketidacukupan Pangan Provinsi Maluku 2020 – 2024

Indikator	T a h u n				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidacukupan Pangan Provinsi Maluku	35,55	29,62	31,68	30,27	31,66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Terjadi penurunan signifikan dari tahun 2020 (35,55%) ke 2021 (29,62%), menunjukkan adanya perbaikan akses atau ketersediaan pangan pada periode tersebut. Namun, setelah 2021, prevalensi kembali fluktuatif dengan kecenderungan meningkat: naik ke 31,68% (2022), sedikit turun ke 30,27% (2023), lalu kembali naik ke 31,66% (2024). Secara umum, periode 2020–2024 menunjukkan tren membaik dibandingkan kondisi awal 2020, tetapi capaian masih relatif tinggi, yaitu sekitar 3 dari 10 penduduk Maluku mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan masyarakat belum stabil, sehingga perlu penguatan intervensi pada ketersediaan, distribusi, keterjangkauan harga pangan, serta edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang.

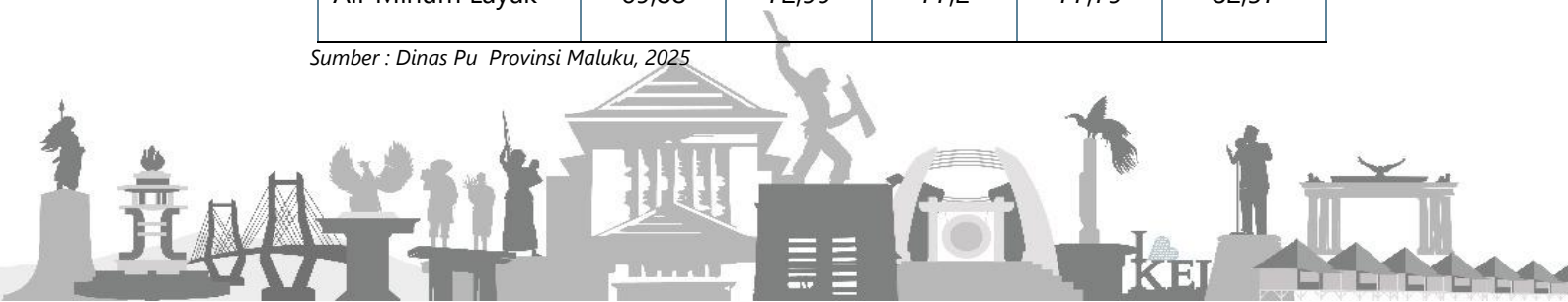
e) Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat serta pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan infrastruktur dasar. Air minum layak didefinisikan sebagai air yang bersumber dari fasilitas yang terlindungi dan memenuhi standar kualitas Kesehatan. Tingkat akses rumah tangga terhadap air minum layak mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjamin ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat. Semakin tinggi persentase akses rumah tangga pada air minum layak, semakin baik pula kondisi kesehatan masyarakat karena dapat menekan risiko penyakit berbasis air, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tabel 2.19
Air Minum Layak Provinsi Maluku 2020 – 2024

Indikator	T a h u n				
	2020	2021	2022	2023	2024
Air Minum Layak	69,88	72,99	77,2	77,79	82,57

Sumber : Dinas Pu Provinsi Maluku, 2025



Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bahwa akses rumah tangga terhadap air minum layak semakin membaik, yang akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta produktivitas ekonomi. Namun demikian, masih terdapat sekitar 17% rumah tangga yang belum terlayani air minum layak, sehingga upaya pemerataan, khususnya di wilayah pedesaan, terpencil, dan sulit air, tetap menjadi prioritas pembangunan ke depan.

f) Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik Per Kapita merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemakaian energi listrik rata-rata oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan dasar rumah tangga terhadap energi, tetapi juga menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah. peningkatan konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu prioritas pembangunan energi. Upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui perluasan jaringan listrik ke daerah yang belum terjangkau, penguatan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan, diversifikasi sumber energi terutama energi baru terbarukan, serta peningkatan efisiensi penggunaan listrik agar pertumbuhan konsumsi tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Tabel 2.20
Penggunaan Listrik Provinsi Maluku 2020 – 2024 (KWH/kapita per tahun)

Tahun	Jumlah Listrik Terjual (KWH)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total (KWH/kapita per tahun)
2020	669.532.519	1.848.923	362,12
2021	702.083.385	1.826.626	384,36
2022	628.858.190	1.881.727	334,19
2023	633.560.000	1.911.943	331,37
2024	816.753.093	1.945.648	419,785

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2025

Konsumsi listrik per kapita di Provinsi Maluku menunjukkan tren yang berfluktuasi sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 362,12 KWh, kemudian meningkat menjadi 384,36 KWh pada 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan berturut-turut menjadi 334,19 KWh dan 331,37 KWh, yang mengindikasikan adanya pelemahan konsumsi energi listrik di tengah masyarakat. Meski demikian, pada tahun 2024 konsumsi listrik per kapita kembali melonjak signifikan menjadi 419,79 KWh, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya jumlah pelanggan listrik, serta membaiknya pasokan energi listrik di Maluku. Secara umum,



meskipun sempat mengalami penurunan pada 2022–2023, tren konsumsi listrik per kapita menunjukkan arah positif dengan capaian akhir yang lebih tinggi dibandingkan awal periode. Hal ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan energi listrik di Maluku semakin meningkat, seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a) Indeks Kualitas Air

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai air bersih untuk rumah tangga, air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Sungai Di Provinsi Maluku sebagian besar merupakan sungai hujan. Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor – sektor perekonomian. Oleh karena itu, kualitas air sungai merupakan salah satu indikator pembangunan Provinsi Maluku untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Penilaian terhadap kualitas air sungai dapat dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya yang terangkum dalam Indeks Kualitas Air (IKA).

Tabel 2.21
Indeks Kualitas Air Provinsi Maluku

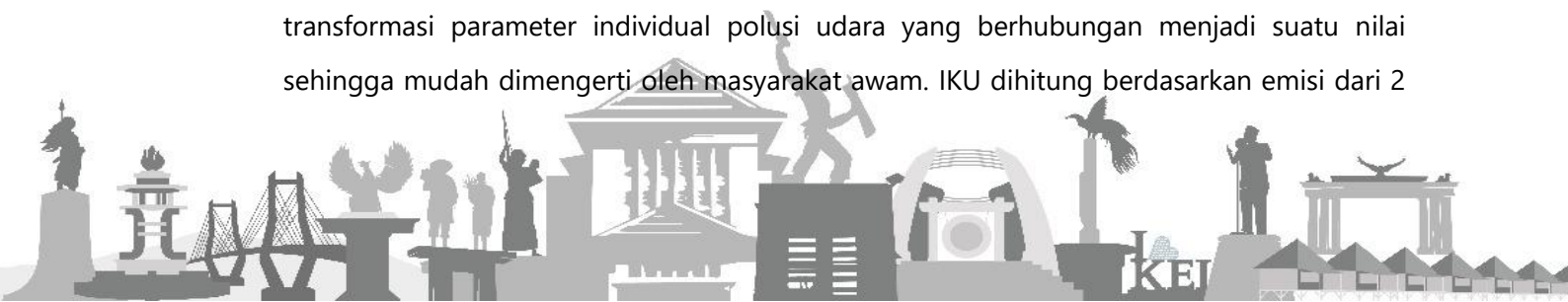
Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	58,75	55,56	52,08	55,87	56,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Pada tahun 2020, IKA Sungai Provinsi Maluku tercatat sebesar 58,75, tahun berikutnya di tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 55,56, yang kemudian berlanjut di tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 52,08. Pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan nilai IKA menjadi 55,87, kemudian tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 56,55 menunjukkan adanya upaya untuk memulihkan kondisi kualitas air meskipun belum mencapai nilai IKA di tahun-tahun sebelumnya.

b) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari 2



(dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Tabel 2.22
Indeks Kualitas Udara Provinsi Maluku

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,41	90,70	91,46	92,47	92,70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Maluku mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas udara di wilayah ini. Menurut data yang tercatat, pada tahun 2020, IKU mencapai 90,41 dan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai 92,70 pada tahun 2024. Peningkatan IKU secara bertahap dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa Provinsi Maluku memiliki potensi untuk terus memperbaiki kualitas udara dengan mempertimbangkan tantangan lingkungan dan wilayah, hal ini ditujukan untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang.

c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH sebagai Indikator yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan di Provinsi Maluku sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,86	78,23	77,69	78,75	78,71

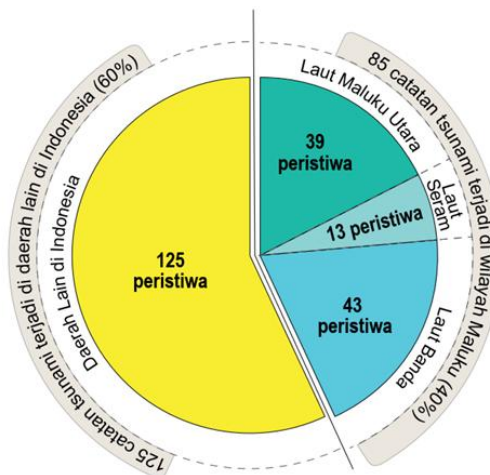
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, 2025



Dalam hal kualitas lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 76,86 menjadi 78,23 di tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 77,69, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 sebesar 78,75, kemudian pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 78,71.

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana merupakan ancaman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah dengan risiko bencana tinggi. Ditinjau dari sejarah bencana beraspek geologi, kejadian gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api sudah berulang terjadi di bumi Raja-Raja ini. Berdasarkan catatan sejarah, kurang lebih terdapat 210 kejadian tsunami yang terjadi dalam kurun waktu 1600 sampai dengan 2015 di Indonesia. Dengan mengambil kurun waktu yang sama, dari jumlah kejadian tsunami di Indonesia tersebut, terdapat 85 kejadian tsunami yang berasal dari wilayah Maluku. Atau secara statistik dapat disampaikan bahwa kurang lebih 40% tsunami di Indonesia bersumber dari Maluku (UNESCO, 2016).

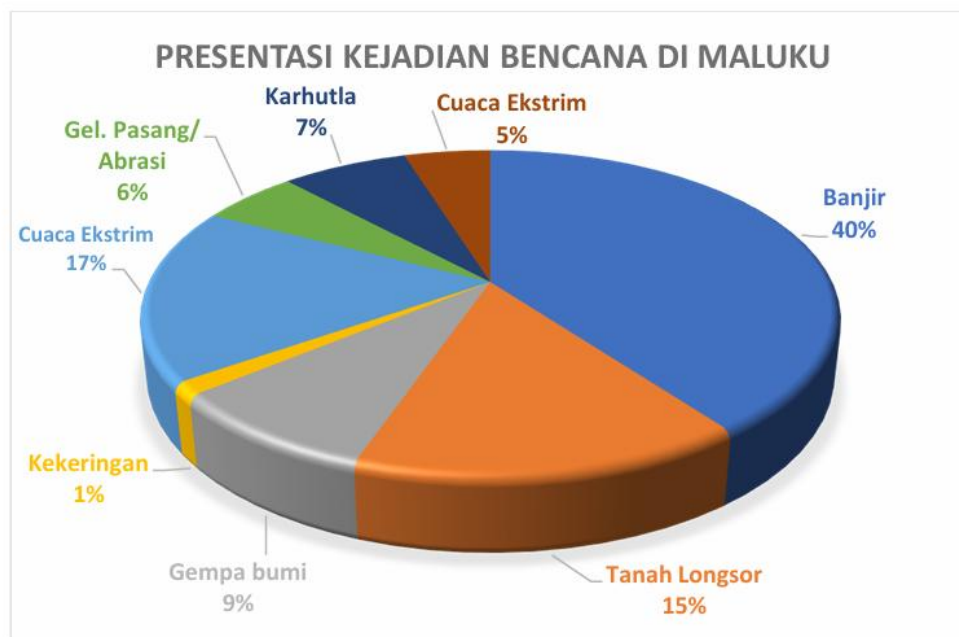


Gambar 2.3 Jumlah Kejadian Tsunami di Indonesia dan Maluku Periode 1600-2015
Sumber : UNESCO, 2016

Kejadian tsunami di masa lampau, sebagian besar dipicu oleh gempa bumi. Salah satu catatan yang cukup lengkap ditulis adalah kejadian tsunami setinggi 15 meter di Banda Neira pada tanggal 1 Agustus 1629, yang kemudian diteliti oleh Liu dan Harris (2013). Dari hasil pemodelan tsunami dan pencocokan data sejarah maka diduga kuat episentrum gempa tersebut berasal dari Kepulauan Watubela – Seram Bagian Timur.

Namun pada beberapa kejadian tsunami lainnya yang terjadi, turut diakibatkan oleh longsoran bawah laut. Sebagaimana yang dikisahkan dalam catatan Rumphius, tentang kejadian gempa bumi dan tsunami di Utara Pulau Ambon yang juga berdampak ke sejumlah

wilayah sekitar Pulau Ambon. Dari catatan Rumphius ini, diperoleh informasi ketinggian tsunami maksimum pada saat itu tercatat di Seith dengan ketinggian 80 s.d. 100 meter (Rumphius, 1675). Catatan ini kemudian diteliti kembali oleh Pranantyo dan Cummins (2019), dan menghasilkan kesimpulan bahwa kejadian tsunami dahsyat itu merupakan akibat dari gempa bumi yang juga menyebabkan longsor bawah laut. Tidak hanya gempa bumi dan longsor bawah laut yang pernah memicu tsunami di Maluku. Tsunami akibat letusan gunung api pun pernah terjadi pada tahun 1659, yaitu letusan gunung api Teun. Gelombang pasang pada saat itu pun terlihat di Teluk Ambon dengan ketinggian 1 s.d. 1,5 meter (Wichmann, 1918). Terlepas dari bencana yang diakibatkan oleh ancaman beraspek geologi, Provinsi Maluku juga kerap diperhadapkan dengan kejadian bencana beraspek hidrometeorologi. Berdasarkan data resmi yang dipublikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian bencana di Provinsi Maluku dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir didominasi oleh bencana banjir, disusul cuaca ekstrim dan tanah longsor.



Gambar 2.4 Persentase Kejadian Bencana di Provinsi Maluku Periode 2015 – 2024
Sumber BNPB

Dengan kejadian bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Maluku, perlu ditinjau juga aspek perubahan iklim. Berdasarkan Catatan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bahwa tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sejak pengamatan tahun 1981. Dimana suhu rata-rata 27,5°C dan anomali 0,8°C terhadap normal 1991 – 2020. Dari sumber yang sama, dijabarkan juga bahwa kenaikan tinggi muka laut berdasarkan data satelit menunjukkan tren naik $4,3 \pm 0,4$ mm/tahun. Bahkan Provinsi Maluku



juga merupakan salah satu wilayah dengan intensitas tertinggi radiasi matahari maksimum sepanjang tahun 2024, dimana radiasi lebih dari 6 kWh/m². Dengan adanya data tersebut, maka tampak telah terjadi perubahan iklim di Provinsi Maluku.

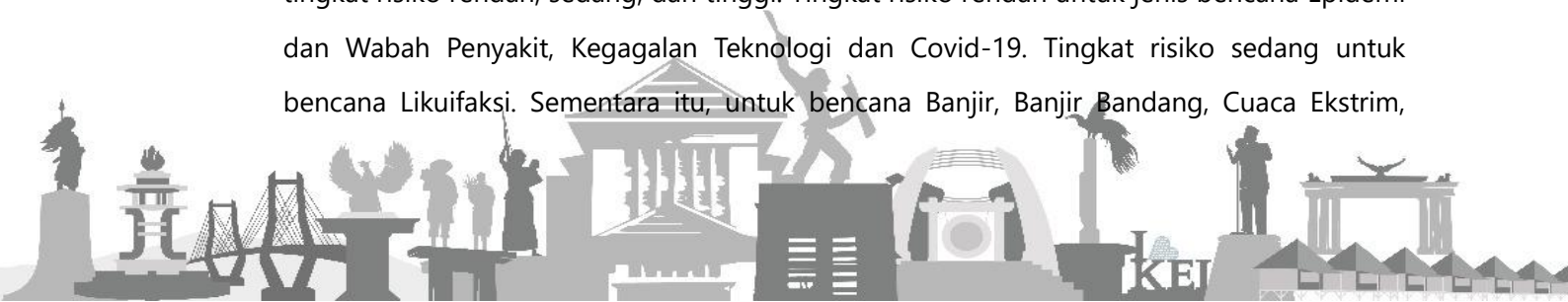
Dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Maluku, BNPB telah merilis terdapat 15 (lima belas) jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Provinsi Maluku. Mulai dari Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempa Bumi, Likuifaksi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Letusan Gunung Api Banda Api Letusan Gunung Api Wurlali, Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, dan Covid-19. Kajian risiko itu sendiri merupakan penggabungan antara indeks/ kelas bahaya, kelas kerentanan, dan kelas kapasitas. Hasil dari penggabungan ketiga indeks/ kelas tersebut akan menunjukkan kelas risiko bencana di tiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Berikut disajikan tingkat risiko bencana di Provinsi Maluku.

Tabel 2.24
Jenis Bahaya yang Berpotensi terjadi di Provinsi Maluku

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5.	Gempa bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6.	Likuifaksi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8.	Letusan Gunung api Banda Api	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
9.	Letusan Gunung api Wurlali	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
10.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
11.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12.	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
13.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
14.	Kegagalan Teknologi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
15.	Covid-19	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021, Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku, BNPB, 2022

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Maluku berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat risiko rendah untuk jenis bencana Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi dan Covid-19. Tingkat risiko sedang untuk bencana Likuifaksi. Sementara itu, untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem,



Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempa Bumi, Likuifaksi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Letusan Gunung Api Banda Api, Letusan Gunung Api Wurlali, Kekeringan, Tanah Longsor dan Tsunami memiliki tingkat risiko Tinggi.

Setiap tahunnya, BNPB merilis nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian, komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Hanya komponen kapasitas saja yang dapat mempengaruhi penurunan indeks risiko bencana.

Berdasarkan penghitungan nilai IRB tahun 2024 yang dirilis oleh BNPB pada awal tahun 2025, diketahui bahwa saat ini Provinsi Maluku berada pada peringkat pertama se-Indonesia dengan nilai 161,5. Penilaian yang sama juga dilakukan untuk Kabupaten/ Kota se-Maluku. Dimana hanya 2 (dua) kabupaten dengan kelas risiko sedang, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun detail nilai IRB masing-masing Kabupaten/Kota yang dirangkum mulai dari tahun 2015 s.d. 2024, tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Nilai IRB dan Tingkat Risiko Bencana per Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	MALUKU BARAT DAYA	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	216.64	211.29	212.91	TINGGI
2	KEPULAUAN ARU	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	183.25	183.80	TINGGI
3	KEPULAUAN TANIMBAR	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	180.60	180.60	TINGGI
4	MALUKU TENGGARA	179.20	179.20	179.20	169.00	169.00	169.00	172.06	172.06	172.06	172.06	TINGGI
5	KOTA TUAL	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	TINGGI
6	SERAM BAGIAN BARAT	180.40	165.80	165.80	170.18	170.18	170.18	170.18	167.46	159.51	163.45	TINGGI
7	MALUKU TENGAH	214.00	184.15	171.52	154.81	154.81	154.81	154.81	163.60	160.59	162.48	TINGGI
8	BURU SELATAN	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	TINGGI
9	BURU	179.60	134.56	129.58	133.55	136.55	136.55	135.08	148.44	143.28	153.72	TINGGI
10	SERAM BAGIAN TIMUR	149.60	104.37	104.37	114.73	114.73	114.73	125.19	125.19	125.19	125.19	SEDANG
11	KOTA AMBON	156.40	112.10	108.03	109.59	105.02	105.02	98.33	103.40	101.38	99.07	SEDANG

Dari tabel 2 di atas, terdapat Kabupaten/ Kota yang tidak mengalami perubahan nilai IRB sejak tahun 2015, yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual. Khusus untuk nilai IRB Provinsi Maluku, sangat bergantung pada nilai IRB masing-masing Kabupaten/ Kota. Sedangkan IRB Kabupaten/ Kota sangat tergantung pada nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Pada penilaian IKD yang dilaksanakan, hanya Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang berada pada kategori sedang. Kabupaten/ Kota yang lain berada pada kategori rendah. Hal ini yang memicu



naiknya IRB Provinsi Maluku. Secara detail, nilai IKD masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Nilai IKD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Kab/ Kota	IKD 2024	Klasifikasi
1	Ambon	0,54	Sedang
2	Maluku Tengah	0,45	Sedang
3	Seram Bagian Barat	0,40	Rendah
4	Seram bagian Timur	0,24	Rendah
5	Buru	0,33	Rendah
6	Buru Selatan	0,32	Rendah
7	Maluku Tenggara	0,24	Rendah
8	Tual	0,23	Rendah
9	Kepulauan Aru	0,33	Rendah
10	Kepulauan Tanimbar	0,33	Rendah
11	Maluku Barat Daya	0,33	Rendah

Sumber: Hasil Verifikasi 2024

Dengan peringkat Provinsi Maluku yang berada pada urutan pertama se-Indonesia untuk kategori Indeks Risiko Bencana Tinggi, maka dibutuhkan sejumlah upaya peningkatan kapasitas secara simultan mulai dari Tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/ Kota. Tantangan penanggulangan bencana di Maluku pun beragam, diantaranya:

1. Maluku memiliki multi ancaman bencana
2. Karakteristik wilayah kepulauan
3. Kapasitas daerah dan masyarakat yang belum memadai
4. Anggaran kebencanaan < 1%. Bahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, anggaran penanggulangan bencana < 0,5% APBD Provinsi Maluku
5. Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang belum sepenuhnya dimiliki oleh BPBD Kabupaten/Kota
6. Belum terintegrasinya dokumen KRB ke dalam dokumen perencanaan daerah

b. Persentase Penurunan Emisi GRK

Persentase Penurunan Emisi GRK merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas upaya mitigasi perubahan iklim dalam menekan laju emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor, seperti energi, transportasi, industri, pertanian, dan kehutanan. Indikator ini



kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk akan mempengaruhi kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan.

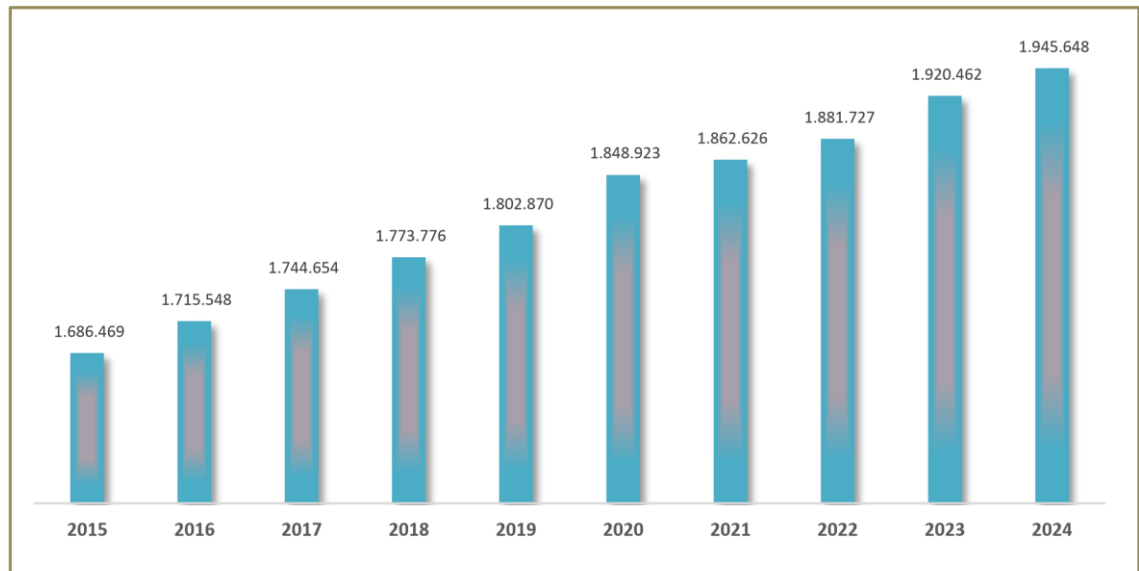
Sebagai provinsi kepulauan, wilayah di Provinsi Maluku tentunya memiliki tingkat kepadatan penduduk serta struktur penduduk yang berbeda pula, dimana struktur penduduk tersebut meliputi jumlah, persebaran dan komposisi penduduk. Tingkat kepadatan serta struktur yang berbeda-beda dari waktu ke waktu pada setiap wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena struktur penduduk yang dinamis atau senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu maka perlu sekali untuk mengetahui komposisi penduduk di suatu wilayah, hal ini dikarenakan komposisi penduduk dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan penduduk berdasarkan pengelompokan kriteria tertentu.

Melalui komposisi penduduk akan diperoleh berbagai data mengenai penduduk menurut jenis kelamin dan pengelompokan umur. Demikian nantinya akan dapat diketahui kelompok umur produktif dan tidak produktif, sehingga hal ini akan memudahkan pemerintah untuk meramalkan kebijakan apa yang akan diambil ketika melakukan pembangunan. Untuk itu pentingnya data jumlah dan struktur penduduk sehingga akan digunakan untuk menentukan beberapa kelompok sasaran (targeted groups) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Perkembangan penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa selama 1 dekade terjadi pertambahan jumlah penduduk sebesar 15,37%. Penambahan jumlah penduduk di Maluku cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak 1.686.469 jiwa dan meningkat hingga mencapai 1.945.648 jiwa pada tahun 2024.

Dari keseluruhan total penduduk di Maluku, sebagian besar tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai 440.848 jiwa atau sekitar 22,66 persen. Adapun ibukota Maluku yakni Kota Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 362.639 jiwa atau sekitar 18,64 persen, dan yang proporsi terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan yakni sebesar 4,16% (80.842 jiwa). Jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya, maka pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku selama tahun 2020-2024 mencapai 1,28 persen dimana pertumbuhan penduduk tertinggi dialami oleh Kabupaten Buru Selatan dengan capaian 1,75 persen disusul Kabupaten Aru sebesar 1,66 persen.





Gambar 2.5
Perkembangan Penduduk di provinsi Maluku Tahun 2015-2024
Sumber BPS Provinsi Maluku 2025

Provinsi Maluku memiliki kepadatan penduduk mencapai 42 jiwa per km². Sebagai ibukota provinsi, Kota Ambon memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 1.532,32 jiwa per km² disusul Kota Tual yang mencapai 394,02 jiwa per km². Adapun sex ratio Maluku mencapai 102,4 yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun pola ini tidak berlaku pada Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Kota Tual dimana sex ratio berada di bawah angka 100 yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari kelompok umur, terlihat bahwa penduduk terbesar berada pada kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 182.791 jiwa dan disusul oleh kelompok umur 15 - 19 tahun sebanyak 180.284 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 33.151 jiwa dan disusul oleh penduduk berumur 75 tahun ke atas sebanyak 34.092 jiwa.

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).



Tabel 2.28
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk 2020-2024	Proporsi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
Kepulauan Tanimbar	130.487	1,38	6,71	29,45	102,4
Maluku Tenggara	126.245	0,96	6,49	124,18	99,3
Maluku Tengah	440.848	1,04	22,66	53,41	102,1
Buru	142.304	1,28	7,31	28,95	104,3
Kepulauan Aru	109.159	1,66	5,61	13,48	106,1
Seram Bagian Barat	226.044	1,57	11,62	45,12	104,1
Seram Bagian Timur	147.139	1,62	7,56	25,70	103,2
Maluku Barat Daya	87.197	1,58	4,48	19,16	104,9
Buru Selatan	80.842	1,75	4,16	21,98	105,0
Ambon	362.639	1,09	18,64	1.532,32	99,8
Tual	92.744	1,26	4,77	394,02	99,6
MALUKU	1.945.648	1,28	100,00	42,16	102,4

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

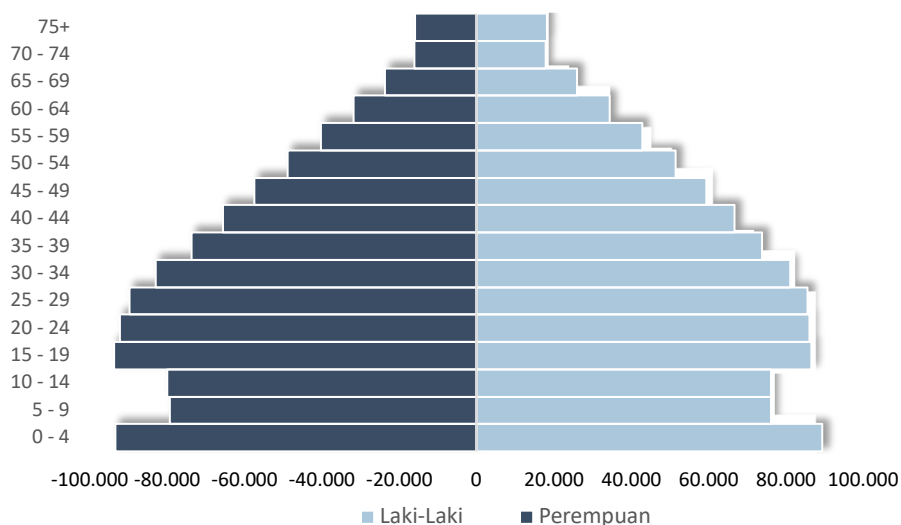
Tabel 2.29
Jumlah Penduduk Menurut Umur di Provinsi Maluku Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0 - 4	93.327	89.464	182.791
5 - 9	79.269	76.147	155.416
10 - 14	79.864	76.194	156.058
15 - 19	93.627	86.657	180.284
20 - 24	92.230	86.192	178.422
25 - 29	89.773	85.655	174.994
30 - 34	82.942	81.180	162.923
35 - 39	73.664	73.907	146.271
40 - 44	65.529	66.677	131.034
45 - 49	57.362	59.549	115.652
50 - 54	48.879	51.553	99.010
55 - 59	40.171	42.871	81.773
60 - 64	31.842	34.511	65.161
65 - 69	23.640	26.045	48.636
70 - 74	15.979	17.942	33.151
75+	15.845	18.247	34.092
TOTAL	983.943	961.705	1.945.648

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2023



Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, terlihat bentuk ekspansif pada piramida penduduk Maluku. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk pada usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).



Gambar 2.6
Piramida Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Angka TFR sangat penting karena merefleksikan tingkat penggantian generasi. Jika TFR berada di angka 2,1, ini sering disebut sebagai tingkat kesuburan pengganti (replacement level fertility). Artinya, setiap pasangan secara rata-rata memiliki cukup anak untuk menggantikan diri mereka sendiri di generasi berikutnya, dengan mempertimbangkan sedikit angka kematian bayi dan anak. TFR di atas 2,1 menunjukkan pertumbuhan populasi, sementara TFR di bawah 2,1 mengindikasikan potensi penurunan populasi di masa depan.



Tabel 2.30
Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Maluku Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	3,16	2,91	2,91	2,52	2,42

Tabel 2.18 memberikan indikasi adanya penurunan yang signifikan dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Tren ini mengindikasikan pergeseran demografi yang positif di Maluku, bergerak menuju tingkat kesuburan yang lebih seimbang. TFR ini adalah cerminan dari kemajuan pembangunan kependudukan di Maluku. Jika tren ini dapat dipertahankan hingga mencapai atau mendekati 2,1, Maluku akan memiliki struktur demografi yang lebih optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu perangkat data yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Maluku adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai produksi barang dan jasa cukup signifikan, yaitu mencapai 12,33 triliun. Kenaikan ini terjadi di semua sektor lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 3,17 triliun atau sebesar 25,7 persen, diikuti sektor perdagangan mencapai 1,60 triliun atau sebesar 13,0 persen dan sektor industri pengolahan mencapai 1,26 triliun atau sebesar 10,3 persen.

Dari segi volume, yang diukur dengan persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2019, 2022 dan 2023 cukup stabil dan menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan rata-rata tumbuh di level 5,26 persen per tahun.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pada komponen konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan ekspor. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2021 kondisi perekonomian Maluku cenderung melemah diakibatkan oleh pandemi covid-19.



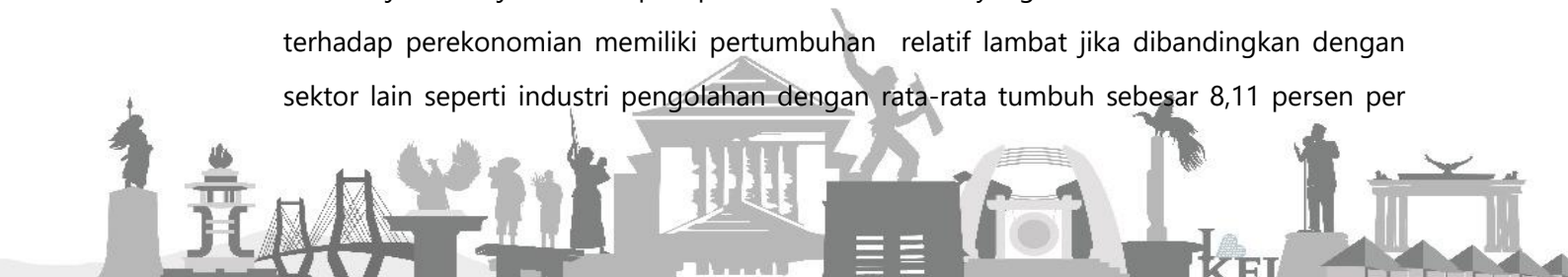
Struktur perekonomian menunjukkan bahwa pada tahun 2019–2023 belum ada perubahan signifikan dalam perekonomian Maluku atau bisa dikatakan masih relatif tetap, perekonomian masih mengandalkan sektor primer sebagai kontributor terbesar. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,53 persen, diikuti sektor administrasi pemerintahan sebesar 22,35 persen, sektor perdagangan sebesar 13,42, sektor konstruksi sebesar 5,05 per tahun.

Tabel 2.31
Rata-Rata Kontribusi PDRB ADHB dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Kategori	Lapangan Usaha	Rata-Rata Kontribusi PDRB Sektoral 2019-2023	Rata-Rata LPE Sektoral 2019-2023
SEKTOR PRIMER	A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,53	3,85
	B Pertambangan dan Penggalian	2,27	(1,44)
SEKTOR SEKUNDER	C Industri Pengolahan	5,54	8,11
	D Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	5,44
	E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,40	3,42
	F Konstruksi	7,81	3,83
SEKTOR TERSIER	G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,42	4,05
	H Transportasi dan Pergudangan	5,05	1,51
	I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55	1,47
	J Informasi dan Komunikasi	3,09	4,81
	K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,09	4,05
	L Real Estate	0,28	2,82
	M,N Jasa Perusahaan	0,97	3,72
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,35	2,95
	P Jasa Pendidikan	5,65	3,92
	Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	6,31
	R,S,T,U Jasa Lainnya	1,63	3,38

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Namun jika ditinjau dari aspek pertumbuhan, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian memiliki pertumbuhan relatif lambat jika dibandingkan dengan sektor lain seperti industri pengolahan dengan rata-rata tumbuh sebesar 8,11 persen per



tahun, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 5,44 persen serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 4,81 persen.

Berdasarkan data komponen pengeluaran dari tahun 2019-2024, kinerja perekonomian Maluku masih didorong oleh konsumsi rumah tangga, artinya barang dan jasa yang dihasilkan di Maluku sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Pada periode 2019-2024, kontribusi komponen pengeluaran menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 71,15% pada tahun 2020 menjadi 68,7% pada tahun 2024. Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan yang signifikan dari 32,2% pada tahun 2020 menjadi 26,9% pada tahun 2024. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami penurunan dari 33,64% pada tahun 2020 menjadi 28,5% pada tahun 2024.

Tabel 2.32
Distribusi PDRB Pengeluaran ADHB Provinsi Maluku Menurut
Lapangan Usaha (Persen)

No	KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	71,15	69,55	69,24	68,96	68,7
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,67	2,62	2,61	2,62	2,8
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32,2	32,64	28,87	27,23	26,9
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,64	33,27	31,01	29,37	28,5
5	Perubahan Inventori	0,62	0,57	0,52	0,48	0,5
6	Ekspor Barang dan Jasa	-40,0	-36,5	-31,8	-24,2	-18,5
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Maluku

b. Pendapatan Perkapita

Pada periode 2020-2024, PDRB per kapita di Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Maluku meningkat sebesar 32,19 juta rupiah, naik sebesar 7,12 juta rupiah dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 25,09 juta rupiah. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan nilai tambah dengan kecenderungan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Secara spasial, PDRB per kapita di 11 kabupaten/kota di Maluku menunjukan beberapa daerah menunjukan peningkatan. Kota Ambon, misalnya, mencatat peningkatan yang sangat



pesat dari 42,37 pada 2020 menjadi 54,69 pada 2024, Kabupaten Kepulauan Aru juga meningkat dari 34,06 pada 2020 menjadi 43,62 pada 2024.

Tabel 2.33
PDRB Per Kapita Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Di Maluku

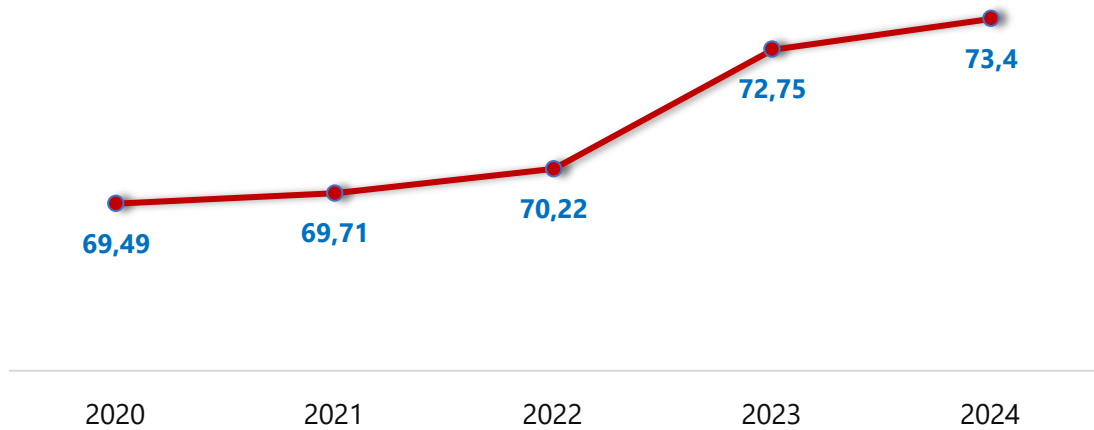
Kabupaten/Kota	T a h u n				
	2020	2021	2022	2023	2024**
Kepulauan Tanimbar	21.989	22.951	24.851	26.366	27.728
Maluku Tenggara	26.927	28.022	30.598	32.893	34.920
Maluku Tengah	20.642	21.350	23.154	24.680	25.983
Buru	17.988	18.474	19.985	21.201	22,256
Kepulauan Aru	34.361	35.360	38.309	41.319	43.620
Seram Bagian Barat	14.324	14.742	15.995	17.031	18.037
Seram Bagian Timur	21.250	22.669	25.530	24.233	25.034
Maluku Barat Daya	20.419	23.960	26.874	33.433	36.666
Buru Selatan	18.931	19.431	20.917	22.229	23.340
Kota Ambon	42.377	44.406	48.359	51.568	54.699
Kota Tual	28.458	29,401	32.185	34.994	36.846
Provinsi Maluku	25.094	26.153	28.537	30.455	32,198**

Sumber: BPS Prov. Maluku, data diolah

c. Indeks Pembangunan Manusia

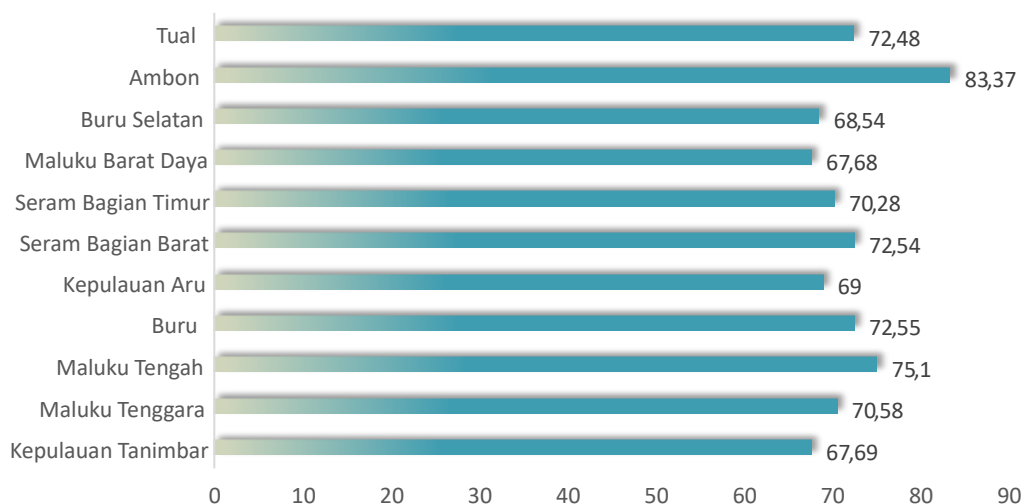
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).





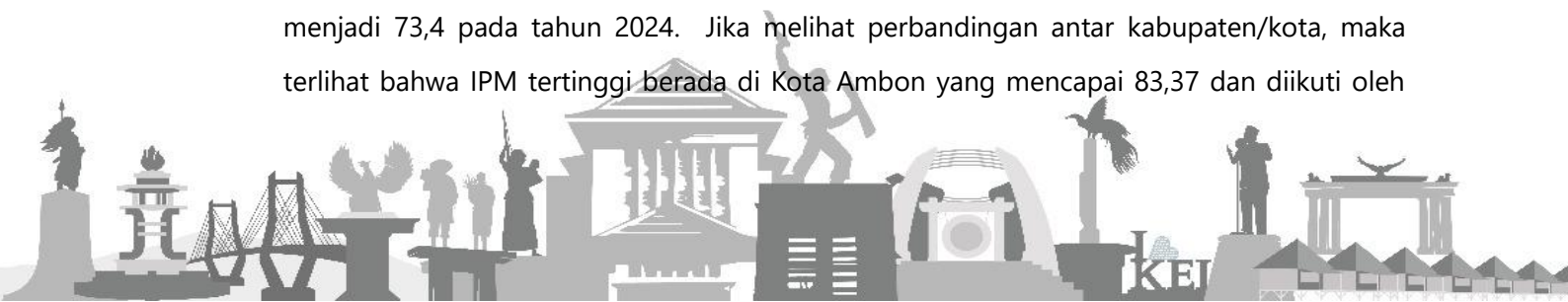
Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Peningkatan perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan capaian kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator yang disusun oleh Angka Harapan Hidup sebagai Indeks Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan rata-rata Lama Sekolah, Indeks Pendidikan dan Rata-Rata Pengeluaran per Kapita sebagai Indeks Hidup Layak.



Gambar 2.8
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

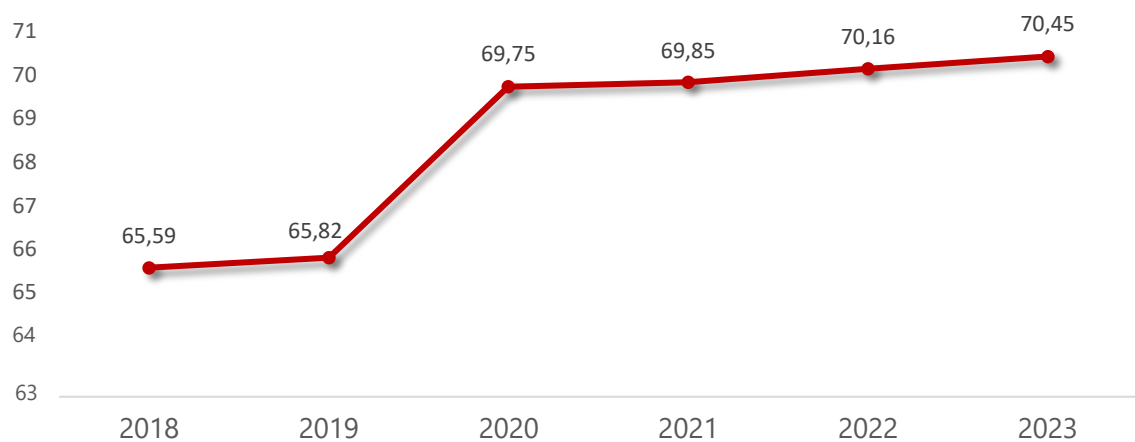
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku mengalami peningkatan pada kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 IPM Maluku sebesar 71,34 dan meningkat menjadi 73,4 pada tahun 2024. Jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota, maka terlihat bahwa IPM tertinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 83,37 dan diikuti oleh



Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru dengan masing-masing capaian IPM sebesar 75,10 dan 72,55.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.



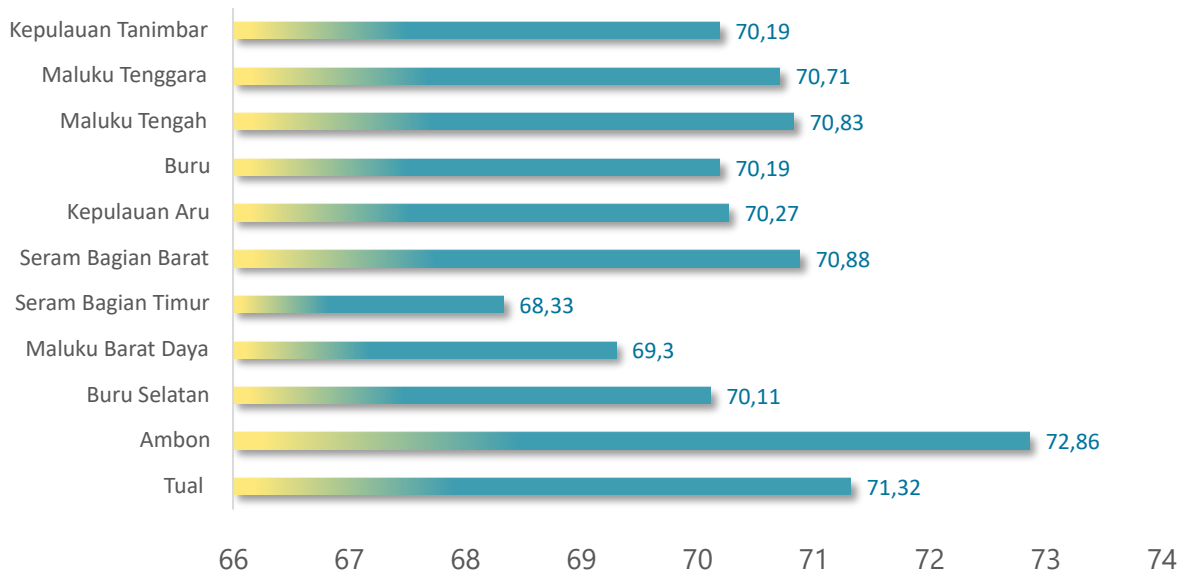
Gambar 2.9

Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku tahun 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Secara global, usia harapan hidup telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, berkat kemajuan dalam bidang kesehatan, sanitasi, akses terhadap perawatan medis, dan perbaikan umum dalam kondisi kehidupan.





Gambar 2.10
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku tahun 2024

Dari capaian usia harapan hidup Maluku terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Maluku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini harus terus diupayakan program strategis pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal cakupan dan pemerataan layanan kesehatan. Usia harapan hidup Maluku meningkat hingga mencapai 70,45 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022, akan memiliki kesempatan hidup hingga berumur 70 tahun.

Jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota, maka terlihat bahwa angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 72,86 tahun dan diikuti oleh Kota Tual dan Seram Bagian Barat dengan masing-masing capaian angka harapan hidup sebesar 71,32 tahun dan 70,88 tahun. Adapun sumber: Bapenda Provinsi Maluku, Tahun 2025. Secara keseluruhan, kemajuan yang dicapai menunjukkan harapan yang lebih baik bagi masa depan kesehatan masyarakat di Maluku, dengan perhatian yang terus menerus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup. Walaupun Capaian UHH Provinsi Maluku mengalami peningkatan tetapi masih dihadapkan pada tantangan unik seperti distribusi layanan kesehatan yang tidak merata dan keterbatasan sumber daya di beberapa daerah. Untuk meningkatkan usia harapan hidup lebih jauh, penting untuk melanjutkan investasi dalam infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

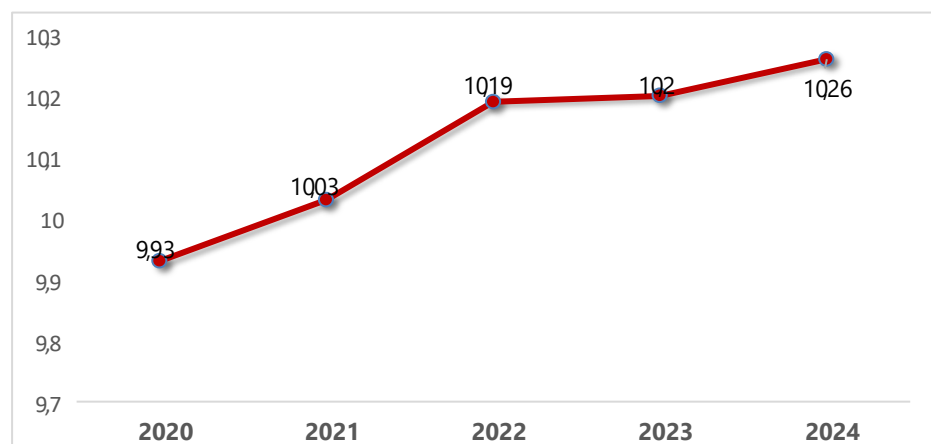


sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

a. Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau *years of schooling* dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.



Gambar 2.11

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Maluku

Sumber: BPS Provinsi Maluku tahun 2025

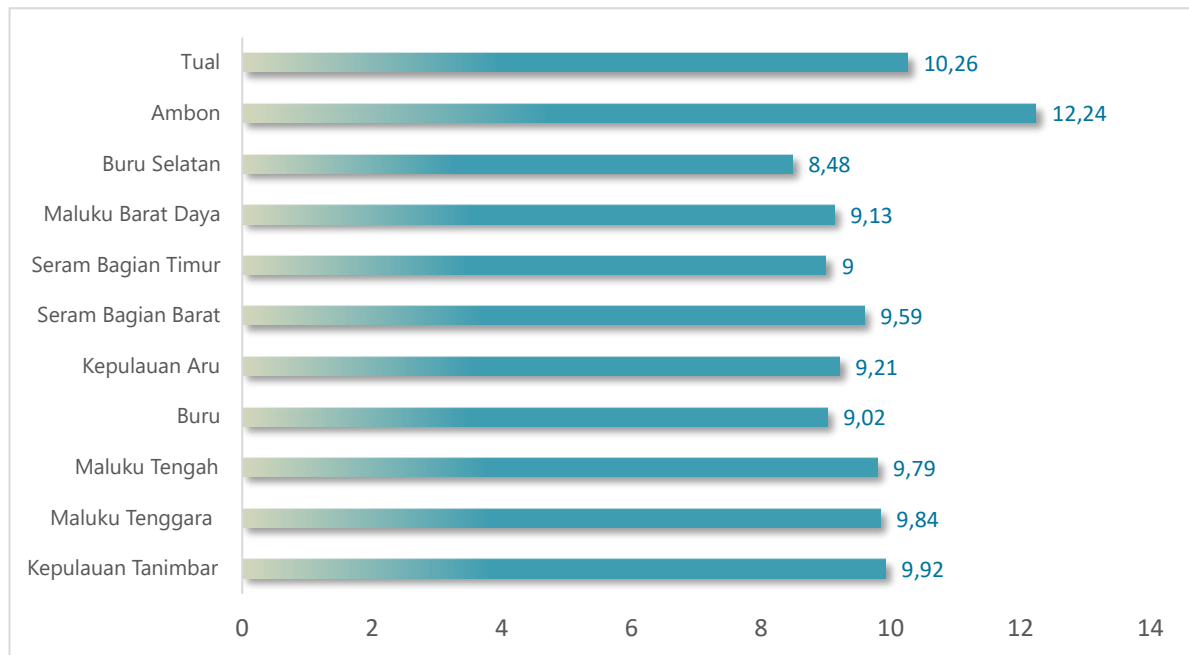


Selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah sebesar 9,81 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 10,2 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, sempat mengenyam bangku pendidikan hingga 10,2 tahun atau secara rata-rata telah menduduki jenjang pendidikan hingga SMA kelas 2 Semester pertama. Angka rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 12,22 Tahun dan Kota Tual yang mencapai 10,66 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Buru Selatan dengan capaian hanya 8,23 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), komponen IPM yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya meskipun lebih landai pergerakannya.

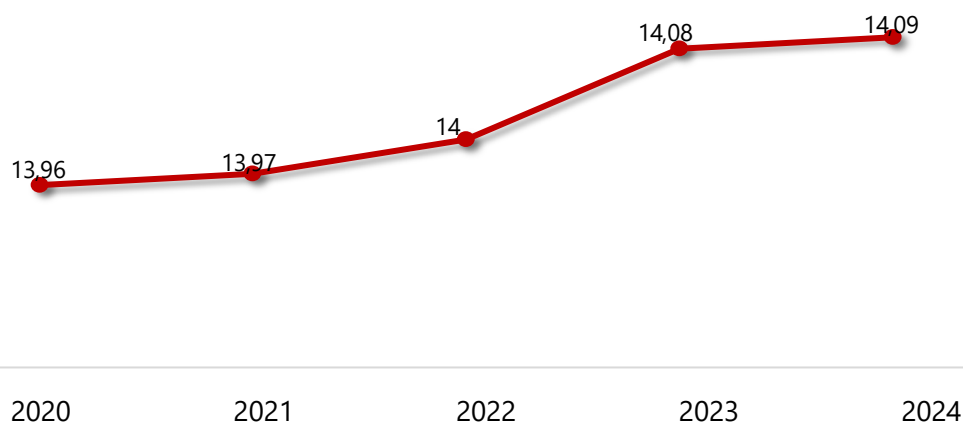




Gambar 2.12
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Maluku tahun 2025

Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Maluku sebesar 13,96 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 14,09 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 14,09 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester ke empat.

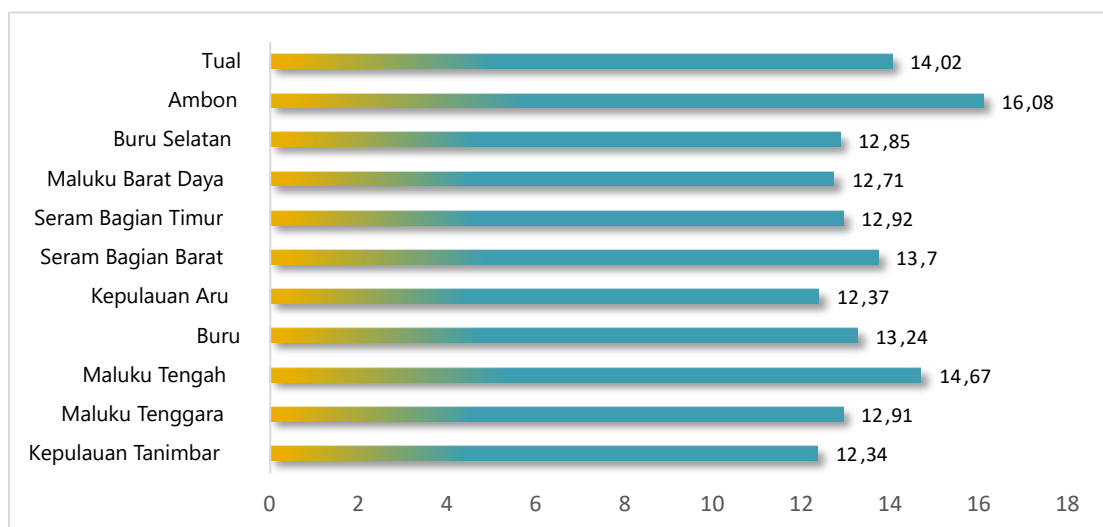
Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah, berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan.



Gambar 2.13
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku
Sumber: BPS Provinsi Maluku tahun 2025



Jika dilihat menurut kabupaten/kota, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi ditempati oleh Kota Ambon (16,08), diikuti oleh Maluku Tengah (14,67) dan Kota Tual (14,02). Sementara angka terendah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu 12,34.



Gambar 2.14

Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Per Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Maluku tahun 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Dalam dokumen perencanaan, urusan sosial merupakan aspek penting yang mencakup berbagai elemen yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, disabilitas, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku, pemerintah daerah melalui stakeholder terkait berupaya untuk memberikan bantuan secara merata dan berkualitas terhadap masyarakat yang layak menerima bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan guna memberi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk lebih berdaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.





Gambar 2.15

Jumlah Penerima Bantuan dan Jumlah Anak Terlantar yang Ditanggung dan Dibina dalam Panti Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Maluku,, 2025

b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menggambarkan persentase tenaga kerja yang telah terlindungi dalam program jaminan sosial, baik di sektor formal maupun informal. Indikator ini menunjukkan tingkat perlindungan tenaga kerja dari risiko kerja, sekaligus mencerminkan kualitas ketenagakerjaan dan jaring pengaman sosial di suatu daerah. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin baik perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja terhadap risiko kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, maupun jaminan hari tua.

Tabel 2.35

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5,7	7,6	8,25	0,10

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, 2025



Nilai IKUB berada pada angka 76,30 di dua tahun awal, menunjukkan kondisi kerukunan yang baik dan stabil. Terjadi peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 77,46, menandakan adanya penguatan dalam toleransi dan kerja sama antarumat beragama. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun terakhir sebesar 80,54, yang termasuk kategori sangat baik. Secara keseluruhan, tren IKUB menunjukkan arah positif dan konsisten meningkat, menggambarkan semakin kuatnya harmonisasi kehidupan beragama. Peningkatan ini berkontribusi pada stabilitas sosial, persatuan bangsa, dan keberlanjutan pembangunan yang inklusif.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang kebudayaan secara terukur dan objektif. Pengukuran ini mencakup berbagai dimensi, antara lain pendidikan, nilai budaya, warisan budaya, ekonomi budaya, kesetaraan gender, ketahanan sosial, hingga lingkungan budaya. Dengan adanya IPK, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana kebudayaan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan identitas bangsa, serta daya saing nasional.

Tabel 2.37
Indeks Pembangunan Kebudayaan Maluku 2020 – 2023

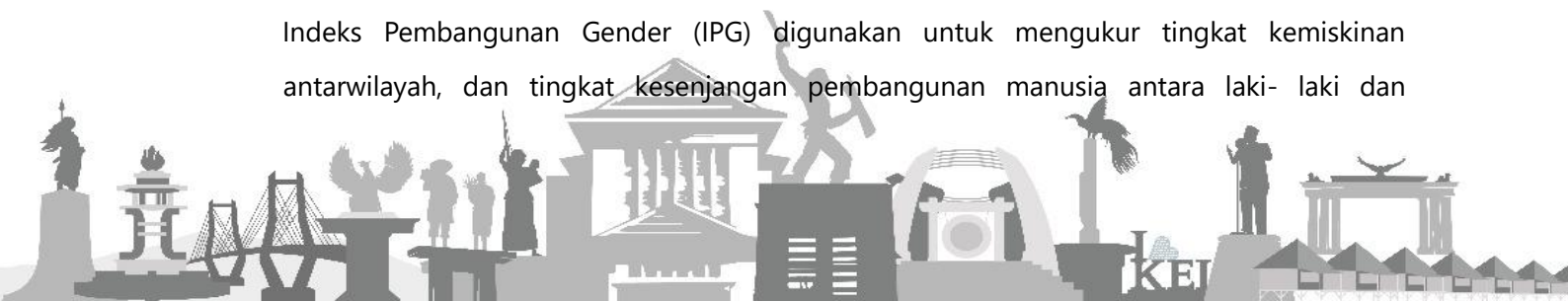
Indikator	Capaian			
	2020	2021	20232	2023
Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,23	54,23	55,87	59,38

Sumber : Kementerian Agama, 2024

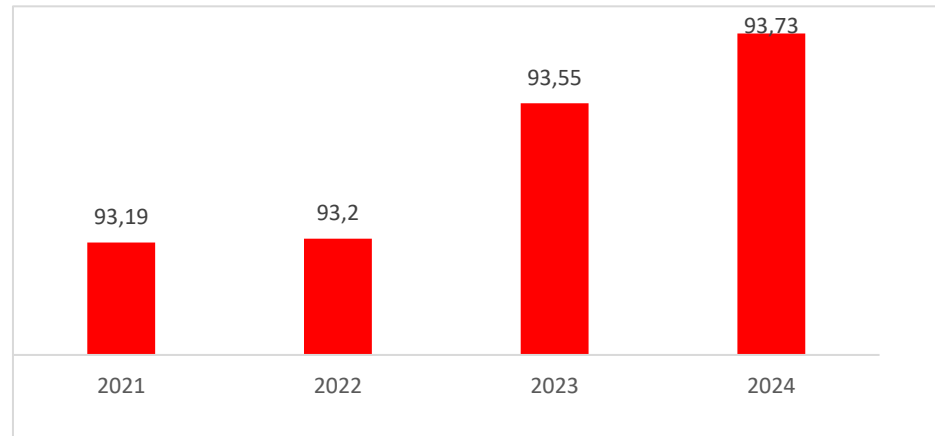
Nilai IPK menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun awal, IPK berada di angka 50,23, yang mencerminkan pembangunan kebudayaan masih pada level cukup. Tahun berikutnya terjadi kenaikan menjadi 54,23 dan 55,87, menandakan adanya perbaikan dalam berbagai dimensi pembangunan kebudayaan. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun terakhir dengan capaian 59,38, mendekati kategori baik. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan semakin mendapat perhatian, dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan nilai budaya, warisan budaya, pendidikan, dan ketahanan sosial. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan arah positif, di mana kebudayaan semakin menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah maupun nasional.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan antarwilayah, dan tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan



perempuan. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan tercermin apabila nilai IPG sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antarwilayah dan kesetaraan gender. IPG Provinsi Maluku masih di atas rata-rata Nasional, berarti kondisi cukup rendahnya kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.16

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Tahun 2021 - 2024

Sumber: BPS Provinsi Maluku,, 2025

Pembangunan Gender Maluku Maluku terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 berada pada angka 93,19 dan pada tahun 2024 mencapai angka 93,73. Untuk mengukur kondisi kesetaraan dan ketimpangan gender di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Indeks Ketimpangan Gender. Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Maluku sebesar 0,509, turun sebanyak 0,018 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,527.

Penurunan sebesar 0,018 poin tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan penurunan IKG pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,013 poin. Selain itu, penurunan IKG Maluku pada tahun 2023 ini memperbaiki sedikit kenaikan IKG pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,006 poin. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Maluku kesetaraan gender di Maluku masih fluktuatif dikarenakan masih terjadi kenaikan pada tahun 2020 dan 2022. Tetapi IKG Maluku menunjukkan penurunan yang signifikan jika dilihat dari tahun 2020 ke 2023 yaitu turun sebesar 0,025 poin. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah.

Penurunan IKG Maluku tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, pada dimensi kesehatan reproduksi indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang berhasil ditekan turun, juga dimensi pemberdayaan dimana keterwakilan perempuan di legislatif meningkat dan dimensi pasar



2.1.3 Aspek Daya Saing

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Mewujudkan maluku maju, inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita pembangunan Provinsi Maluku diperlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan inovatif pada setiap sektor pembangunan. SDM yang berkualitas memiliki sejumlah karakteristik dan kompetensi yang mampu beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan yang dinamis serta memiliki kemampuan untuk berpikir diluar kebiasaan dan menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing SDM adalah melalui perhitungan rasio ketergantungan (dependency ratio) yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun).

Tabel 2.39
Rasio Ketergantungan Tahun 2021-2024 Provinsi Maluku

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15	490.963	481.147	492.104	494.265
2	Jumlah Penduduk Usia > 64	99.529	107.612	111.374	115.879
3	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif	590.492	588.759	603.478	610.144
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.258.431	1.292.968	1.316.984	1.335.504
5	Jumlah Penduduk	1.848.923	1.881.727	1.920.462	1.945.648
6	Rasio Ketergantungan	46,92	45,54	45,82	45,69

Sumber: Maluku Dalam Angka, 2025

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. sebaliknya, jika semakin rendah persentase rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukan nilai rasio ketergantungan Provinsi Maluku dari Tahun 2021-2024 berfluktuatif. Kondisi ini dibuktikan oleh penurunan nilai rasio ketergantungan pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 akan tetapi mengalami peningkatan pada Tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi nilai rasio ketergantungan akan tetapi jumlah penduduk produktif terus



Tabel 2.43
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Maluku 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	1,57	1,53	1,48	1,45	1,45

Sumber: BPS Maluku, 2025

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 1,57, kemudian turun menjadi 1,53 di tahun 2021. Data tahun 2022 tercatat cukup tinggi sebesar 1,48* (diduga terjadi salah penulisan angka, karena tidak konsisten dengan tren), namun kembali menurun dan stagnan pada angka 1,45 di tahun 2023 hingga 2024.

Secara umum, tren ini mengindikasikan bahwa peran sektor akomodasi dan makan-minum terhadap PDRB relatif kecil dan cenderung menurun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perlambatan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta ketatnya persaingan usaha. Ke depan, dibutuhkan strategi penguatan sektor pariwisata dan kuliner, termasuk dukungan pada UMKM serta peningkatan kualitas layanan akomodasi, agar kontribusinya terhadap PDRB dapat meningkat secara berkelanjutan.

e. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang kreatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.44
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	25 (Kurang Inovatif)	32,66 (Inovatif)	41,26 (Inovatif)	47,34 (Inovatif)	46,71 (Inovatif)

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025



Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada kinerja inovasi pemerintah daerah. Pada tahun 2020, nilai IID tercatat sebesar 25,00 dengan kategori Kurang Inovatif. Namun sejak tahun 2021, terjadi lonjakan yang menunjukkan peningkatan kapasitas inovasi daerah secara konsisten. Nilai IID meningkat menjadi 32,66 pada tahun 2021, kemudian terus naik menjadi 41,26 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan nilai 47,34, semuanya berada dalam kategori Inovatif.

Meski demikian, pada tahun 2024 nilai IID sedikit menurun menjadi 46,71, meskipun masih bertahan dalam kategori yang sama, yaitu Inovatif. Penurunan tipis ini menunjukkan adanya perlambatan laju peningkatan inovasi yang perlu diantisipasi dengan langkah penguatan kelembagaan dan keberlanjutan program inovatif.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru di Provinsi Maluku merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau menekankan pada aktivitas ekonomi yang rendah emisi, efisien sumber daya, dan inklusif, misalnya melalui pengembangan energi terbarukan, pertanian ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan. Bagi Maluku, pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologi daratan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Sementara itu, ekonomi biru menjadi kerangka strategis dalam pengelolaan potensi laut Maluku secara berkelanjutan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, serta konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Penerapan ekonomi biru di Maluku bertujuan meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem laut. Kombinasi antara ekonomi hijau dan biru akan memperkuat daya tahan lingkungan, mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, dan membuka peluang inovasi serta investasi berkelanjutan yang relevan dengan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi Digital di Provinsi Maluku merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi tantangan geografis wilayah kepulauan. Dengan meningkatkan infrastruktur TIK, memperluas akses internet, dan memperkuat literasi digital,



transformasi digital memungkinkan pemerataan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital hingga ke desa-desa terpencil. Digitalisasi juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui sistem administrasi berbasis elektronik serta pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Selain itu, transformasi digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM, nelayan, petani, dan generasi muda Maluku untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, mengakses informasi dan teknologi, serta mengembangkan inovasi lokal. Ekosistem digital yang inklusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru berbasis teknologi, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat integrasi Maluku ke dalam ekonomi nasional dan global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi menjadi alat pemberdayaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di provinsi kepulauan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : pertama faktor Sumber Daya Alam, kedua faktor Sumber Daya Manusia, ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, keempat faktor kebijakan pemerintah.



Tabel 2.45
Realisasi Investasi PMDN dan PMA, serta Realisasi Proyek di
Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Realisasi Proyek PMDN	1.953	1.179	1.537	2.579	4.463
Jumlah Realisasi Proyek PMA	24	54	82	124	180
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rp)	2.967,2	3.134,1 M	1.664,9	3.477,8	3.380,5
Realisasi Investasi PMA (Juta Rp)	2.492,4	194,4 M	1.053,9	1.573,3	1.810,9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Pada tahun 2020 jumlah proyeksi investasi PMDN di Maluku sebanyak 1.953 proyek menurun menjadi 1.179 proyek di tahun 2021, kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2023 sebesar 2.579 proyek dan 2024 mengalami peningkatan signifikan menjadi 4.463 proyek. Sementara nilai investasi PMDN yang telah direalisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,967,2 M kemudian naik menjadi Rp. 3,134,1 M pada tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 1,664,9 M pada tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi Rp. 3,477,8 M dan pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 3,380,5 M. Nilai investasi PMDN meningkat pada tahun 2024 dibandingkan dengan PMA (asing), dimana proyek investor yang telah direalisasikan sejak tahun 2020 - 2024 yang mencapai 4.463 proyek.

2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Infrastruktur

Infrastruktur merupakan fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sehingga ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat berperan penting bagi kemajuan suatu wilayah, termasuk di Provinsi Maluku.

Tabel 2.46
Jumlah Pelabuhan Laut per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Eksisting	Rencana
1	Kepulauan Tanimbar	5	7
2	Maluku Tenggara	1	9
3	Maluku Tengah	10	15
4	Buru	2	5



No	Kabupaten/Kota	Eksisting	Rencana
5	Kepulauan Aru	6	8
6	Seram Bagian Barat	6	12
7	Seram Bagian Timur	8	0
8	Maluku Barat Daya	21	6
9	Buru Selatan	4	6
10	Ambon	3	0
11	Tual	3	10
Total		68	78

Sumber : Permenhub No. KP901 Tahun 2016

Saat ini indeks infrastruktur Provinsi Maluku tahun 2023 mencapai angka 68,68%. Ketersediaan infrastruktur transportasi dan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan memadai tentunya akan meningkatkan daya saing daerah baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku akan semakin meningkat.

Tabel 2.47
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Eksisting	Rencana
1	Kepulauan Tanimbar	2	4
2	Maluku Tenggara	0	4
3	Maluku Tengah	8	8
4	Buru	2	1
5	Kepulauan Aru	3	3
6	Seram Bagian Barat	2	2
7	Seram Bagian Timur	3	2
8	Maluku Barat Daya	5	7
9	Buru Selatan	1	1
10	Ambon	2	0
11	Tual	2	1
TOTAL		31	33

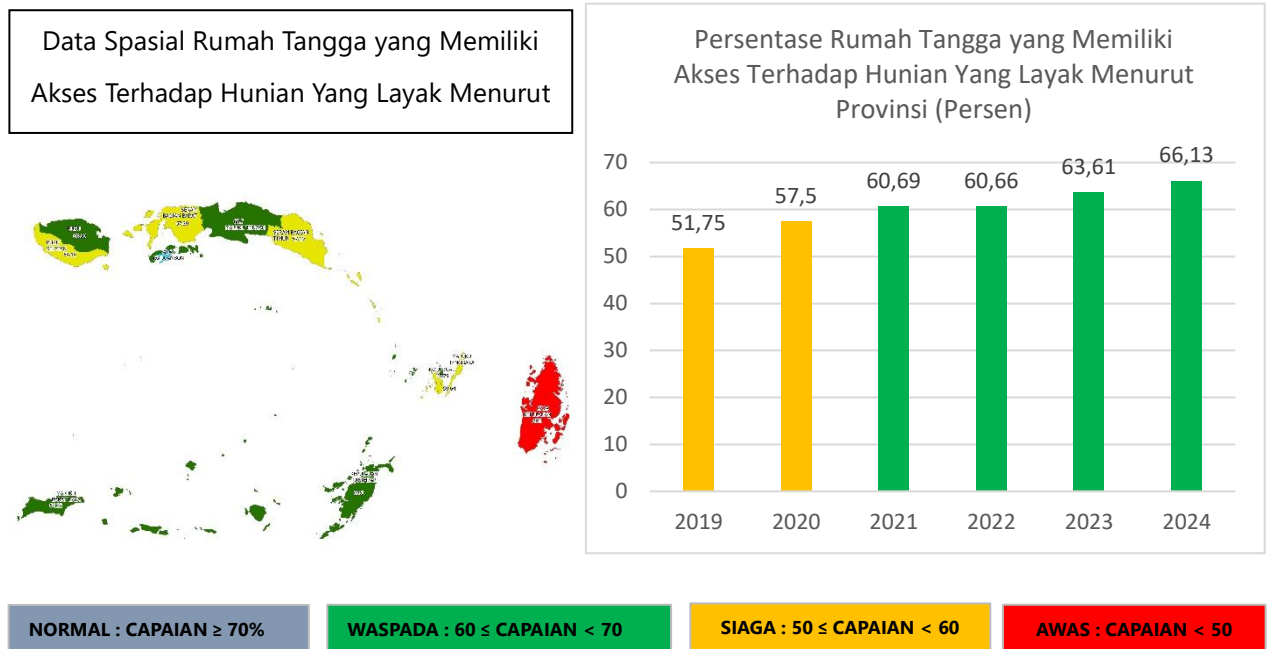
Sumber : Permenhub No. KP901 Tahun 2016

Sebagai wilayah kepulauan, infrastruktur transportasi merupakan kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. pembangunan Infrastruktur transportasi yang ada di Provinsi Maluku meliputi jalan raya, pelabuhan laut dan penyeberangan, serta bandar udara. Ketiga infrastruktur tersebut merupakan kunci penting untuk menjadi penghubung antarwilayah kepulauan di Provinsi Maluku. Saat ini, panjang ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku mencapai 996,63 Km dan tersebar di setiap wilayah Kabupaten/Kota dengan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2023 sebesar 50,18%.





hunian yang layak di Provinsi Maluku pada tahun 2024 mencapai angka 66,13 %, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 63,61 %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada peta dan grafik berikut :



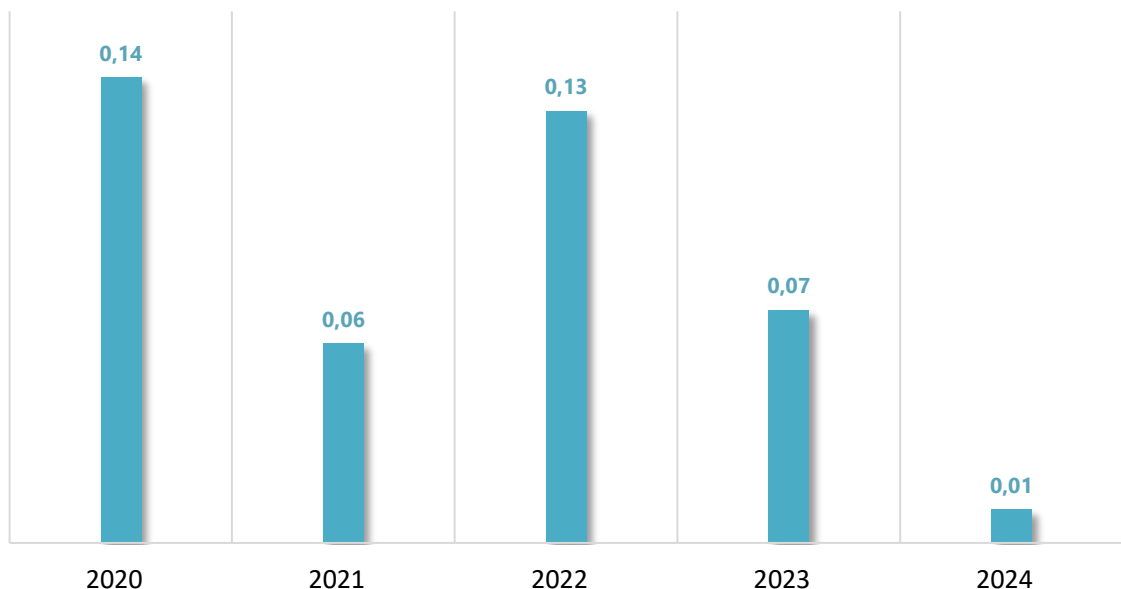
Gambar 2.17
Ketersediaan Rumah Layak Huni Provinsi Maluku Tahun 2020-2024
Sumber: Data Susenas (data diolah) Tahun 2024

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Provinsi Maluku sejak tahun 2020 yang berada pada angka 57,5 % dan berada pada kategori Siaga karena berada $50 \% \leq \text{capaian} < 60 \%$ hingga pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 60,69 % dan berada pada kategori Waspada. Ketersediaan rumah layak huni yang terus meningkat tentunya merupakan hal positif yang harus dipertahankan. Namun capaian tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan akan rumah layak huni yang harus dicapai. Oleh karenanya penyediaan rumah yang layak huni harus terus ditingkatkan hingga seluruh masyarakat di Provinsi Maluku dapat memiliki rumah yang layak huni. Hal ini tentunya dibarengi dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan. Capaian penyediaan PSU yang mencapai 100% setiap tahunnya, tentunya akan menciptakan kawasan perumahan yang ideal bagi masyarakat.

Secara spasial sebaran Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Aru berada pada kategori Awam dengan angka 27,29 % dan telah mencapai kategori Normal Adalah Kota

Ambon dengan angka 78,61 % sedangkan 10 Kabupaten/Kota lainnya berada pada kategori Siaga dan Waspada.

Penyediaan rumah layak huni juga dilakukan bagi para korban bencana. Sejak tahun 2020 sampai 2024 pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan ketercapaian antara penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dengan target pembangunan yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana juga merupakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang seharusnya memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk merelokasi rumah masyarakat yang terimbas program Pemerintah tersebut.



Gambar 2.18
Persentase Luas Kawasan Kumuh Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas PKP Provinsi Maluku, 2024

Khusus pada kawasan perkotaan, seringkali terdapat kawasan kumuh yang ditinggali oleh masyarakat terutama di area pusat kota. Keberadaan perumahan kumuh tersebut tentunya menunjukkan kondisi rumah yang tidak layak dan memadai untuk ditinggali oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyakit, kondisi lingkungan sosial yang tidak aman, serta merusak wajah dari kota tersebut. Oleh karenanya penanganan terhadap kawasan kumuh harus dilakukan. Persentase luasan kawasan kumuh Provinsi Maluku menunjukkan kinerja yang baik.



Berdasarkan data di atas luasan kawasan kumuh yang ditangani terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 luasan kawasan kumuh yang ditangani mencapai 28,38%. Masih tersisa 71,62% kawasan kumuh yang belum ditangani. Perlu adanya perhatian serius dalam penanganan kawasan kumuh sehingga masyarakat dapat memiliki penghidupan yang lebih baik, juga dapat menciptakan citra kota yang berkualitas.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

a. Tingkat Inflasi

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, inflasi tahunan gabungan indeks harga konsumen (IHK) di kabupaten/kota di Provinsi Maluku menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi serta faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi harga barang dan jasa di Maluku. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Maluku, inflasi tahunan di Maluku pada tahun 2020 turun tajam menjadi hanya 0,21% karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian pandemi COVID-19, yang berdampak signifikan terhadap sisi permintaan.

Pada tahun 2021, inflasi kembali mengalami peningkatan menjadi 4,01%. Inflasi mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan angka 6,28 persen, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas utama di Maluku seperti bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, rokok putih, tukang mandor, ikan teri, nasi dengan lauk, dan embal.

Tabel 2.49
Perkembangan Inflasi di Provinsi Maluku

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional (y-on-y)	0,45	0,57	0,51	2,61	157
Maluku (y-on-y)	0,21	4,01	6,28	2,81	1,28
Kota Ambon (y-on-y)	0,06	4,05	6,39	2,77	1,92
Kota Tual (y-on-y)	2,34	2,06	3,45	3,32	2,42

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Pada tahun 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi tahun 2022 yang mengalami inflasi sebesar 6,28% (yoy). Realisasi inflasi di Provinsi Maluku pada 2024 juga berada dibawah rentang sasaran inflasi nasional tahun 2024 sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Secara kewilayahan, realisasi inflasi pada gabungan kota IHK di Provinsi Maluku tahun 2024 menempati posisi di bawah gabungan kota di provinsi lainnya di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku



berada di level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% (yoy, sedangkan inflasi Provinsi tercatat sebesar 1,28%.

2.1.3.8 Aspek Pelayanan Umum

a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil. Integritas memastikan fondasi yang kuat dan terpercaya, sementara adaptabilitas memastikan organisasi dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika perubahan yang terus terjadi

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Data perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku tahun 2022–2024 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dan signifikan. Kenaikan dari kategori CC (2022) ke C (2023) dan kemudian B (2024) menandakan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Pencapaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi landasan strategis dalam mendorong pencapaian visi pembangunan daerah.

Tabel 2.50
Indeks Reformasi Birokrasi Maluku Tahun 2022 – 2024

Indeks Reformasi Birokrasi	2022	2023	2024
	CC	C	B

Sumber : Portal Satu Data. Menpan.go.id

c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai SPBE Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan bertahap dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, nilai SPBE sebesar 1,93 masih berada pada kategori “Kurang”, mencerminkan bahwa implementasi layanan dan tata kelola pemerintahan berbasis digital masih pada tahap awal. Tahun 2022 terjadi lonjakan ke 2,23 (“Cukup”), yang menandakan adanya perbaikan signifikan pada aspek kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen layanan digital.

Pada tahun 2024, nilai SPBE meningkat menjadi 2,63, tetap berada pada kategori “Cukup” tetapi menunjukkan bahwa upaya percepatan digitalisasi kembali berjalan. Kenaikan ini menjadi indikasi bahwa penguatan kebijakan, penambahan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas SDM mulai berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.



Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan dari 1,93 (2021) ke 2,63 (2024), capaian ini masih berada di level menengah. Untuk mencapai kategori “Baik” ($\geq 3,00$), dibutuhkan strategi percepatan integrasi layanan, pengembangan platform digital terpadu, serta perluasan akses internet yang merata.

Tabel 2.51
Indeks SPBE Maluku Tahun 2021 – 2024

Indeks SPBE	2021	2022	2023	2024
	1,93	2,23	2,23	2,63

Sumber : Portal Satu Data. Menpan.go.id

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Maluku merupakan salah satu instrumen strategis untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. IPP menggambarkan sejauh mana standar pelayanan publik telah terpenuhi, meliputi dimensi kebijakan, profesionalisme sumber daya aparatur, sarana prasarana, sistem dan prosedur, inovasi pelayanan, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

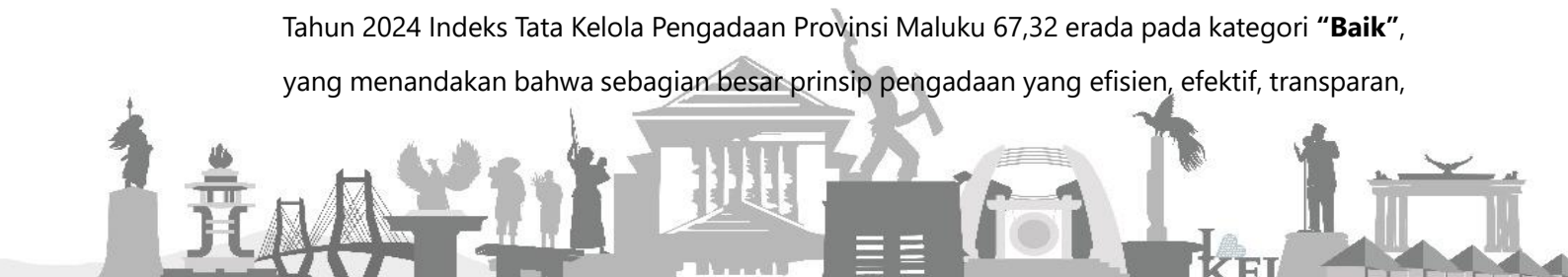
Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Maluku sebesar 2,18 pada skala 1,00–5,00 tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori “**Kurang**”. Skor ini menggambarkan bahwa meskipun pelayanan publik telah berjalan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa indikator yang masih lemah meliputi ketersediaan sarana dan prasarana layanan, kejelasan prosedur, kecepatan waktu layanan, inovasi pelayanan, serta tingkat kepuasan masyarakat.

Nilai ini juga menandakan bahwa reformasi dalam pelayanan publik memerlukan percepatan, khususnya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan transparan.

e. Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Indeks ini biasanya mencakup dimensi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, dan bersaing.

Tahun 2024 Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi Maluku 67,32 berada pada kategori “**Baik**”, yang menandakan bahwa sebagian besar prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan,



Tabel 2.52
Indeks Demokrasi Indonesia – Maluku, Tahun 2021 – 2023

Tahun	Nilai IDI	Kategori	Perubahan dari Tahun Sebelumnya
2021	66,76	Sedang	—
2022	75,25	Sedang	Naik 8,49 poin
2023	69,35	Sedang	Turun 5,90 poin

Sumber : BPS Maluku, 2025

2.1.3.10. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen strategis untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing jangka panjang.

Bagi Provinsi Maluku, IDSD menjadi barometer penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi unggulan daerah, penguatan tata kelola, dan optimalisasi sumber daya manusia. Indeks ini mencerminkan kapasitas dan kesiapan Maluku untuk bersaing di era ekonomi terbuka, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Peningkatan nilai IDSD tidak hanya menandakan capaian positif pembangunan, tetapi juga menjadi pendorong semangat untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, serta memiliki posisi kompetitif yang kuat di tingkat nasional maupun global.

Tabel 2.53
Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024

Indeks Daya Saing Daerah	Pilar 1 Institusi	Pilar 2 Infrastruktur	Pilar 3 Adopsi TIK
	4,03	2,73	3,10

Sumber : <https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah>, 2025

Secara umum, kekuatan daerah lebih menonjol pada aspek **Institusi**, sementara **Infrastruktur** menjadi titik terlemah yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan. Adopsi TIK menunjukkan potensi perkembangan yang dapat dipercepat melalui investasi teknologi, pelatihan SDM, dan perluasan akses digital. Perbaikan pada pilar infrastruktur dan



TIK akan memperkuat daya saing secara menyeluruh dan meningkatkan iklim investasi serta kualitas hidup masyarakat.

2.1.3.11. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.11.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	%	97,14	97,58	79,03	81,96	77,70
2	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	99,20	99,66	99,86
3	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1:19	1:20	1:20	1:20	1:20

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

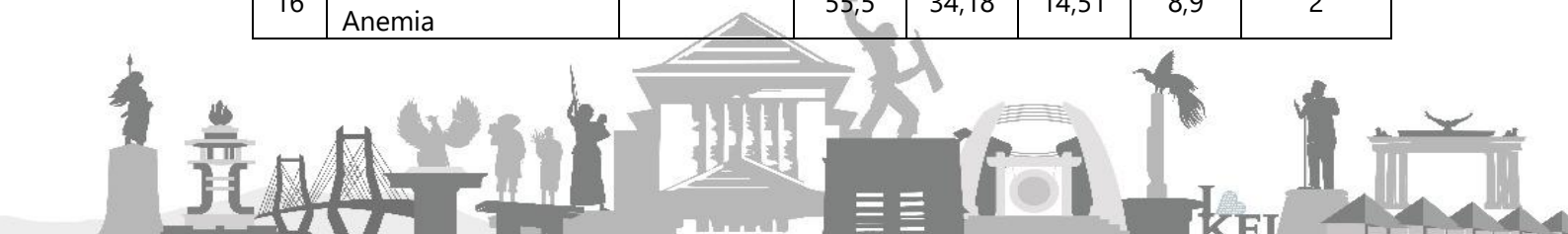
Capaian indikator urusan pendidikan menunjukkan bahwa kualitas hasil belajar tetap terjaga meskipun partisipasi mengalami fluktuasi. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/ sederajat relatif tinggi pada 2020–2021, namun turun signifikan pada 2022 sebelum kembali meningkat di 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan akses dan keberlanjutan sekolah bagi sebagian siswa. Sementara itu, Angka Kelulusan (AL) tetap berada pada tingkat sangat tinggi ($\geq 99\%$), mencerminkan keberhasilan proses pembelajaran dan evaluasi akhir di satuan pendidikan. Rasio guru-murid yang stabil pada kisaran 1:19–1:20 menunjukkan ketersediaan tenaga pendidik yang cukup untuk menjaga kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan, meskipun akses partisipasi sempat terganggu, mutu pendidikan dan efisiensi pengajaran masih dapat dipertahankan dengan baik.



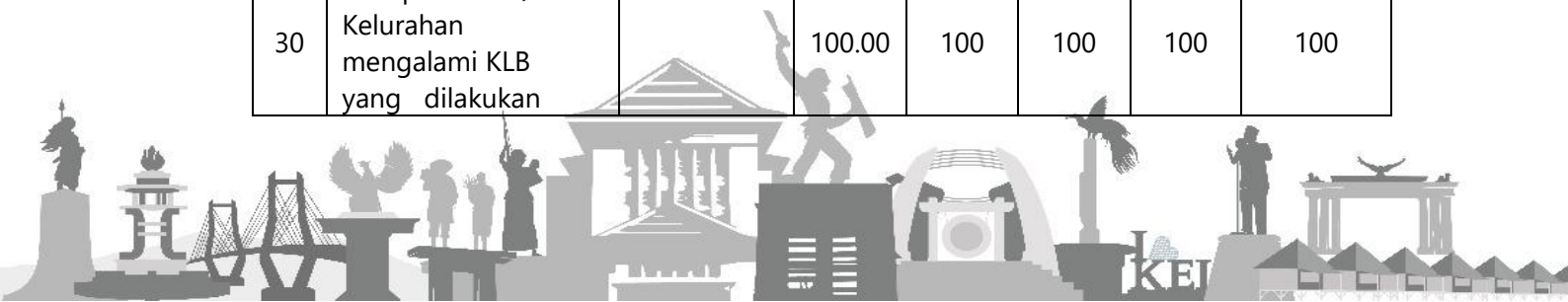
b. Kesehatan

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	6	6	7	6	6
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	6	1	8	7	6
3	Angka Kematian Neonata per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	3	5	6	2	4
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	149	63	62	76	68
5	Cakupan Penanganan komplikasi kebidanan	%	25	32	3,45	13	21
6	Persalinan di fasilitas kesehatan (PF)	%	38	66,03	58,38	61,38	52,96
7	Cakupan Pelayanan ANC (6 kali)	%	47	77,51	34,34	45,3	53,22
8	Cakupan kunjungan nifas	%	45	53,83	78,7	73,18	62,84
9	Cakupan penanganan komplikasi neonatal	%	23	1,32	2,23	2,64	5,1
10	Cakupan Kunjungan balita	%	56	9,36	75,36	82,45	63,13
11	Cakupan puskesmas mampu melaksanakan penjangkauan kesehatan anak usia sekolah	%	67	39,74	78,14	78,51	56,25
12	Cakupan Asi Eksklusif	%	76,9	49,9	46	42,5	57,6
13	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	5,7	4,8	4,9	4,4	5,6
14	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	Jumlah	43	78,17	78,7	75,96	66,38
15	Prevalensi Balita Stunting	%	15.00	10,2	8,3	7,2	7,16
16	Prevalensi Ibu Hamil Anemia	%	55,5	34,18	14,51	8,9	2



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
17	Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah	65	40	63,72	71,93	66,25
18	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak	%	22	41,68	63,72	26,32	9,17
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	%	18	25,5	45,49	62,29	63,22
20	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,2	0,7	0,7	0,44	0,6
21	Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita	%	82	73	73,95	71,23	12-59 Bulan = 95,39 dan 6-11 Bulan = 92,94
22	Cakupan Pelayanan Balita (D/S)	%	58	52	67,2	67,6	76,16
23	Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori	%	26,4	15	16,2	16,9	21,4
24	Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium	%	76,9	73,62	71,41	79,2	89,22
25	Jumlah puskesmas pembantu dengan luas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah	497	222	458	457	582
26	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	70,60	56,8	66	54,2	66,1
27	AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	1/100.000	≥ 5/100.000	0,4/100.000	>5,53/100.000	>5,52/100.000
28	Temuan Kasus TB Baru	%	11	38,2	62,8	70	59,17
29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	<0,2	<0,2	0,3	0,3	0,26
30	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	%	100,00	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penyelidikan epidemiologi < 24 jam						
31	Krisis Kesehatan	%	100	100	100	100	100
32	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	76,5	56,8	66	82,7	66,1
33	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengendalian konsumsi rokok pada penduduk 10 - 18 tahun	Jumlah			3	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota
34	Annual Paracite Incidence (API)	%	0,47	0,39	0,64	0,9	5 Kab/Kota API < 1/1000 Pddk (Buru, Bursel, Ambon, Malteng, SBB & SBT)
35	Slide Postivity Rate (SPR)	%	1,94	< 5	2,19	1,91	Buru, Bursel, Ambon, Malteng, SBB, Tual, dan MBD
36	Puskesmas yang Melaksanakan Tata laksana Program ISPA sesuai Standar	%	30,10	27,27	18,18	72,73	90,91
37	Persentase ODHA yang Mendapat Pengobatan ARV	%	211,70	40	56,55	34,5	57
38	Sistem Kewaspadaan Dini	%	87,70	87,2	95	98,36	97,81
39	Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan screening PTM Prioritas	Jumlah			5,15	11,7% (155.548 orang)	15,48
40	Persentase penyandang hipertensi yang Tekanan darahnya	Jumlah			NA	1,8% (153 orang)	14,24



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	terkendali di puskesmas/FKTP						
41	Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkontrol di puskesmas/FKTP	Jumlah			NA	0,3% (6 orang)	12,73
42	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM di $\geq 80\%$ puskesmas	Jumlah			2	11 kab/kota	11
43	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	39	18,6	9	85% (195 PKM)	100% (229 PKM)
44	Campak Dosis Kedua	%	60,20	43	73,6	22,7	49,8
45	Jumlah puskesmas dengan luas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah	236,00	222	228	229	241
46	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes	%	58,82	63,83	55,44	53,7	104 FKTP(70 % dari 324 FKTP)
47	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madya	Jumlah		79	158	132	225
48	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional	%	26		19,8	20,6	29,5
49	Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama	Jumlah			3	9	26
50	Ketersediaan Obat dan Vaksin	%	92,00	93	94	95	Obat : 72%, Vaksin : 100%
51	Rasio dokter dengan penduduk	per satuan penduduk	32,9 : 100.000	2;;100.000	40	41,82	39
52	Rasio Dokter Spesialis dengan Penduduk	per satuan penduduk			11	10,47	11



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
53	Rasio Dokter Gigi dengan Penduduk	per satuan penduduk	4,2:100.000	4:100.000	4	6,75	7
54	Rasio Bidan dengan Penduduk	per satuan penduduk	133,6:100.000	141:100.000	141	208	192
55	Rasio Perawat dengan Penduduk	per satuan penduduk	329,8:100.000	345:100.000	345	331,40	399
56	Rasio Apoteker dengan Penduduk	per satuan penduduk	12,9:100.000	17:100.000	17	35,02	18,45
57	Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan Penduduk	per satuan penduduk	32,3:100.000	45:100.000	45	24,87	76
58	Penggunaan Obat Generik di Puskesmas	%	96	97	98	99	96
59	Penggunaan Obat Generik di Rumah Sakit	%	72	74	76	78	78
60	Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap	%	38	35	43	45	45
61	Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	%	48	50	52,5	55	55
62	Penggunaan Obat Rasional	%	73,00	69	76	82	82

Sumber, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2025

Secara keseluruhan, kinerja sektor kesehatan 2020–2024 menunjukkan tren membaik di sebagian besar indikator strategis, terutama dalam penurunan stunting, peningkatan mutu fasilitas layanan, serta penguatan sistem surveilans kesehatan. Namun, beberapa indikator KIA dan gizi masih fluktuatif, terutama cakupan ANC dan persalinan di fasilitas kesehatan, yang perlu perhatian pada akses, kualitas layanan, dan peran tenaga kesehatan di daerah terpencil. Upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular menunjukkan progres signifikan, didukung oleh peningkatan akreditasi fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.





peningkatan signifikan dalam kepatuhan tata ruang. Capaian luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dapat dilayani jaringan irigasi mengalami kenaikan dari 42,27% (2020) menjadi 44,31% (2024), yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan meski peningkatan relatif lambat.

Secara umum, terdapat kemajuan nyata di sektor penyediaan air minum, kemantapan jalan, dan kepatuhan tata ruang, namun aspek pengelolaan sanitasi dan pemanfaatan kapasitas air baku untuk kebutuhan kota/kabupaten masih memerlukan perhatian lebih untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	74,01	74,04	74,39	74,57	74,25
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	n/a	n/a	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%	0	0	0	0	0
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha yang Ditangani	%	63,38	n/a	68,21	68,47	67,78
5	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	11,12	n/a	0,53	0,89	1,06

Sumber, Dinas Perumahan Permukiman, 2025

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menunjukkan kemajuan pada aspek penyediaan air bersih, kemantapan jalan, kepatuhan tata ruang, dan pemenuhan rumah bagi korban bencana. Namun, beberapa indikator mengalami stagnasi atau belum terealisasi, seperti pelayanan limbah domestik, relokasi hunian layak, dan peningkatan cakupan kawasan kumuh. Perlu percepatan program, penguatan koordinasi lintas sektor,



dan inovasi pendanaan agar target pembangunan infrastruktur dan hunian layak tercapai secara merata di seluruh wilayah.

e. Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase penanganan pra bencana	%	150,37	100	81,81	90,91	81,82
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	69,77	91,68	100	100	100

Sumber. Dinas Kesbangpol, 2025

Kinerja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup positif pada sebagian besar indikator. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan berada pada level maksimal, yaitu 100% secara konsisten setiap tahun. Hal ini menunjukkan respon cepat dan efektif dari perangkat daerah dalam menangani setiap gangguan yang terjadi.

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (kategori tertentu) juga berada di angka 100% sepanjang periode, menandakan tidak adanya penurunan kualitas layanan di bidang ini. Persentase penanganan bencana mengalami fluktuasi. Tahun 2020 menunjukkan angka 150,37% (melebihi target yang ditetapkan), namun kemudian menurun drastis pada 2022 menjadi 81,81%, sedikit meningkat pada 2023 ke 89,02%, dan turun kembali ke 81,82% di 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas dan sumber daya dalam penanganan bencana.

Persentase penanganan tanggap darurat bencana meningkat signifikan dari 69,77% pada 2020 menjadi 91,68% di 2021, dan kemudian mencapai 100% secara konsisten sejak 2022 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kecepatan dan efektivitas dalam fase tanggap darurat.



f. Sosial

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	80
4	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	%	100	100	100	100	115
6	Persentase cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100	100	100	100	100
7	Persentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial	%	100	100	100	100	15
8	Persentase cakupan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	%	100	100	100	100	100
9	Persentase cakupan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	100	100	100
10	cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	%	100	100	100	100	100

Sumber, Dinas Sosial, 2025

Capaian Urusan Sosial menunjukkan Kinerja yang stabil dan memenuhi target 100% selama 2020–2024, bahkan ada yang melebihi target 115 persen untuk Persentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti. Namun, terdapat penurunan signifikan pada dua indikator di 2024 yaitu Penanganan Warga Negara



Migran korban kekerasan (dari 100% ke 80%). Penanganan bencana alam dan sosial (dari 100% ke 15%). Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan eksternal atau hambatan pelaksanaan program di tahun terakhir, yang perlu menjadi fokus evaluasi dan perbaikan.

2.1.3.11.2. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tabel 2.60

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	%	20	54,54	54,54	0
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,53	0,18	0,67	3,66
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	8,00	2,43	0,48	11,47
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	5,7	7,6	8,25	0,10
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan	%	39,90	22,5	28,10	6,47

Sumber, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

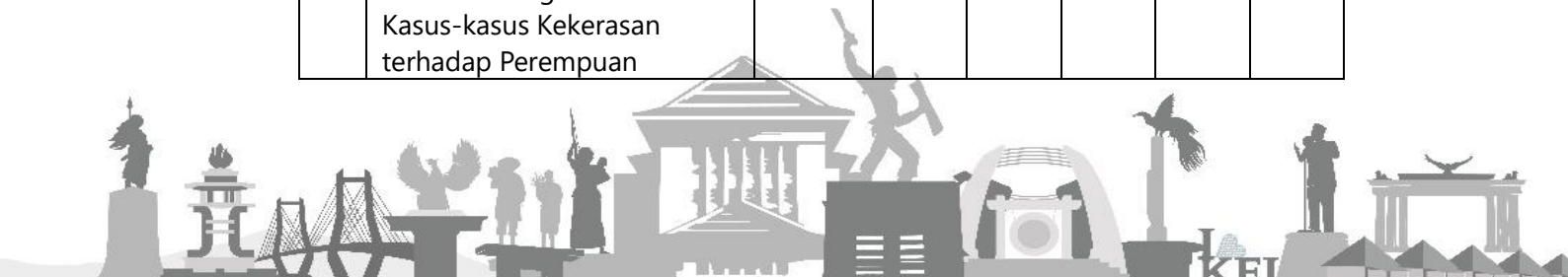
Capaian urusan indikator tenaga kerja mengalami fluktuasi besar sepanjang periode 2021–2024. Beberapa indikator menunjukkan peningkatan signifikan di awal, tetapi penurunan tajam pada 2024, seperti indikator penyusunan rencana tenaga kerja dan penerapan tata kelola kerja layak. Indikator yang berhasil *rebound* pada 2024 adalah penempatan tenaga kerja antarwilayah dan tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Penurunan besar di 2024 pada beberapa indikator mengindikasikan adanya tantangan serius dalam keberlanjutan program ketenagakerjaan yang mungkin disebabkan oleh faktor anggaran, kebijakan, atau dinamika pasar tenaga kerja.



b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	0	0	7,75	14,88	1,6
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	26,75	26,85	23,26	23,26	13
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	20	30	32,52	17,71	16
4	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	41	43	53,33	32,29	--
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	40	42	40,63	54,50	--
6	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	%	20	21	5,7	0	--
7	Rasio KDRT	%	0,38	0,37	0,01	0,01	0,01
8	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	12	15	55	100	100
9	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	50	55	39	100	100
10	Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitas Sosial Terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	50	55	0,4	100	100
11	Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	0	0	89	8	0



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	30	35	28	100	100
13	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	24	26	24	100	100
14	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	25	25	0,4	100	1,7
15	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	2%	2%	19	0,03	27,16
16	Persentase Keluarga Sejahtera	%	50	53	63,01	-	-
17	Cakupan kab/kota yang mengelola sistem data gender dan anak	%	0	82	82	82	82
18	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	18,18	27,27	18,18	18,18	18,18
19	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	30	35	55	100	100
20	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	30	35	8,23	-	-
21	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	30	45	2	100	100
22	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0	0	3,93	0,02	3,8

Sumber, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdapat kemajuan signifikan pada layanan penanganan korban kekerasan, terutama mulai 2022 hingga 2024 yang banyak mencapai cakupan 100%. Namun, indikator partisipasi perempuan di ranah politik, pemerintahan, dan ketenagakerjaan mengalami penurunan tajam di tahun terakhir. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak justru menunjukkan peningkatan di 2024, mengindikasikan perlunya penguatan pencegahan. Selain itu,



beberapa indikator stagnan atau tidak memiliki data terbaru, sehingga evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pendataan menjadi penting.

c. Ketahanan Pangan

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketahanan Pangan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	67,30	70,00	70,07	75,09	76,90
2	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu	%	55	60	70,58	89,32	96,77
3	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	99,95	-	15	10	12,47
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	-	-	48,30	17,80	22,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Secara keseluruhan, kualitas konsumsi pangan dan pengawasan mutu pangan menunjukkan kemajuan yang positif. Namun, penurunan cadangan pangan dan fluktuasi daerah rawan pangan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi, agar capaian positif tidak terancam saat menghadapi gangguan pasokan atau bencana.

d. Lingkungan Hidup

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	76,68	78,23	77,69	78,75	78,71
2	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	33,33	66,67	77,78	88,89	88,89

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Kualitas lingkungan hidup di provinsi terjaga dengan nilai IKLH yang stabil di kategori baik, sementara tingkat kepatuhan usaha terhadap izin lingkungan mengalami kemajuan signifikan dan telah mencapai hampir 90% pada dua tahun terakhir. Fokus selanjutnya adalah mendorong peningkatan IKLH melalui inovasi pengelolaan lingkungan, karena meskipun kepatuhan meningkat, kualitas lingkungan belum menunjukkan lonjakan signifikan.

e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	Ratio	0,91	0,93	0,94	0,80	0,86.73
2	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	0,82	0,73	0,82	0,82	0,89.60
3	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah	Ratio	1	1	1	1	1
4	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	3	3	3	3	3
5	Status Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Secara umum, Kinerja administrasi kependudukan di Provinsi Maluku cukup baik, ditandai dengan rasio pasangan ber-akta nikah yang sempurna, database kependudukan yang selalu tersedia, dan pelaporan yang konsisten. Meski sempat terjadi penurunan pada rasio kepemilikan KTP dan cakupan akta kelahiran di satu periode, tren akhir menunjukkan perbaikan, yang menjadi indikasi positif bagi penguatan layanan administrasi di masa depan.



f. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	44,96	20,56	23,52	14,63	14,94
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	78,79	20,24	24,20	32,97	18,50

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2025

Data tabel 2.64 menunjukkan capaian tinggi di awal periode, lalu mengalami penurunan dengan fluktuasi di tahun-tahun berikutnya. Untuk desa mandiri, tantangan terbesar adalah mempertahankan momentum dan mendorong desa yang hampir mandiri untuk naik kelas. Untuk desa tertinggal, capaian awal besar kemungkinan karena fokus pada desa yang lebih mudah dientaskan, sedangkan desa yang tersisa membutuhkan program berbasis kebutuhan lokal dan solusi jangka panjang. Pola ini mengindikasikan bahwa capaian mudah biasanya terjadi di awal, sementara capaian selanjutnya memerlukan strategi yang lebih kompleks dan biaya lebih besar.

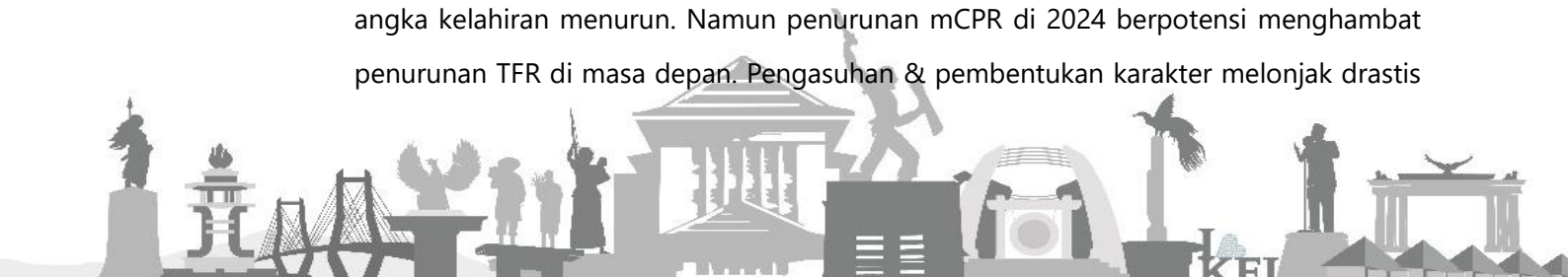
g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	36,6	45,7	45,7	60,4	37,4
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	3,16	2,91	2,91	2,52	2,42
3	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter	Persen	38,68	39,68	39,68	85,21	76,3

Sumber : Dinas Dukcapil, 2025

mCPR dan TFR menunjukkan keterkaitan: saat pemakaian kontrasepsi modern naik, angka kelahiran menurun. Namun penurunan mCPR di 2024 berpotensi menghambat penurunan TFR di masa depan. Pengasuhan & pembentukan karakter melonjak drastis



pada 2023, menunjukkan dampak kuat dari intervensi terstruktur, namun perlu pemeliharaan agar capaian tidak menurun. Secara umum, tren positif terjadi di tengah periode (2022–2023), sedangkan 2024 menunjukkan adanya tantangan mempertahankan capaian terutama di bidang KB.

h. Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	%	32	40,8	88,8	88,88	40
2	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Kinerja penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan sudah optimal dan stabil, namun pemanfaatan jaringan TIK masih memerlukan konsistensi, peningkatan kapasitas infrastruktur, serta keberlanjutan penggunaan agar capaian tinggi dapat dipertahankan.

i. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	%	65,64	66,63	66,94	67,70	65,23
2	Jumlah Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	10	n/a	13	15	17
3	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	n/a	n/a	3,30	5,82	10,16



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel	%	n/a	n/a	70	136	256
5	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%	91,15	86,95	86,95	92,25	99,74
6	Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Unit Usaha	60	1.380	1.718	604	139

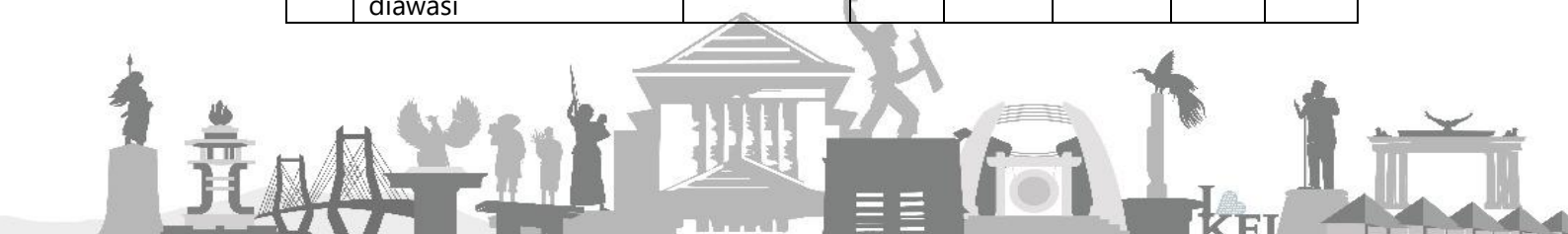
Sumber : Dinas Koperasi dan UKMKM, 2025

Ekosistem usaha dan koperasi menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas, kepatuhan regulasi, dan pengawasan kelembagaan. Sektor UMK tumbuh positif, meskipun ada fluktuasi, dan berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun, penurunan tajam pada jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha mengindikasikan tantangan serius dalam keberlanjutan dan daya saing usaha. Perlu strategi terpadu yang menghubungkan koperasi, UMK, dan program kewirausahaan, termasuk pendampingan berkelanjutan, akses pembiayaan, dan penguatan pasar agar pertumbuhan tidak hanya tinggi di awal, tetapi juga stabil dalam jangka panjang.

j. Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA	Dokumen	0	0	3	2	2
2	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)	Pelaku Usaha	17	22	35	765	714
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	91	90,02	93,08	93
4	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi	Pelaku Usaha	44	349	193	318	423



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase pertumbuhan investasi	%	20,90	-64,22	-46,87	108	-2,79

Sumber : Badan Penanaman Modal, 2025

Promosi investasi mulai terlihat sejak 2022, namun keberlanjutan dokumen peluang investasi masih terbatas. Minat investor melonjak drastis sejak 2023, yang diiringi peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha. Kepuasan layanan di bidang investasi sudah tinggi dan stabil. Pertumbuhan investasi masih berfluktuasi tajam, sehingga perlu strategi jangka panjang untuk menjaga tren positif

k. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	60	70	86,29	80,56	100
2	Tingkat Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	60	70	102,58	107,33	100
3	Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	70	81,32	90,00	n/a

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

Ketiga indikator (kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan) sama-sama menunjukkan tren peningkatan signifikan dibanding 2020. Sektor keolahragaan menjadi yang paling cepat melampaui target (>100%).

l. Bidang Statistik

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	%	11,54	42,31	73,08	125,9	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



Terjadi peningkatan signifikan dalam penyediaan data statistik sektoral dari tahun ke tahun, terutama lonjakan besar pada 2023 yang melampaui target. Capaian di atas 100% pada 2023 mengindikasikan adanya ekstra Kinerja di luar target awal, kemungkinan karena integrasi data lintas sektor dan percepatan digitalisasi. Posisi 100% di 2024 menandakan target terpenuhi secara optimal dan stabil.

m. Persandian

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	%	8,14	3,49	0,00	12,79	16,27

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Tingkat pemenuhan standar keamanan informasi masih rendah dan belum konsisten. meskipun ada tren peningkatan pada dua tahun terakhir, capaian 2024 masih menunjukkan perlunya penguatan sistem keamanan informasi dan audit berkala agar standar keamanan dapat dipenuhi secara stabil dan berkelanjutan.

n. Kebudayaan

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Cagar Budaya	64	65	14	68	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Pengelolaan cagar budaya belum konsisten dan cenderung tidak stabil. Perubahan besar dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemungkinan kendala kebijakan, pendanaan, atau manajemen yang membuat jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sulit dipertahankan. Upaya stabilisasi dan keberlanjutan program pengelolaan diperlukan agar warisan budaya tetap terjaga secara optimal.



o. Perpustakaan

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	52,90	54	56,88	62,88	62,58
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	17,51	18	49,77	63,97	58,55

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Minat membaca dan pembangunan literasi masyarakat menunjukkan kemajuan pesat dalam lima tahun terakhir, terutama pada periode 2020–2023. Namun, penurunan di 2024 mengindikasikan perlunya penguatan keberlanjutan program literasi dan pemerataan akses bahan bacaan agar tren positif tetap terjaga.

p. Kearsipan

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	10	20	75	75	51,74
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	27	30	33	67	11,97
3	Jumlah tata perizinan dan penggunaan arsip secara baik	Jumlah	0	0	0	0	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,, 2025



Pengelolaan arsip sempat mencapai capaian tinggi pada 2022–2023, namun mengalami kemunduran signifikan di 2024 terutama dalam aspek keberadaan dan keutuhan arsip. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengarsipan, pengamanan, dan regulasi akses agar arsip tetap terjaga sebagai bukti akuntabilitas dan aset negara.

2.1.3.11.3. Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

a. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	533.726,2	536.112,62	513.048,73	533.115,8*
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	208.922,724	278.134,47	251.727,62	261.166,28*
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	65	27,27	76,23	80,62

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Kinerja produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, relatif stabil dengan kecenderungan positif dalam jangka menengah. Kepatuhan pelaku usaha sempat melemah pada 2022, namun pulih cepat dan kini berada pada level tinggi. Fokus ke depan adalah menjaga konsistensi kepatuhan sambil mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

b. Pariwisata

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	57.527	318.349	387.589	385.653	402.843



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	2.010	1.450	7.422	11.946	13.098
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	55.517	316.899	380.167	373.707	389.745
4	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Maluku	%	1,6	3,12	1,49	1,61	1,45

Sumber : Dinas Pariwisata,, 2025

Sektor pariwisata Maluku pulih kuat pasca pandemi, baik dari sisi kunjungan total, wisatawan mancanegara, maupun domestik. Namun, pertumbuhan kunjungan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB, yang masih stagnan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi integrasi antara pariwisata dan ekonomi kreatif agar nilai tambah ekonominya meningkat seiring naiknya jumlah wisatawan.

c. Pertanian

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian
Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2019	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tukar Petani	%	99,01	102	102,5	106,35	99,56
2	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	10,31	10,38	9,77	9,57	11,31

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Sektor pertanian Maluku menunjukkan kontribusi ekonomi yang membaik pada 2024, namun tantangan kesejahteraan petani masih ada karena daya beli mereka melemah di tahun yang sama. Fokus ke depan perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan petani dan efisiensi biaya produksi agar kenaikan kontribusi sektor ke PDRB dapat sejalan dengan kesejahteraan petani.



d. Kehutanan

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Sektor Kehutanan	Persen	0,52	0,52	0,54	0,50	0,45*)
2	RHL Lahan Kritis	Ha	176,2	186,13	355,62	364,24	30
3	Pemberdayaan Masyarakat	KTH	6	16	24	20	12
4	Peningkatan Kualitas Hutan Melalui Tutupan Lahan	Persen	65,84	66,57	66,57	66,57	66,76**)

Sumber : Dinas Kehutanan,, 2025

Upaya peningkatan kualitas hutan secara tutupan lahan relatif terjaga, namun kontribusi ekonomi kehutanan, rehabilitasi lahan kritis, dan pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan tajam di 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali program rehabilitasi dan pemberdayaan agar fungsi ekologis dan kontribusi ekonomi kehutanan dapat meningkat secara seimbang.

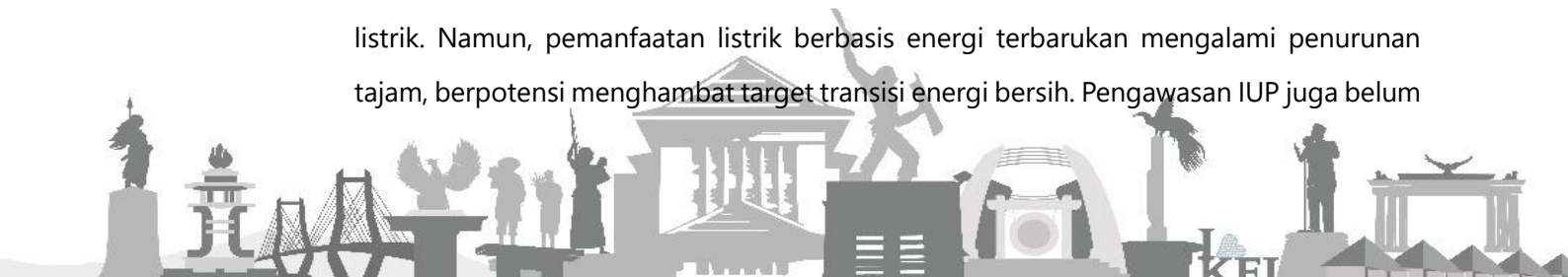
e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi					
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wilayah Ijin Usaha (WIUP) yang diterbitkan	Ijin	-	-	-	20	16
2	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan yang diawasi	Ijin	8	12	2	5	4
3	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik EBT	Unit	350	280	274	77	46
4	Rasio Elektrifikasi	%	95,58	96,75	97,49	98,79	99,66
5	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Unit	0	350	592	374	41

Sumber : Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025

Capaian elektrifikasi di Maluku sangat baik dengan hampir seluruh rumah tangga teraliri listrik. Namun, pemanfaatan listrik berbasis energi terbarukan mengalami penurunan tajam, berpotensi menghambat target transisi energi bersih. Pengawasan IUP juga belum



konsisten, sementara penerbitan WIUP baru mulai aktif pada 2023. Ke depan, perlu ada strategi revitalisasi pemanfaatan EBT dan penguatan pengawasan tambang agar capaian elektrifikasi dapat selaras dengan keberlanjutan lingkungan.

f. Perdagangan

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	
			2023	2024
1	Pemantauan Bahan Berbahaya	Jenis	4	4
2	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	128,12	13,11
3	Peningkatan Penanganan Konsumen	Laporan	5	6
4	Persentase Pengawasan Barang Beredar yang sesuai ketentuan	%	138,82	153,50
5	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai ketentuan yang berlaku	Komoditi	6	6
6	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	3,75	2,84

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,, 2025

Pengawasan kualitas barang dan kepatuhan di pasar menunjukkan tren positif, namun pertumbuhan ekspor non migas melambat drastis dan stabilisasi harga bahan pokok melemah. Hal ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok sambil menjaga kinerja pengawasan barang beredar.

Aspek pengawasan perdagangan menunjukkan kinerja positif, tercermin dari meningkatnya persentase barang beredar yang sesuai ketentuan serta meningkatnya laporan konsumen yang berhasil ditangani. Hal ini menandakan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi perdagangan. ekspor nonmigas mengalami penurunan yang signifikan, yang mengindikasikan perlunya strategi baru dalam pengembangan ekspor melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas dan nilai tambah komoditas, serta penguatan jaringan pasar luar daerah maupun luar negeri.



Beberapa indikator seperti pemantauan bahan berbahaya dan komoditi potensial sesuai ketentuan masih bersifat stagnan, sehingga diperlukan inovasi program dan perluasan cakupan kegiatan agar kinerja sektor perdagangan dapat meningkat lebih merata.

Secara keseluruhan, capaian kinerja perdagangan tahun 2024 telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pengawasan dan perlindungan konsumen, namun masih memerlukan upaya penguatan dalam stabilisasi harga dan pengembangan ekspor guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

g. Perindustrian

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi	
			2023	2024
1	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan	%	97,55	100
2	Nilai Ekspor Non Migas	US\$ (Juta)	57,58	45,9
3	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Orang	38,668	39,076

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Sarana Prasarana, dan Sistem Administrasi Pelaporan Terjadi peningkatan dari 97,55% (2023) menjadi 100% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola administrasi pada sektor perdagangan telah mencapai target maksimal, mencerminkan perbaikan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan program.

Nilai Ekspor Non-Migas Mengalami penurunan dari US\$ 57,58 juta (2023) menjadi US\$ 45,9 juta (2024). Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam kinerja ekspor daerah, baik karena faktor eksternal seperti permintaan global dan harga komoditas, maupun faktor internal seperti daya saing produk dan kapasitas produksi industri lokal. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non-Migas Terjadi peningkatan ringan dari 38.668 orang (2023) menjadi 39.076 orang (2024). Kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tetap mampu menyerap tenaga kerja, meskipun pertumbuhannya relatif lambat.



h. Transmigrasi

Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi
Tahun 2022 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing	Kelompok	5	15	40
2	Jumlah Kawasan/Unit Pemukiman Transmigrasi yang siap dibangun	Kawasan	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Kinerja pembangunan pada aspek pemberdayaan masyarakat transmigrasi menunjukkan hasil positif dan progresif, dengan peningkatan tajam jumlah kelompok masyarakat berdaya saing. Hal ini menandakan keberhasilan program dalam memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan transmigrasi.

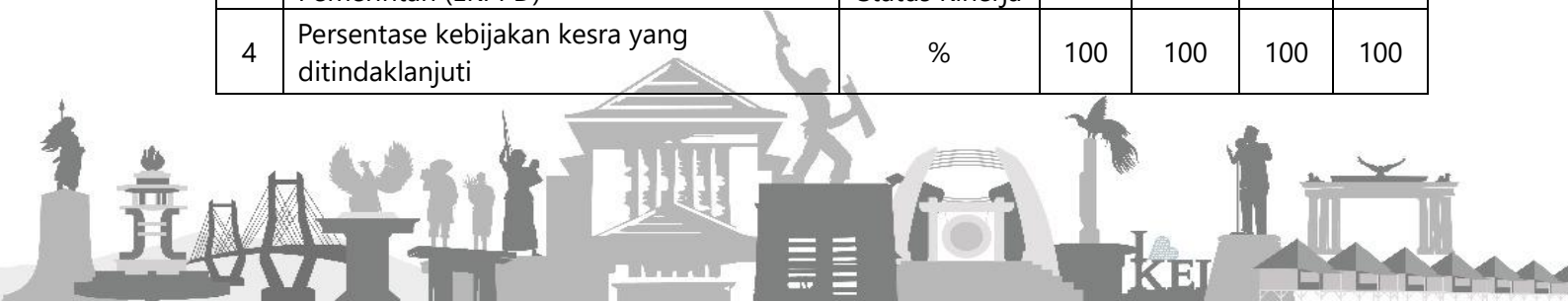
Namun, dari sisi pengembangan fisik kawasan transmigrasi, tidak ada kemajuan selama tiga tahun terakhir. Ini mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan dan dukungan lintas sektor agar penyiapan dan pembangunan kawasan baru dapat berjalan, sehingga keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan wilayah pemukiman yang memadai.

2.1.3.11.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Administrasi Pemerintahan

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Sekretariat Daerah
Tahun 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD yang mengumpulkan LAKIP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	60	61,03	84,92	68,00
3	Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD)	Skor dan Status Kinerja	2,81	2,72	-	-
4	Persentase kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
5	Persentase produk hukum yang disahkan	%	100	100	100	102
6	Persentase Penurunan Inflasi Daerah	%	4,01	6,28	2,81	1,28
7	Maturitas UKPBJ	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50	65	100	38

Kinerja pemerintah daerah secara umum menunjukkan stabilitas dalam tata kelola dan kebijakan publik, serta perbaikan signifikan dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kepatuhan administratif. Namun, perlu perhatian terhadap penurunan indeks kepuasan masyarakat dan penurunan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa, yang menjadi indikasi perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas manajemen pengadaan.

Dengan penguatan pada aspek tersebut, kinerja pemerintahan daerah berpotensi mencapai tingkat maturitas dan kualitas pelayanan yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Secara menyeluruh, capaian kinerja tahun 2021–2024 mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek pelayanan publik dan kompetisi pengadaan. Konsistensi pada indikator administratif menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas birokrasi dan efektivitas kebijakan. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada penguatan inovasi pelayanan publik, digitalisasi sistem pemerintahan, serta peningkatan kapasitas SDM agar capaian kinerja yang sudah baik dapat bertransformasi menjadi hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat secara berkelanjutan.

b. Perencanaan

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Perencanaan
Tahun 2022 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	2023	2024
			Realisasi		
1	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100
2	Status Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD yang Tepat Waktu	Ya/Tidak	Tidak	Ya	Ya



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	2023	2024
			Realisasi		
3	Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD	%	97	89,86	100
4	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	99,31

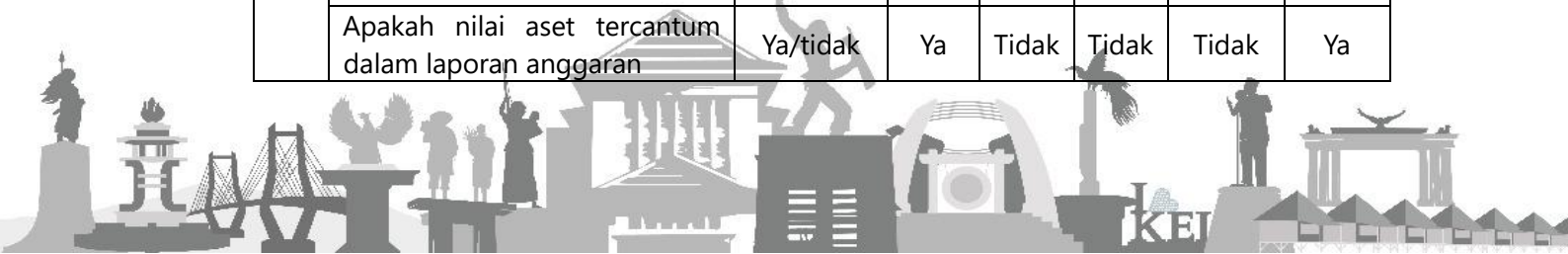
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan,, 2025

Perencanaan pembangunan daerah menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat baik terhadap RTRW dan konsistensi tinggi dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen sejak 2022 menjadi capaian penting, meski tetap perlu menjaga konsistensi agar tidak terjadi penurunan di masa depan.

c. Keuangan

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Keuangan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi				
1	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2
2	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	%	100	100	97,73	100	100
3	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	85	85	74,39	85	91,67
4	Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	97,73	100	100
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	%	1,9	0,09	0,01	0,09	-80,82
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	%	0,04	1,03	0,08	0,08	-78,47
7	Apakah ada daftar aset tetap	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi				
8	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,49	0,11	0,08	0,04	3,30

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara administratif tergolong baik dengan kepatuhan tinggi. Namun, terdapat deviasi realisasi belanja dan PAD yang cukup besar sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD, baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Perlu evaluasi mendalam terhadap perencanaan, realisasi, dan faktor eksternal yang memengaruhi Kinerja anggaran tahun tersebut.

d. Pendapatan

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pendapatan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi				
1	Persentase peningkatan PAD	%	-0,28	0,60	16,2	5,74	2,00
2	Standar kepatuhan Pelayanan publik	Nilai	-	B	B	E	A

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2025

Pertumbuhan PAD secara keseluruhan menunjukkan perbaikan, seiring dengan terjadi perbaikan pada standar kepatuhan pelayanan publik di 2024. Untuk itu mempertahankan kualitas pelayanan publik agar harus dapat dijaga sejalan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

e. Pengadaan

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pengadaan
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	
			Target	Realisasi
1	Persentase Jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	20	0
2	Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	60	65
3	Rasio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38	47



Pengelolaan proyek dan pengadaan menunjukkan perbaikan signifikan, dengan penyelesaian proyek lebih tepat waktu, meningkatnya persaingan sehat dalam pengadaan, dan bertambahnya nilai belanja melalui proses pengadaan formal. Ke depan, fokus dapat diarahkan pada meningkatkan efisiensi biaya dan kualitas hasil pengadaan seiring perbaikan kinerja ini.

f. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.89
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2022 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	2023	2024
			Realisasi		
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100
2	Provinsi Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Bappeda, 2025

Kinerja kelitbangan dan inovasi daerah sangat baik dan konsisten. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan status inovatif sambil mengembangkan inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

g. Kepegawaian

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Kepegawaian
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi				
1	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya	%	0	100	100	100	100
2	Persentase PNS yang meningkat Kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar	%	0	100	100	100	100
3	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang Terevaluasi Kinerjanya	%	0	100	100	100	30



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi				
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	0	100	100	100	100
5	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	0	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan Kasus Kepegawaian	%	0	100	100	100	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2025

Pengelolaan kepegawaian menunjukkan kemajuan besar sejak 2021, dengan seluruh aspek utama mencapai 100% capaian. Namun, penurunan tajam pada evaluasi kinerja pimpinan di 2024 menjadi perhatian serius, karena dapat memengaruhi kualitas manajemen dan akuntabilitas birokrasi. Diperlukan langkah cepat untuk mengembalikan evaluasi kinerja ke tingkat optimal.

h. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.91
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	0	100	99,91	100	100

Sumber : BPSDM, 2025

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang periode pengukuran. Pada tahun 2019 dan 2020, capaian masih berada pada angka 0% karena program peningkatan kapasitas aparatur belum terlaksana secara optimal. Memasuki tahun 2021, terjadi lonjakan capaian hingga 100% seiring dengan implementasi program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi yang terstruktur. Pada tahun 2022, capaian sedikit di bawah target yaitu 99,91% akibat adanya satuan kerja yang belum menyelesaikan seluruh program peningkatan kapasitas tepat waktu. Namun demikian, pada tahun 2023 hingga 2025, capaian kembali berada pada tingkat optimal 100%, yang mencerminkan keberhasilan konsistensi pelaksanaan program pengembangan kapasitas aparatur secara menyeluruh. Stabilitasnya capaian di angka maksimal dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem pembinaan dan pengembangan aparatur telah berjalan efektif dan berkelanjutan.



i. **Pengelolaan Perbatasan**

Tabel 2.92
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Perbatasan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi				
1	Persentase pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku	%	-	100	100	100	100

Sumber : Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, 2025

Persentase Pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku memperlihatkan capaian yang konsisten tahun hingga 2024, capaian berada di angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kabupaten perbatasan di Provinsi Maluku telah dikelola sesuai rencana dan target program. Konsistensi capaian ini mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta keberlanjutan program penguatan wilayah perbatasan yang dilaksanakan pemerintah daerah secara efektif.

j. **Pengelolaan Penghubung**

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pengelolaan Penghubung
Tahun 2022 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	2023	2024
			Realisasi		
1	Persentase Pelayanan Penghubung	Poin	88,30	100	100

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2025

Persentase Pelayanan Penghubung memperlihatkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun pertama pengukuran, capaian berada pada angka 88,30 poin, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target pelayanan telah terpenuhi namun masih memerlukan penguatan. Pada tahun berikutnya, capaian meningkat signifikan menjadi 100 poin dan berhasil dipertahankan hingga tahun terakhir pengukuran. Pencapaian maksimal yang konsisten ini mencerminkan bahwa mekanisme pelayanan penghubung telah berjalan efektif, memenuhi standar yang ditetapkan, serta mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan pihak terkait.



k. Inspektorat

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Inspektorat
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Realisasi				
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, Itjen dan Inspektorat	%	80	85	78,2	76,56	76,07 (BPK)
							90,00 (Itjen Kemendagri)
							77,00 (Inspektorat)
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Level	CC	CC	B	B	B (Sekretariat)
3	Persentase Implementasi MCP Korsupgah dan Stranas	%	75,00	78,00	73,49	50,63	62,72

Sumber : Inspektorat, 2025

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK, Itjen Kemendagri, dan Inspektorat menunjukkan variasi capaian antar lembaga pemeriksa. Untuk temuan BPK, capaian pada periode 2019–2023 masing-masing adalah 80%, 85%, 78,2%, 76,56%, dan 76,07%. Sementara itu, capaian penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen Kemendagri di tahun 2023 mencapai 90%, sedangkan Inspektorat sebesar 77%. Walaupun capaian Itjen tergolong sangat baik, hasil BPK dan Inspektorat masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam percepatan penyelesaian rekomendasi agar seluruh temuan dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai target.

Nilai akuntabilitas Kinerja pemerintah menunjukkan tren perbaikan yang cukup baik, dari kategori CC pada 2019–2020 menjadi B pada 2021–2022, dan tetap berada pada level B di tahun 2023 untuk Sekretariat. Perbaikan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kinerja, walaupun masih terdapat ruang penguatan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.

Persentase implementasi MCP Korsupgah KPK dan Stranas Pencegahan Korupsi mengalami fluktuasi capaian. Tahun 2019 tercatat sebesar 75,00%, meningkat menjadi 78,00% pada 2020, namun menurun menjadi 73,49% di 2021. Penurunan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 50,63%, sebelum kembali meningkat menjadi 62,72% pada 2023. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi dalam



koordinasi lintas sektor, monitoring, dan pengendalian program pencegahan korupsi agar capaian dapat stabil dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

I. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.95
Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2020 – 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme Dan Tindak Kriminalitas	%	100	100	100	100
2	Persentase Aspek Hak-Hak Politik	%	60	65	70	80
3	Persentase Aspek Kebebasan Sipil	%	83	85	87	90
4	Persentase Lembaga Demokrasi	%	68	71	74	80
5	Jumlah Koordinasi Dengan Instansi Terkait	Koordinasi	10	11	12	13
6	Jumlah Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan, Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba	Pembinaan	3	3	1	1
7	Jumlah Pembinaan Terhadap Paham Keagamaan Bermasalah	Pembinaan	6	9	2	1
8	Jumlah Pembinaan Kamtramtibmas	Pembinaan	13	14	1	2

Sumber : Kesbangpol,, 2025

Capaian urusan kesatuan bangsa dan politik, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku berhasil mempertahankan stabilitas keamanan, memperkuat kehidupan demokrasi, dan meningkatkan koordinasi antar instansi, meskipun terdapat penurunan jumlah pembinaan pada beberapa aspek yang berpotensi mencerminkan perbaikan situasi di lapangan.

2.2. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1. Realisasi APBD Periode Tahun 2020 – 2024

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,



pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah selama periode tahun 2020-2024, diwarnai oleh dinamika perubahan aturan dalam sistem pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pengganti PP nomor 58 tahun 2005 dan diikuti dengan Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Permendagri nomor 13 tahun 2006 serta pedoman-pedoman teknis pengelolaan keuangan lainnya telah menyebabkan daerah melakukan penyesuaian kembali struktur organisasi perangkat daerah dan penataan kembali sumber daya, program, kegiatan, urusan serta kewenangan baik provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, juga dengan diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah daerah perlu menyesuaikan Peraturan Daerah khususnya yang berkaitan dengan penerimaan daerah (pajak dan retribusi daerah) sehingga memberikan kejelasan kewenangan provinsi, serta peluang yang lebih dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan daerah dalam satu periode anggaran. Sumber pendapatan Provinsi Maluku selama tahun 2020-2024 berasal dari penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah; serta
- 3) Lain – lain pendapatan yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain – lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

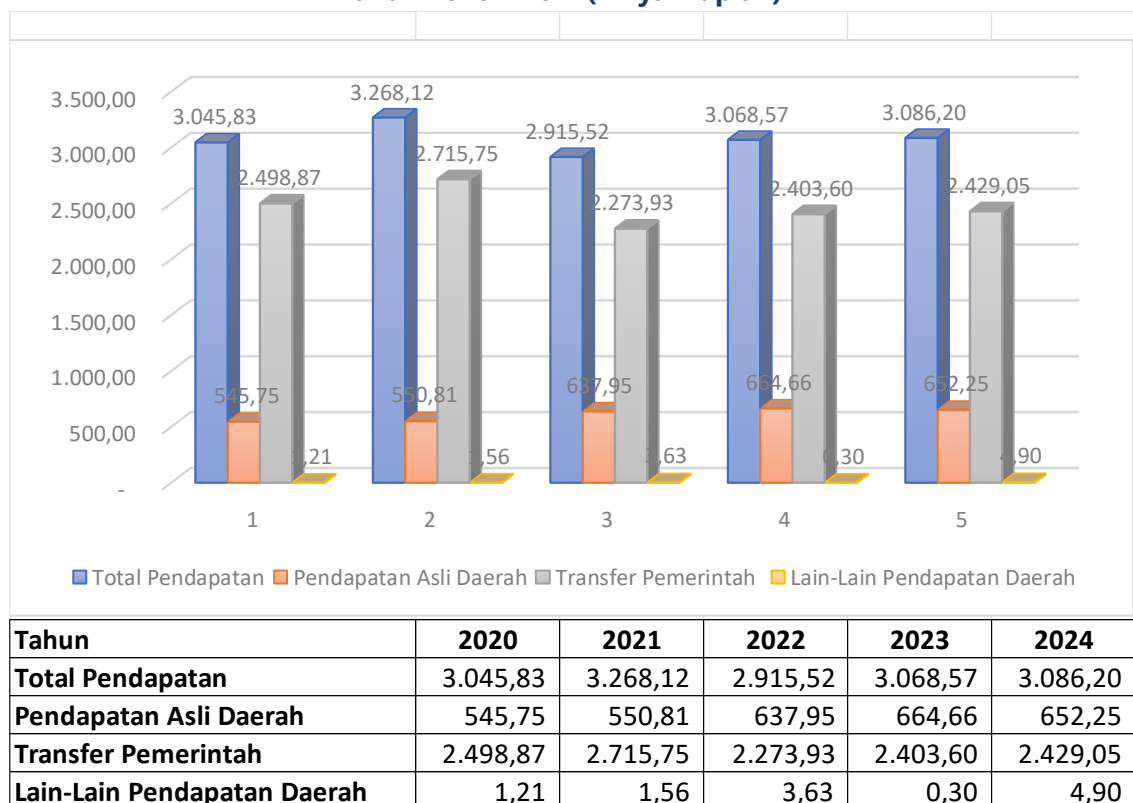
Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Secara umum selama periode tahun 2020-2024 realisasi pendapatan daerah cukup berfluktuasi dan cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah



mencapai 3,05 trilyun meningkat menjadi 3,09 triliun rupiah di tahun 2024 atau naik 1,33%. Berfluktuasinya penerimaan daerah ini sangat ditentukan oleh besarnya alokasi dana transfer dari pemerintah. Proporsi Pendapatan Daerah selama periode ini didominasi oleh Pendapatran Transfer dari Pemerintah Pusat (rata-rata 80,11%) kemudian diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (rata-rata 19,84%), dan dana dari sumber lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (rata-rata 0,05%). Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku selama tahun 2019-2023 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 2.19
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2020 – 2024(milyar rupiah)



Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2025

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah yang dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pergub Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Maluku, maka jenis pajak yang menjadi



sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

2) Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pergub Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Maluku, maka retribusi daerah provinsi meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

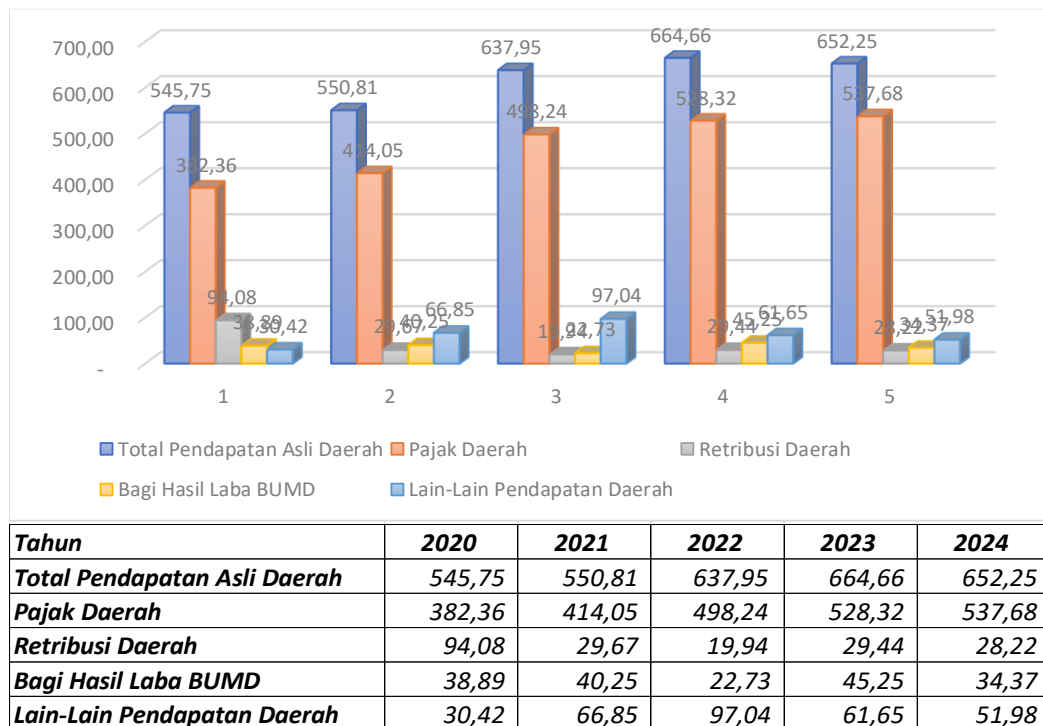
Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Maluku yaitu PT. Bank Maluku dan Maluku Utara, PD. Panca Karya dan PT. Dok dan Perkapalan Wayame.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diantaranya penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga Bank, tuntutan ganti rugi, pendapatan denda kelambatan pekerjaan, pendapatan BLUD, dan lain-lain.

Sumber utama PAD Provinsi Maluku selama periode tahun 2020 - 2024 berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 77,36%, diikuti Lain-lain PAD yang sah sebesar 10,09%; retribusi daerah sebesar 6,60%; dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5,95%. Proporsi pajak daerah terhadap PAD dalam kurun waktu tersebut, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 proporsi Pajak Daerah sebesar 70,06%, meningkat menjadi 82,43% di tahun 2024. Perkembangan realisasi PAD Provinsi Maluku tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.20
Perkembangan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)



Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2024

2. Dana Transfer Pemerintah

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil

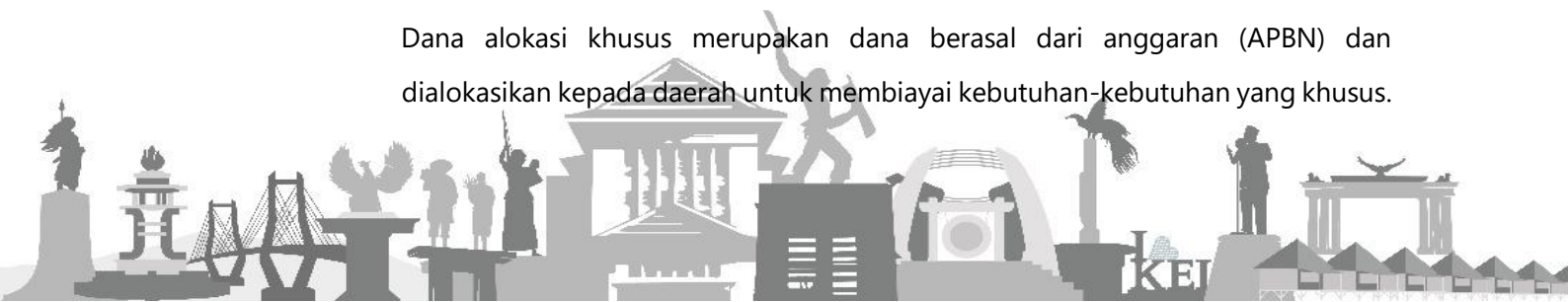
Dana Bagi Hasil Pajak bukan pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.



4) Dana Insentif Daerah

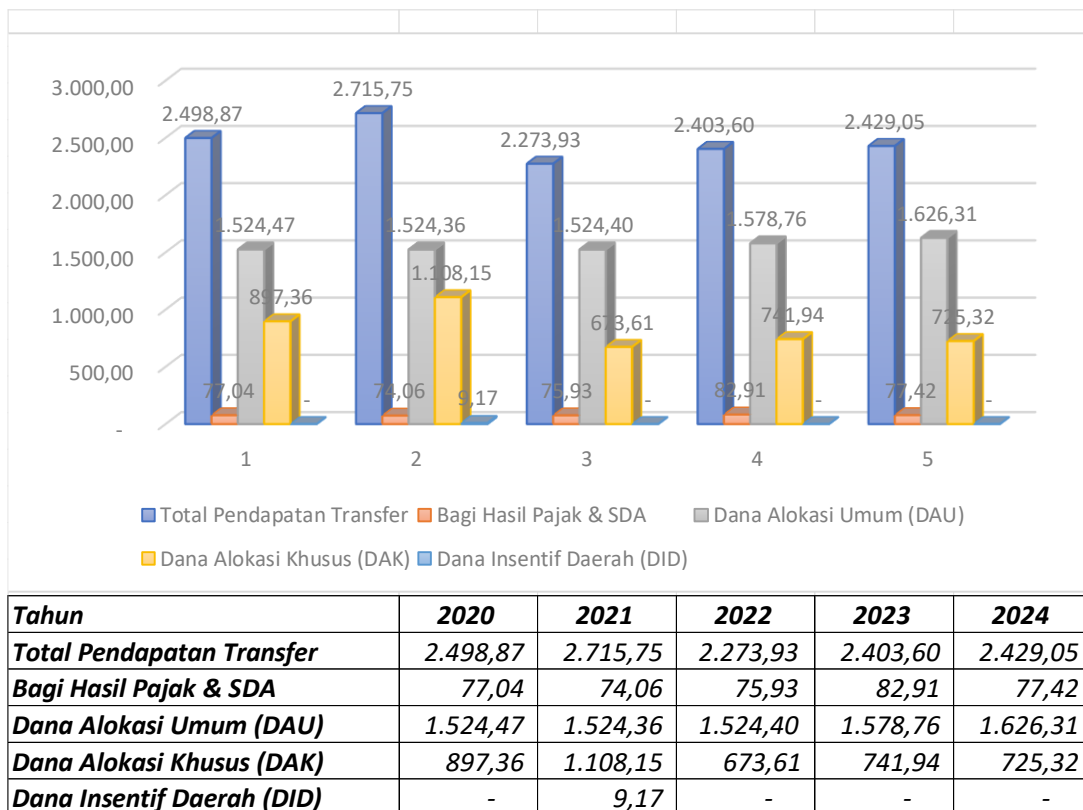
Dana Insentif Daerah, atau disingkat DID, adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja.

Selama kurun waktu 2020 – 2024 sumber penerimaan Dana Transfer Pemerintah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang menyumbang 63,13%, Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi sebesar 33,65%, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 3,14%, dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan yang hanya menyumbang 0,07% dari total Penerimaan Transfer Pemerintah. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai komponen terbesar dalam penerimaan Dana Transfer Pemerintah, selama periode 2020 – 2024 sangat fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 penerimaan transfer mencapai Rp.2,50 trilyun meningkat menjadi Rp. 2,72 trilyun di tahun 2021 (naik 8,68%), kemudian turun di tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024. Naiknya penerimaan Transfer di tahun 2021 disebabkan pada tahun tersebut penerimaan DAK mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 23,49% dari tahun sebelumnya. Proporsi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap penerimaan transfer dari pemerintah selama periode ini cenderung meningkat yaitu dari 61,01% di tahun 2020 meningkat menjadi 66,95% pada tahun 2024.

Penerimaan DAK di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari Rp.1,11 trilyun di tahun 2021 menjadi Rp.673,60 milyar atau turun 39,21%. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalihkan pembiayaan dana BOS SD dan SMP (kewenangan Kab/Kota) yang semula dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dialihkan ke kabupaten/Kota. Sementara itu untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak selama periode ini proporsinya cenderung relatif stabil pada kisaran 3 persen, hanya pada tahun 2021 yang proporsinya menurun menjadi 2,73%. Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah (DID), selama periode ini Provinsi Maluku hanya mendapat alokasi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 9,17 milyar. Secara umum Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bersifat dinamis dan fluktuatif menyesuaikan dengan kebijakan Nasional pada tahun berjalan. Perkembangan realisasi Dana Perimbangan Provinsi Maluku tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.21
Perkembangan Proporsi Dana Transfer Provinsi Maluku
Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)



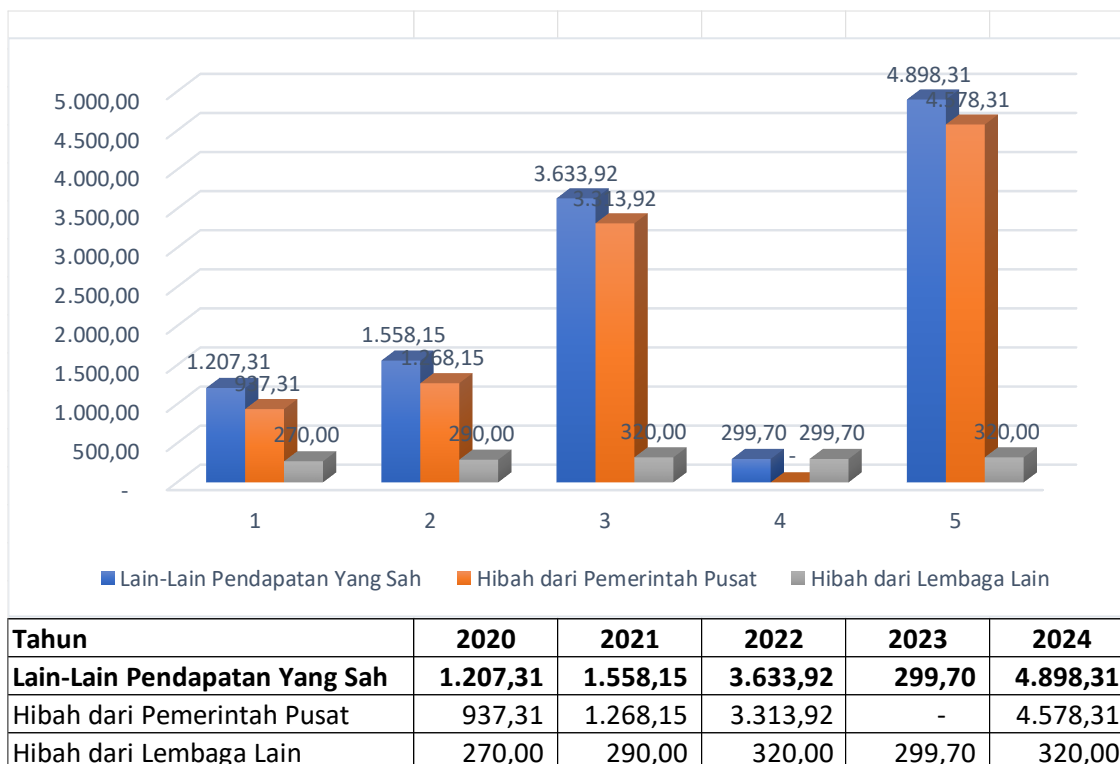
Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2025

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain penerimaan yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari: 1) pendapatan hibah diantaranya pendapatan hibah dari pemerintah, pendapatan hibah dari Badan/Lembaga swasta/organisasi, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan. Proporsi terbesar sumber lain-lain pendapat daerah yang sah tahun 2020-2024 adalah Hibah dari Pemerintah Pusat yang proporsinya mencapai sebesar 87,07%. Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.22
Perkembangan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Maluku
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2025

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah melalui rekening kas daerah yang merupakan pengurang terhadap ekuitas dan yang menjadi tanggung jawab daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2020-2024, Belanja Daerah mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, Dimana pada tahun 2020 belanja daerah sebesar Rp.2,99 trilyun meningkat 27,89% di tahun 2021. Peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 tidak terjadi di tahun berikutnya, dimana pada tahun 2022 belanja daerah turun sebesar 20,05% dan turun lagi 3,12% di tahun 2023. Sebaliknya pada tahun 2024 belanja daerah Kembali meningkat menjadi Rp. 3,04 trilyun atau naik 1,94% dari tahun sebelumnya. Tingginya kenaikan belanja daerah di tahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut Provinsi Maluku memperoleh pinjaman dari PT. SMI dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 683,36 milyar, dimana Rp. 508,36 milyar dialokasikan di tahun 2021. Gambaran realisasi belanja pemerintah provinsi Maluku sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.96
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020-2024
(ribu rupiah)

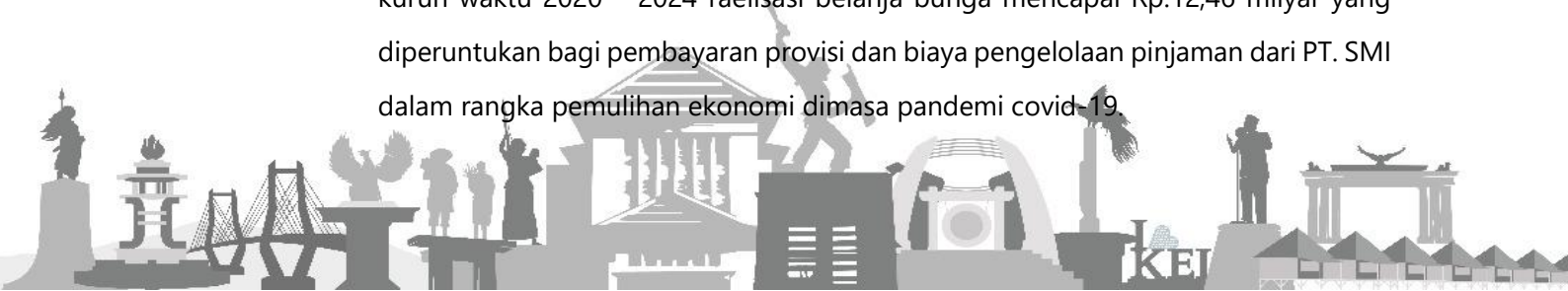
NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Operasi	2.095.676.284,07	2.532.850.638,31	2.210.972.754,70	2.202.590.434,28	2.362.256.828,48
2.	Bealnja Modal	591.452.177,03	1.003.241.925,08	561.815.853,46	502.704.093,99	384.445.739,99
3.	Belanja Tidak Terduga	93.681.264,25	63.047.802,31	17.420.246,26	-	77.331,00
4.	Belanja Transfer	205.330.026,21	219.726.735,59	262.966.510,00	279.508.876,73	295.655.060,81
	JUMLAH	2.986.141.771,56	3.818.869.122,29	3.053.177.386,42	2.984.805.428,00	3.042.436.984,29

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memberikan manfaat jangka pendek. Yang termasuk dalam belanja operasi antara lain terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai, dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp. 948,89 milyar meningkat menjadi sebesar Rp. 1.129,29 milyar di tahun 2024 atau naik 19,01% selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Selama kurun waktu 2020 – 2024 belanja pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.020,25 milyar. Belanja pegawai merupakan belanja yang memiliki proporsi terbesar dalam kelompok belanja operasi yaitu sebesar 44,43%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai manfaat kurang dari 12 bulan, baik itu barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah daerah maupun barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual ke Masyarakat/pihak ketiga. Selama periode ini, belanja barang dan jasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari Rp. 673,20 milyar pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 867,85 milyar di tahun 2024 atau naik 28,95% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Belanja barang dan jasa ini menduduki urutan kedua dalam proporsi kelompok belanja operasi yaitu 39,83%.
- 3) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Selama kurun waktu 2020 – 2024 raelisasi belanja bunga mencapai Rp.12,46 milyar yang diperuntukan bagi pembayaran provisi dan biaya pengelolaan pinjaman dari PT. SMI dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid-19.

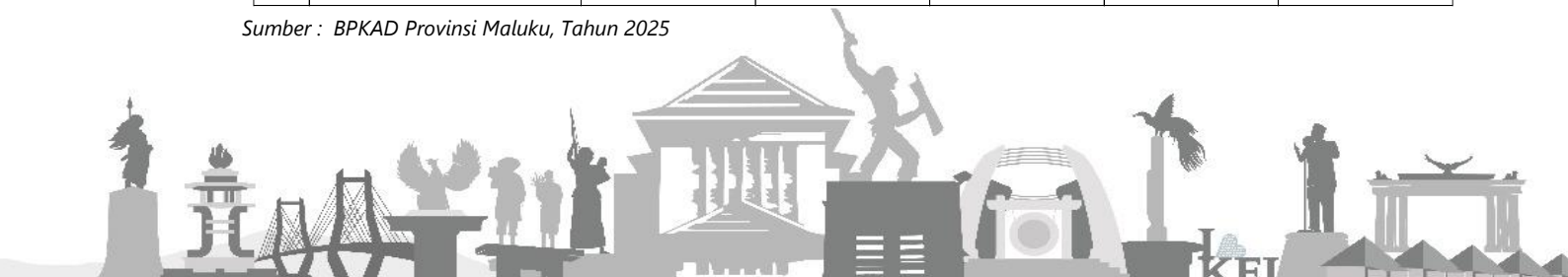


- 4) Belanja Subsidi, belanja ini dimaksudkan agar barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak ketiga baik itu swasta maupun BUMD/BUMN terjangkau oleh Masyarakat. Realisasi belanja subsidi selama periode 2020 – 2024 sebesar Rp. 1,73 milyar yang diperuntukan bagi subsidi angkutan bagi pelajar dan mahasiswa yang dikelola oleh PD. Panca Karya.
 - 5) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alokasi dari tahun 2020 – 2024 berfluktuatif, dan realisasi belanja hibah terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu kepada Lembaga dan organisasi kemasyarakatan dimasa pandemi Covid-19. Realisasi belanja hibah selama periode ini sebesar Rp. 1.758,87 milyar atau 15,42% dari total belanja operasi.
 - 6) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan untuk pemberian bantuan berupa uang atau barang dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2020 – 2024 sebesar Rp. 22,32 milyar dimana alokasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni Rp. 8,90 milyar. Alokasi belanja bantuan sosial ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengurangi kemiskinan dengan pemberian stimulan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Gambaran untuk rincian belanja operasi Pemerintah Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2.97
Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun 2020 – 2024 (ribu rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Pegawai	948.885.404,44	953.797.760,64	1.020.252.521,36	1.014.931.784,54	1.129.294.947,96
2.	Belanja Barang dan Jasa	673.020.748,12	995.571.805,60	1.028.190.201,02	977.167.767,66	867.848.630,91
3.	Belanja Bunga	1.295.000,00	8.128.609,92	1.264.217,83	1.011.374,22	758.530,70
4.	Belanja Subsidi	-	323.585,40	488.165,80	254.567,06	667.985,83
5.	Belanja Hibah	471.393.321,50	571.365.265,35	151.872.107,04	203.945.367,43	360.292.649,81
6.	Belanja Bantuan Sosial	1.081.810,00	3.663.611,40	8.905.541,64	5.279.573,38	3.394.083,27
	JUMLAH	2.095.676.284,07	2.532.850.638,31	2.210.972.754,70	2.202.590.434,28	2.362.256.828,48

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025



2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan di Daerah. Realisasi Belanja Modal selama periode 2020 – 2024 mencapai Rp. 3.042,05 milyar atau 19,15% dari total belanja daerah selama 5 tahun terakhir. Belanja Modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- 1) Belanja Modal Tanah, merupakan belanja yang dianggarkan dalam rangka pengadaan tanah/lahan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 realisasi belanja modal tanah mencapai Rp. 50,06 milyar atau 1,65% dari total realisasi belanja modal. Realisasi belanja modal tanah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 33,98 milyar atau 67,87% dari total belanja modal tanah.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk pengadaan asset berupa mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang memiliki nilai yang signifikan serta masa penggunaan lebih dari 12 bulan. Dalam 5 tahun terakhir ini (2020-2024) realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai Rp. 582,83 milyar atau 19,16% dari total realisasi belanja modal.
- 3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung, merupakan pengeluaran untuk pengadaan bangunan dan gedung yang digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung dalam kurun waktu 2020-2024 mencapai Rp. 1.084,26 milyar atau 35,64% dari total belanja modal.
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan jalan. Irigasi dan jaringan yang merupakan kewenangan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama periode 2020-2024 mencapai Rp. 1.279,27 milyar dan merupakan alokasi tertinggi dalam belanja modal yaitu 42,05% dari total belanja modal.
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan dalam rangka pengadaan asset tetap lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Alokasi belanja modal asset tetap lainnya selama periode 2020-2024 mencapai Rp. 45,63 milyar atau 1,50% dari total belanja modal.



- 6) Belanja Modal Aset Lainnya, digunakan untuk pengadaan asset yang tidak berbentuk fisik seperti belanja modal untuk pengadaan aplikasi atau software. Selama periode 2020–2024 belanja modal ini terrealisasi sebesar Rp. 1,61 milyar atau 0,05% dari total belanja modal yaitu pada tahun 2023 dan 2024. Rincian Belanja Modal daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Modal Tanah	8.329.000,00	33.977.682,50	1.517.567,13	6.236.590,00	-
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.270.426,78	158.549.632,67	102.302.887,16	104.177.305,28	75.529.559,32
3.	BM Bangunan dan Gedung	153.051.642,97	200.748.943,62	290.634.634,59	232.721.421,21	207.105.737,21
4.	BM Jalan, irigasi dan Jaringan	250.172.216,46	607.004.434,97	165.583.655,70	155.848.680,86	100.659.192,96
5.	BM Aset Tetap Lainnya	37.628.890,82	2.961.231,31	1.777.108,88	2.258.974,65	1.003.620,50
6.	BM Aset Lainnya	-	-	-	1.461.122,00	147.630,00
	JUMLAH	591.452.177,03	1.003.241.925,08	561.815.853,46	502.704.093,99	384.445.739,99

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Belanja Tidak Terduga ini ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Alokasi Belanja Tidak Terduga selama tahun 2020 – 2024 mencapai Rp. 174,23 milyar atau 1,10% dari total belanja daerah. Belanja tidak terduga ini digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan dan pemulihan di masa Pandemi Covid-19 dan belanja dalam rangka penanganan bencana.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer, merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Selama periode 2020 – 2024 realisasi belanja transfer mencapai Rp. 1.263,19 milyar atau 7,95% dari total belanja daerah. Alokasi Belanja Transfer ini diperuntukan bagi belanja meliputi :



pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, penerimaan pinjaman, penerbitan surat obligasi, penerimaan atas pembiayaan BLUD. Penerimaan pembiayaan di Provinsi Maluku tahun 2020 – 2024 hanya berasal dari dua sumber yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan pinjaman yang masing-masing kontribusinya sebesar 60,64% dan 39,36% dari total penerimaan pembiayaan selama 5 tahun. Perkembangan rincian penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2020-2024 (ribu rupiah)

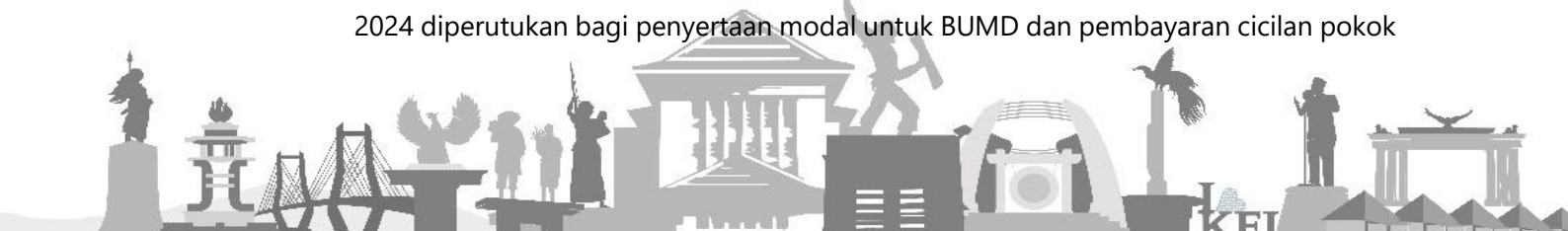
NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	PEMBIAYAAN PENERIMAAN	338.326.478,09	851.689.064,36	294.939.158,24	152.779.266,27	98.370.079,27
1.	SiLPA	163.326.478,09	343.328.072,88	294.939.158,24	152.779.266,27	98.370.079,27
2.	Pinjaman Daerah	175.000.000,00	508.360.991,47	-	-	-
3.	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-	-
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.775.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	138.172.225,63	136.672.225,63
1.	Penyertaan Modal	32.775.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	-
2.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	136.672.225,63	136.672.225,63
C.	PEMBIAYAAN NETTO	305.551.478,09	845.689.064,36	290.439.158,24	14.607.040,63	(38302146,36)

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025

d. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi), Pembayaran Cicilan Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan.

Pengeluaran pembiayaan di Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020 – 2024 diperutukan bagi penyertaan modal untuk BUMD dan pembayaran cicilan pokok



utang kepada PT. SMI yang dimulai pada tahun 2023. Penyertaan modal BUMD sebagai upaya untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha. Berkenaan dengan hal tersebut pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan fluktuatif sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pengeluaran pembiayaan ini meningkat signifikan di tahun 2023, karena pada tahun tersebut Pemerintah Provinsi Maluku mulai membayar Cicilan Pokok Pinjaman PEN sesuai perjanjian pinjaman dengan PT. SMI

2.2.2. Neraca Daerah

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan bangunan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara lain utang kepada entitas pemerintah lain, utang kepada lembaga keuangan, dan utang perhitungan pihak ketiga. Sedangkan Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Contoh ekuitas dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan ekuitas dana yang diinvestasikan.

Gambaran tentang Neraca Daerah Provinsi Maluku selama periode Tahun 2020 – 2024 dapat diikuti pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.101
Realisasi Neraca Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
I.	ASET	5.799.738.610.056,32	6.511.969.943.448,61	6.691.296.783.226,09	6.883.236.642.447,14	7.246.068.663.803,98
A.	Aset Lancar	400.383.404.746,18	377.506.066.718,70	205.608.271.849,61	253.498.326.337,18	260.547.619.943,27
1.	Kas di Kas Daerah	322.528.844.257,40	283.119.628.305,70	124.524.151.284,81	92.809.037.913,73	1.025.056.664,60
2.	Kas di Bendahara Penerima	2.031.500,00	1.546.500,00	3.032.000,00	-	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	585.779.170,55	572.365.849,69	909.775.959,29	1.217.876,00	396.280.601,00
4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	13.951.954.279,67	5.206.869.085,63	26.075.212.464,72	3.966.396.284,93	2.476.623.259,36
5.	Kas Dana BOS	6.324.513.402,96	6.123.203.447,27	1.366.583.082,00	179.755.516,00	173.714.941,00
6.	Kas Lainnya	2.198.007.719,08	1.492.637.600,00	-	1.414.889.557,11	1.403.271.170,15
7.	Piutang Pajak	13.978.947.152,00	17.203.376.653,00	21.613.699.227,00	21.892.819.071,00	22.011.254.565,00
8.	Penyisihan Piutang Pajak	- 3.552.227.636,00	- 3.551.251.635,90	- 3.957.153.765,50	- 4.008.318.220,00	- 4.593.882.983,95
9.	Piutang Retribusi	8.641.429.500,00	29.881.922.108,00	2.659.189.800,00	3.690.905.600,00	13.173.483.060,00
10.	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	-	- 210.780.450,00
11.	Piutang Bagian Laba BUMD	588.379.544,40	188.379.544,40	1.414.231.258,50	544.027.767,25	544.027.767,25
12.	Penyisihan Piutang Bagian Laba BUMD	- 169.014.940,11	- 18.837.954,44	-	-	-
13.	Piutang PAD yang Sah	22.343.269.679,85	12.414.055.209,85	17.554.284.300,85	25.470.158.046,85	29.282.021.445,85
14.	Penyisihan Piutang PAD yang Sah	- 804.741.328,00	- 1.520.472.686,60	- 892.613.898,50	- 902.662.735,00	- 966.396.880,00
15.	Piutang Lain-lain	3.548.471.117,98	4.066.498.102,98	3.944.377.989,98	3.910.787.279,98	3.889.287.279,98
16.	Penyisihan Piutang Lain-lain	- 3.020.125.583,73	- 3.013.959.358,63	- 3.379.486.582,38	- 3.403.075.248,98	- 3.392.325.248,98
17.	Belanja dibayar dimuka	1.359.769.167,17	829.862.818,00	608.546.262,00	260.801.735,00	69.574.302.919,33
18.	Persediaan	11.878.117.742,96	24.510.243.129,75	13.164.442.466,84	107.671.585.893,31	125.761.681.832,68
B.	Investasi Jangka Panjang	645.669.779.869,58	675.223.349.219,68	756.569.868.868,81	767.932.786.333,70	819.492.327.914,65
1.	Investasi Non Permanen	7.760.316.523,94	7.678.182.923,94	8.389.448.787,00	7.740.592.981,44	7.784.562.981,44
a.	Dana Bergulir	45.581.000.000,00	45.581.000.000,00	45.581.000.000,00	45.581.000.000,00	45.581.000.000,00
b.	Penyisihan Dana Bergulir	- 37.820.683.476,06	- 37.902.817.076,06	- 37.191.551.213,00	- 37.840.407.018,56	- 37.796.437.018,56
2.	Investasi Permanen	637.909.463.345,64	667.545.166.295,74	748.180.420.081,81	760.192.193.352,26	811.707.764.933,21
C.	Aset Tetap	4.035.418.010.963,88	4.768.030.755.525,69	4.804.537.854.292,13	4.941.619.687.468,72	5.245.142.175.789,47
1.	Tanah	975.282.109.780,00	1.009.631.427.284,00	987.336.342.704,00	992.189.242.511,62	1.055.233.166.328,84
2.	Peralatan dan Mesin	803.609.285.146,30	958.765.550.778,67	1.101.017.751.120,97	1.238.381.238.366,57	1.404.816.714.537,76
3.	Gedung dan Bangunan	1.214.399.118.664,79	1.417.975.215.677,54	1.626.206.253.027,90	1.871.012.748.447,92	2.287.505.237.885,02
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.524.738.240.712,48	4.291.136.987.051,48	4.378.543.831.705,48	4.534.794.220.206,59	4.677.202.709.369,11
5.	Aset Tetap Lainnya	21.764.468.399,94	27.235.726.499,94	32.518.166.579,94	38.293.394.254,94	51.151.057.872,94
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.770.613.048,44	36.183.190.625,44	48.687.795.625,44	48.687.795.625,44	58.297.527.652,29
7.	Akumulasi Penyusutan	- 2.635.145.824.788,07	- 2.972.897.342.391,38	- 3.369.772.286.471,60	- 3.781.738.951.944,36	- 4.289.064.237.856,49
D.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
E.	Aset Lainnya	718.267.414.476,68	691.209.771.984,54	924.580.788.215,54	920.185.842.307,54	920.886.540.156,59
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	1.149.721.159,05
2.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.280.008.000,00	2.280.008.000,00	2.280.008.000,00	2.280.008.000,00	2.280.008.000,00
3.	Aset Tidak Berwujud	2.022.207.000,01	3.533.977.864,01	7.337.596.066,01	8.454.499.066,01	8.863.534.066,01
4.	Aset Lain-lain	713.965.199.476,67	685.395.786.120,53	914.963.184.149,53	909.451.335.241,53	908.364.457.931,53
5.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	228.819.000,00
II.	KEWAJIBAN	294.698.355.838,03	829.822.406.553,89	860.912.955.471,99	751.449.910.819,33	726.612.787.998,93
A.	Kewajiban Jangka Pendek	119.698.355.838,03	169.240.114.795,89	314.224.189.629,99	341.433.370.609,33	453.268.473.420,93
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	140.012.475,00	84.454.949,00	99.488.524,00	1.217.873,00	12.035.701,00
2.	Pendapatan Diterima di Muka	74.918.439,51	79.431.736,17	100.431.736,00	1.459.200.000,00	39.000.000,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	22.778.699.716,00	136.672.225.632,00	136.672.225.632,00	136.672.225.632,00
4.	Utang Beban	117.241.108.204,44	144.089.976.594,72	176.639.720.137,99	193.991.120.412,33	270.746.531.126,93
5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.242.316.719,08	2.207.551.800,00	712.323.600,00	9.309.606.692,00	45.798.680.961,00
B.	Kewajiban Jangka Panjang	175.000.000.000,00	660.582.291.758,00	546.688.765.842,00	410.016.540.210,00	273.344.314.578,00
1.	Utang Dalam Negeri	175.000.000.000,00	660.582.291.758,00	546.688.765.842,00	410.016.540.210,00	273.344.314.578,00
III.	EKUITAS DANA	5.505.040.254.218,29	5.682.147.536.894,74	5.830.383.827.754,10	6.131.786.731.627,81	6.519.455.875.805,05
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.799.738.610.056,32	6.511.969.943.448,63	6.691.296.783.226,09	6.883.236.642.447,14	7.246.068.663.803,98

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025



pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Rasio Hutang terhadap Aset Provinsi Maluku Tahun 2020-2024

Tahun	Total Kewajiban	Total Aset	Rasio
1	2	3	4
2020	294.698.355.838,03	5.799.738.610.056,32	0,05
2021	829.822.406.553,89	6.511.969.943.448,61	0,13
2022	860.912.955.471,99	6.691.296.783.226,09	0,13
2023	751.449.910.819,33	6.883.236.642.447,14	0,11
2024	726.612.787.998,93	7.246.068.663.803,98	0,10

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025

- b) Rasio Ekuitas Terhadap Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Pada tahun 2024 rasio ekuitas dana terhadap modal Pemerintah Provinsi Maluku sebesar 0,90 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 0,95. Dengan demikian nilai ekuitas dana masih di bawah total aset sehingga semakin mandiri tidak tergantung pada hutang. Untuk mengetahui rincian rasio ekuitas terhadap total aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Provinsi Maluku Tahun 2020-2024

Tahun	Total Ekuitas	Total Aset	Rasio
1	2	3	4
2020	5.505.040.254.218,29	5.799.738.610.056,32	0,95
2021	5.682.147.536.894,74	6.511.969.943.448,61	0,87
2022	5.830.383.827.754,10	6.691.296.783.226,09	0,87
2023	6.131.786.731.627,81	6.883.236.642.447,14	0,89
2024	6.519.455.875.805,05	7.246.068.663.803,98	0,90

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025



2.2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

2.2.3.1 Asumsi-Asumsi

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan saat ini dan masih adanya sasaran RPJPD 2005-2025 yang belum tercapai, maka di perlukan kondisi dan situasi yang dapat menjadi pemicu dan pendorong dalam melaksanakan pembangunan sebagai berikut:

- a. Stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan global, regional, dan nasional semakin mantap sebagai prasyarat kondusivitas pelaksanaan pembangunan;
- b. Kebijakan perundang-undangan untuk mitigasi dampak kecepatan kemajuan teknologi informasi dapat diterbitkan sehingga teknologi informasi dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan baik nasional maupun daerah;
- c. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku diasumsikan berjalan sesuai dengan perencanaan dan didukung dengan penganggaran secara konsisten. PSN diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah;
- d. Dana perimbangan diasumsikan akan terus meningkat, dengan besaran yang dapat diprediksikan dengan acuan realisasi tahun sebelumnya.

Ekonomi Maluku tahun 2024 tumbuh sebesar 5,34 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan IV 2024 yang sebesar 6,52 persen (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pertambangan dan penggalian sebesar 9,95%; selanjutnya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,92%. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan pada perekonomian Maluku juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,90%.

Dari sisi penggunaannya, konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi menjadi 4,93% (yoy) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan terjaganya daya beli. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4,43% (yoy) seiring dengan peningkatan kinerja ekspor dan belanja modal Pemerintah. Ekspor tumbuh sebesar 8,28% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat. Sementara itu, konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) dan konsumsi Pemerintah tumbuh melambat masing-masing menjadi 9,98% (yoy) dan 1,42% (yoy) seiring dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Inflasi tahunan pada gabungan kota di Provinsi Maluku yang cukup terkendali di triwulan I tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan pada triwulan II tahun 2024. Indeks harga



komoditas untuk gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan II 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 3,63% (yoy). Capaian inflasi tersebut masih lebih rendah dari capaian pada triwulan II tahun 2023 yang mengalami inflasi sebesar 6,07% (yoy). Angka inflasi triwulan II tahun 2024 yang sebesar 3,63% tersebut menempatkan Provinsi Maluku kedalam 10 Provinsi yang angka inflasi tertinggi jika dibandingkan dengan capaian inflasi nasional yang sebesar 2,51% (yoy). Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi senantiasa berkooordinasi dengan TPID kabupaten/kota dan stakeholder terkait dalam Upaya pengendalian inflasi di Provinsi Maluku sehingga pada bulan Juli 2024 inflasi dapat ditekan pada kisaran 2,71%. Melalui berbagai Upaya dan terobosan yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yaitu dengan “Pasar Pengendalian Inflasi (PASADLI)” diharapkan kedepan inflasi Maluku pada tahun 2024 ini dapat terjaga dan berada pada rentang sasaran inflasi nasional tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Prospek perekonomian Maluku tahun 2025, tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional saat ini serta kondisi lingkungan ekonomi global. Saat ini kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian akibat meningkatnya tensi geopolitik, serta kebijakan nasional untuk percepatan Pembangunan IKN akan tetap mempengaruhi strategi kebijakan fiskal di level nasional. Untuk itu, diperlukan strategi dan Upaya yang dapat dilaksanakan agar dapat berdampak pada kondusifnya dan produktivitasnya perekonomian Maluku, dilakukan antara lain melalui:

- a. Peningkatan dan keterpaduan yang sinergis pada belanja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota utamanya untuk mendorong pembiayaan pembangunan pada sektor utama pendukung PDRB dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kegiatan perekonomian yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat;
- b. Dukungan kebijakan pemerintah dan perbankan pada pengembangan produk UMKM dan IKM Jawa Tengah yang bernilai ekspor disertai dengan peningkatan kualitas produk;
- c. Peningkatan realisasi investasi dan pengembangan kawasan industri di kabupaten/kota yang potensial menyerap banyak tenaga kerja;
- d. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat dan antara wilayah upaya yang telah dilakukan antara lain: penumbuhan dan pengembangan berbagai kawasan ekonomi pendukung pengembangan perwilayahan; pengembangan infrastruktur lintas wilayah dan sektor industri pengolahan, pertanian dan pariwisata; dukungan kebijakan daerah yang sinergis



2) Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah:

- a) Peningkatan kualitas dan jenis pelayanan umum kepada masyarakat wajib pajak;
- b) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- c) Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- d) Kemitraan BUMD dengan dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi;
- e) Penetapan tarif pajak dan penyesuaian dasar dan pengenaan pajak daerah;
- f) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang diarahkan untuk pencapaian visi daerah dalam 5 tahun ke depan yaitu ***"Transformasi Menuju Maluku yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"*** yang diupayakan melalui 7 Misi yang dikenal dengan **Sapta Cita** yaitu :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran melalui Kebijakan yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif;
3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah;
5. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana;
6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah; dan
7. Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Semangat Hidup Orang Basudara, Berbasis Adat Budaya dan Kearifan Lokal serta Ketaatan dan Kepatuhan Terhadap Hukum.



Tabel 2.105
Proyeksi Pendapatan Provinsi Maluku
Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	TARGET APBD 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	682.570.784.882,89	725.033.444.363,70	748.403.331.514,77	785.171.920.458,53	812.764.271.570,79	867.577.148.217,45
1.	Pajak Daerah	474.167.049.624,00	536.314.670.056,34	538.760.331.388,63	550.001.330.897,20	562.446.751.289,58	604.630.257.636,30
2.	Retribusi Daerah	33.046.434.640,17	34.953.162.024,00	40.512.013.452,93	43.854.089.749,68	44.330.091.229,31	46.657.421.018,85
3.	Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	45.000.000.000,00	47.350.000.000,00	52.210.000.000,00	59.780.000.000,00	62.320.000.000,00	65.850.000.000,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	130.357.300.618,72	106.415.612.283,37	116.920.986.673,21	131.536.499.811,65	143.667.429.051,90	150.439.469.562,30
II.	PENDAPATAN TRANSFER	2.157.438.895.000,00	2.514.951.050.000,00	2.670.608.163.000,00	2.804.710.314.000,00	2.983.508.106.000,00	3.163.757.506.000,00
1.	Bagi Hasil Pajak dan SDA	78.843.770.000,00	81.846.604.000,00	82.565.071.000,00	83.290.721.000,00	94.023.628.000,00	99.724.810.000,00
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.584.180.021.000,00	1.710.591.973.000,00	1.785.827.613.000,00	1.834.681.959.000,00	1.915.435.468.000,00	1.984.687.121.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	494.415.104.000,00	722.512.473.000,00	802.215.479.000,00	886.737.634.000,00	974.049.010.000,00	1.079.345.575.000,00
4.	Dana Insentif						
III.	LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH	321.000.000,00	350.000.000,00	375.000.000,00	400.000.000,00	425.000.000,00	450.000.000,00
1.	Hibah Pemerintah Pusat						
2.	Hibah Dari Pihak Lain	321.000.000,00	350.000.000,00	375.000.000,00	400.000.000,00	425.000.000,00	450.000.000,00
	JUMLAH	2.840.330.679.882,89	3.240.334.494.363,70	3.419.386.494.514,77	3.590.282.234.458,53	3.796.697.377.570,79	4.031.784.654.217,45

Sumber: Bapenda Provinsi Maluku, Tahun 2025

Adapun belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja/*money follow programe* yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mengutamakan belanja pemenuhan pelayan dasar serta mampu memberikan dampak tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat tahun 2025 – 2030 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	TARGET APBD 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL	2.559.609.626.651,82	2.806.351.269.642,52	2.981.636.417.223,46	3.283.381.545.053,78	3.483.867.960.402,79	3.710.230.354.534,40
2.	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.732.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.	BELANJA TRANSFER	134.791.774.235,18	289.810.999.089,18	291.077.851.659,31	296.900.689.404,75	302.829.417.168,00	311.554.299.683,04
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.709.133.400.887,00	3.111.162.268.731,70	3.292.714.268.882,77	3.600.282.234.458,53	3.806.697.377.570,79	4.041.784.654.217,44

Sumber: Bappeda Provinsi Maluku, dan BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2025



2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Infrastruktur Wilayah dan Dasar Belum Merata dan Memadai

Sebagai Provinsi yang bercirikan kepulauan Maluku diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya bagaimana memastikan pembangunan yang merata pada setiap wilayah pulau, yakni bagaimana infrastruktur wilayah maupun dasar dapat terpenuhi dan memberikan kemudahan akses baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Maluku berjalan lambat, ditandai dengan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur, baik fisik seperti jalan, bandara, dan listrik, maupun layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menyulitkan Maluku untuk mendorong pengembangan struktural secara cepat dan efektif. Sampai dengan tahun 2023 kuantitas jalan Provinsi Maluku dari total kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku mencapai 996,63 km dan tersebar di setiap wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kuantitas jalan pada baru mencapai 50,18%. Sehingga masih membutuhkan upaya – upaya penanganan infrastruktur jalan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jalan masih harus terus dilakukan.

Kondisi geografis Maluku yang bercirikan kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar jalan darat sebagai penghubung antarwilayah. Saat ini, terdapat 101 pelabuhan laut dan penyeberangan di seluruh kabupaten/kota di Maluku, namun masih banyak wilayah yang belum terjangkau akibat keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan armada kapal. Tingginya kebutuhan layanan transportasi laut menjadikan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan, penyeberangan, serta perluasan jejaring transportasi, baik laut maupun udara, sebagai prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Maluku.

Ketersediaan infrastruktur dasar di Maluku masih sangat terbatas. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih dan listrik layak masih rendah, sementara sarana perkotaan seperti drainase dan pengelolaan sampah belum berfungsi optimal. Di pedesaan, jaringan irigasi dan jalan desa membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas. Keterbatasan ini menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat transformasi perekonomian, menghalangi kemajuan dan kemandirian wilayah.



2.3.1.2 Kesenjangan Antar Wilayah Masih Tinggi

Kesenjangan ekonomi antarwilayah menjadi salah satu indikator utama ketimpangan regional. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan yang seimbang. Pendekatan pertumbuhan harus fokus pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis keunggulan wilayah di setiap kabupaten/kota. Sementara itu, pendekatan pemerataan harus mengutamakan pengembangan wilayah penyangga di sekitar pusat-pusat pertumbuhan, guna memastikan kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Pengembangan pusat-pusat perekonomian baru harus menjadi agenda prioritas dalam RPJMD 2025–2029 untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah di Maluku, yang merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi terendah terhadap PDB nasional. Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perekonomian baru berkat kekayaan sumber daya alam dan lokasi strategisnya. Melalui pengembangan agroindustri, hilirisasi pertambangan, dan pengembangan pariwisata, diharapkan perekonomian Maluku dapat meningkat. Namun, kesenjangan antarwilayah masih tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dengan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pesat sementara lainnya tertinggal karena pertumbuhannya yang lambat

2.3.1.3 Aksesibilitas Layanan Kesehatan Belum Optimal

Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau dan terpisah oleh laut menjadi tantangan besar dalam pembangunan sektor kesehatan. Distribusi layanan kesehatan menjadi sulit dan mahal, dengan waktu respons yang lambat dalam keadaan darurat serta keterlambatan pengiriman obat atau peralatan medis. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah telah mengembangkan pendekatan gugus pelayanan kesehatan dengan 56 Puskesmas pusat gugus yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Namun, sejumlah masalah masih menghambat, seperti keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah 3T, akses transportasi darat, laut, dan udara yang belum memadai, serta terbatasnya jaringan komunikasi. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, kurangnya jumlah tenaga kesehatan, dan terbatasnya sarana serta prasarana kesehatan juga menjadi kendala. Rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan ini berisiko menurunkan indikator Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi.



2.3.1.4 Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Belum Merata

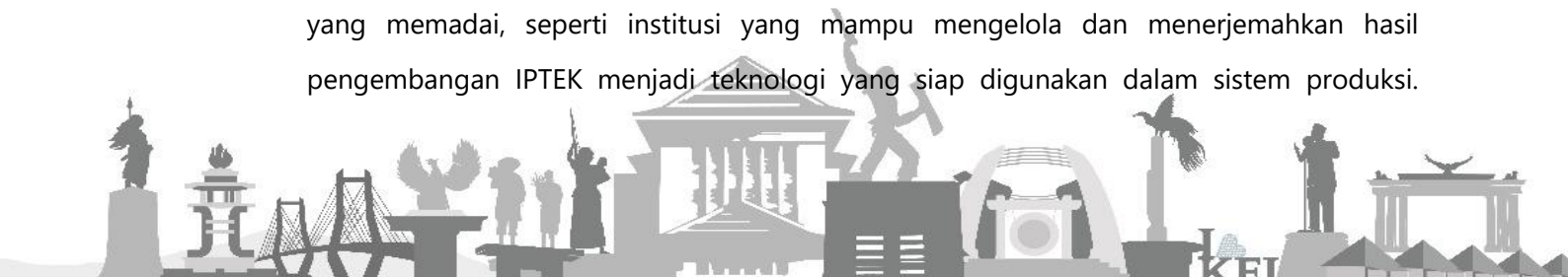
Pendidikan adalah kunci utama keberhasilan pembangunan, sehingga tantangan untuk menyediakan pendidikan yang relevan dan berdaya saing terus menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat. Di Maluku, salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan akses pendidikan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas guru, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Mutu pendidikan di Maluku masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain, dengan disparitas kualitas dan aksesibilitas yang signifikan antara desa dan kota. Di desa, fasilitas pendidikan masih kurang memadai, dan jumlah tenaga pengajar jauh lebih sedikit dibandingkan di kota. Oleh karena itu, permasalahan pendidikan ini harus segera diatasi dengan solusi yang tepat dan efektif.

Pada tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Maluku hanya mencapai 14 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Beberapa akar masalah rendahnya rata-rata lama sekolah ini antara lain rendahnya pemerataan akses layanan pendidikan dan rendahnya angka partisipasi murni masyarakat. Angka partisipasi sekolah terendah terjadi pada jenjang SMA atau sederajat, yang hanya mencapai 79,06 persen.

Selain itu, akses pendidikan di Maluku masih perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan angka kelulusan di jenjang perguruan tinggi atau kelanjutan pendidikan. Dari sisi kualitas, lebih dari 50 persen guru di Maluku masih belum memenuhi standar kualifikasi yang memadai, dan hanya sekitar 30 persen gedung sekolah yang dalam kondisi baik. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan belum memenuhi target, karena mutu layanan dasar seperti literasi, numerasi, dan karakter peserta didik masih rendah, sementara kompetensi guru dan tenaga kependidikan memerlukan perhatian serius.

2.3.1.5 Pengembangan IPTEKIN dan Riset Belum Optimal

Rendahnya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Provinsi Maluku dalam menghadapi perkembangan nasional dan global menjadi salah satu masalah utama, dengan Indeks Inovasi Maluku pada 2023 hanya mencapai 36,97. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEK yang menghubungkan kapasitas penyedia IPTEK dengan kebutuhan pengguna. Masalah ini juga terlihat dari kurangnya infrastruktur IPTEK yang memadai, seperti institusi yang mampu mengelola dan menerjemahkan hasil pengembangan IPTEK menjadi teknologi yang siap digunakan dalam sistem produksi.

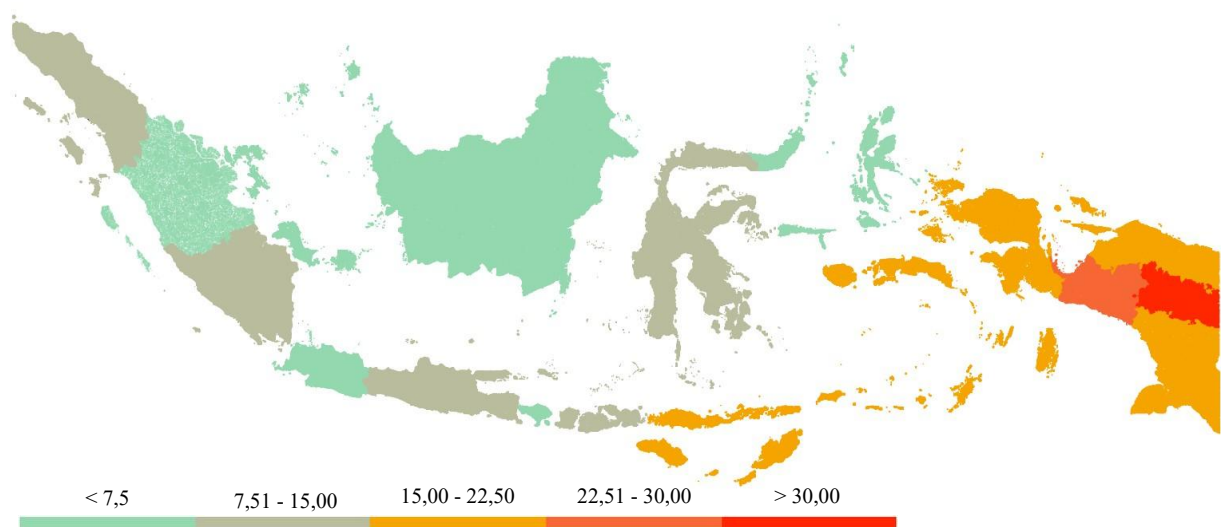


daya ekonomi, meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini masih bergantung pada sektor primer, terutama sektor perikanan dan pertanian. Untuk mendorong perkembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan, diperlukan transformasi dari sektor primer ke sektor non-primer, yaitu sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan melalui industrialisasi serta memperluas kontribusi sektor jasa dalam perekonomian Maluku.

2.3.1.7 Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Masih Tinggi

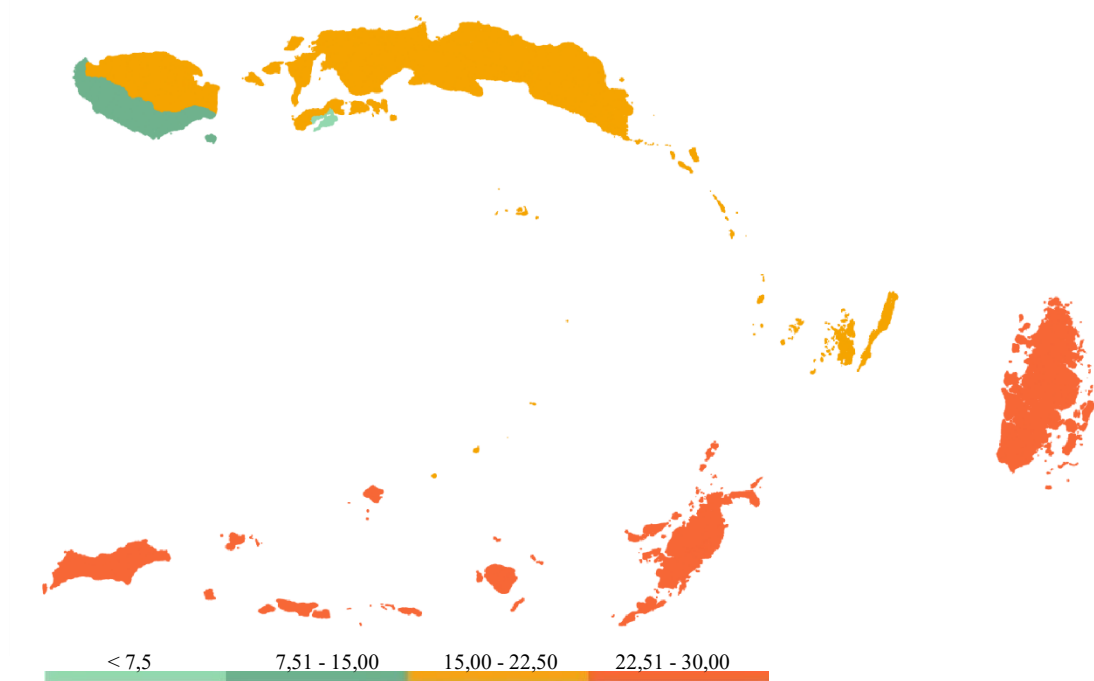
Kemiskinan adalah salah satu masalah utama dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial di Maluku yang harus diatasi melalui pembangunan dan pengembangan ekonomi yang terarah. Keberhasilan pemerintah daerah dapat diukur dari kemampuannya mengurangi kemiskinan sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan yang rendah mencerminkan kesejahteraan penduduk yang lebih baik.



Gambar 2.23
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (Semester 1, 2024)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Namun, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih menjadi tantangan besar karena masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, meskipun menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Maluku turun 1,64 poin, dari 17,69% pada Maret 2019 menjadi 16,05% pada 2024. Meski demikian, sebagian besar kabupaten/kota di Maluku masih mencatat angka kemiskinan di atas 20%.

Dari 11 kabupaten/kota, hanya Kota Ambon (5,13%) dan Kabupaten Buru Selatan (14,91%) yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata provinsi.

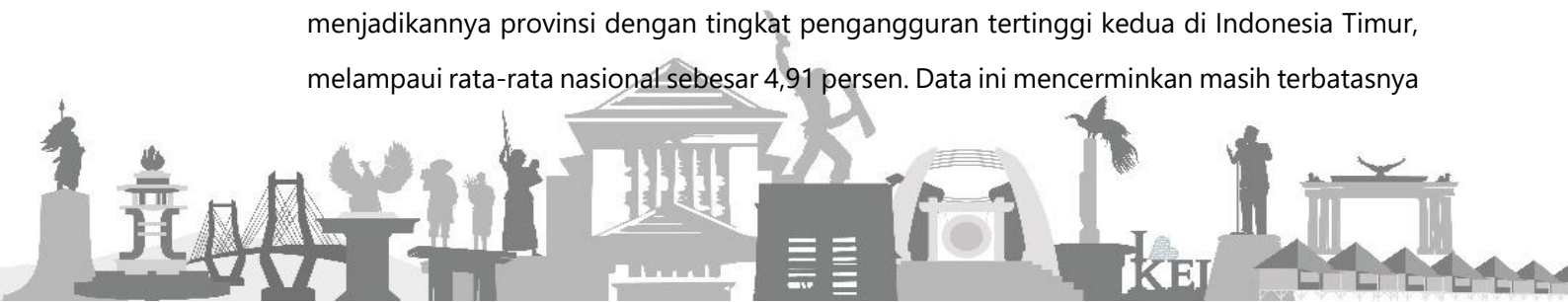


Gambar 2.24
Persentase Penduduk Miskin di Maluku (Semester 1, 2024)
Sumber: Badan Pusat Statistik Maluku 2024

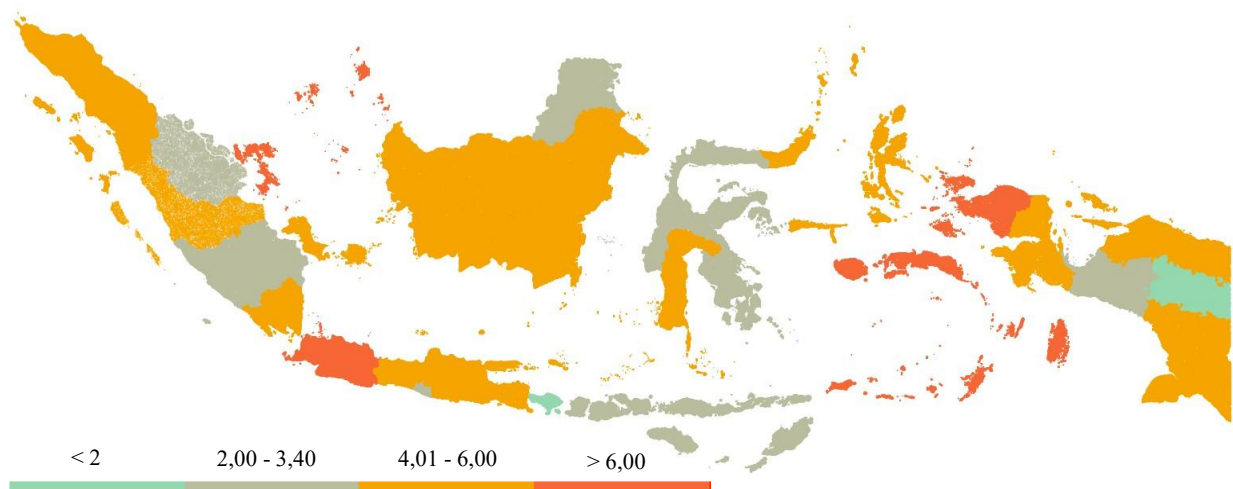
Kemiskinan adalah masalah kompleks dan multidimensi yang tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat miskin akibat terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga terlihat dari kurangnya penyediaan rumah layak huni, layanan air minum dan sanitasi yang aman, serta masih banyaknya permukiman kumuh yang menjadi tempat tinggal penduduk miskin. Tantangan lainnya adalah minimnya infrastruktur wilayah, seperti transportasi, komunikasi, dan kelistrikan, yang menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan aksesibilitas di daerah kepulauan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

2.3.1.8 Tingkat Pengangguran Masih Tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Provinsi Maluku. Pada Agustus 2024, TPT Maluku mencapai 5,96 persen, menjadikannya provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Indonesia Timur, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,91 persen. Data ini mencerminkan masih terbatasnya



kontribusi Maluku dalam menurunkan angka pengangguran nasional. Meski begitu, TPT Maluku menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 6,08 persen. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan untuk kedua gender. TPAK laki-laki naik dari 74,16 persen pada 2023 menjadi 76,84 persen pada 2024, dan TPAK perempuan meningkat dari 53,30 persen menjadi 54,50 persen. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 56.367 orang, atau 5,96 persen dari total angkatan kerja sebanyak 949.084 orang.



Gambar 2.25
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia (Agustus, 2024)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk, yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah angkatan kerja. Tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan terus meningkat. Masalah ini diperparah oleh rendahnya kapasitas dan kapabilitas angkatan kerja, terutama akibat rendahnya tingkat pendidikan. TPT di kalangan lulusan SMA mencapai 8,94 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan lulusan SD ke bawah yang hanya 2,69 persen. Data ini mencerminkan kekurangan dalam pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, yang menyebabkan rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja terampil. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang melibatkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Maluku.



Selain itu, jumlah dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan SMK di Maluku masih belum memadai. Rasio tenaga pendidik terhadap jumlah siswa tidak seimbang, dan kompetensi tenaga pendidik belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan tenaga kependidikan juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Maluku.

2.3.1.9 Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial

Provinsi Maluku, dengan keanekaragaman budaya yang kaya, sering menjadi sorotan dalam perbincangan masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan arus globalisasi membawa tantangan besar dalam mempertahankan warisan budaya tersebut. Perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi semakin mempermudah masyarakat terpapar budaya luar, yang berpotensi menggerus keberlangsungan budaya lokal-bagian integral dari identitas bangsa.

Indeks Pembangunan Kebudayaan Maluku tahun 2023 mencapai 59,38, sedikit lebih tinggi dibanding capaian nasional. Meski demikian, upaya untuk terus meningkatkannya menjadi tantangan tersendiri. Pendidikan, yang memiliki peran sentral dalam pelestarian budaya, menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang semakin terpengaruh norma global cenderung mengalihkan perhatian dari kearifan lokal, sehingga nilai budaya lokal terancam tergerus.

Selain itu, pembinaan politik daerah kepada masyarakat masih terbatas, khususnya peran partai politik dalam membentuk pendidikan karakter politik yang adaptif dan terbuka. Hal ini penting untuk mengurangi sikap primordial yang berpotensi menciptakan intoleransi antar kelompok masyarakat. Upaya ini harus menjadi prioritas guna menjaga kerukunan dan keberlanjutan budaya di Maluku.

2.3.1.10 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Serta Ancaman Bencana

Tantangan pembangunan di Maluku salah satunya adalah degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan sosial dan ekonomi yang kurang berkelanjutan. Ketahanan ekologi, yaitu kemampuan ekosistem untuk bertahan, beradaptasi, dan mendukung kehidupan jangka panjang, menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Upaya menjaga keanekaragaman hayati, menyeimbangkan ekosistem, dan menerapkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Tantangan lain yang mendesak adalah meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap



kerentanan bencana alam serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku semakin merasakan dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu udara dan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi. Fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk, yang hingga kini belum diimbangi dengan upaya penurunan emisi yang efektif. Langkah nyata diperlukan untuk menekan laju emisi dan memitigasi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat Maluku.

2.3.1.11 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih belum optimal, terutama dari aspek transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas Kinerja. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hanya dapat terwujud melalui pelibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan berperan penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Aparatur pemerintahan memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan. Profesionalitas aparatur dapat dicapai dengan menempatkan individu sesuai kompetensi dan kapasitasnya. Namun, masih terdapat kekosongan jabatan dan kurangnya pelaksanaan penilaian mendalam sebelum penempatan aparatur di seluruh jenjang jabatan struktural. Manajemen talenta ASN yang belum maksimal menjadi kendala utama dalam menciptakan aparatur yang profesional dan berKinerja tinggi.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan untuk memastikan pencapaian target yang telah direncanakan. Meskipun hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan nilai baik, pencapaian tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh perlunya perbaikan berkelanjutan serta penguatan komitmen manajemen dalam meningkatkan manajemen Kinerja secara menyeluruh.

Di sisi lain, tantangan besar dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan memberikan perlindungan bagi anak belum sepenuhnya teratasi. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta anak masih lemah, perencanaan dan penganggaran berbasis gender belum optimal, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Selain



itu, pemberdayaan perempuan belum maksimal, dan pemahaman yang komprehensif terhadap isu gender di kalangan masyarakat maupun pemerintah masih rendah.

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Isu Global

a. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global dan memberi dampak besar dan luas. Peningkatan temperatur, berubahnya siklus hidrologi maupun cuaca ekstrem yang berdampak multidimensional bukan hanya lingkungan namun juga sosial dan ekonomi. Kondisi ini harus direspon dan disikapi oleh semua negara baik melalui mitigasi maupun adaptasi agar lebih tangguh menghadapi dampak yang diakibatkannya.

Perubahan iklim berdampak besar pada pembangunan daerah, terutama bagi wilayah-wilayah yang bercirikan kepulauan. Dampak perubahan iklim mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti, banjir, kekeringan dan badai. Wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil, akan menjadi sangat rentan dengan kondisi seperti ini. Bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti ini akan memperlambat dan mengganggu perekonomian wilayah, meningkatkan biaya untuk penanggulangan atau pemulihan pasca bencana. Bahkan, bencana juga dapat merusak infrastruktur terbangun seperti jalan, pelabuhan serta fasilitas umum lainnya. Berubahnya siklus hidrologi seperti pola curah hujan, temperatur dan kualitas air laut akan mempengaruhi pembangunan sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan. Produktivitas pertanian akan terganggu bahkan menurun karena kekeringan, banjir maupun musim yang berubah. Begitu halnya dengan sektor perikanan, dimana kenaikan suhu permukaan air akan merusak ekosistem terumbu karang dan mempengaruhi jenis-jenis ikan ekonomis penting.

b. Transformasi Digital

Digitalisasi telah merambah kehidupan manusia, dan ketergantungan terhadap teknologi digital semakin meningkat hampir di semua sektor seperti industri, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan otomatisasi semakin meningkat, yang mengubah struktur ekonomi dan pekerjaan secara global. Transformasi digital global berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan nasional maupun daerah. Transformasi digital selain menciptakan peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri yang perlu dikelola agar proses pembangunan dapat beradaptasi dan berkembang secara optimal.



Digitalisasi dapat mempercepat pembangunan dengan meningkatkan efisiensi, memperluas akses terhadap berbagai layanan, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, digitalisasi juga menuntut infrastruktur internet yang kuat, literasi digital masyarakat yang tinggi, serta perlindungan terhadap keamanan data dan privasi. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang mendorong pembangunan digital secara inklusif agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Energi Terbarukan

Berubahnya orientasi global untuk penggunaan energi terbarukan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini, sebagai akibat kebutuhan akan energi yang bersih dan berkelanjutan. Perubahan ini akan sangat mempengaruhi pembangunan nasional maupun daerah, terutama dalam kebijakan, investasi maupun prioritas pembangunan.

Di banyak negara penerapan kebijakan dan insentif untuk mendorong percepatan proses adopsi energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi. Sementara itu, kemajuan teknologi telah berhasil menurunkan biaya produksi energi terbarukan, membuatnya lebih kompetitif dibandingkan sumber energi fosil. Hal ini mendorong lebih banyak investasi dan adopsi energi terbarukan di berbagai sektor. Pemanfaatan energi terbarukan bukan hanya semata-mata sebagai program dekarbonisasi, namun merupakan langkah-langkah inisiatif untuk memasuki mencapai target transisi energi pada periode rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 - 2045 dan target "*net zero emissions*" dalam beberapa dekade ke depan, yang merupakan kesepakatan global dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

d. Ekonomi Hijau/Biru

Pendekatan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) menjadi sangat signifikan di tengah upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi dampak perubahan iklim. Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial dan secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Aspek penting dalam ekonomi hijau adalah efisiensi energi, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian ekosistem. Sementara, ekonomi biru difokuskan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut. Sektor-sektor yang relevan dalam ekonomi biru meliputi perikanan, pariwisata laut, energi kelautan, dan transportasi laut.



Secara keseluruhan, penerapan ekonomi hijau dan biru menuntut daerah untuk bertransformasi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kebijakan, regulasi, dan insentif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk mengarahkan sektor-sektor terkait agar dapat mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam proses pembangunan.

2.3.2.2 Isu Nasional dan Daerah

Isu pembangunan nasional dan provinsi bersifat sinergis dan saling mempengaruhi. Pembangunan di tingkat provinsi merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga kebijakan dan program di tingkat provinsi harus selaras dengan arah kebijakan nasional. Pentingnya teridentifikasi isu-isu pembangunan nasional dan provinsi bertujuan agar terintegrasinya arah kebijakan pembangunan, selarasnya program dan prioritas pembangunan, potensi dan kebutuhan daerah menjadi menjadi basis kebijakan pembangunan, alokasi anggaran terkait dengan pembiayaan pembangunan sesuai kewenangan dan percepatan pembangunan untuk daerah-daerah yang masih tertinggal.

Tabel 2.108 Isu Strategis Nasional dan Daerah

RPJP Nasional 2025 - 2045	RPJPD Provinsi Maluku 2025 - 2045	RPJMN Wilayah Maluku 2025 - 2029
Rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Tingkat Perekonomian Rendah	Masih minimnya hilirisasi komoditas unggulan pada sektor perikanan, pertanian (cengkeh) dan pertambangan (minyak)
	- Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah - IPTEKIN dan Riset Lemah	Belum optimalnya diversifikasi ekonomi khususnya pada pengembangan sektor pariwisata
Kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	SDM Berdaya Saing Terbatas	Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (tenaga pendidik dan kesehatan, sarana prasarana dan pengembangan kurikulum yang relevan)



RPJP Nasional 2025 - 2045	RPJPD Provinsi Maluku 2025 - 2045	RPJMN Wilayah Maluku 2025 - 2029
Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal	
Supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh	Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial	Belum optimalnya penguatan ketahanan bencana dan perencanaan penanggulangan bencana
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah	Masih minimnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekologis, pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengelolaan SDA)
Ketimpangan antarwilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	Kesenjangan antarwilayah	Belum optimalnya infrastruktur transportasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau
Konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

2.3.3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029

2.3.3.1 Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar Serta Infrastruktur Transportasi Dan Telekomunikasi Untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau

Provinsi Maluku memiliki posisi strategis dalam konstelasi global maupun nasional. Akan tetapi dibalik itu, sebagai Provinsi kepulauan dengan berbagai karakteristik kewilayahannya, Provinsi Maluku dituntut untuk mampu menjaga konektivitas antarwilayah di setiap daerah pulau sehingga perlu disiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya menjamin konektivitas khususnya melalui penguatan infrastruktur dasar, transportasi dan telekomunikasi, yang menjadi tulang punggung konektivitas antara wilayah di Provinsi Maluku.

Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan konektivitas antar pulau meliputi 5 hal pokok, antara lain profil Maluku dalam konstelasi nasional maupun global, variabel konektivitas sebagai kunci peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi wilayah,



identifikasi dan analisis peta prioritas (kebijakan) pembangunan konektivitas antar pulau, peluang dan kendala dalam optimalisasi pembangunan konektivitas, serta rekomendasi dan langkah strategis dalam rangka optimalisasi pembangunan konektivitas. Dalam melakukan pembangunan konektivitas tentunya memiliki berbagai peluang dan kendala yang dihadapi, antara lain kondisi geospasial Maluku sebagai daerah yang bercirikan kepulauan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan untuk pembangunan konektivitas di Maluku.

Sementara dari aspek sosial ekonomi Maluku masih dihadapkan pada disparitas, biaya logistik tinggi dan aspek pembiayaan langkah strategis lain adalah dengan melakukan pengembangan infrastruktur transportasi laut yang harus didasarkan pada identifikasi dan prioritas yang jelas dengan melibatkan peran swasta mengingat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dana untuk pembangunan konektivitas. Selain itu, diperlukan harmonisasi kebijakan atau aturan, koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan harus ditingkatkan dan dibina secara berkesinambungan. Konektivitas juga harus diwujudkan dengan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, melalui peningkatan infrastruktur yang memadai maupun kualitas layanan yang dimiliki pada wilayah kabupaten/kota. Sehingga daerah dapat siap dalam memasuki era konvergensi dimana perpaduan teknologi dan rantai nilai (value chain) industri telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran, konten beserta industri ikutannya menghasilkan suatu mata rantai baru yang lebih efisien dimana membuat masyarakat memperoleh layanan yang terpadu sesuai kebutuhan.

2.3.3.2 Kesenjangan Antar Wilayah

Kesenjangan antarwilayah di Provinsi Maluku menjadi signifikan karena dipengaruhi oleh keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial. Untuk itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Kesenjangan antarwilayah di Maluku juga tercermin pada PDRB yang berbeda antar kabupaten/kota, ruang fiskal antar daerah kabupaten/kota, kepemilikan infrastuktur baik dasar dan kewilayahan serta akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan.



2.3.3.3 SDM Yang Berdaya Saing Terbatas

Minimnya sumber daya manusia adalah masalah yang serius pada banyak daerah di Indonesia termasuk di Maluku. Hal ini terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap pelatihan, serta masalah kesehatan yang seringkali menghambat perkembangan sumber daya manusia. Dampak dari minimnya sumber daya manusia ini sangat signifikan pada pembangunan salah satunya adalah rendahnya produktivitas ekonomi.

Terdapat beberapa hal yang harus menjadi kebijakan dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, pertama, adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah daerah dalam hal ini harus memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh daerah kepulauan.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia, ekonomi politik dan budaya. Salah satu hal yang mempersulit peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM) adalah tidak didukung oleh keterampilan yang tepat dalam mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi,

2.3.3.4 Belum Optimalnya Pengembangan IPTEKIN dan Riset

Produktivitas pemanfaatan sumber daya alam unggulan masih relatif rendah karena belum didukung teknologi, inovasi dan riset yang memadai serta sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas. Ekosistem riset, IPTEK dan inovasi yang lemah berakibat pada kurangnya hasilhasil riset berkualitas dan aplikatif.

Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai komoditas utama penggerak ekonomi Maluku diperlukan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset yang mutakhir. Seiring dengan kemajuan IPTEKIN yang berkembang begitu cepat secara nasional maupun global menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat mewujudkan kemajuan IPTEK, Inovasi dan Riset daerah yang didukung sumber daya manusia berkualitas sebagai bagian dari solusi terhadap isu dan tantangan pembangunan.



2.3.3.5 Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Khususnya Hilirisasi Komoditas Unggulan

Pembangunan ekonomi inklusif dikonsepkan sebagai pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan akses serta kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, terutama menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan tersebut. Diharapkan pembangunan ekonomi inklusif tersebut akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan, memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, menurunkan kemiskinan, serta dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan berfokus pada perluasan skala ekonomi, perluasan akses terhadap aset perekonomian, dan perluasan pasar serta menciptakan pemerataan peluang dalam upaya memperluas kemakmuran ekonomi.

Sektor kelautan, perikanan, pariwisata, manufaktur, teknologi (digitalisasi), hingga industri kreatif juga dapat menjadi produk paling potensial untuk mendorong terwujudnya hilirisasi yang lebih beragam. Hilirisasi pada intinya dapat membuka pintu menuju diversifikasi ekonomi serta dapat mengurangi ketergantungannya pada sektor ekonomi tertentu, menciptakan ketahanan ekonomi, hingga mengembangkan SDM yang terampil.

Tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Provinsi Maluku pada masa mendatang dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonominya harus mendorong terwujudnya kebijakan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

2.3.3.6 Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah

Integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana merupakan tantangan yang perlu disinergikan dalam sistem pembangunan. Kebijakan adaptasi perubahan iklim dengan turut mempertimbangkan risiko bencana diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mengurangi kerentanan (mitigasi) dan meningkatkan kapasitas (kesiapsiagaan).



Provinsi Maluku berkarakteristik wilayah kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil di mana pulau kecil memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Terbatasnya sumber daya alam pulau (ruang, air, vegetasi, tanah, kawasan pantai dan margasatwa) serta rapuhnya ekosistem pulau, sangat menentukan kapasitas sebuah pulau untuk menerima dan dibangun secara berkelanjutan.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia dan khususnya Maluku. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar dimana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Perubahan iklim di Provinsi Maluku akan sangat terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah laut dan pesisir serta pertanian. Ketersediaan air dan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Peningkatan tinggi gelombang ekstrem, kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu dan perubahan curah hujan merupakan risiko yang perlu diantisipasi.

2.3.3.7 Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting

Masih tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting Provinsi Maluku dirasakan akan terus mengalami tantangan semakin berat pada level makro. Pemerintah Provinsi Maluku akan dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga stabilitas inflasi/harga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, maupun menjaga iklim investasi masih dihadapkan dengan kenyataan terjadinya kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

Pada level mikro, upaya untuk menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui program ekonomi produktif juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, yakni dimilikinya akurasi data dan mewujudkan sinergi antar program yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan dunia usaha,.



Selain itu pemerintah juga diperhadapkan dengan upaya menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik salah satunya melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT). Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara merit sistem serta berkelanjutan. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu cita-cita untuk mewujudkan *good governance* mesti dilakukan dengan membangun kolaborasi sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. *Good governance* menitikberatkan pada adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.



VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD disusun selaras dan berkesinambungan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kesenambungan ini menjadi sangat penting untuk menjamin konsistensi arah pembangunan, menjaga keberlanjutan program prioritas, serta menjawab tantangan strategis secara bertahap dan terukur.

Visi RPJPD, sebagai panduan utama pembangunan jangka panjang selama 20 tahun, menggambarkan arah ideal yang ingin dicapai oleh daerah dalam jangka waktu panjang. Dalam konteks Provinsi Maluku, visi RPJPD “Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan” menjadi arah strategis yang mengakar pada nilai-nilai keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta pembangunan manusia dan wilayah yang berkelanjutan.

Untuk memastikan tercapainya visi jangka panjang tersebut, maka disusun RPJMD Tahap I Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan lima tahunan yang berperan sebagai tahapan awal Penguatan fondasi transformasi. merefleksikan komitmen untuk memulai langkah-langkah strategis dalam Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah, Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dan Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan.

Misi RPJMD disusun untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang mampu mewujudkan transformasi dan akselerasi pencapaian visi jangka panjang RPJPD. Misi-misi dalam RPJMD 2025–2029 tetap berada dalam koridor misi RPJPD. Perwujudan Visi Maluku 2045 akan tercermin melalui sasaran visi, di mana sasaran Visi Maluku 2045 telah diselaraskan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan digambarkan 5 sasaran visi RPJPD Maluku Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Visi Maluku Emas 2025 - 2045

RPJPD Maluku 2025 - 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	2045
Pendapatan Per Kapita Meningkat	PDRB per Kapita (Rp Juta)	33,11 – 33,26	146,98 – 219,94
	Indonesia Blue Economy Index (Indeks)	55,18	98,29
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,50 - 6,64	8,14 - 8,95
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,01 - 13,51	0,32 - 0,82

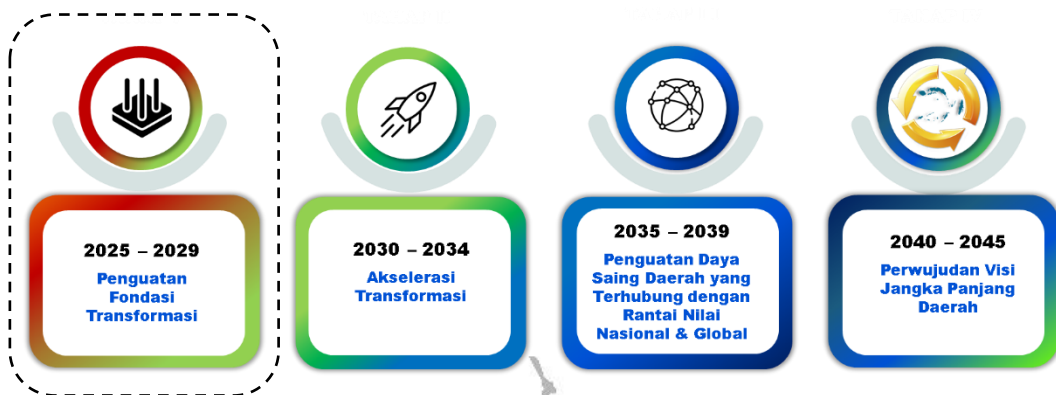
RPJPD Maluku 2025 - 2045				
Sasaran Visi		Indikator	Baseline 2025	2045
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang		Rasion Gini (Indeks)	0,282 - 0,287	0,220 - 0,243
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,28	0,24
Daya Saing Daerah di Tingkat Nasional Meningkat		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)	Sedang	Sangat Tinggi
		Indeks Daya Saing Daerah	20 Besar (2023)	15 Besar
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		Indeks Pembangunan Manusia	74,72	Di Atas 85,00
		Indeks Modal Manusia	0,48	0,62
Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	42,88	100
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,43	88,72

Sumber : Perda No. 9 Tahun 2024, RPJPD 2025 – 2045

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dijabarkan ke dalam RPJMD, diperlukan arah kebijakan yang fokus, terukur, dan responsif terhadap tantangan serta kebutuhan pembangunan aktual. Fokus arah kebijakan pembangunan daerah menjadi panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada periode perencanaan RPJMD Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan diarahkan pada pembangunan fondasi transformasi. Fokus arah kebijakan pembangunan mencakup delapan pilar utama guna mewujudkan Visi dan mencapai sasaran pokok Visi yang telah ditetapkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 - 2045 membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Gambar 3.1
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku 2025 – 2045



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2024, RPJPD 2025 – 2045

Tahapan pembangunan (RPJMD 2025-2029 merupakan tahapan pertama pembangunan jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku. Pada tahapan pertama diarahkan pada :

Penguatan fondasi untuk transformasi tahap-tahap selanjutnya. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,9 - 6,1 persen per tahun.

Transformasi Sosial difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial.

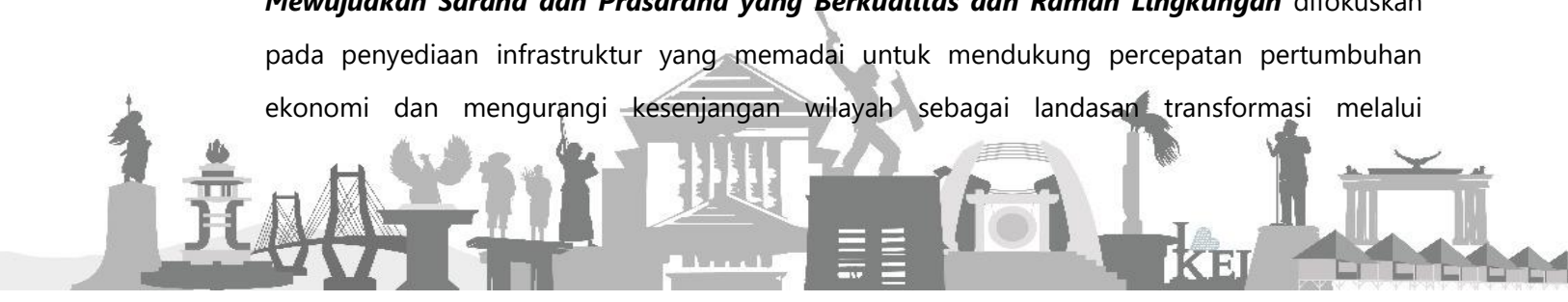
Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan melalui pengembangan sentra-sentra industri yang telah memiliki potensi berkembang yang cukup besar pada saat ini, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi, pengembangan produk wisata baru yang kreatif dan inovatif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, iklim investasi yang semakin baik, optimalisasi perdagangan luar negeri dengan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan dan penataan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit sistem, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi, penataan regulasi daerah dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah dititikberatkan penguatan modal sosial masyarakat Maluku melalui kebijakan pemerintah daerah antara lain dengan revitalisasi budaya dan kearifan lokal (termasuk pendidikan), mengoptimalkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kerukunan beragama, penguatan supremasi hukum, penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kelembagaan adat dan memanfaatkan ruang-ruang publik dalam menciptakan kohesi sosial yang semakin berkualitas. Peningkatan keamanan dan stabilitas ekonomi daerah dengan implementasi kebijakan yang adaptif.

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana yang sejalan dengan penguatan pembangunan lingkungan hidup secara inklusif, mempercepat pencapaian target pembangunan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang merata, adil dan berdaya saing dengan meningkatkan tata kelola dan adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah sebagai landasan transformasi melalui



peningkatan perluasan dan pemerataan cakupan akses layanan infrastruktur dasar dan transportasi termasuk penguatan jejaring konektivitas wilayah yang berbasis mitigasi bencana, perluasan jangkauan layanan akses telekomunikasi universal, penyiapan SDM TIK termasuk ASN, pengembangan jaringan 5G di Kawasan Pariwisata. Pemenuhan kebutuhan energi melalui diversifikasi sumber energi listrik termasuk mendorong investasi energi baru terbarukan, dan kesinambungan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan pemanfaatan cakupan sektor yang didanai non pemerintah

3.1 VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

3.1.1 Visi Dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi 20 tahun Pemerintah Provinsi Maluku, kerangka kerja pembangunan jangka panjang tersebut dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya.

Periode RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045. Pada tahapan ini difokuskan pada langkah penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang mencakup enam aspek utama yaitu transformasi Ekonomi, sosial, ekonomi, Tata Kelola, Ketahanan Sosial dan Budaya, dan Ketahanan Ekologi.

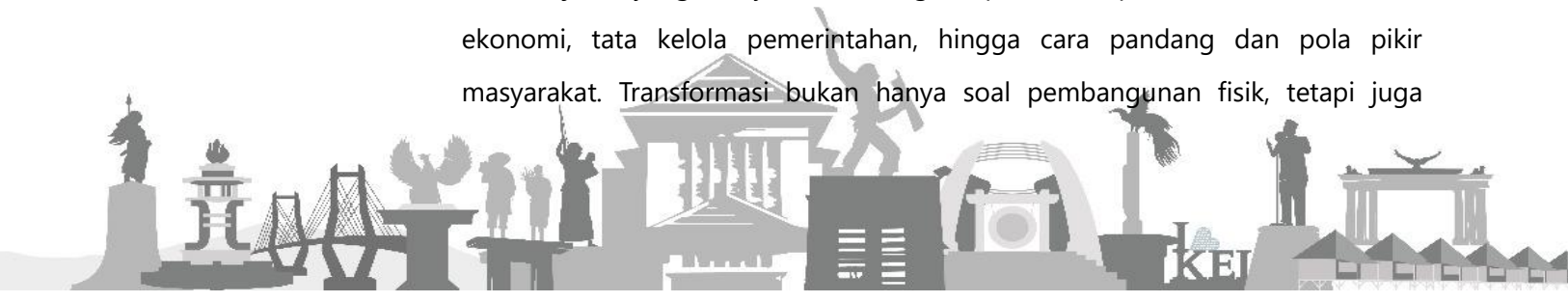
3.1.1.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Maluku. Pernyataan Visi ini merupakan pernyataan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dan merupakan kondisi ideal yang diharapkan sesuai dengan potensi, tantangan dan kebutuhan daerah. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, adalah:

"Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"

Pernyataan visi ini mengandung arti:

Transformasi : **Transformasi** mengandung arti proses perubahan mendasar, menyeluruh, dan berkelanjutan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan—baik struktur sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga cara pandang dan pola pikir masyarakat. Transformasi bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga



perubahan paradigma menuju tatanan baru yang lebih progresif, inklusif, dan berkelanjutan.

- Maju : **Maju** berarti kondisi di mana Maluku mengalami peningkatan kualitas secara signifikan dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola, serta inovasi dan teknologi, yang ditandai dengan produktivitas tinggi, daya saing kuat, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal, didukung oleh infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
- Adil : **Adil** berarti menghadirkan pembangunan yang merata dan setara hingga pelosok kepulauan, menjamin hak-hak setiap individu dan kelompok masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang kemajuan tanpa diskriminasi. Keadilan tidak berarti sama rata, tetapi memberikan **apa yang menjadi hak dan kebutuhan setiap orang atau wilayah sesuai kondisinya**.
- Sejahtera : **Sejahtera** berarti kondisi di mana masyarakat hidup dalam kecukupan, kedamaian, dan kebahagiaan lahir dan batin. Sejahtera tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas hidup secara menyeluruh—terpenuhinya kebutuhan dasar, hubungan sosial yang harmonis, serta lingkungan hidup yang sehat dan aman.

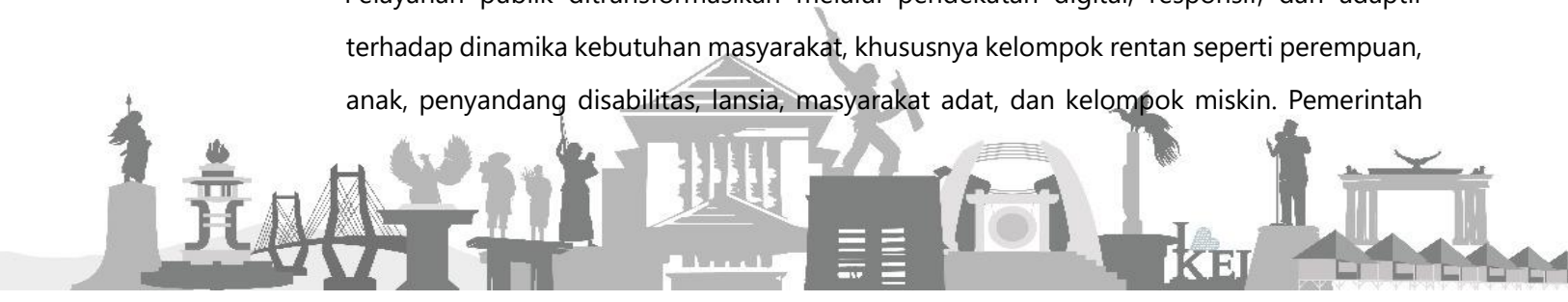
3.1.1.2 Misi

Dalam mewujudkan Visi "**Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045**", maka ditentukan misi pembangunan daerah yang disebut "**SAPTA CIPTA** " adalah:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel ;

Misi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara. Peningkatan tata kelola pemerintahan tidak hanya mencakup efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kebijakan dan pelayanan.

Pelayanan publik ditransformasikan melalui pendekatan digital, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok miskin. Pemerintah



daerah juga berkomitmen mengarusutamakan prinsip-prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam seluruh perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan.

Melalui misi ini, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat, yang didukung oleh mekanisme pelaporan dan pengaduan yang efektif serta pembangunan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif;

Misi ini menekankan pentingnya **pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di wilayah kepulauan** melalui kebijakan yang dirancang secara **spesifik, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan geografis dan sosial-ekonomi** masyarakat pulau-pulau kecil dan terluar. Wilayah kepulauan memiliki karakteristik khusus seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang rendah, biaya logistik tinggi, dan ketimpangan pelayanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan tersebut secara **tepat sasaran, efisien, dan efektif**.

- **Tepat Sasaran:** Program diarahkan pada kantung-kantung kemiskinan di pulau-pulau kecil dan terisolasi, dengan menggunakan data yang akurat dan partisipasi masyarakat lokal.
- **Efisien :** Penggunaan sumber daya disesuaikan dengan keterbatasan geografis dan difokuskan pada intervensi yang memberi hasil maksimal.
- **Efektif :** Kebijakan difokuskan untuk mengatasi hambatan utama seperti keterisolasian, rendahnya konektivitas, dan minimnya peluang kerja lokal.

3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;

Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, inovatif, produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh. Misi ini menekankan pentingnya investasi pada manusia sejak dini melalui akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang adaptif, serta penguatan peran kelompok strategis dalam pembangunan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah;

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku, misi ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur layanan dasar, transportasi dan telekomunikasi yang efisien. Mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses fisik dan digital yang dapat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur akan difokuskan pada pembangunan sarana transportasi dan telekomunikasi yang dapat menghubungkan antar pulau dan kawasan secara lebih efektif.

5. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel);

Misi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi karakteristik utama wilayah kepulauan Maluku. Hal ini akan dicapai melalui upaya konservasi, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, serta penguatan kapasitas lokal dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana yang sering terjadi di kawasan ini. Fokus utama dari misi ini adalah untuk melindungi keberagaman hayati pesisir dan ekosistem laut, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem.

Upaya pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, seperti hasil laut dan hutan mangrove, tidak merusak ekosistem dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Adaptasi terhadap perubahan iklim difokuskan pada peningkatan infrastruktur yang tahan bencana dan ramah lingkungan, serta penguatan sistem peringatan dini untuk bencana alam. Sementara itu, mitigasi dilakukan dengan pengurangan emisi karbon dan peningkatan penyerapan karbon melalui penghijauan dan restorasi ekosistem.

Proses pengelolaan dilakukan dengan pendekatan yang etis, menjunjung tinggi hak masyarakat lokal, dan memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Semua kegiatan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kebijakan yang ada.



6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah;

Misi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di wilayah kepulauan dengan memperkuat basis ekonomi lokal melalui pengembangan nilai tambah komoditas unggulan, mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, memperluas akses pasar, serta menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Karakteristik wilayah kepulauan yang tersebar, memiliki keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta tingginya ketergantungan pada sektor primer, menuntut strategi pembangunan ekonomi yang adaptif dan kontekstual.

7. Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

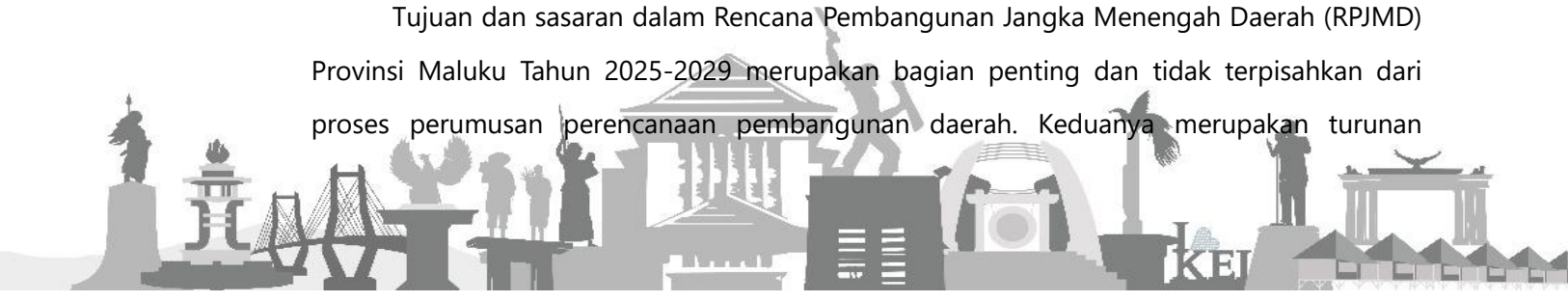
Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga sosial kemasyarakatan sebagai pilar utama dalam menjaga kohesi sosial, mempererat relasi antarwarga, serta memperkuat identitas budaya masyarakat kepulauan. Penataan dan revitalisasi dilakukan dengan menempatkan nilai-nilai hidup orang basudara—yang menjunjung tinggi persaudaraan, toleransi, dan solidaritas—sebagai landasan dalam merawat harmoni sosial di tengah keberagaman etnis, agama, dan adat istiadat.

Dalam konteks kepulauan, di mana keterpencilan geografis dan keterbatasan akses dapat memperlemah institusi sosial, penguatan kelembagaan berbasis komunitas lokal menjadi sangat krusial. Revitalisasi lembaga adat, rukun warga, majelis keagamaan, kelompok pemuda dan perempuan, serta forum masyarakat lainnya akan dilakukan secara terpadu dan partisipatif, dengan menjadikan adat dan kearifan lokal sebagai sumber nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian konflik sosial.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan ditegakkan secara adil dan inklusif dengan mengintegrasikan hukum positif dan pranata adat secara harmonis, guna menciptakan ketertiban dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini juga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif, menjembatani kesenjangan sosial antar pulau, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah perubahan sosial dan tekanan eksternal.

3.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Keduanya merupakan turunan



langsung dari visi dan misi kepala daerah, yang dijabarkan lebih operasional agar dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.

Lima sasaran pembangunan daerah Tahun 2025–2029 dirumuskan secara selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD 2025–2045), RPJPN 2025–2045, serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Keterpaduan ini tercermin melalui kesesuaian antara indikator-indikator sasaran pembangunan daerah dan indikator-indikator pembangunan nasional, yang menunjukkan adanya kesinambungan visi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan di semua level perencanaan.

Penetapan indikator makro sebagai indikator sasaran pembangunan kewilayahan Provinsi Maluku, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, menjadi dasar utama dalam perumusan indikator sasaran pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah, serta mendukung keterpaduan kebijakan secara vertikal

Indikator-indikator tersebut kemudian diadopsi dan ditetapkan sebagai indikator sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan daerah tidak hanya sejalan dengan lima sasaran utama dalam visi RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025–2045, tetapi juga konsisten dengan sasaran strategis pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam RPJPN 2025–2045.

Selanjutnya, target-target sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku untuk periode 2025–2029 disusun secara terukur dan realistis, dengan mengacu pada baseline capaian tahun sebelumnya, dinamika potensi kewilayahan, serta proyeksi pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap isu-isu strategis lokal, regional, dan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan, mendorong sinergi lintas sektor, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah. Target dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	RPJMN		RPJMD	
			2025	2029	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,3	8,4	5,34	8,4
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,3	0,3	0,3	0,3
3	PDRB Perkapita	%	34,1	50,5	34,8	50,5
4	Tingkat Kemiskinan	%	13,01-13,51	8,03-9,03	15,43	11,09
5	Rasio Gini	Rasio	0,282-0,287	0,239-0,243	0,282-0,287	0,239-0,243
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,49	0,52	0,49	0,52
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	42,8	70,87	42,88	100
8	IKLH Daerah	Indeks	82,43	83,10	82,43	83,1
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,55-6,03	5,07-5,57	5,95	5,37

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029 dan Bappeda Provinsi Maluku, 2025



3.1.2.1 Tujuan Dan Sasaran Provinsi Maluku 2025 – 2030

Perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 didasarkan pada tujuh misi utama yang ditetapkan sebagai Sapta Cita Pembangunan Daerah, yang secara strategis dirancang untuk mendukung Asta Cita sebagai prioritas nasional dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ketujuh misi tersebut merupakan hasil konsolidasi visi politik dan komitmen pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian diintegrasikan secara teknokratis ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan dalam RPJMD merupakan penjabaran sistematis dari masing-masing misi daerah, yang berfungsi sebagai landasan strategis dalam pelaksanaan agenda pembangunan lima tahunan. Setiap tujuan mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai secara bertahap dalam berbagai bidang kehidupan, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dengan pendekatan tersebut, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah kepulauan, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.



Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel											
T1: Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik		T1. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku	Indeks	38,08	65,11	66 (B : Cukup Baik)	67 (B : Cukup Baik)	68 (B : Cukup Baik)	69 (B : Cukup Baik)	70 (BB : Baik)	71
	S1.1. : Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku	S1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	n/a	n/a	60,75	62,75	64,75	66,75	68,75	70,75
		Indeks Integritas Nasional/Daerah	Skor	n/a	n/a	67,43	68,12	68,81	69,5	70,19	70,88
MISI 2. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif											
T2. Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat		T1, Tingkat Kemiskinan	Persen	16,42	15,78	15,43	14,54	13,67	12,78	11,9	11,00
	S2.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	S2.1 PDRB Per Kapita	Persen	30,46	32,2	34,8	38,73	42,65	46,58	50,5	54,43
	S2.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran	S2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP 45)	Persen	6,31	6,11	5,95	5,92	5,8	5,69	5,37	5,00



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas											
T3: Meningkatnya kualitas SDM Maluku		T3: Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	n.a	n.a	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53
	S3.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	S3.1 Indeks Pendidikan	Indeks	0,481	0,471	0,473	0,475	0,477	0,479	0,481	0,483
	S3.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	S3.2 Indeks Kesehatan	Indeks	0,468	0,422	0,764	0,767	0,770	0,773	0,776	0,779
	S3.3 Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga	S3.3.1 Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi dalam kompetisi nasional dan internasional	Jumlah	11	11	4	4	4	7	4	4
		S3.3.2 Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,3	na	56,75	57,45	58,16	58,87	59,58	60,28
	S3.4 Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesetaraan Gender	S3.4 Indeks Ketimpangan Gender (IUP 45)	Indeks	0,509	0,538	0,525	0,514	0,502	0,491	0,479	0,468



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar Serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah											
T.4 Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi, Elektrifikasi dan wilayah serta konektivitas Antar dan Intra Wilayah		T4.1 Indeks Infrastruktur	Indeks	42,27	43,72	54,00	56,07	57,84	59,75	61,78	64,24
		T4.2 Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku	Rasio	0,766	0,761	0,704	0,725	0,741	0,752	0,764	0,776
	S4.1 Meningkatnya Infrastruktur Dasar	S4.1.1: Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	16,72	17,74	33,67	35,72	37,27	39,07	41,30	44,28
		S4.1,2 Kemantapan Jalan	Persen	50,18	53,22	54,63	56,79	58,37	60,39	61,89	64,24
		S4.1.3 Persentase Rumah Tangga Terakses Air Minum Aman	Persen	0,00	0,00	40,39	41,25	44,12	47,27	52,00	58,54



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		S4.1.4 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Aman	Persen	0,00	0,00	6,00	9,12	9,33	9,56	10,00	10,05
	S4.2 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Transportasi	S4.2: Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur transportasi	Persentase	67,92	69,75	71,67	73,58	75,58	77,50	79,42	81,58
	S4.3. Meningkatnya infrastruktur Dasar telekomunikasi	S4.3. Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur telekomunikasi	Persentase	64,75	68,13	71,50	74,87	78,25	81,62	85,00	88,37
MISI 5. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)											
T5 Meningkatnya pengelolaan SDA, dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana		T5.1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,75	78,71	82,43	82,59	82,76	82,93	83,1	83,27
		T5.2 Indeks Risiko Bencana	Indeks	160,33	161,50	161,45	161,40	161,35	161,30	161,25	161,20
		T5.3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persentase	na	na	42,88	49,38	58,91	68,44	77,97	86,29



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	S5.1 Terjaganya Lingkungan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil	S5.1: Persentase wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang terkonservasi	Persentase	na	2,11	2,05	2,37	3,32	3,92	4,06	4,22
	S5.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim	5.2 Indeks Kualitas Lingkungan hidup Daerah (IUP 45)	Angka	78,75	78,71	82,43	82,59	82,76	82,93	83,1	83,27
	S5.3 Meningkatnya Mitigasi Bencana	S5.3 Indeks Ketahanan Daerah	Skor	0,34	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46
	S5.4 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Secara Berkelanjutan	S5.4 Indeks Ketahanan Pangan	Skor	64,37	62,68	65,15	67,20	69	72,10	74,65	77,15
MISI 6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah											
T6 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		T6.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,21	5,34	5,34	6,07	6,85	7,62	8,4	9,17
		T6.3 Indeks Williamson	Indeks	0,386	0,389	0,388	0,388	0,388	0,387	0,387	0,387



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		T5.4. Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	na	na	60,07	61,90	63,73	65,57	67,40	69,23
	S6.1 Terciptanya iklim investasi yang kondusif	S6.1 Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku	Persen	3,478	3,38	3,760	3,838	3,912	3,989	4,068	4,149
	S6.2: Berkembangnya kawasan Ekonomi Khusus	S6.2 Tingkat Perkembangan Kawasan Ekonomi. Khusus	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	1
	S6.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Perekonomian Daerah	S6.3.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP 45)	Persen	6,26	6,31	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,01
		S6.3.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%) (IUP 45)	Rasio	1,45	1,45	1,5	1,58	1,615	1,7	1,76	1,8
		S6.3.3 LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,66	3,39	5,8	6,35	6,9	7,45	8	8,55



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	S6.4 Meningkatnya Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat	S6.4.1 Persentase Masyarakat yang mengakses pembiayaan	Persen	7,20	7,39	7,46	7,54	7,61	7,69	7,77	7,84
		S6.4.2 Inklusi Keuangan	Persen			86,30	87,11	87,92	88,73	89,54	90,35
	S6.5: Stabilitas Ekonomi Daerah	S6.5.1 : Tingkat Inflasi Daerah	Persen	2,81	1,28	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
		S6.5.2 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Persen	n/a	n/a	11,50	11,32	11,15	10,97	10,8	10,62
	S6.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa	S6.7.1 Indeks Desa	Skor	n/a	n/a	0,659	0,672	0,686	0,699	0,713	0,728
MISI 7. Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum											
T7. Meningkatnya Harmonisasi Sosial, Pembangunan Kebudayaan, dan Penegakan Hukum		T7.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,02	76,47	76,5	76,53	76,56	76,59	76,62	76,65
		T7.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	59,38	n/a	60,71	61,31	61,91	62,51	63,11	63,71



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		T7.3 Indeks Demokrasi Provinsi	Persen	69,35	na	70,5 - 76,69	70,55 - 77,19	70,6 - 77,69	70,65 – 78,19	70,7 - 78,69	70,75 - 78,75
	S7.1 Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat	S7.1 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
	S7.2 Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal	S7.2.1 Indeks Harmoni	Skor	n/a	n/a	6,5	6,6	6,7	6,8	6.9	7,0
	S7.3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	S7.3 Persentase desa Mandiri	Persen	6,83	15,17	15,25	15,67	16,08	16,33	16,50	18



3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan *strategi dan arah kebijakan* sangat penting dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku karena akan menjadi acuan utama dalam mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan terkoordinasi. Strategi memberikan kerangka berpikir jangka menengah dalam menjawab isu-isu strategis, sedangkan arah kebijakan memastikan bahwa setiap langkah operasional pemerintah daerah tetap berada dalam koridor pembangunan yang telah ditetapkan. Tanpa strategi dan arah kebijakan yang jelas, pelaksanaan program dan kegiatan berisiko tidak terfokus, tidak efisien, dan tidak sinkron antar sektor maupun antar wilayah.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan membantu menjamin konsistensi antara visi-misi kepala daerah dengan implementasi kebijakan pembangunan di lapangan. Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak bersifat ad hoc, melainkan terstruktur dan berorientasi pada hasil. Perumusan ini juga menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya, pemantauan capaian pembangunan, serta evaluasi kinerja, sehingga seluruh proses pembangunan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

3.2.1.1 Misi 1: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel

Rumusan strategi "**Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Transparan, Efisien, Responsif, dan Berbasis Teknologi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Efektif**" diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik. Strategi ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai komponen utama melalui penyederhanaan struktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sistem pengawasan internal. Strategi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui layanan yang lebih cepat, tepat, dan terbuka.

Untuk menjabarkan strategi pembangunan tersebut, arah kebijakan difokuskan pada empat pilar utama yang saling mendukung. Pertama, peningkatan kapasitas manajemen kinerja pemerintahan dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil dan ditopang oleh percepatan digitalisasi layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas aparatur ditempuh melalui penguatan sistem merit, pelatihan yang berkelanjutan, serta penanaman budaya kerja yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan. Ketiga, transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah diperkuat melalui penerapan sistem informasi yang terbuka, terintegrasi, dan mudah diakses publik, sehingga mendorong akuntabilitas. Keempat, kualitas perencanaan pembangunan ditingkatkan melalui pendekatan berbasis data, partisipatif, dan inovatif agar proses



perencanaan lebih tepat sasaran, inklusif, dan mampu merespons tantangan pembangunan secara dinamis.

3.2.1.2 Misi 2: Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif

Rumusan strategi ***Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran*** diarahkan pada integrasi program lintas sektor yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, perluasan kesempatan kerja produktif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercapai penurunan persentase penduduk miskin, berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, serta berkembangnya usaha masyarakat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Rumusan arah kebijakan untuk mendukung strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran difokuskan pada dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Percepatan Akses terhadap Perlindungan Sosial Adaptif, Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin, Penguatan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Lintas Sektor serta Penguatan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan arah kebijakan ini difokuskan pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat terlebih pada menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dari bawah, Percepatan Akses terhadap Perlindungan Sosial Adaptif, Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin, untuk meningkatkan kualitas hidup. Arah kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek fisik hunian, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan, produktivitas, dan martabat keluarga miskin. Intervensi dilakukan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan rumah baru bagi keluarga tanpa hunian, serta fasilitasi akses pembiayaan perumahan yang terjangkau. Pembangunan rumah layak huni juga terintegrasi dengan penyediaan sarana prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan lingkungan yang menjadi factor penting dalam mencegah stunting lingkungan hunian yang sehat dengan akses air minum layak dan sanitasi yang memadai akan menekan angka penyakit infeksi yang menjadi salah satu penyebab utama stunting. Dengan rumah yang lebih layak, keluarga juga memiliki ruang yang lebih sehat untuk tumbuh kembang anak, sehingga gizi yang dikonsumsi dapat terserap secara optimal. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan struktural yang mendorong keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keluarga miskin memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa harus terjerat utang atau mengorbankan pendidikan dan Kesehatan, dan yang terakhir untuk kebijakan ini yakni Penguatan Program Perlindungan Sosial dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat hal ini akan dilakukan melalui pendekatan yang lebih inklusif, Kedua Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui upaya penciptaan lapangan kerja, investasi, proyek padat

karya, penguatan sektor informal, Pengembangan pasar tenaga kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, disertai fasilitasi penempatan tenaga kerja lokal di sektor-sektor produktif, ditujukan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan terserap.

3.2.1.3 Misi 3: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Misi ke-3 yakni *"Meningkatkan Kualitas SDM Maluku"*, telah dirumuskan 4 (empat) sasaran. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan tersebut ditetapkan strategi ***"memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan olahraga, serta pemberdayaan kelompok rentan, keluarga, dan pengarusutamaan gender secara inklusif dan berkelanjutan"*** yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku secara menyeluruh dan berkeadilan.

Terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang merupakan turunan langsung dari strategi pembangunan yang menekankan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan dasar serta pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan pertama menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama, dimana peningkatan kapasitas individu menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pemerataan akses, penguatan kapasitas pendidik, dan kurikulum berbasis teknologi serta Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan mewujudkan lembaga pendidikan (SMK, Politeknik, Perguruan Tinggi), khususnya yang relevan dengan standar industri migas. berupa program studi teknik perminyakan, geologi, teknik kimia, teknik mesin, kelistrikan, instrumentasi, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan bidang maritime serta Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang memadai melalui Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) yang berfokus pada keahlian migas dan maritim, didukung oleh teknologi simulasi dan laboratorium mutakhir untuk menjawab tantangan masa depan. Kebijakan kedua diarahkan pada penguatan sistem layanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah, dengan tenaga medis yang kompeten dan infrastruktur yang memadai untuk menjamin kesehatan masyarakat secara berkesinambungan. Kebijakan ketiga merupakan wahana pembentukan karakter dan prestasi generasi muda dimana diarahkan untuk mendorong pengembangan pembinaan olahraga yang terintegrasi dengan pendidikan dan potensi lokal guna mencetak prestasi serta memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik yang sehat. Sementara itu, kebijakan keempat memastikan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta pengarusutamaan gender menjadi prinsip dalam setiap aspek pembangunan, guna mewujudkan keadilan sosial dan partisipasi yang setara dalam proses pembangunan daerah.

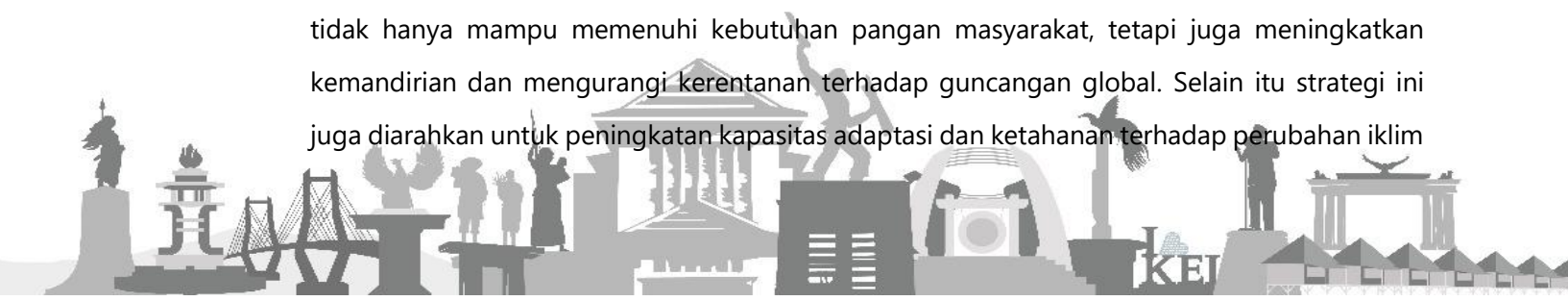
3.2.1.4 Misi 4: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah

Tujuan pembangunan tertuang dalam Misi ke-4 adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, transportasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas antar dan intra wilayah. Untuk mewujudkan itu ditetapkan strategi pembangunan "**Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi secara terpadu**", sebagai pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pendekatan terpadu ini penting untuk memastikan bahwa ketiga aspek infrastruktur saling mendukung dalam menciptakan pertumbuhan wilayah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Untuk menjawab strategi pembangunan "Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi secara terpadu" dirumuskan 3 (tiga) arah kebijakan yang mencerminkan pendekatan multisektor yang saling mendukung. Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak difokuskan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan, terutama di wilayah tertinggal dan kepulauan. Percepatan pembangunan jaringan transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi ditujukan untuk membuka konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta memperkuat keterhubungan pusat-pusat produksi dan pelayanan. Selanjutnya perluasan jangkauan serta peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan digital merupakan kunci untuk mendorong transformasi digital, mempercepat akses informasi, dan mendukung pelayanan publik yang inklusif. Ketiga arah kebijakan ini secara terpadu diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing wilayah.

3.2.1.5 Misi 5: Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)

Strategi pembangunan untuk Misi ke-5 ini yakni "**mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang inklusif dan berbasis komunitas**" menekankan pentingnya pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta ketahanan sosial-ekologis masyarakat. Strategi ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan adaptif terhadap iklim diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan. Peningkatan produksi pangan lokal melalui praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, serta penguatan rantai pasok pangan akan menjadi fokus utama. Dengan demikian, daerah tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan global. Selain itu strategi ini juga diarahkan untuk peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim



dan bencana yang inklusif dan berbasis komunitas memiliki relevansi langsung dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memastikan ketersediaan lahan subur, air bersih, dan ekosistem perikanan yang sehat sebagai basis utama produksi pangan.

Di sisi lain, perubahan iklim dan bencana berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan melalui gagal panen, kerusakan lahan, dan menurunnya produktivitas sektor pertanian, perikanan, maupun peternakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat, penyediaan teknologi ramah iklim, serta pembangunan infrastruktur tahan bencana menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan.

Lebih jauh, pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas mendorong masyarakat lokal untuk terlibat dalam menjaga ketersediaan, distribusi, serta konsumsi pangan. Melalui diversifikasi pangan lokal, penguatan lumbung desa, perbaikan sistem logistik, dan edukasi gizi, strategi ini tidak hanya menjawab tantangan produksi, tetapi juga memastikan akses pangan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, strategi ini berfungsi sebagai pilar penting dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.

Strategi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memiliki peran aktif dalam menjaga lingkungan sekaligus memiliki kemampuan beradaptasi dan tangguh terhadap risiko perubahan iklim dan bencana. Pendekatan berbasis komunitas ini juga menjamin bahwa pembangunan bersifat inklusif, tidak meninggalkan kelompok rentan, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan strategi tersebut, arah kebijakan difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, penguatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menjaga ekosistem strategis serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Kedua, pengurangan pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan integrasi upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ketiga, penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mitigasi bencana yang berbasis wilayah dan kearifan lokal. Ketiga arah kebijakan ini secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan yaitu: terjaganya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta meningkatnya kapasitas mitigasi terhadap bencana. Dan keempat Meningkatkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan serta memastikan ketahanan dan kemandirian daerah dalam pemenuhan pangan, air, dan energi melalui pengelolaan sumber daya lokal secara bijak.

3.2.1.7 Misi 7: Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum

“Memperkuat integrasi sosial melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel,” merupakan strategi pembangunan untuk menjawab Misi ke-7 yang menekankan pentingnya memperkuat integrasi sosial sebagai fondasi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan inklusi, pembangunan diarahkan untuk mendorong kohesi sosial antar komunitas melalui dialog lintas budaya, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, serta penguatan solidaritas masyarakat. Di saat yang sama, penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif menjadi pilar utama dalam menjamin rasa keadilan dan perlindungan hak warga negara. Selain itu, desa sebagai garda terdepan pelayanan publik perlu diperkuat melalui tata kelola yang partisipatif dan akuntabel, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam sistem administrasi dan pengambilan keputusan.

Arah kebijakan yang mendukung strategi ini meliputi tiga hal utama. Pertama, penguatan dialog antar komunitas dan nilai toleransi untuk membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Kedua, memperkuat sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan sistem hukum yang responsif dan terpercaya. Ketiga, memperkuat peran adat dan kearifan lokal dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga pembangunan desa tidak hanya administratif tetapi juga berakar pada identitas dan kebutuhan masyarakat setempat.



Tabel 3.4
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik		
		Sasaran 1 : Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku	Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Efisien, Responsif, dan Berbasis Teknologi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Efektif	Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pemerintahan berbasis hasil, dan percepatan digitalisasi layanan publik
				Peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan, sistem merit, serta budaya kerja berintegritas dan adaptif
				Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan sistem informasi yang terbuka dan Akuntabel
				Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, partisipatif, dan inovatif.
2	Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		
		Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Percepatan Akses terhadap Perlindungan Sosial Adaptif, Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin, Penguatan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Lintas Sektor serta Penguatan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat



No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sasaran 3 : Menurunnya Tingkat Pengangguran		Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui upaya penciptaan lapangan kerja, investasi, proyek padat karya, penguatan sektor informal, Pengembangan pasar tenaga kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja,
3	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas SDM Maluku		
		Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan olahraga, serta pemberdayaan kelompok rentan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang memadai, kapasitas guru, serta penguatan kurikulum berbasis teknologi
		Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan		Penguatan sistem layanan kesehatan yang merata, responsif, dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan
		Sasaran 6 : Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga		Pengembangan sistem pembinaan olahraga terpadu yang berbasis komunitas, pendidikan, dan potensi lokal untuk meningkatkan prestasi
		Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesenjangan Gender		Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta mendorong kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan
4	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah	Tujuan 4 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Wilayah Serta Konektivitas Antar dan Intra Wilayah		
		Sasaran 8 : Meningkatnya infrastruktur dasar	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi secara terpadu	Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak secara merata dan berkelanjutan
		Sasaran 9 : Meningkatnya infrastruktur dasar transportasi		Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi serta Mengoptimalkan peran bandara di Maluku sebagai simpul transportasi udara utama yang mendukung pariwisata, investasi, dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan dan terintegrasi serta Memperkuat peran pelabuhan utama sebagai simpul konektivitas maritim regional dan nasional, serta mendukung pengembangan sentra produksi.
		Sasaran 10 : Meningkatnya Infrastruktur Telekomunikasi		Perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan digital



No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)	Tujuan 5 : Meningkatnya Pengelolaan SDA, dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana		
		Sasaran 11 : Terjaganya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan, air, energi serta peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang inklusif dan berbasis komunitas	Penguatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil
		Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim		Pengurangan pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan integrasi mitigasi-adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan
		Sasaran 13 : Meningkatnya Mitigasi Bencana		Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis wilayah dan kearifan lokal
		Sasaran 14 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan		Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Pangan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal dan Penguatan Sistem Logistik dan Distribusi Pangan
6	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah	Tujuan 6 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		
		Sasaran 15 : Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Kemudahan Investasi, Hilirisasi Industri, Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Lokal dan UMKM.	Peningkatan iklim investasi, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi
		Sasaran 16 : Berkembangnya kawasan ekonomi khusus		Pengembangan kawasan industri pengolahan melalui penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, dan kemitraan dengan pelaku usaha lokal
		Sasaran 17 : Meningkatnya Kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah		Memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor unggulan, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor
		Sasaran 18 : Meningkatnya akses pembiayaan bagi masyarakat		Perluasan akses pembiayaan inklusif melalui penguatan kelembagaan keuangan lokal, digitalisasi layanan, dan skema pembiayaan yang terjangkau
		Sasaran 19 : Stabilitas ekonomi daerah		Penguatan diversifikasi usaha dan pengendalian inflasi daerah
		Sasaran 20 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa		Pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
7	Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum	Tujuan 7 : Meningkatnya Harmonisasi Sosial, Pembangunan Kebudayaan, dan Penegakan Hukum		



No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sasaran 21 : Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat	Memperkuat integrasi sosial melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel	Penguatan dialog antar komunitas, nilai toleransi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan
		Sasaran 22 : Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal		Penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat
		Sasaran 23 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa		Penguatan integrasi adat istiadat dan kearifan lokal, sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan



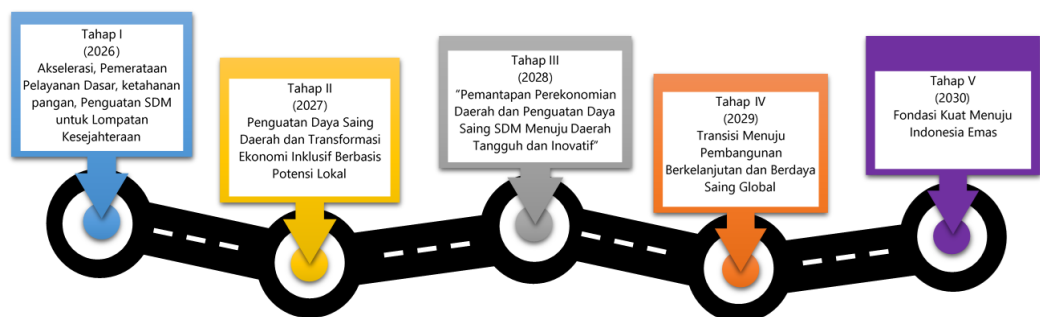
3.2.2 Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkelanjutan yang memerlukan perencanaan yang sistematis, bertahap, dan berorientasi pada hasil jangka menengah serta kontribusi terhadap visi jangka panjang daerah maupun nasional. Dalam konteks Provinsi Maluku, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari kerangka perencanaan jangka panjang menuju *Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera*, serta sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus, dan terukur, maka dalam RPJMD ini diterapkan pendekatan pentahapan pembangunan lima tahunan yang disusun secara strategis berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah, serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pentahapan pembangunan ini dirancang untuk membentuk kesinambungan kebijakan, memperkuat fondasi kelembagaan, dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara progresif.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pada tiap misi dan arahan kebijakan pada RPJMN maka ditetapkan pentahapan pembangunan Provinsi Maluku sebagai berikut :

Gambar 3.2
Penahapan Pembangunan Provinsi Maluku 2026 – 2030



Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2025

Pentahapan pembangunan ini diarahkan untuk menciptakan akselerasi pembangunan yang sistematis dan terukur, dengan setiap tahunnya membangun fondasi dari tahun sebelumnya, serta memastikan setiap tujuan misi dapat tercapai. Arah dan Implementasi kebijakan pada masing-masing tahapan pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut :

Tahun 2025 : **Penguatan Tata Kelola dan Fondasi Sosial**

Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan : Fokus Strategi : Pembangunan fondasi transformasi dan keadilan sosial

Membangun fondasi pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta memperkuat pilar-pilar sosial masyarakat yang harmonis, inklusif, dan sejahtera sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan di seluruh sektor.



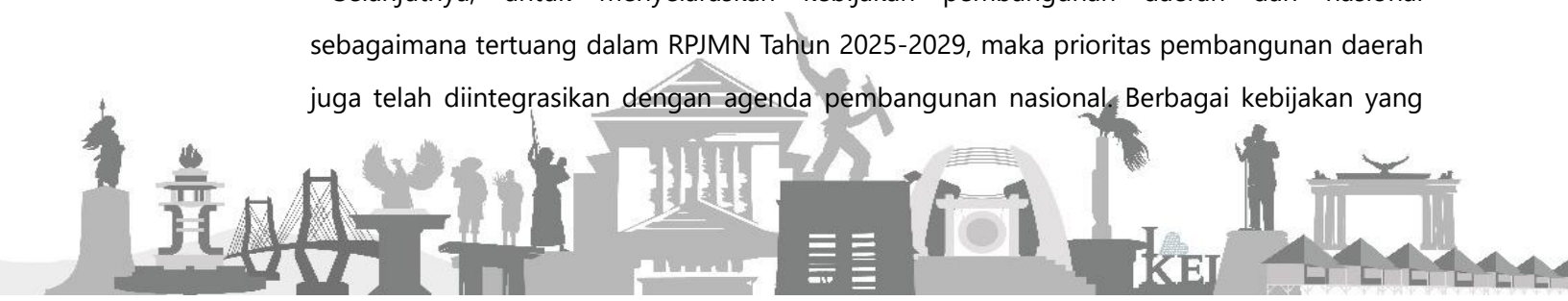
Tahun 2027	:	Penguatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal
Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan	:	Fokus Strategi : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dengan memaksimalkan potensi lokal, Pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas SDM. • Prioritas: ○ Hilirisasi Komoditas Unggulan: Pemberian insentif dan fasilitasi untuk hilirisasi komoditas unggulan Maluku. ○ Pengembangan UMKM: Program pendampingan, pelatihan, dan akses permodalan bagi UMKM, serta pembukaan aksesibilitas pasar. ○ Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri lokal. ○ Penguatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Program kesehatan preventif dan kuratif, serta peningkatan gizi, terutama pada ibu dan anak. ○ Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Implementasi program pengelolaan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.
Tahun 2028	:	Pemantapan Perekonomian Daerah dan Penguatan Daya Saing SDM dan Ketahanan Lingkungan Menuju Daerah Tangguh dan Inovatif.
Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan	:	Fokus Strategi : Mengkonsolidasikan dan memantapkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia Maluku agar mampu mendorong inovasi dan membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan global dan lokal. • Prioritas : ○ Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi primer dengan mendorong pengembangan sektor sekunder (industri pengolahan/hilirisasi) dan tersier (jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital). ○ Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha: Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor lokal maupun nasional melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, dan insentif fiskal daerah.



- **Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Lokal** : Melakukan hilirisasi produk-produk unggulan daerah (perikanan, pertanian, perkebunan) untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.
- **Peningkatan Kualitas Pendidikan**: Memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata dari tingkat dasar hingga menengah, dengan fokus pada penguatan pendidikan vokasi (SMK) yang relevan (*link and match*) dengan kebutuhan industri dan potensi daerah.
- **Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (Green Economy)**: Mendorong praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Tahun 2029	:	Transisi Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global
Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan	:	Fokus Strategi : Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Inovasi dan Hilirisasi, Tahun 2029 merupakan fase strategis yang menandai transisi akhir dari RPJMD menuju visi jangka panjang RPJPD 2025–2045. Pada tahap ini, pembangunan daerah diarahkan untuk memastikan keberlanjutan capaian, dan menyiapkan fondasi yang kokoh untuk menghadapi dinamika global secara adaptif dan kompetitif • Prioritas ○ Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi, teknologi, dan hilirisasi potensi unggulan lokal. ○ Pengembangan kawasan ekonomi strategis dan inovatif, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. ○ Fasilitasi ekspor produk unggulan daerah dan kerja sama antardaerah (Sister Province/District Cooperation) untuk membuka akses pasar global.
Tahun 2030	:	Fondasi Kuat Menuju Indonesia Emas 2045 Fokus Utama: Memastikan fondasi pembangunan Maluku kuat dan berkelanjutan sebagai pijakan menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

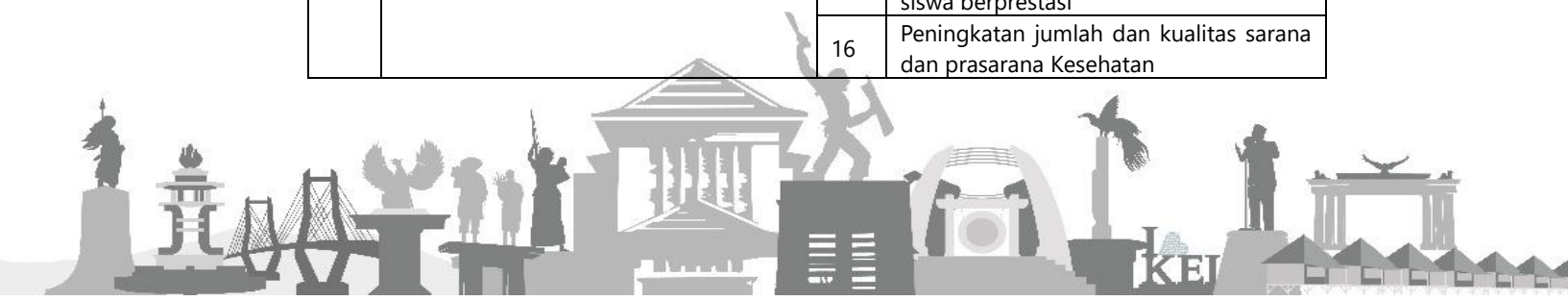
Selanjutnya, untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, maka prioritas pembangunan daerah juga telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang



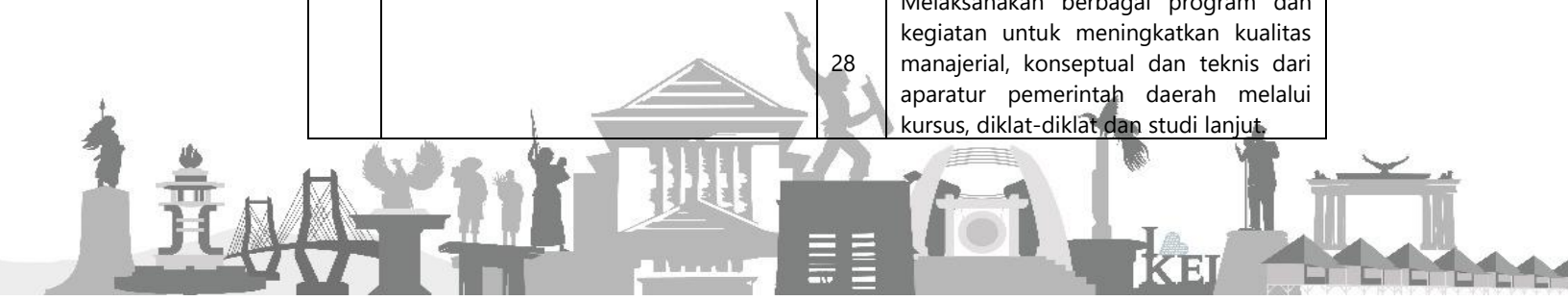
telah dirumuskan akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan agenda pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Maluku. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara agenda prioritas pembangunan nasional dengan prioritas kepala daerah agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	MISI RPJMN 2025 – 2029	NO	Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1	Mendorong kohesi sosial antar komunitas yang majemuk melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan event kultural seperti panas gandong, panas pela, bakti sosial dan lingkungan.
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2	Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi dan air bagi kebutuhan masyarakat.
		3	Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan
		4	Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		5	Mitigasi Bencana
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6	Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan listrik.
		7	Mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), peternakan, perkebunan, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
		8	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan internet.
		9	Memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-sumber pembiayaan (bank dan lembaga keuangan lainnya).
		10	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif untuk merangsang tumbuh-kembang jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda dan mahasiswa
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	11	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
		12	Pembangunan sekolah model untuk tingkat SMA/SMK/ MA
		13	Pendampingan program makan siang bergizi bagi anak sekolah dan pesantren
		14	Peningkatan kompetensi kepala sekola dan guru, serta pemerataan guru
		15	Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan siswa berprestasi
		16	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan



NO	MISI RPJMN 2025 – 2029	NO	Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.
		17	Pembangunan dan peningkatan RSUD dr. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan regional
		18	Melakukan revitalisasi fasilitas-fasilitas olahraga dan pembangunan fasilitas olahraga baru di setiap kabupaten/kota serta mendorong kompetisi cabang-cabang olahraga untuk menghasilkan atlet-atlet olahraga yang unggul dan kompetitif.
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	19	Mendorong Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Serta Pertambangan Melalui Pembangunan Industri Yang Terkait Dengan Sektor Dimaksud Sesuai Potensi Sumber Daya Alam Di Maluku.
		20	Membangun Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Seram dan Kepulauan Tanimbar.
		21	Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional).
		22	Stabilisasi harga komoditas lokal (hasil bumi dan laut).
		23	Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional).
		24	Pengembangan destinasi wisata dan mendorong pembangunan destinasi-destinasi wisata baru yang berorientasi pada wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya.
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	25	Menggenjot pembangunan Maluku dari Desa melalui pemberian bantuan keuangan/insentif kepada 1.234 desa yang ada di Maluku dengan fokus pada desa-desa swadaya dan menggerakkan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	26	Penegakan supremasi hukum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
		27	Melakukan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku melalui program dan kegiatan penataan kelembagaan, personil dan penciptaan budaya kerja yang menghargai kompetensi dan prestasi (Merit System).
		28	Melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas manajerial, konseptual dan teknis dari aparatur pemerintah daerah melalui kursus, diklat-diklat dan studi lanjut.



NO	MISI RPJMN 2025 – 2029	NO	Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.
8	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	29	Memberikan dukungan penuh terhadap tata kelola pemerintahan terbawah di tingkat desa melalui penyesuaian semua regulasi tentang desa berdasarkan UU Desa, dengan mendudukkan kembali marwah negeri adat sesuai tatanannya berdasarkan karakteristik budaya masing-masing wilayah adat di Maluku, serta penciptaan aparatur desa yang profesional
		30	Reformasi Regulasi (Perda, Pergub, Dll) Untuk Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Dan Mempermudah Investasi(lokal, regional,
		31	Mendorong kohesi sosial antar komunitas yang majemuk melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan event kultural seperti panas gandong, panas pela, bakti sosial dan lingkungan.

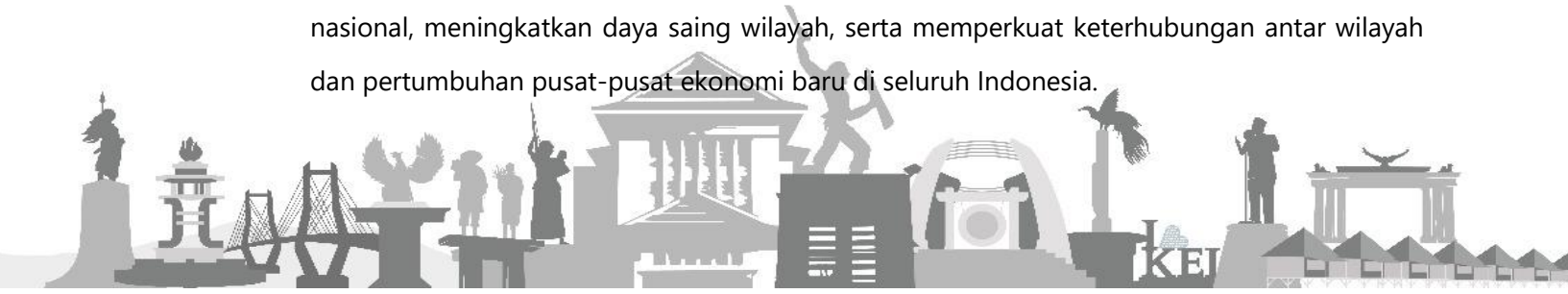
3.2.3 Pembangunan Kewilayahan

3.2.3.1 Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka mencapai visi pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang, Pemerintah menetapkan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan nasional. Penyusunan dan perencanaan PSN dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan kriteria yang terukur, transparan, dan akuntabel, serta mengedepankan asas kebermanfaatan nasional. PSN dapat diprakarsai dan dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun badan usaha swasta.

Keterlibatan multipihak ini mencerminkan bentuk kontribusi kolaboratif dalam mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Proyek-proyek yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, dan pihak swasta menjadi bagian integral dari orkestrasi pembangunan nasional yang memerlukan fasilitasi dan dukungan Pemerintah Pusat, baik dalam aspek regulasi, pembiayaan, maupun percepatan pelaksanaan.

Untuk menjamin kelancaran proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pendanaan PSN, Pemerintah akan menyediakan berbagai bentuk kemudahan, baik dalam bentuk perizinan maupun non-perizinan. Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan langkah-langkah harmonisasi regulasi serta penataan kelembagaan pengelolaan PSN agar tercipta iklim implementasi proyek yang efisien, responsif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi fondasi dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperkuat keterhubungan antar wilayah dan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di seluruh Indonesia.



Tabel 3.6

Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 – 2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
1	Bendungan Way Apu	Maluku	Kementerian Pekerjaan Umum
2	Pengembangan lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Maluku	Swasta
3	Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

Sumber: Perpres 12/2025-RPJMN 2025-2029,

3.2.3.1.1 Bendungan Way Apu

Pembangunan Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah dalam memperkuat ketahanan sumber daya air serta mendukung pembangunan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Bendungan ini dirancang sebagai bendungan multifungsi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong produktivitas dan ketahanan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Salah satu fungsi utama Bendungan Way Apu adalah sebagai sumber air baku yang akan memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Maluku, baik untuk keperluan domestik maupun industri. Selain itu, bendungan ini akan difungsikan sebagai sarana irigasi yang mendukung pengembangan sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan, menjamin kesinambungan usaha tani, dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

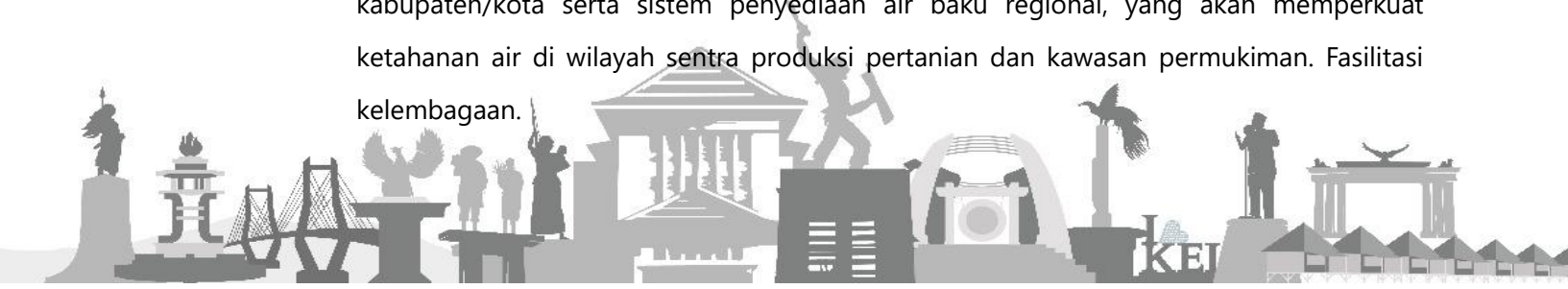
Di samping itu, keberadaan bendungan ini akan berperan penting dalam pengendalian banjir, khususnya pada kawasan rawan banjir musiman yang kerap mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kapasitas tampung yang memadai, bendungan ini mampu mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan melindungi infrastruktur vital serta permukiman warga.

Pengembangan Bendungan Way Apu juga mempertimbangkan potensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Energi listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan ini akan memperkuat pasokan listrik regional dan mendukung pemenuhan kebutuhan energi yang ramah lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan peran strategis tersebut, Bendungan Way Apu diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan kawasan yang integratif, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

Kebijakan Pendukung Provinsi Maluku

- Pemanfaatan air bendungan secara optimal, melalui pengembangan sistem irigasi lintas kabupaten/kota serta sistem penyediaan air baku regional, yang akan memperkuat ketahanan air di wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan permukiman. Fasilitasi kelembagaan.



- Mengintegrasikan Bendungan Way Apu dalam sistem mitigasi bencana daerah melalui penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas wilayah dan sektor.
- Pemanfaatan potensi energi terbarukan dari bendungan melalui penyusunan peta potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala kecil/menengah dan integrasi dalam Rencana Aksi Daerah Energi Baru dan Terbarukan (RAD EBT).
- Membentuk forum koordinasi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, swasta, dan masyarakat. Selain itu, akan dilakukan penyusunan regulasi daerah yang mendukung perizinan, fasilitasi investasi, dan harmonisasi kewenangan dalam pengelolaan Bendungan Way Apu sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

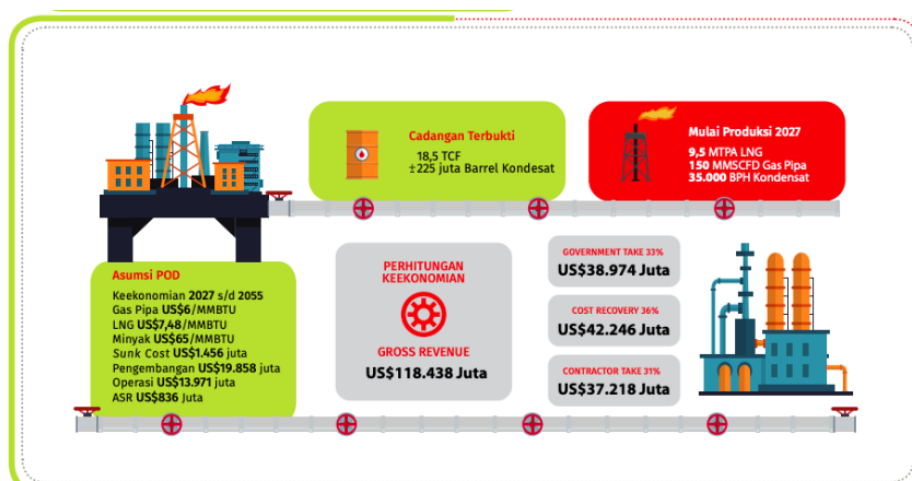
3.2.3.1.2 Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela

Selain memiliki potensi yang sangat besar pada produksi rempah-rempah dan sumber daya laut, Provinsi Maluku juga memiliki potensi gas bumi yang sangat besar yaitu mencapai 10,7 Triliun Cubic Feet (TCF) dengan masa reserve to production selama 70 tahun di Blok Masela. Berdasarkan potensi ini, proyek Blok Masela menjadi proyek gas bumi terbesar di dunia dengan nilai investasi mencapai 390 triliun rupiah.

Pembahasan mengenai proyek gas bumi di Blok Masela telah mengalami revisi dalam Rencana Pengembangan (Pod) pada pertengahan tahun 2019. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh SKK Migas dan Inpex pada 16 Juni 2019 di Tokyo, Jepang. Pengaruh positif yang diharapkan dari adanya kesepakatan ini adalah tetap berlangsungnya proyek Blok Masela hingga tahun 2055. Hal ini berkesesuaian dengan telah dijadikannya pengembangan lapangan abadi di Blok Masela sebagai salah satu prioritas dan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Maluku.

Lapangan abadi Masela memiliki cadangan minyak bumi yang terbukti sebanyak 18,5 TCF. Dengan potensi cadangan terbukti yang besar tersebut, proyek Blok Masela akan mulai berproduksi pada tahun 2030. Perhitungan potensi pendapatan kotor (gross revenue) sebanyak 118,438 juta Dolar Amerika. Penjabaran mengenai rencana pengembangan Lapangan Abadi Masela bisa dilihat dengan lebih rinci pada gambar berikut ini :

Gambar.3.3
Rencana Pengembangan (PoD) Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela



Kebijakan Pendukung Provinsi Maluku

- Pengembangan SDM Lokal dan Ketenagakerjaan melalui Menyusun Rencana Pengembangan SDM Energi dan Migas yang terintegrasi dengan kebutuhan Wilayah Kerja Masela, Memfasilitasi pelatihan vokasional dan sertifikasi tenaga kerja lokal melalui BLK dan lembaga pelatihan lainnya.
- Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal melalui pemberdayaan UMKM lokal dan koperasi sektor jasa, makanan, transportasi dan penginapan yang bisa bermitra dengan kegiatan operasional Wilayah Kerja Masela, Mendorong pelibatan BUMDes dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok.
- Perlindungan sosial dan pemetaan wilayah adat untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terdampak secara negatif.
- Penguatan tata kelola dan kelembagaan daerah dalam mendukung koordinasi lintas sektor serta memastikan keberlanjutan pembangunan kawasan.
- Pengarusutamaan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam setiap intervensi pembangunan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat setempat.

3.2.3.1.3 Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu/Maluku Integrated Port

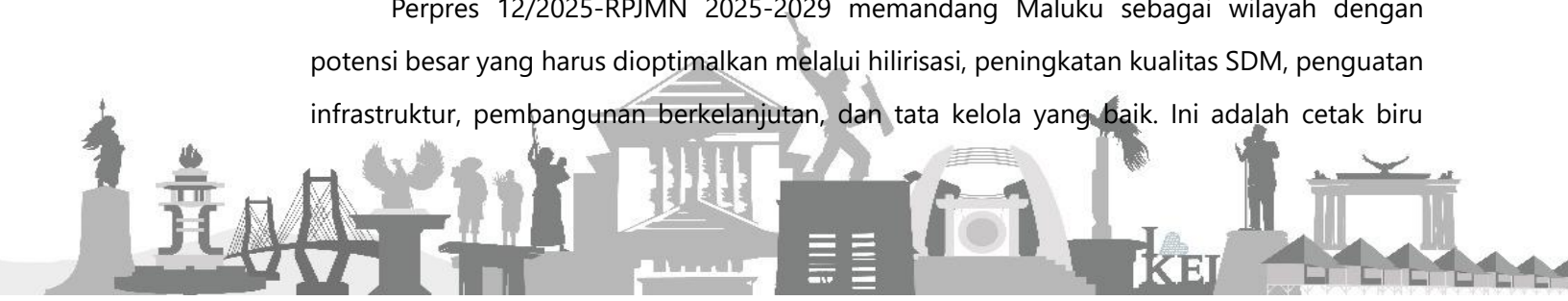
Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu/Maluku Integrated Port adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan pelabuhan baru yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan, mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Rencana pengembangan ini mencakup terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal ro-ro, pelabuhan perikanan, kawasan industri logistik, terminal LNG, dan pembangkit listrik.

Kebijakan Pendukung Provinsi Maluku (Maluku Integrated Port)

- Menyusun program pelatihan vokasi maritim, logistik, dan perikanan industri bagi tenaga kerja lokal.
- Mendorong kemitraan UMKM perikanan, koperasi nelayan, dan pelaku logistik lokal dalam ekosistem pelabuhan dan kawasan industri.
- Mengintegrasikan pembangunan Terminal LNG dan PLTU/PLTS dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta pengawasan dampak lingkungan.
- Mendorong pembangunan dan peningkatan jalan provinsi, konektivitas pelabuhan–bandara–industri.

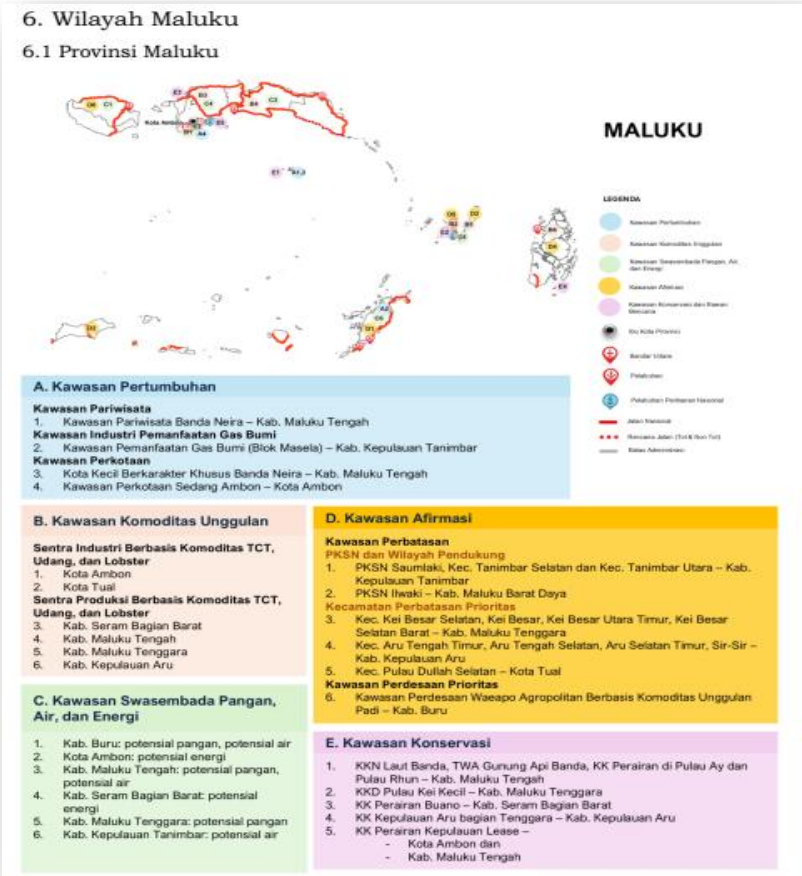
3.2.3.1.4 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

Perpres 12/2025-RPJMN 2025-2029 memandang Maluku sebagai wilayah dengan potensi besar yang harus dioptimalkan melalui hilirisasi, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola yang baik. Ini adalah cetak biru



nasional yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta memastikan keselarasan antara visi daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025 – 2029 telah membagi wilayah dalam klaster-klaster dengan fokus pembangunan spesifik. Pendekatan ini memastikan potensi unik setiap daerah tergarap maksimal, sekaligus mengantisipasi tantangan demi keberlanjutan sebagaimana digambarkan pada peta di bawah ini :

Gambar. 3.4
Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025 – 2029
Di Provinsi Maluku



Sumber : Perpres No 12 Tahun 2024, RPJMN 2025 - 2029

A. Kepulauan Tanimbar

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kabupaten Kepulauan Tanimbar diposisikan sebagai wilayah strategis dengan peran sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia Timur. Perpres No 12 Tahun 2025 mengarahkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Kawasan Pertumbuhan dengan Fokus Kawasan industri Pemanfaatan Gas Bumi, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi dengan Fokus Potensial Air, dan Kawasan Afirmasi yang diarahkan sebagai PKSN dan Wilayah Pendukung, Bentuk intervensi tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kepulauan Tanimbar
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
Kawasan Pertumbuhan					
1	A2	Blok Masela	Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Kab. Kepulauan Tanimbar (Blok Masela) melalui:		- Membangun Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Seram dan Kepulauan Tanimbar - Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat - Penguatan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan mewujudkan lembaga pendidikan (SMK, Politeknik, Perguruan Tinggi), khususnya yang relevan dengan standar industri migas. berupa program studi teknik perminyakan, geologi, teknik kimia, teknik mesin, kelistrikan, instrumentasi, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan bidang maritime serta Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang memadai melalui Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) yang berfokus pada keahlian migas dan maritim, didukung oleh teknologi simulasi dan laboratorium mutakhir - Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
			1	Penyiapan wilayah kerja pengembangan, dengan output penetapan wilayah kerja pengembangan gas bumi dan wilayah keprospekan migas	
			2	Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan dan pemanfaatan gas bumi, dengan output pembangunan jaringan gas bumi, sarana prasarana produksi pemanfaatan gas bumi, serta penerapan pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas	
			3	Penyiapan kapasitas SDM, dengan output pembangunan sarana prasarana dan program studi pendidikan tinggi vokasi berbasis industri migas	
			4	Penyiapan pembangunan sarana dan prasarana luar kawasan, dengan output pembangunan SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, akses internet, jaringan listrik, serta pembangunan RTH dan ruang terbuka Publik	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
2		Kab. Kepulauan Tanimbar (industri migas)		Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri. serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui:	
			1	Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i> : jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK)	
			2	Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri	
			3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i> : peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri	
			4	Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggaraan pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i> : pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja	
	C1	Kawasan Potensial		Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik / blue food berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui:	
	C3	Swasembada Pangan:			
		Kawasan Rentan Pangan	1	Penguatan produksi, dengan output optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, serta pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
		Kepulauan Tanimbar (padi)	2 Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pascapanen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengadaan gudang lumbung pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan akuakultur	
			3 Penguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan output penguatan dan pelatihan kelompok tani GAP (Good Agriculture practices), GHP (Good Handling practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian	
			Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal	
	C6	Swasembada Air:	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui:	
			1 Peningkatan kapasitas tampungan/sumbu daya air, dengan output : pembangunan Bendungan Tanimbar	
		Kawasan Afiriasi (Kawasan Perbatasan)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Saumlaki dan Ilwaki, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui :	
	D1	PKSN dan Wilayah Pendukung : PKSN Saumlaki, serta Kecamatan Tanimbar Selatan dan kecamatan Tanimbar Utara (Kabupaten Kepulauan Tanimbar)	1 Pemenuhan layanan dasar, dengan output: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga	
			2 Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sentra perikanan budidaya terutama di PKSN, dengan output : peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Saumlaki) yang dikelola dan operasional sesuai standar,	

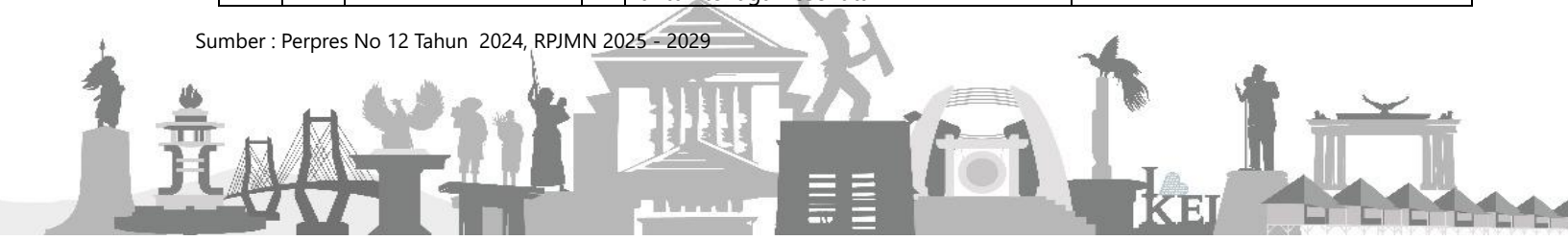


No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
			penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Tapa, Eray dan Mahaleta, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis	
			3 Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output ; penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku	
			4 Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output : <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN	
		Kawasan Afirmasi		
		Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka:	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui :	
			1 Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan output : penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran	
			2 Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output : pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen	
			3 Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output : pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja	
			4 Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output : pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA	
			5 Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output : rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh	



No		Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah	
				6	Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output : pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan		
				7	Peningkatan literasi, dengan output : pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital		
				8	Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan output : pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual		
		Kecamatan Perbatasan prioritas dan PKSN Saumlaki			Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :		
				1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>		
				2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis		
				2	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>		
				3	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting		
				4	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga Kesehatan		

Sumber : Perpres No 12 Tahun 2024, RPJMN 2025 - 2029



Sasaran pembangunan Kabupaten Tanimbar dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku. untuk periode 2025 – 2030 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Tanimbar
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Kepulauan Tanimbar
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,09
			2029	9,86
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	16,95
			2029	21,24
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	5,72
			2029	5,72
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	19,74
			2029	14,13
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,2395
			2029	0,1855
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	68,05
			2029	70,50
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	81,46
			2029	82,15
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	3,85
			2029	3,45

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

B. Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan yang difokuskan sebagai sentra produksi berbasis komoditas TCT, udang, dan lobster dan dalam skala yang signifikan dan Kawasan Afirmasi yang di fokuskan pada Kawasan Kecamatan Perbatasan Prioritas yang bertujuan mengatasi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan negara di wilayah kebijakan spesifik untuk mencapai sasaran pembangunan pada wilayah ini tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Maluku Tenggara
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
	Kawasan Komoditas Unggulan		
B5	Komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster	Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui :	• Mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), peternakan, perkebunan, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional • Mendorong Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Serta Pertambangan Melalui Pembangunan Industri Yang Terkait Dengan Sektor Dimaksud Sesuai Potensi Sumber Daya Alam Di Maluku



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
		Sentra Produksi	1	Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan	• Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan
			2	Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat	
			3	Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	
			4	Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan	
			5	Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat	
			6	Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan output peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital	
C1	C1	Kawasan Potensial		Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik / blue food berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui:	
	C3	Swasembada Pangan:			
	C5	Kab. Maluku Tenggara (ubi, rumput laut)	1	Penguatan produksi, dengan output optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, serta pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			2	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pascapanen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengadaan gudang lumbung pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan akuakultur	
			3	Penguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan output penguatan dan pelatihan kelompok tani GAP (Good Agriculture practices), GHP (Good Handling practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian	
				Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal	
		Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka:		Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui :	
		Penguatan Sekolah Terbuka	1	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan output : penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran	
			2	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output : pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen	
			3	Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output : pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja	



No			Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
					4 Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output : pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA	
					5 Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output : rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh	
					6 Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output : pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan	
					7 Peningkatan literasi, dengan output : pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital	
					8 Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan output : pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual	
			Kawasan Konservasi		Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui :	
			KKD Pulau Kei Kecil		1 Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan output: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.	
					2 Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan output: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan Kawasan	
					3 Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan output: inventarisasi keterancaman Spesies dan konservasi biota yang terancam punah.	
					4 Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
			5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan output: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)	

Sumber : Perpres No 12 Tahun 2024, RPJMN 2025 - 2029

Sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku. untuk periode 2025 – 2030 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Maluku Tenggara
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,04
			2029	6.73
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	21,31
			2029	27,14
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	6,93
			2029	6,93
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	15,76
			2029	12,64
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,2398
			2029	0,2072
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	70,82
			2029	73,13
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	75,96
			2029	80,25
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	4,66
			2029	4,20

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

C. Kabupaten Maluku Tengah

Maluku Tengah diarahkan sebagai Kawasan Pertumbuhan, fokus pada Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Komoditas Unggulan, fokus pada sentra produksi berbasis kmomoditas TCT, Udang dan Lobster, serta Kawasan swasembada pangan, air dan energi dan Kawan Konservasi.

Tabel 3.11
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Maluku Tengah
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
	Kawasan Pertumbuhan			
1.	A1	Kawasan Pariwisata Banda Neira	Pengembangan kawasan pariwisata Banda Neira di Kab. Maluku Tengah melalui :	• Pengembangan destinasi wisata dan mendorong pembangunan destinasi-destinasi wisata baru yang berorientasi pada wisata alam,



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
					wisata sejarah dan wisata budaya
			1	Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan output, penanganan jalan daerah, peningkatan fasilitas pelabuhan dan dermaga	• Mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), peternakan, perkebunan, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional) • Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
			2	Peningkatan daya tarik pariwisata alam, sejarah, dan budaya banda, dengan output pengembangan desa wisata, pengembangan atraksi wisata budaya, penyediaan prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan, pendudukan event daerah, pembangunan pusat informasi kepariwisataan, termasuk konten peta wisata (tourism map) yang berkualitas, serta pemanfaatan cagar budaya dan aset sejarah	• Penguatan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan mewujudkan lembaga pendidikan (SMK, Politeknik, Perguruan Tinggi), khususnya yang relevan dengan standar industri migas. berupa program studi teknik perminyakan, geologi, teknik kimia, teknik mesin, kelistrikan, instrumentasi, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan bidang maritime serta Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang memadai melalui Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) yang berfokus pada keahlian migas dan maritim, didukung oleh teknologi simulasi dan laboratorium mutakhir
			3	Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan output penyediaan akomodasi dan restoran yang berkualitas, kios cinderamata, pengembangan pasar tematik wisata, serta penyediaan layanan kesehatan wisatawan	• Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat • Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
			4	Pengembangan kapasitas SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan output: fasilitasi dan pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata, penguatan tata kelola desa wisata dan kampung adat	• Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan • Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			5	Penguatan dan perluasan promosi dan pemasaran, dengan output promosi terpadu secara nasional dan internasional, serta pembangunan	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
				jaringan pengetahuan dan media rekonstruksi diplomasi budaya jalur rempah	
			6	Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan output peningkatan akses pembiayaan, literasi bisnis dan mutu produk IKM/UMKM, pembentukan dan pembinaan BUMDeS dan koperasi berbasis pariwisata, perikanan, dan perkebunan	
3	A3	Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira		Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira melalui:	
			1	Penataan ruang kota, dengan output penetapan RDTR dan RTBL, penataan lanskap dan pembangunan fasilitas rekreasi, termasuk diantaranya penyediaan <i>wayfinding</i> , pembangunan <i>promenade</i> sepanjang pantai, pengembangan <i>shared-street</i> , <i>street furniture</i> , dan manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan	
			2	Peningkatan citra kota, dengan output pemanfaatan cagar budaya (<i>adaptive reuse</i>) sesuai branding kawasan, penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya di dalam dan luar negeri	
			3	Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan, dengan output peningkatan SPAM, SPAL, drainase, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, penyediaan akses internet dan listrik berbasis EBT, penataan kawasan, serta peremajaan/pemugaran pemukiman kumuh, bantuan pembangunan rumah swadaya, serta penyediaan fasilitas asrama Pendidikan	
			4	Penguatan peran kawasan, dengan output penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor <i>ketenagakerjaan</i>	
			5	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan output : pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, serta pengembangan bandar udara dan Pelabuhan	
			6	Peningkatan tata kelola pelayanan publik, dengan output : pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang transparan dan akuntabel, serta penerepan Mal Pelayanan publik (MPP) digital	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
7	B3	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster)		Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui :	
		Sentra Produksi	1	Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan	
			2	Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat	
			3	Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	
			4	Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (smart fisheries village), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan	
			5	Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat	
			6	Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan output peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital	
		Kab. Maluku Tengah (pariwisata dan ekonomi kreatif)		Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui:	
14			1	Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i> : jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
				dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK)	
			2	Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri	
			3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i> : peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri	
			4	Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggaraan pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i> : pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja	
	C1	Kawasan Potensial		Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik / blue food berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui:	
	C3	Swasembada Pangan:			
	C3	Kab. Maluku Tengah (padi, kedelai, pangan akuatik)	1	Penguatan produksi, dengan output optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, serta pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut	
			2	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pascapanen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengadaan gudang lumbung pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan akuakultur	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			3	Penguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan output penguatan dan pelatihan kelompok tani GAP (Good Agriculture practices), GHP (Good Handling practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian	
			4	Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal	
	E2	Kawasan Konservasi		Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui:	
		Pulau Rhun	1	Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan output: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.	
		Perairan Pulau Lease	2	Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan output: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan	
			3	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan output: inventarisasi keterancaman Spesies dan konservasi biota yang terancam punah.	
			4	Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan Kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon	
			5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan konservasi, dengan output: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)	
			6	Pengembangan potensi <i>geopark</i> di TWA Gunung Api Banda, dengan output: pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan fasilitasi usaha ekonomi produktif, kelompok masyarakat	
		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
		Penanganan Penyakit TBC:	1	Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output : penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak	
			2	Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output : penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, serta peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL	
		Penanganan Penyakit ISPA:	1	Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan output ; penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta optimalisasi data dan ioformasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidat layak	
		Penanganan Penyakit Kusta	1	Etiminasi penyakit kusta, dengan output : penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan penangendalian kusta, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL	
		Penanganan Penyakit rabies ;	1	Eliminasi penyakit rabies, dengan output : penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan	

- **Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Banda Neira dan Sekitarnya berdasarkan Indikasi Intervensi Daerah**
 - a) Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Fokus utama adalah membuka akses yang lebih mudah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
 - Optimalisasi Jalur Pelayaran: Mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas kapal cepat (fast boat) dari Ambon dan Tual menuju Banda Neira, serta meningkatkan kualitas layanan dan keamanan selama perjalanan.
 - Peningkatan Kapasitas Bandara: Melakukan studi kelayakan dan implementasi untuk memperpanjang landasan pacu Bandara Banda Neira agar dapat mengakomodasi pesawat yang lebih besar, serta meningkatkan fasilitas terminal.
 - Penyediaan Transportasi Lokal: Mengembangkan sistem transportasi darat dan laut yang terorganisir di sekitar kawasan Banda untuk memudahkan pergerakan wisatawan.
 - b) Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Sejarah, Budaya, dan Ekologi Pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan keunikan Banda Neira sebagai "mutiara" sejarah rempah-rempah dunia dan kekayaan ekosistem lautnya.



- Konservasi Situs Sejarah: Memprioritaskan revitalisasi dan pemeliharaan cagar budaya, seperti benteng-benteng peninggalan VOC, rumah-rumah tua, dan situs-situs bersejarah lainnya. Ini akan menjadikannya destinasi wisata sejarah yang otentik.
 - Pengembangan Ekowisata Bahari
- c) Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal (UMKM) Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.
- Pelatihan Sumber Daya Manusia: Memberikan pelatihan profesional kepada masyarakat lokal,
 - Promosi Produk Ekonomi Kreatif: Mendukung UMKM lokal untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk khas Banda Neira
- d) Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Memastikan pertumbuhan pariwisata tidak merusak alam dan lingkungan yang menjadi daya tarik utama kawasan.
- Penetapan Zona Konservasi untuk menetapkan zona-zona konservasi di perairan sekitar Banda Neira guna melindungi ekosistem laut yang sensitif dari aktivitas pariwisata.

Sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tengah dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku. untuk periode 2025 – 2030 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Maluku Tengah
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,07
			2029	6,87
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	15,96
			2029	20,27
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	18,14
			2029	18,14
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	14,38
			2029	9,35
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,254
			2029	0,250
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	79,39
			2029	77,77
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	83,36
			2029	84,05
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	5,84
			2029	5,32

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025



D. Kabupaten Buru

Arah pengembangn kewilayahan Kabupten Buru diarahkan sebagai Kawasan swasembada pangan, air dan energi yang difokuskan pada Kawasan potensial pangan dan potensial air serta Kawasan Afirmasi yang difokuskan sebagai Kawasan Perdesaan Priritas. Indikasi Intervensi pusat dan dukungan pemerintah daerah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Buru
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
1	C1	Kawasan Potensial		Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik / blue food berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui:	• Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat • Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
	C3	Swasembada Pangan:			• Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat
	C1	Padi Pangan Akuatik	1	Penguatan produksi, dengan output optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, serta pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut	• Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			2	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pascapanen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengadaan gudang lumbung pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan den akuakultur	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			3	Penguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan output penguatan dan pelatihan kelompok tani GAP (Good Agriculture practices), GHP (Good Handling practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian	
			4	Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal	
	C1	Kawasan Potensial			
		Swasembada Air:		Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui:	
			1	Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan output : pembangunan Bendungan Way Apu	
	D6	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas		Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi melalui :	
		Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi	1	Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar, dengan output : penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif	
			2	Peningkatan aksesibilitas desa, dengan output : pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa	
			3	Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan output : pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa	
			4	Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan output : fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
		Kecamatan Perbatasan prioritas dan PKSN Saumlaki		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
			1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>	
			2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis	
			2	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>	
			3	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting	
			4	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan	
		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui :	
		Penanganan Penyakit Pneumonia		Pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia dengan output : peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia	



- **Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Waeapo Agropolitan berbasis Komoditas Unggulan Padi dengan mendukung intervensi RPJMN Tahun 2025–2029 melalui :**
 1. Peningkatan layanan dasar perdesaan (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan energi) untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat desa.
 2. Penguatan aksesibilitas desa melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah serta jaringan logistik yang mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian.
 3. Diversifikasi ekonomi lokal dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agroindustri berbasis padi, serta pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung nilai tambah produk pertanian.
 4. Penguatan tata kelola kawasan perdesaan yang inklusif dan partisipatif, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, kemitraan petani, dan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.
 5. Pengarusutamaan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan melalui praktik pertanian modern, ramah lingkungan, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Sasaran pembangunan Kabupaten Buru dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2029 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Buru
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,17
			2029	6,78
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	13,66
			2029	17,24
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	5,02
			2029	5,02
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	17,27
			2029	13,74
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,2472
			2029	0,2238
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	73,09
			2029	75,21
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	79,73
			2029	80,42
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	4,61
			2029	4,07

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

E. Kepulauan Aru

Arah pengembangan kewilayahan Kepulauan Aru dalam RPJMN 2025 – 2029 mengarahkan Kepulauan Aru sebagai Kawasan Komoditas Unggulan yang difokuskan sebagai sentra produksi



berbasis komoditas TCT, udang dan lobster dan juga Kawasan Afirmasi yang difokuskan sebagai Kecamatan Perbatasan Prioritas. Indikasi intervensi dalam RPJMN sebagai berikut :

Tabel 3.15
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kepulauan Aru
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
	Kawasan Komoditas Unggulan				
10	B6	Sentra Produksi berbasis Komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster		Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui :	• Mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), peternakan, perkebunan, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
		Sentra Produksi	1	Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan	• Mendorong Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Serta Pertambangan Melalui Pembangunan Industri Yang Terkait Dengan Sektor Dimaksud Sesuai Potensi Sumber Daya Alam Di Maluku
			2	Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat	• Memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-sumber pembiayaan (bank dan lembaga keuangan lainnya) • Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional) • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan internet
			3	Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	• Stabilitas Harga Komoditas lokal (Hasil bumi dan Laut) • Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat • Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta pemerataan guru
			4	Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (smart fisheries village), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan	• Pendampingan program makan siang bergizi bagi anak sekolah dan pesantren • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			5	Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat	• Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan • Mitigasi Bencana • Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



No		Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah	
				6	Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan output peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital		
		Kawasan Rentan Pangan			Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan output : Pengembangan kawasan sagu dan padi, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan		
		Kawasan Rendah elektrifikasi :			Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan output : pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T		
		Kawasan Afirmasi (Kawasan Perbatasan)			Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kecamatan perbatasan prioritas, melalui :		
	D4	Kecamatan perbatasan prioritas D4 Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir	1		Pemenuhan layanan dasar, dengan output: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga		
			2		Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sentra perikanan budidaya terutama di PKSN, dengan output : peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Saumlaki) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Tepa, Eray dan Mahaleta, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis		



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			3	Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output ; penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku	
			4	Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output : <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah Kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN	
		Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka:		Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui :	
		Kab. Kepulauan Aru (Daerah Tertinggal)	1	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan output : penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran	
			2	Pemberian insentif, jaminan eamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output : pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen	
			3	Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output : pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja	
			4	Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output : pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA	
			5	Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output : rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh	
			6	Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output : pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan	
			7	Peningkatan literasi, dengan output : pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital	
			8	Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan output : pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
				pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual	
		Daerah Tertinggal dan Kecamatan perbatasan prioritas		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
			1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>	
			2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis	
			2	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>	
		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota	3	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting	
			4	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan	
		Penanganan Penyakit TBC:		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui :	
				Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output : penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
		Penanganan Penyakit Pneumonia		Pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia dengan output : peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia	
		Kawasan Konservasi		Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui	
	E4	KK Kepulauan Aru bagian Tenggara (Kab. Kepulauan Aru)	1	Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan output: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.	
			2	Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan output: optimalisasi pegelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan	
			3	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan output: inventarisasi keterancaman Spesies dan konservasi biota yang terancam punah.	
			4	Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output : penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan Kawasan hutan konservasi untuk iplementasi nilai ekonomi karbon	
			5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan output: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)	

Sasaran pembangunan Kabupaten Buru dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2030 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Kepulauan Aru
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,02
			2029	6,74
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	26,44
			2029	32,90
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	7,48
			2029	7,48
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	19,61
			2029	14,04
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,2778



No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Kepulauan Aru
			2029	0,2212
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	69,32
			2029	72,08
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	81,41
			2029	83,10
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	1,78
			2029	1,56

F. Seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat diarahkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan dengan fokus Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT, Udang dan Lobster, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi dengan fokus Potensial Energi serta Kawasan Konservasi dengan fokus KK Perairan Buano. *Highlight* Indikasi Intervensi sebagai berikut :

Tabel 3.17

Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Seram Bagian Barat

Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
1	B4	<i>Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster)</i>		<i>Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui :</i>	- Membangun Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Seram dan Kepulauan Tanimbar - Mendorong Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Serta Pertambangan Melalui Pembangunan Industri Yang Terkait Dengan Sektor Dimaksud Sesuai Potensi Sumber Daya Alam Di Maluku - Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat - Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan - Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan
		<i>Sentra Produksi</i>	1	Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan	
			2	Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat	
			3	Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			4	Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (smart fisheries village), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan	
			5	Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat	
			6	Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan output peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital	
C2	C2	Kawasan Potensial			
	C4	Kawasan Potensial Swasembada Energi		Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:	
			1	Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan output: pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT berbasis biomassa (PLTBio) dan surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), penataan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk	
			2	Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output ; penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit	
		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui :	
		Penanganan Penyakit rabies		Eliminasi penyakit rabies, dengan output penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan	
	E1	Kawasan Konservasi		Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui	
	E3	KK Perairan Buano	1	Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan output: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			2	Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan output: optimalisasi pegelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan Kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di awasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan	
			3	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan output: inventarisasi keterancaman Spesies dan konservasi biota yang terancam punah.	
			4	Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan Kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon	
			5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan konservasi, dengan output: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)	

Sasaran pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2029 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

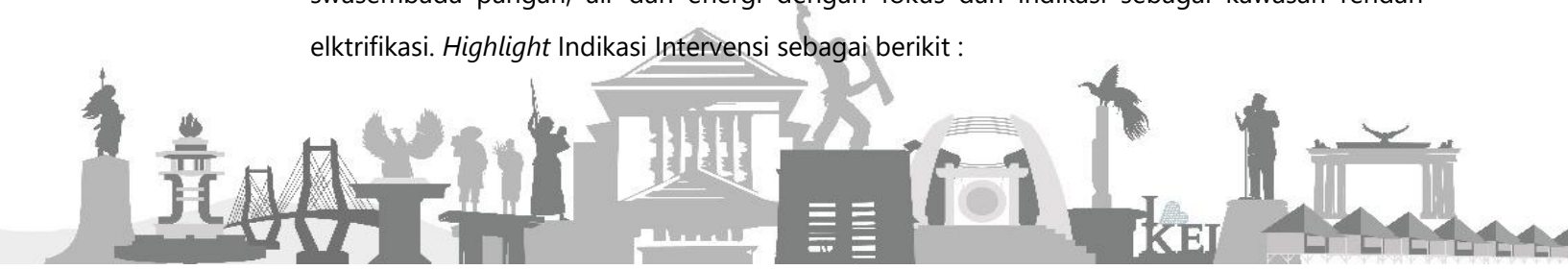
Tabel 3.18
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Seram Bagian Barat
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,21
			2029	7,75
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	10,89
			2029	13,59
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	6,38
			2029	6,38
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	16,51
			2029	12,08
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,2460
			2029	0,2220
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	73,16
			2029	75,56
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	82,87
			2029	83,56
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	4,29
			2029	3,85

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

G. Seram Bagian Timur

RPJMN 2025 – 2029 mengarahkan seram bagian timur sebagai Kawasan potensial swasembada pangan, air dan energi dengan fokus dan indikasi sebagai kawasan rendah elektrifikasi. *Highlight* Indikasi Intervensi sebagai berikut :



Tabel 3.19
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Seram Bagian Timur
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
	C2	Kawasan Potensial			
	C4	Swasembada Energi		Peningkatan ketahanan energi terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui :	• Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Listrik • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
1		Kawasan Rendah elektrifikasi :		Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan output : pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T	
				Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
				Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:	
			1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>	
			2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis	
			2	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			3	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting	
			4	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan	
		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui :	
		Penanganan Penyakit Pneumonia	1	Pencegahan dan pengendalian pemyakit pneumonia dengan output : peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia	

Seram Bagian Timur juga menjadi kawasan strategis pengembangan sagu sebagai komoditas unggulan daerah. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pengembangan terintegrasi berbasis hilirisasi sagu, dengan strategi sebagai berikut :

- **Pemetaan dan Penataan Kawasan Budidaya Sagu**
Menetapkan zona kawasan budidaya dan konservasi sagu berbasis tata ruang dan daya dukung lingkungan, serta memberikan kepastian hukum atas lahan bagi petani sagu rakyat.
- **Peningkatan Kapasitas Produksi dan Teknologi Pengolahan**
Mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk panen dan pengolahan sagu, mulai dari pengolahan pati hingga produk turunan seperti sagu instan, makanan olahan, bioetanol, dan bioplastik.
- **Penguatan Kelembagaan Petani dan Industri UMKM Sagu**
Pengembangan koperasi petani sagu, BUMDes, dan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkuat rantai nilai (value chain) sagu dari hulu ke hilir.
- **Fasilitasi Investasi dan Insentif Hilirisasi**
Mendorong investasi sektor hilir dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta dukungan infrastruktur dasar dan penunjang industri pengolahan sagu.
- **Promosi dan Diversifikasi Pasar**
Menyusun strategi branding dan pemasaran sagu Maluku sebagai produk sehat, alami, dan berkelanjutan ke pasar domestik dan ekspor.
- **Riset dan Inovasi Produk Turunan Sagu**
Mendorong perguruan tinggi dan lembaga riset lokal untuk melakukan inovasi produk turunan sagu yang bernilai tambah tinggi, serta mendukung riset keberlanjutan budidaya sagu di lahan marginal.



Sasaran pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2029 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Seram Bagian Timur
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	4,40
			2029	6,40
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	15,50
			2029	19,33
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	5,91
			2029	5,91
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	15,76
			2029	12,04
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,1833
			2029	0,1127
6	Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	70,88
			2029	73,44
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	84,47
			2029	85,16
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	2,99
			2029	2,70

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

H. Maluku Barat Daya

Maluku Barat Daya diarahkan sebagai Kawasan Afirmasi dengan fokus Kawasan Perbatasan PKSN Ilwaki. *Highlight* Indikasi Intervensi sebagai berikut :

Tabel 3.21
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Maluku Barat Daya
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
1				Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di puLau-pulau kecil melalui:	• Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Listrik • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan • Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta pemerataan guru • Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan siswa berprestasi • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Kawasan Rawan Air		Pengauatankawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan output : pembangunan embung, penyediaan infrastruktur desalinisasi air laut di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air	
		Kawasan Afirmasi (Kawasan Perbatasan)		Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ilwaki kecamatan perbatasan prioritas, melalui :	
		PKSN dan wilayah pendukung			



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
	D2	PKSN Ilwaki	1	Pemenuhan layanan dasar, dengan output: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga	
			2	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sentra perikanan budidaya terutama di PKSN, dengan output : peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Saumlaki) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Tapa, Eray dan Mahaleta, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis	
			3	Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output ; penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku	
			4	Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output : <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN	
		Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka:		Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui :	
		Daerah tertinggal dan PKSN Ilwaki	1	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan output : penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran	
			2	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output : pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			3	Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output : pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja	
			4	Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output : pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA	
			5	Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output : rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh	
			6	Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output : pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan	
			7	Peningkatan literasi, dengan output : pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital	
			8	Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan output : pengembangan kurikulum dan system penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual	
		Daerah tertinggal dan PKSN Ilwaki		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
			1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis	
			2	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>	
			3	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting	
			4	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan	
		Layanan Unggulan RS : Seluruh Kab/Kota		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui :	
		Penanganan Penyakit ISPA:	1	Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan output ; penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak	
		Penanganan Penyakit Pneumonia	2	Pencegahan dan pengendalian pemyakit pneumonia dengan output : peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia	
		Penanganan Penyakit rabies ;	3	Eliminasi penyakit rabies, dengan output : penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan	

Sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2029 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya
Mendukung Pencapaian Target Provinsi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Maluku Barat Daya
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	6,01
			2029	8,80
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	21,38
			2029	26,68
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	4,83
			2029	4,83
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	22,72
			2029	16,15
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,1610



No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Maluku Barat Daya
			2029	0,0970
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	68,29
			2029	71,67
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	82,95
			2029	83,64
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	2,12
			2029	1,87

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

I. Buru Selatan

RPJMN 2025 – 2029 mengarahkan kabupaten Buru Selatan sebagai Kawasan Afirmasi dengan fokus Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka. *Highlight* Indikasi Intervensi sebagai berikut :

Tabel 3.23
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Buru Selatan
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
1	Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka:	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui : 1 Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan output : penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran 2 Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output : pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen 3 Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output : pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja 4 Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output : pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA 5 Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output : rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh	• Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta pemerataan guru • Pendampingan program makan siang bergizi bagi anak sekolah dan pesantren • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			6	Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output : pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan	
			7	Peningkatan literasi, dengan output : pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital	
			8	Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan output : pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
			1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>	
			2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis	
			3	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>	
			4	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting	
			5	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga esehatan	

Sasaran pembangunan Kabupaten Buru Selatan dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2029 ditampilkan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.24
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Buru Selatan
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Buru Selatan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,19
			2029	6,48
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	14,21
			2029	17,66
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	3,08
			2029	3,08
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	11,51
			2029	8,54
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,2215
			2029	0.2075
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	68,95
			2029	72,00
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	-
			2029	-
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	0,87
			2029	0,81

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

J. Kota Ambon

Sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku, Kota Ambon diarahkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Kawasan Pertumbuhan dengan fokus sebagai Kawasan Perkotaan Sedang, Kawasan Komoditas Unggulan dengan fokus sebagai sentra Industri dan sentra produksi berbasis Komoditas TCT, Udang dan Lobsetr. Kawasan swasembada pangan, air dan energi dengan fokus kawasan potensian energi dan Kawasan konservasi. *Highlight* Indikasi Intervensi sebagai berikut :

Tabel 3.25
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kota Ambon
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
4	A4	Kawasan Perkotaan Sedang Ambon	1	Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan output rencana induk (masterplan)	• Pengembangan Costal Road • Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Listrik • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan internet • Mendorong Pengembangan usaha di bidang pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), peternakan, perkebunan, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional • Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan
			2	Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan output: penguatan <i>branding</i> kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota	
			3	Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan output : pembangunan dan peningkatan jalan, transportasi umum massal perkotaan, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya	

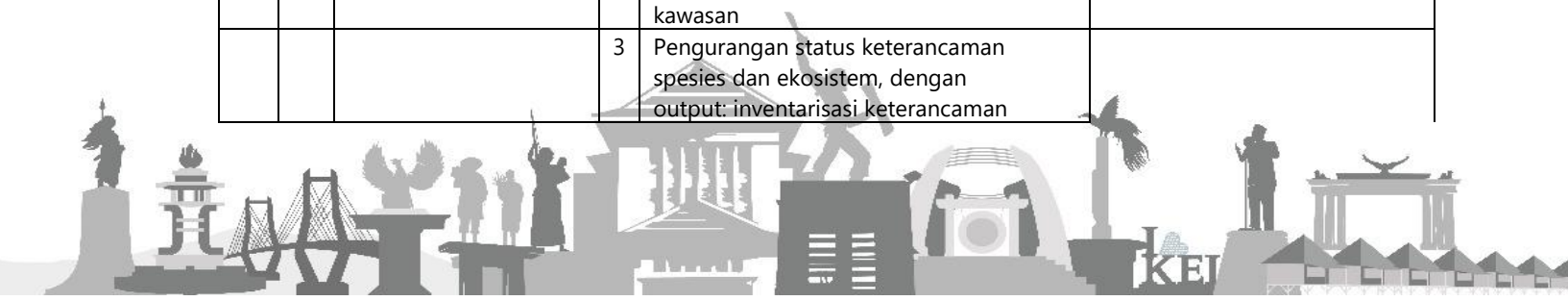
No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
					budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)
					• Memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-sumber pembiayaan (bank dan lembaga keuangan lainnya)
			4	Penguatan peran kawasan, dengan output penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	• Stabilitas Harga Komoditas lokal (Hasil bumi dan Laut) • Mendorong Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Serta Pertambangan Melalui Pembangunan Industri Yang Terkait Dengan Sektor Dimaksud Sesuai Potensi Sumber Daya Alam Di Maluku
5	B1	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster)		Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui :	• Menggenjot pembangunan Maluku dari Desa melalui pemberian bantuan keuangan/insentif kepada 1.234 desa yang ada di Maluku dengan fokus pada desa- desa swadaya dan menggerakkan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT, Udang dan Lobster	1	Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan	• Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan internet • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan • Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta pemerataan guru
			2	Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat	• Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Listrik • Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan • Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Mitigasi Bencana



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			3	Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	
			4	Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (smart fisheries village), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan	
			5	Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat	
			6	Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan output peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital	
		Kota Ambon (perikanan)		Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri. serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui:	
12			1	Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i> : jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK)	
			2	Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri	
			3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i> : peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri	
			4	Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggaraan pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i> : pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
				pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja	
	C2	Kawasan Potensial Swasembada Energi		Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:	
		Kota Ambon	1	Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan output: pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT berbasis biomassa (PLTBio) dan surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), penataan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk	
			2	Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output; penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit	
		penanganan penyakit ISPA:		Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kuslitas hunian tidatk layak	
		Penanganan Penyakit rabies		Eliminasi penyakit rabies, dengan output penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan	
		Kawasan Konservasi		Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui	
	E5	KK Perairan Kepulauan Lease (Kota Ambon)	1	Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan output: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konsenvarasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.	
			2	Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan output: optimalisasi pegelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan	
			3	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan output: inventarisasi keterancaman	

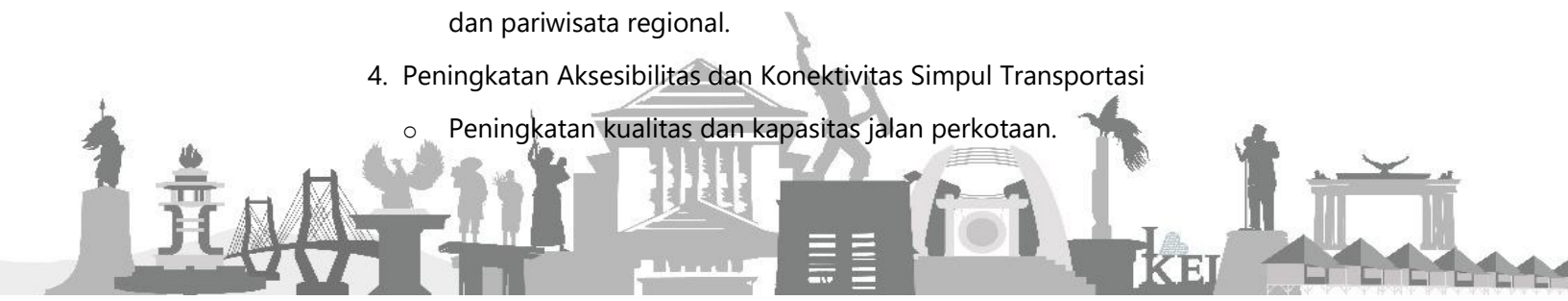


No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
				Spesies dan konservasi biota yang terancam punah.	
			4	Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon	
			5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan output: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)	
			6	Pengembangan potensi <i>geopark</i> di TWA Gunung Api Banda, dengan output: pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan fasilitasi usaha ekonomi produktif, kelompok masyarakat	

• **Kebijakan Pengembangan Kawasan Perkotaan Ambon berdasarkan Indikasi Intervensi Daerah**

Pengembangan Kawasan Perkotaan Ambon diarahkan untuk memperkuat peran Ambon sebagai pusat pertumbuhan utama Maluku serta simpul konektivitas antarwilayah. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan tata ruang, pembangunan sarana-prasarana, peningkatan daya saing kota, dan perbaikan tata kelola pelayanan publik. Intervensi yang ditempuh antara lain:

- 1. Penataan Ruang Kota
 - o Menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang kota sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 - o Mengarahkan pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan ruang terbuka publik yang seimbang dan berkelanjutan.
- 2. Peningkatan Citra Kota
 - o Mengembangkan branding Ambon sebagai kota musik dunia, pusat perdagangan, jasa, dan budaya Maluku.
 - o Revitalisasi kawasan waterfront, pusat kota, dan ruang publik untuk memperkuat identitas kota yang modern namun tetap berakar pada kearifan lokal.
- 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan serta Penguatan Peran Kawasan
 - o Penyediaan layanan dasar perkotaan: air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, energi, dan listrik.
 - o Pengembangan infrastruktur digital dan ruang terbuka hijau.
 - o Penguatan Ambon sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata regional.
- 4. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Simpul Transportasi
 - o Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan perkotaan.



- Integrasi jaringan transportasi darat, laut, dan udara melalui Bandara Pattimura, Pelabuhan Yos Sudarso, dan simpul transportasi lokal.
 - Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang aman, nyaman, dan terjangkau.
5. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik
- Modernisasi sistem pelayanan publik berbasis digital (smart city).
 - Peningkatan kapasitas SDM aparatur perkotaan.
 - Mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola kota.

Sasaran pembangunan Kota Ambon dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2029 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.26
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Ambon
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Kota Ambon
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,14
			2029	6,96
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	33,43
			2029	42,47
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	31,12
			2029	31,12
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	6,75
			2029	6,75
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,2558
			2029	0,2272
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	83,72
			2029	85,45
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	76,48
			2029	77,16
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	11,90
			2029	10,97

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

Sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku, Ambon adalah pusat segala aktivitas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga pendidikan. Namun, layaknya sebuah jantung yang terus berdetak, Ambon menghadapi tantangan besar: kemacetan lalu lintas. Ruas jalan utama yang sempit dan topografi kota yang berbukit membuat pergerakan menjadi terhambat, menghalangi potensi besar yang dimiliki kota ini. Dalam mengatasi masalah tersebut, terutama di pusat kota, serta untuk membuka akses ke wilayah-wilayah pesisir yang selama ini sulit dijangkau. Pengembangan Coastal Road Kota Ambon dapat mengubah wajah kota Ambon menjadi lebih modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Pengembangan Coastal Road sejalan dengan visi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, dan konektivitas wilayah. Sehingga dapat diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir dan mendukung visi pembangunan



Maluku yang lebih merata. Pengembangan costal road menjadi salah satu upaya menyelesaikan permasalahan yakni :

- 1. Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Ambon
- 2. Pengembangan Icon Ambon City Of Music (Mendukung Pariwisata)
- 3. Pengembangan UMKM
- 4. Ruang Terbuka Publik (Mendukung Pembangunan Social Capital)
- 5. Pengembangan Pendidikan dan Industri Digital

Gambar 3.5
Costal Road Kota Ambon (Jalan Lingkar Teluk Ambon)



K. Kota Tual

Lampiran IV RPJMN 2025 – 2029 memberi arah pengembangan kewilayahan bagi Kota Tual sebagai Kawasan Komoditas Unggulan fokus pada Industri berbasis komoditas unggulan TCT, udang dan lobster dan Kawasan Perbatasan Prioritas. *Highlight* Indikasi Intervensi sebagai berikiut :

Tabel 3.27
Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Kota Tual
Dalam RPJMN 2025 – 2029

No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
6	B2	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster)		Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui :	• Mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), peternakan, perkebunan, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional
		Sentra Produksi	1	Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
			2 Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan output pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat	• Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan internet • Penguatan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan mewujudkan lembaga pendidikan (SMK, Politeknik, Perguruan Tinggi), khususnya yang relevan dengan standar industri migas. berupa program studi teknik perminyakan, geologi, teknik kimia, teknik mesin, kelistrikan, instrumentasi, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan bidang maritime serta Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelatihan yang memadai melalui Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) yang berfokus pada keahlian migas dan maritim, didukung oleh teknologi simulasi dan laboratorium mutakhir • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta pemerataan guru • Pendampingan program makan siang bergizi bagi anak sekolah dan pesantren
			3 Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan output pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	
			4 Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (smart fisheries village), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan	
			5 Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat	
			6 Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan output peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital	
13	Kota Tual (perikanan)		Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri. serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui:	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
			1 Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i> : jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK)	
			2 Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri	
			3 Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i> : peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri	
			4 Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggaraan pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i> : pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja	
		Kawasan Afirmasi		
		Kawasan Perbatasan	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Saumlaki dan Ilwaki, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui :	
	D5	PKSN dan Wilayah Pendukung : Kec. Pulau Dullah Selatan (Kota Tual)	1 Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i> : penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga	



No		Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			2	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sentra perikanan budidaya terutama di PKSN, dengan output : peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Saumlaki) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Tapa, Eray dan Mahaleta, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis	
			3	Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output ; penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku	
			4	Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output : <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN	
		Penguatan sekolah terbuka:Kota Tual		Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui :	
			1	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan output : penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran	
			2	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan output : pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen	
			3	Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output : pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja	



No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi	Indikasi Intervensi Daerah
			4 Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan output : pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA	
			5 Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan output : rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh	
			6 Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output : pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan	
			7 Peningkatan literasi, dengan output : pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital	
			8 Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan output : pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual	
		Kecamatan prioritas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
			1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>	

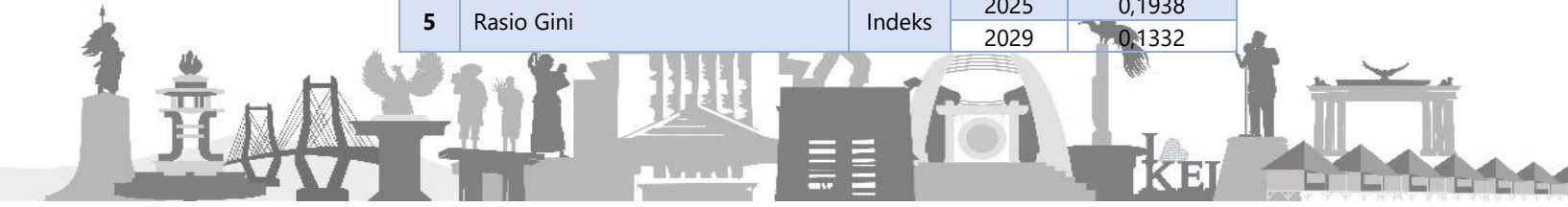


No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
			2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis	
			2	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>	
			3	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting	
			4	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan	
		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/ Kota		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui :	
		penanganan penyakit ISPA:	1	Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kuslitas hunian tidatk layak	

Sasaran pembangunan Kota Tual dirumuskan untuk mendukung sasaran pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2025 – 2029 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.28
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Tual
Mendukung Pencapaian Target Provisi Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Kota Tual
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	2025	5,31
			2029	6,80
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	2025	22,55
			2029	28,54
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	2025	5,40
			2029	5,40
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	16,,3
			2029	12,92
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,1938
			2029	0,1332



No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	Kota Tual
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	73,14
			2029	76,38
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	2025	78,61
			2029	79,29
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2025	7,75
			2029	6,95

Sumber : Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2025

3.2.4 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Perumusan Arah Kebijakan dan fokus pembangunan kewilayahan disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis dan menjadi wadah integrasi lintas sektor, guna mendorong sinergi pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat daya saing wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam prosesnya, dilakukan sinkronisasi antara kebijakan nasional, regional, dan lokal, serta penyesuaian terhadap arah pengembangan pada setiap Wilayah Pengembangan dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013- 2033, RPJPD Provinsi Maluku, yang diselaraskan dengan program prioritas dan program pembangunan daerah serta program unggulan pimpinan daerah. Dengan demikian focus pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2025-2029) mendatang secara umum diarahkan untuk mendukung :

1. Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata Kelola pemerintahan daerah di setiap Gugus Pulau;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau;
4. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana;
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah melalui kawasan budidaya; dan
6. Optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah.

Berikut ini adalah arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan fokus wilayah pembangunan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian gugus pulau,



Tabel 3.29
Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Wilayah Pembangunan
Kabupaten/Kota

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Wilayah
Memperkuat Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Efisien, Responsif, dan Berbasis Teknologi untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Efektif	Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pemerintahan berbasis hasil, dan percepatan digitalisasi layanan publik	12 Gugus Pulau
	Peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan, sistem merit, serta budaya kerja berintegritas dan adaptif	12 Gugus Pulau
	Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan sistem informasi yang terbuka dan akuntabel	12 Gugus Pulau
	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, partisipatif, dan inovatif.	12 Gugus Pulau
Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Percepatan Akses terhadap Perlindungan Sosial Adaptif, Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin, Penguatan Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Lintas Sektor serta Penguatan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat	12 Gugus Pulau (terkhususnya Gugus IX, X, XI)
	Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui upaya penciptaan lapangan kerja, investasi, proyek padat karya, penguatan sektor informal, Pengembangan pasar tenaga kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja,	12 Gugus Pulau
Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan olahraga, serta pemberdayaan kelompok rentan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang memadai, kapasitas guru, serta penguatan kurikulum berbasis teknologi	12 Gugus Pulau
	Penguatan sistem layanan kesehatan yang merata, responsif, dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan	12 Gugus Pulau
	Pengembangan sistem pembinaan olahraga terpadu yang berbasis komunitas, pendidikan, dan potensi lokal untuk meningkatkan prestasi	12 Gugus Pulau
	Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta mendorong kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan	12 Gugus Pulau
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi secara terpadu	Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, energi, dan perumahan layak secara merata dan berkelanjutan	12 Gugus Pulau (Terkhususnya Gugus IV, IX, X)
	percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi serta Mengoptimalkan peran bandara di Maluku sebagai simpul transportasi udara utama yang mendukung pariwisata, investasi, dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan dan terintegrasi serta Memperkuat peran pelabuhan utama sebagai simpul konektivitas maritim regional dan nasional, serta mendukung pengembangan sentra produksi.	12 Gugus Pulau
	Perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan digital	12 Gugus Pulau (Terkhususnya Gugus IX dan X)
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan, air, energi serta peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang inklusif dan berbasis komunitas	Penguatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil	Gugus II, IV, VIII, IX, XI dan XII
	Pengurangan pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan integrasi mitigasi-adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan	12 Gugus Pulau
	Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis wilayah dan kearifan lokal	12 Gugus Pulau
	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Pangan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal dan Penguatan Sistem Logistik dan Distribusi Pangan	12 Gugus pulau (Khususnya Gugus III & IV)



Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Wilayah
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Kemudahan Investasi, Hilirisasi Indudtri, Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Lokal dan UMKM.	Peningkatan iklim investasi, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi	12 Gugus Pulau
	pengembangan kawasan industri pengolahan melalui penyediaan infrastruktur, insentif fiskal, dan kemitraan dengan pelaku usaha lokal	
	Memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor unggulan, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor	
	Perluasan akses pembiayaan inklusif melalui penguatan kelembagaan keuangan lokal, digitalisasi layanan, dan skema pembiayaan yang terjangkau	12 Gugus Pulau
	Penguatan diversifikasi usaha dan pengendalian inflasi daerah	12 Gugus Pulau
Memperkuat integrasi sosial melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel	Penguatan dialog antar komunitas, nilai toleransi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan	12 Gugus Pulau
	Penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat	12 Gugus Pulau
	Penguatan integrasi adat istiadat dan kearifan lokal, sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan	12 Gugus Pulau

3.2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku ditetapkan sebagai wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap kepentingan provinsi, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maupun kelestarian lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis ini bertujuan untuk mengarahkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada optimalisasi potensi wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Jenis Kawasan strategis Provinsi Maluku sebagai berikut :

- Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, yang meliputi :
 - Kepulauan Aru;
 - Kepulauan Tanimbar;
 - Kepulauan Babar;
 - Kepulauan Leti – Moa – Lakor;
 - Pulau Kisar;
 - Pulau Wetar;
 - Pulau Lirang
- Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang meliputi :
 - Kawasan Seram Barat (GP 2);
 - Kawasan Seram Selatan (GP 5);
 - Kawasan Seram Timur (GP 4);
 - Kawasan Seram Utara (GP 3);
 - Kawasan Pulau Buru (GP 1);
 - Kota Ambon (GP 7);
 - Kepulauan Tanimbar (GP 10);
 - Kepulauan Kei (GP 8);



- i) Kawasan Bula (GP 4);
 - j) Kawasan Benjina (GP 9);
 - k) Zona Industri Seram Selatan (GP 5);
 - l) Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang
3. Kawasan Strategis dari Aspek Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi seluruh kawasan darat dan laut kabupaten/kota di Provinsi Maluku, terutama di :
- a) Teluk Ambon (GP 7);
 - b) Kawasan Bula (GP 4);
 - c) Kawasan Buru (GP 1);

3.2.6 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan pintu gerbang penghubung Negara Indonesia dengan negara tetangga yang memberikan first impression tentang NKRI. PKSN merupakan wujud dari sistem perkotaan nasional, dalam pengembangannya, suatu kota tidak dapat terlepas dari pengembangan desa, PKSN yang ideal dapat dicapai dengan membangun kawasan perdesaannya untuk kemudian berakselerasi menjadi kawasan perkotaan.

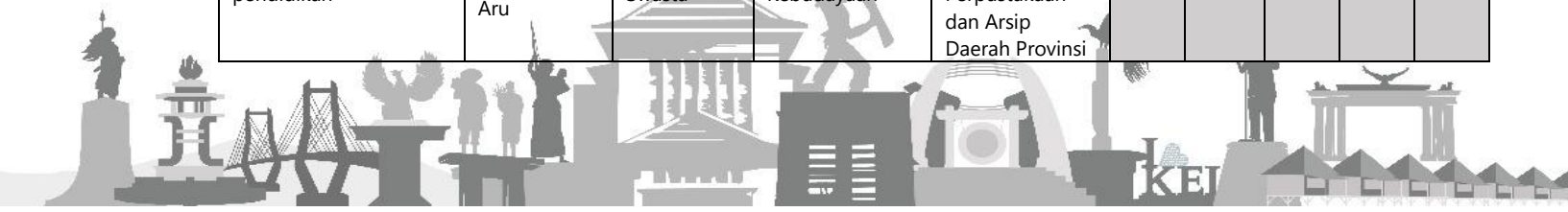
1. Fungsi penetapan PKSN adalah :
- a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
 - b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
 - c. Pusat pengembangan kegiatan ekonomi sentra Perikanan Budidaya, Tangkap dan Sentra Industri Maritim
2. PKSN Provinsi Maluku terdapat di:
- a. PKSN Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - b. PKSN Ilwaki Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - c. PKSN Dobo Kabupaten Kepulauan Aru ;

Tabel 3.30
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama Provinsi Maluku

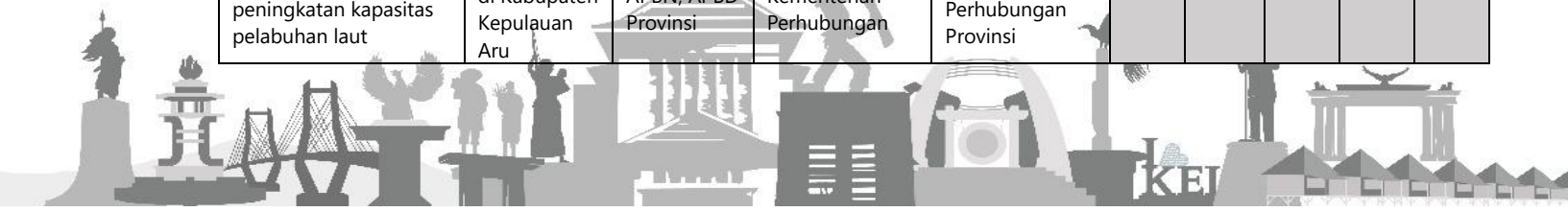
Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian Lembaga	Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan				
					2026	2027	2028	2029	2030
Pembangunan dan pemantapan fungsi pertahanan dan keamanan perbatasan (pos lintas batas negara, dll)	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN	Kementerian Pertahanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan					



Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian Lembaga	Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Permukiman Provinsi					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi					
Pembangunan dan pematapan fungsi lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi					
Pembangunan dan pematapan fasilitas kesehatan (puskesmas pembantu dan fasilitas penunjang lainnya).	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi					
			Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi					
			Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi					
			Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi					
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi					



Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian Lembaga	Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan				
					2026	2027	2028	2029	2030
		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi					
		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi					
		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,					
Peningkatan kualitas pasar induk kabupaten	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata daerah	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimba	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pertanian, Kementerian kelautan dan perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan	Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pariwisata					
Peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU	Dinas PUPR					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU	Dinas PUPR					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU	Dinas PUPR					
Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan laut	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi					



Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian Lembaga	Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan				
					2026	2027	2028	2029	2030
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi					
Pengembangan dan peningkatan kapasitas bandara udara	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi					
Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber energi listrik	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi					
	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi					
Keanekaragaman Hayati	PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup					
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup					
	PKSN Saumlaki di Kabupaten Tanimbar	APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup					

3.3 Agenda Kerja Prioritas Program unggulan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran setiap Misi dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029

Program Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pada setiap misi pembangunan daerah. Seluruh program ini diarahkan untuk bersinergi dengan agenda Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang telah ditetapkan, sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Terdapat 13 KPU yang menjadi fokus utama, yang pelaksanaannya terintegrasi dalam berbagai program strategis perangkat daerah guna menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target pembangunan.

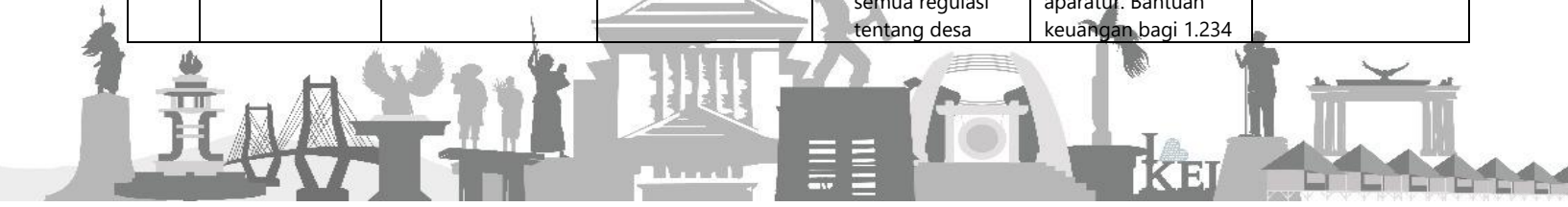


Tabel 3.31
Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan

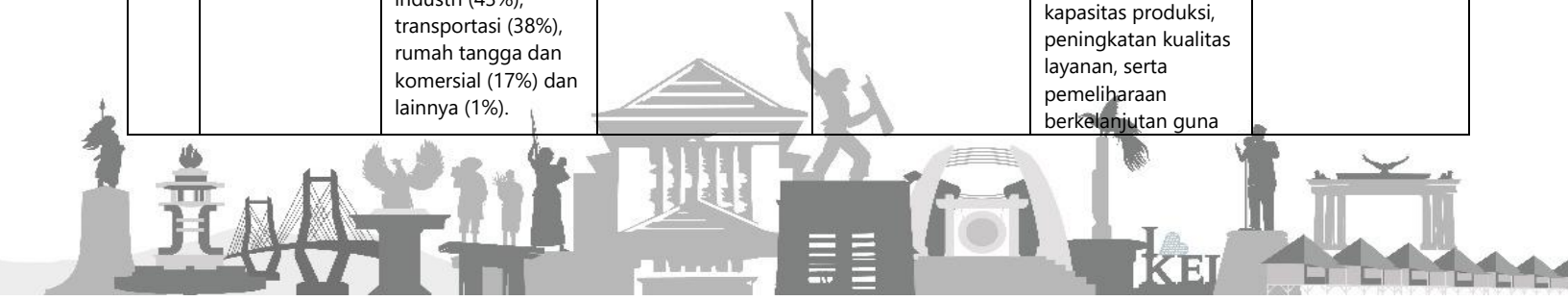
No	NASIONAL			PROVINSI MALUKU		
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	Kebijakan Strategis Gubernur	Deskripsi Singkat	OPD Penanggungjawab
1	01 - Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Tata kelola kelembagaan dan pembiayaan persampahan belum terbangun: (1) Belum adanya pemisahan fungsi regulator-operator pada 399 kab/kota serta baru 3 dari 38 pemerintah provinsi dan 3 dari 514 pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan; (2) Rata-rata Alokasi APBD untuk pengelolaan sampah hanya sekitar 0,50% pada TA 2023; (3) Persentase pengumpulan retribusi sampah hanya sebesar 40-45%; dan (4) Hanya 11 kab/kota (8 dilegalisasi) yang memiliki Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah.	Provinsi Maluku Lokasi Proyek: ▪ Kab/kota delienasi DAS Prioritas ▪ Kab/kota yang memiliki ekosistem pengolahan sampah ▪ Kab/kota amanat Perpres 35/2018	Mitigasi Bencana	Mitigasi Bencana di Maluku diarahkan tidak hanya pada pengurangan risiko gempa, tsunami, maupun dampak perubahan iklim, tetapi juga pada penguatan tata Kelola persampahan sebagai bagian dari adaptasi dan ketahanan lingkungan. Pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, dan pembinaan kepada kabupaten/kota agar memperkuat system pengelolaan sampah, terutama di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta Kawasan perkotaan. Hal ini penting mengingat tingginya kerentanan terhadap banjir, pencemaran laut, dan degradasi ekosistem pesisir akibat sampah yang tidak terkelola. Melalui penerapan prinsip pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumber, tata Kelola persampahan dapat menjadi instrument mitigasi bencana sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam, Kesehatan Masyarakat, dan kualitas ruang hidup di Maluku.	• Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Lingkungan Hidup • Badan Penanggulangan Bencana
2	001 - Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0.	Provinsi Maluku	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif untuk merangsang tumbuh- kembang jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda dan mahasiswa	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda dan mahasiswa melalui pemanfaatan transformasi digital, sehingga produksi, pemasaran, dan distribusi lebih efisien, pasar lebih luas, dan daya saing meningkat.	• Dinas Pariwisata • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Perindag • Dinas Kominfo



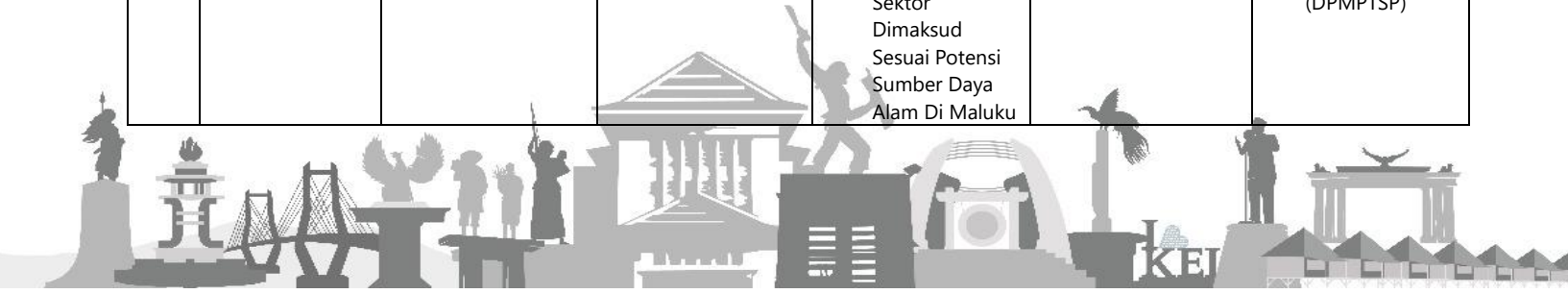
No	NASIONAL			PROVINSI MALUKU		
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	Kebijakan Strategis Gubernur	Deskripsi Singkat	OPD Penanggungjawab
3	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Kegiatan prioritas utama ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas SPAM yang dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir serta meningkatkan jumlah lembaga Pengelolaan SPAM. KP Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir mendukung PHTC Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk pemenuhan layanan di rumah tangga	Provinsi Maluku, mempertimbangkan kriteria: ▪ Kab/Kota dengan capaian akses air minum jaringan perpipaan < 20% ▪ Wilayah Rawan Air ▪ Perdesaan di wilayah 3T	Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat	Mendorong kemandirian dan keberlanjutan pemenuhan pangan, energi, dan air melalui peningkatan produksi dan distribusi yang efisien, penguatan sumber daya lokal, penerapan teknologi tepat guna, serta kebijakan yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Khusus untuk sektor air, dilakukan penguatan pengelolaan SPAM melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan, optimalisasi kapasitas produksi, peningkatan kualitas layanan, serta pemeliharaan berkelanjutan guna memastikan pasokan air minum yang aman, layak, dan merata.	PU
4	01 - Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Data pendukung (suplemen) belum tersedia oleh sektor terkait	Data pendukung (suplemen) belum tersedia oleh sektor terkait	• Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Listrik • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan internet • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan internet • Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat		• Dinas PU • Dinas ESMD • Dinas Kominfo • Dinas Pertanian
5	01 - Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Peningkatan rumah tangga perdesaan agar dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni	Provinsi Maluku	• Memberikan dukungan penuh terhadap tata kelola pemerintahan terbawah di tingkat desa melalui penyesuaian semua regulasi tentang desa	Penguatan tata kelola desa di Maluku dilakukan melalui penyesuaian regulasi sesuai UU Desa, pengakuan marwah negeri adat, dan peningkatan profesionalisme aparatur. Bantuan keuangan bagi 1.234	• Dinas PU • Dinas Perumahan dan Permukiman



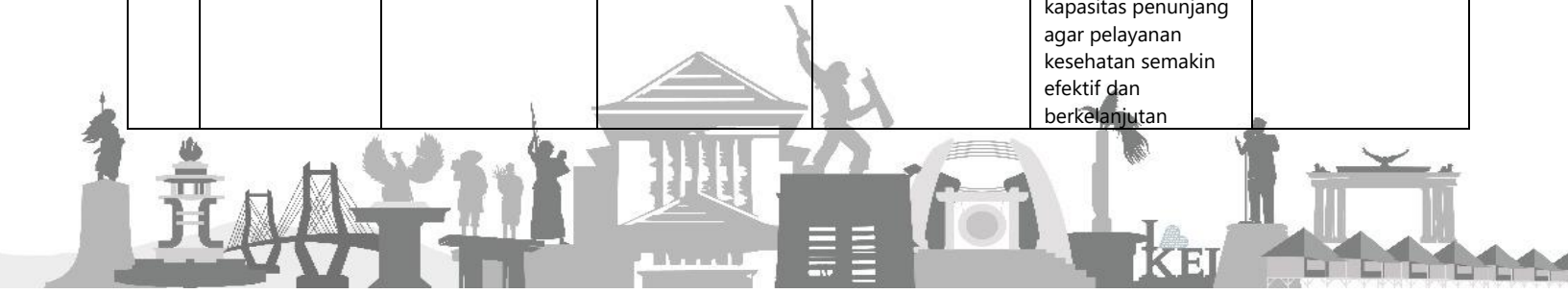
No	NASIONAL			PROVINSI MALUKU		
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	Kebijakan Strategis Gubernur	Deskripsi Singkat	OPD Penanggungjawab
				berdasarkan UU Desa, dengan mendudukkan kembali marwah negeri adat sesuai tatanannya berdasarkan karakteristik budaya masing-masing wilayah adat di Maluku, serta penciptaan aparatur desa yang profesional Menggenjot pembangunan Maluku dari Desa melalui pemberian bantuan keuangan/insentif kepada 1.234 desa yang ada di Maluku dengan fokus pada desa-desa swadaya dan menggerakkan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa	desa difokuskan pada pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan akses air minum, sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni bagi rumah tangga perdesaan.	
6	03 - Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Capaian indeks ketahanan energi yang masih diangka 6,64 menandakan perlunya ada perbaikan dari segi penyediaan maupun permintaan Menurunnya produksi migas mengakibatkan semakin tingginya nilai impor migas untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Nilai impor migas naik 8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Penyerapan energi dari berbagai sektor didominasi dari industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga dan komersial (17%) dan lainnya (1%).	Provinsi Maluku - Kota Ambon, - Kab. Seram Bagian Barat, - Kab. Seram Bagian Timur, - Kab. Kepulauan Aru	Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat	Mendorong kemandirian dan keberlanjutan pemenuhan pangan, energi, dan air melalui peningkatan produksi dan distribusi yang efisien, penguatan sumber daya lokal, penerapan teknologi tepat guna, serta kebijakan yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Khusus untuk sektor air, dilakukan penguatan pengelolaan SPAM melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan, optimalisasi kapasitas produksi, peningkatan kualitas layanan, serta pemeliharaan berkelanjutan guna	- Dinas ESDM - Dinas Pertanian - Dinas PU - Dinas Ketahanan Pangan



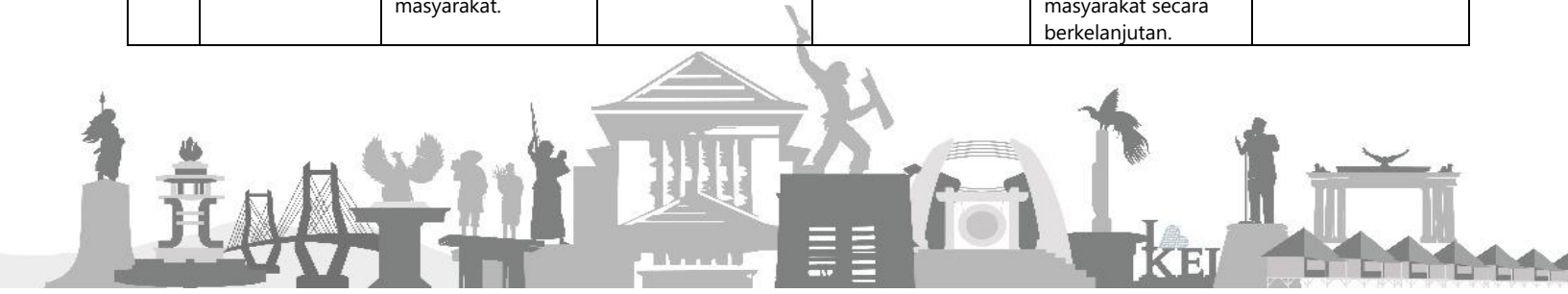
No	NASIONAL			PROVINSI MALUKU		
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	Kebijakan Strategis Gubernur	Deskripsi Singkat	OPD Penanggungjawab
					memastikan pasokan air minum yang aman, layak, dan merata.	
7	07 - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Dalam 4 tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan pada sektor pertanian: Lahan Baku Sawah berkurang 88.000 Ha, Indeks Pertanaman turun 4,6 poin, dan produksi beras menurun hingga 623.000 ton. Kondisi ini mengancam ketahanan dan cadangan pangan nasional, terlebih di tengah ketidakstabilan pasokan pangan global.	- Kab. Buru - Kab. Maluku Tengah - Kab. Maluku Tenggara	Mendorong terciptanya kedaulatan pangan, energi, dan air bagi kebutuhan masyarakat	Mendorong kemandirian dan keberlanjutan pemenuhan pangan, energi, dan air melalui peningkatan produksi dan distribusi yang efisien, penguatan sumber daya lokal, penerapan teknologi tepat guna, serta kebijakan yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Khusus untuk sektor air, dilakukan penguatan pengelolaan SPAM melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan, optimalisasi kapasitas produksi, peningkatan kualitas layanan, serta pemeliharaan berkelanjutan guna memastikan pasokan air minum yang aman, layak, dan merata.	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan, memperluas aksesibilitas dan jaminan mutu produk perikanan, serta meningkatkan penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	Provinsi Maluku - Sentra TCT - Sentra Lobster/Kepiting Kab. Buru dan Kab. Maluku Tengah*	- Mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), peternakan, perkebunan, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional - Mendorong Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Serta Pertambangan Melalui Pembangunan Industri Yang Terkait Dengan Sektor Dimaksud Sesuai Potensi Sumber Daya Alam Di Maluku	Penguatan sentra produksi dan industri Tuna, Cakalang, Tongkol, Lobster, dan Udang melalui hilirisasi, peningkatan kapasitas armada tangkap dan budidaya, serta penguatan akses pasar lokal hingga internasional, guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.	- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UKM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Perhubungan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



No	NASIONAL			PROVINSI MALUKU		
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	Kebijakan Strategis Gubernur	Deskripsi Singkat	OPD Penanggungjawab
				Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan penambahan armada penangkapan dan perikanan budidaya, serta membuka akses ke pasar (lokal, regional, nasional maupun internasional)		
9	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan RS Lengkap Berkualitas di seluruh provinsi dan kab/kota yang memiliki kriteria standar akreditasi nasional tertinggi (paripurna), standar kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan, serta memiliki tenaga kesehatan spesialis dasar penunjang serta spesialis lain untuk pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi	- Kab. Buru, - Kab. Buru Selatan, - Kab. Kepulauan Aru, - Kab. Kep. Tanimbar, - Kab. Maluku Barat Daya, dan - Kota Tual	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Memperluas jangkauan layanan kesehatan, memastikan fasilitas yang tersedia memenuhi standar mutu, serta mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, penyediaan peralatan medis modern, serta peningkatan kapasitas penunjang agar pelayanan kesehatan semakin efektif dan berkelanjutan	- Dinas Kesehatan - Dinas PU
10	02 - Pencegahan dan penurunan stunting	KP ini akan dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran baik secara umum maupun khusus dan penguatan konvergensi melalui perbaikan tata kelola	Provinsi Maluku Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Memperluas jangkauan layanan kesehatan, memastikan fasilitas yang tersedia memenuhi standar mutu, serta mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, penyediaan peralatan medis modern, serta peningkatan kapasitas penunjang agar pelayanan kesehatan semakin efektif dan berkelanjutan	Dinas Kesehatan

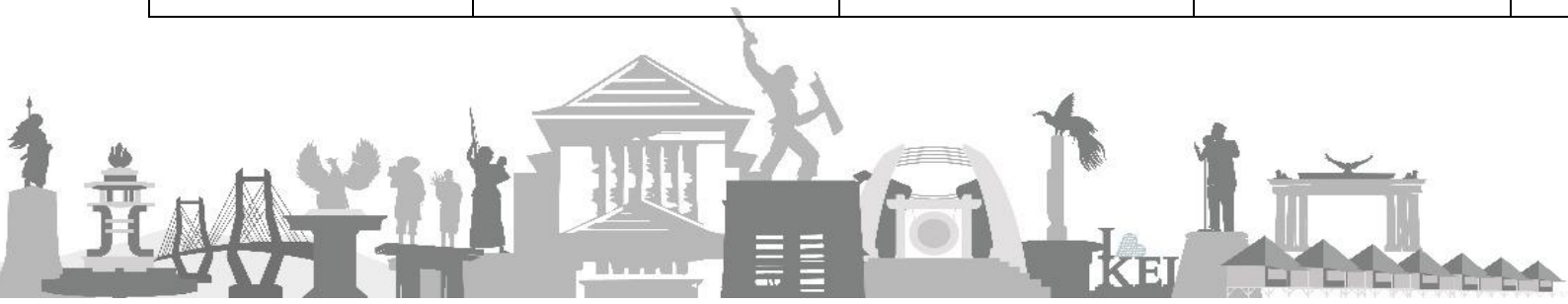


No	NASIONAL			PROVINSI MALUKU		
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	Kebijakan Strategis Gubernur	Deskripsi Singkat	OPD Penanggungjawab
11	02 - Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Indonesia mengalami penurunan daya saing talenta global, masih rendahnya jumlah SDM Iptek Indonesia, sehingga perlunya peningkatan pembinaan talenta	Provinsi Maluku K/L membuka usulan kegiatan yang dapat diusulkan dari seluruh daerah secara nasional (proposal based)	• Melakukan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku melalui program dan kegiatan penataan kelembagaan, personil dan penciptaan budaya kerja yang menghargai kompetensi dan prestasi (Merit System) • Melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi di bidang manajerial, konseptual, dan teknis		• Badan Kepegiaian Daerah • Biro Organisasi • BPSDM
12	02 - Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	diarahkan untuk memperkuat adaptasi wilayah pesisir dan ekosistem laut terhadap dampak perubahan iklim melalui rehabilitasi dan perlindungan ekosistem pesisir, pembangunan infrastruktur pesisir yang adaptif, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diversifikasi ekonomi dan mitigasi risiko bencana. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya dukung lingkungan, menekan kerentanan sosial-ekonomi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi kesejahteraan masyarakat.	Provinsi Maluku dan 11 Kab/Kota	Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	diarahkan untuk memperkuat adaptasi wilayah pesisir dan ekosistem laut terhadap dampak perubahan iklim melalui rehabilitasi dan perlindungan ekosistem pesisir, pembangunan infrastruktur pesisir yang adaptif, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diversifikasi ekonomi dan mitigasi risiko bencana. Pada tingkat provinsi, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya dukung lingkungan, menekan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	• Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas PU • Badan Penanggulangan Bencana



Tabel 3.32
Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku 2025 – 2029

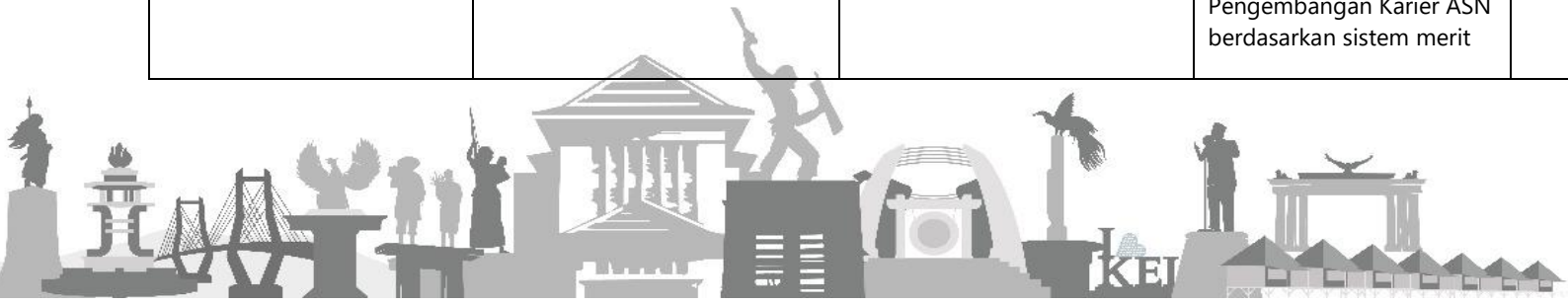
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
Visi : Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045						
Misi 1 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel	T1. Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik			T1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku,		
		S1.1 : Tercapainya reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku		S1.1. Indeks Reformasi Birokrasi General		
				S1.2. Indeks Integritas Nasional/Daerah		
			O1.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	O1.1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	P1. Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua OPD



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O1.1.2. Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	O1.1.2 Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	P3. Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				O1.1.2. Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		Inspektorat
			O1.1.3 Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	O1.1.3 Persentase Nilai Monitoring, Surveillance Corruption Prevention (MSCP)	P4. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				O1.1.3 Zona Integritas yang terbentuk		
			O1.1.4. Meningkatnya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah	O1.1.4. Persentase Layanan Penghubung	P5. Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
			O1.1.5. Meningkatnya Kualitas profil kependudukan	O1.1.5. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	P6. Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil
			O1.1.6 Meningkatnya Tata Kelola organisasi pemerintah daerah		P7. Penataan Organisasi	Setda (Biro Organisasi)
			O1.1.7. Meningkatnya kualitas	O1.1.7 Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	P8. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Setda (Biro Pemerintahan)



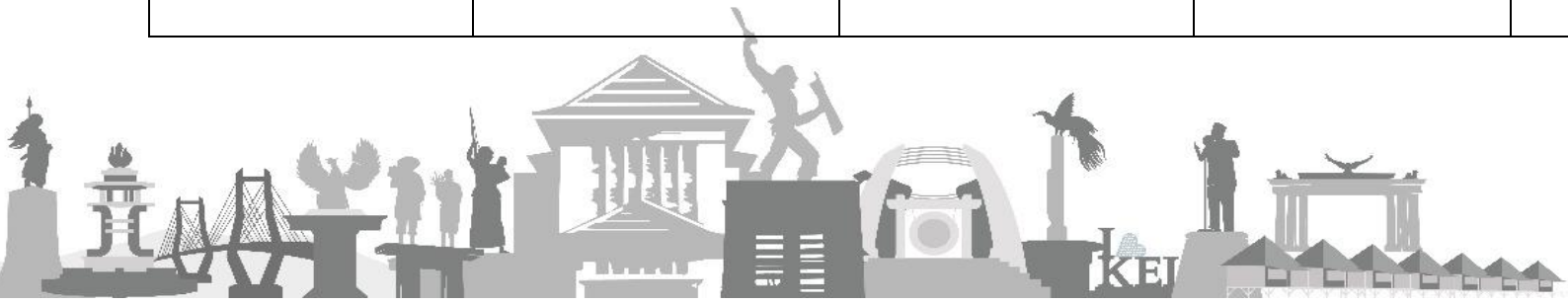
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	O1.1.7 Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
			O1.1.8. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah Pengoordinasian Perumusan Bidang Hukum	O1.1.8. Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi	P9. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Setda (Biro Hukum)
			O1.1.9. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	O1.1.9. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	P10. Perekonomian	Setda (Biro Ekonomi)
			O1.1.10. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	O1.1.10. Tingkat Kematangan UKPBJ	P11. Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
			O1.1.12. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	O1.1.12 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	P12. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
			O1.1.13 Meningkatnya kualitas perencanaan, kebutuhan ASN, perlindungan dan pelayanan ASN	O1.1.13 Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi	P13. Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
			O1.1.14 Meningkatnya Kualitas promosi dan mutasi serta Pengembangan Karier ASN berdasarkan sistem merit	O1.1.14 Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O1.1.15 Meningkatnya Kualitas Manajemen kinerja, Penghargaan dan Disiplin ASN yang berdasarkan sistem merit	O1.1.16 Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghargaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan		
			O1.1.17 Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	O1.1.17 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	P14. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
			O1.1.18 Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	O1.1.18 Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan		
			O1.1.19 Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	O1.1.19 Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi		
			O1.1.20 Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	O1.1.20 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		
			O1.1.21 Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian	O1.1,21. Ketetapan penetapan perda APBD Tahun N.	P15. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretarist DPRD



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			peraturan perundang-undangan	O1.1.21. Persentase penetapan Ranperda Tahun N.		
			O1.1.22. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	O1.1.22. Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
			O1.1.23 Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	O1.1.23 Efektifitas Pendapatan Daerah (Persentase)	P16. Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
					P17 Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			O1.1.24 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan berbasis data dan inovasi	O1.1.24 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah & Indeks Inovasi Daerah	P18 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
					P19 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					P20 Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					P21 Program Riset dan Inovasi Daerah	



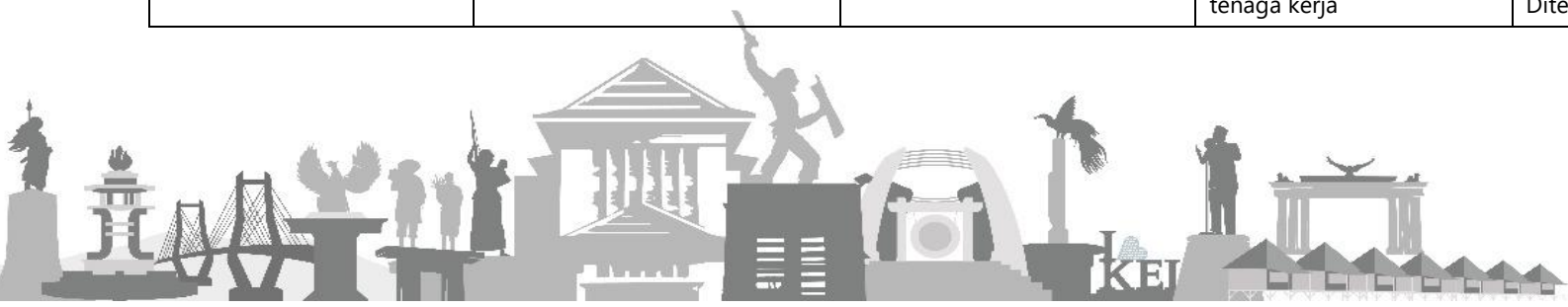
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
Misi 2 : Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif	T2.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			T2.1 Tingkat Kemiskinan		
		S2.1 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		S2.1 PDRB Per Kapita		
			O2.2.1 Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial	O2.2.1 Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	P22. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				O2.2.1 Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Provinsi pada masa tanggap darurat sesuai standar		Dinas Sosial
				O2.2.1 Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
				O2.2.1 Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			O2.2.2 Meningkatnya rehabilitasi sosial	O2.2.2 Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	P23 Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				O2.2.2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				O2.2.2 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				O2.2.2 persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				O2.2.2 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O2.2.3 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	O2.2.3 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	P24 Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				O2.2.3 Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			O2.2.4 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	O2.2.4 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	P25 Kawasan Permukiman	
		S2.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran		S2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka		
			O2.2.1. Terkelolanya informasi tenaga kerja	O2.2.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	P26 Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			O2.2.2 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	O2.2.2 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	P27 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			O2.2.3 Meningkatnya penempatan tenaga kerja	O2.2.3 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	P28 Penempatan Tenaga Kerja	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	T3 : Meningkatnya kualitas SDM Maluku			T3 : Indeks Modal Manusia		
		S3.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan		S3.1 Indeks Pendidikan		
			O3.1.1 Meningkatnya Tingkat Kelulusan menengah dan Pendidikan Khusus	O3.1.1. Persentase anak usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	P29. Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				O3.1.1 Persentase anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		
			O3.1.2. Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	O3.1.2. Indeks Pemerataan Guru	P30 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				O3.1.2. Presentasi Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O3.1.3 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	O3,1,3, Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	P31 Pembinaan Perpustakaan	
		S3.2 : Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan		S3.2 : Indeks Kesehatan		
			O3.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	O3.2.1 Angka Kematian Bayi	P32. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				O3.2.1. Angka Kematian Balita		
				O3.2.1. Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria		
				O3.2.1. ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ART		
				O3,2,1, Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap		
				O3.2.1. Persentase hipertensi dalam pengendalian		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O3. 2.2 Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	O3.2.2 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	P33 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		S3.3 : Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga		S3.3 Jumlah cabang olah raga yang meraih prestasi dalam kompetisi nasional dan internasional		
				S3.3 : Indeks Pembangunan Pemuda		
			O3.3.1. Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	O3,3,1 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	P34 Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				O3.3.1 Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional		
			O3.3.2 Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	O3.3.2. Rasio Wirausaha Pemuda	P35 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		S3.4 : Meningkatnya Peran Kelompok Rentan (Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas) Keluarga dan Kesenjangan Gender		S3.4 : Indeks Ketimpangan Gender		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O3.4.1 Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	O3.4.1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	P36 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				O3.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
Misi 4 : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah	T4 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi, Elektrifikasi dan wilayah serta konektivitas Antar dan Intra Wilayah			T4 : Indeks Infrastruktur		
				T4 : Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku		
		S4.1 : Meningkatnya infrastruktur dasar		S4.1. Indeks Infrastruktur Dasar		
			O4.4.1 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	O4.4.1. Tingkat Kemantapan Jalan	P37 Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum (PU)
			O4.4.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	O4.4.2 Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	P38 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	



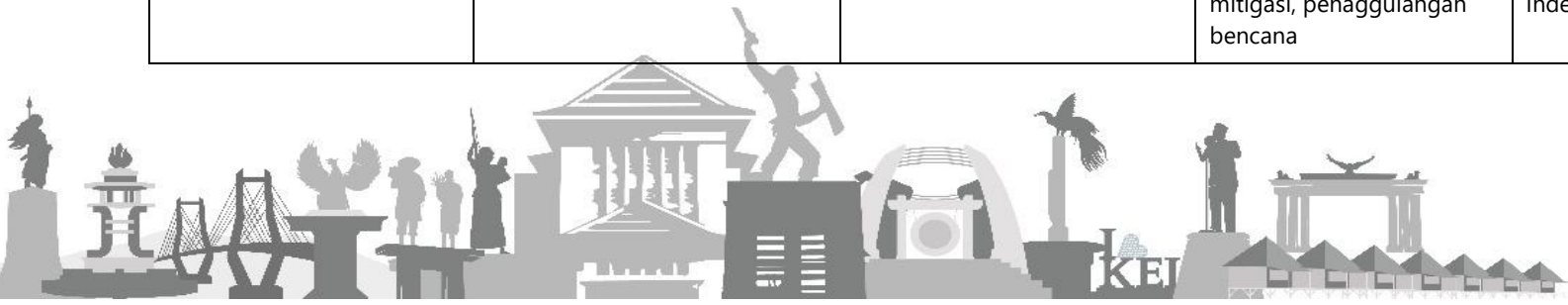
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O4.4.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	O4.4.3. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	P39 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			O4.4.4. Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	O4.4.4. Rasio Elektrifikasi	P40. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
		S4.2 : Meningkatnya infrastruktur dasar transportasi		S4.2 : Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur transportasi		
			O4,1.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	O4.1.1 Konektivitas Darat	P41 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				O4,1,2, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		
			O4.1.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	O4.1.2 Konektivitas Laut	P42 Pengelolaan Pelayaran	
		S4.3 : Meningkatnya infrastruktur dasar telekomunikasi		S4.3 : Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur telekomunikasi		



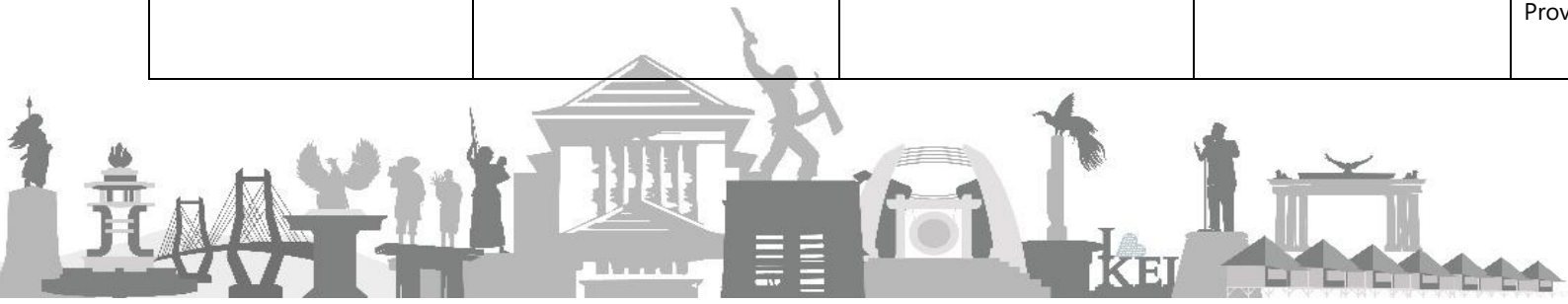
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O4.3.1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi	O4.3.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	P43 Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Misi 5 : Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)	T5 : Meningkatnya pengelolaan SDA, dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana			T5.1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				T5.2. Indeks Resiko Bencana		
				T5.3. Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK		
		S5 1: Terjaganya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil		S5.1 : Persentase wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang terkonservasi		
			O5.1.1. Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	O5.1.1 Tingkat Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil	P44 Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Perikanan



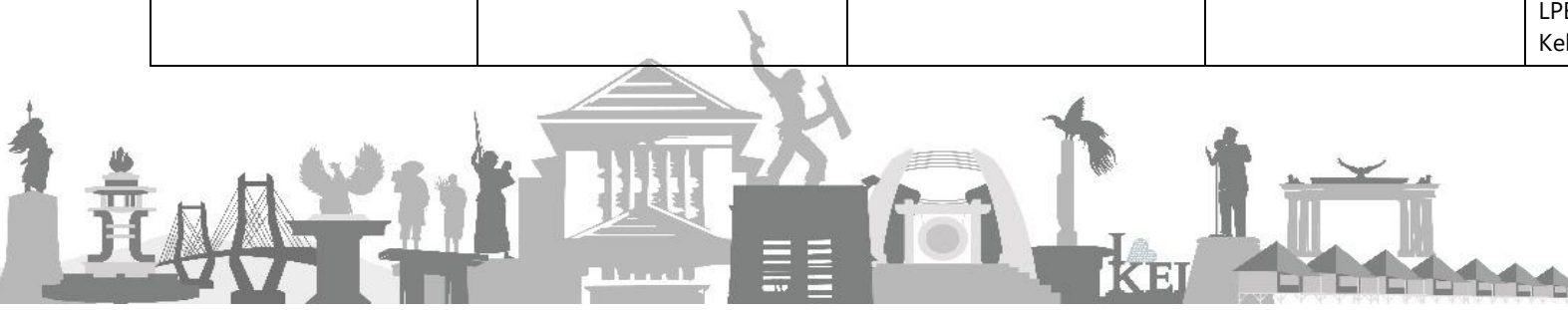
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
					P45. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		S5.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim		S5.2 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
			O5.1.2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan integrasi mitigasi-adaptasi perubahan iklim	O5.1.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	P46 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				O5.1.3. Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK	P47 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
					P48 Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		S5. 3 : Meningkatnya mitigasi bencana		S5.3 : Indeks Ketahanan Daerah		
			O5.3.1 Peningkatan kapasitas mitigasi, penanggulangan bencana	O5.3.1. Indeks Resiko Bencana	P49 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



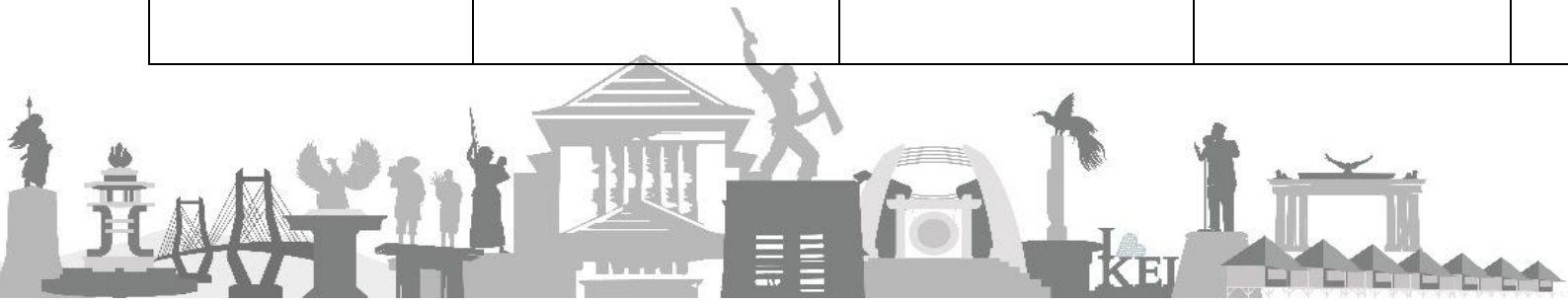
Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
		S5.4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Secara Berkelanjutan		S5.4 Indeks Ketahanan Pangan		
			O5.1. Tercapainya ketersediaan dan keterjangkauan pangan daerah yang berkelanjutan	O5.1. Indeks Ketahanan Pangan	P50 : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
					P51 : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
Misi 6 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah	T6 : Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif		T6 : Laju Pertumbuhan Ekonomi			
			T6 : Indeks Ekonomi Hijau			
			T6 : Indeks Williamson			
		S6. 1 : Terciptanya iklim investasi yang kondusif		S6.1 : Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O6.1.1 Terwujudnya sistem regulasi yang adaptif dan ramah investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	O6.1.1. Jumlah regulasi yang direformasi untuk mempermudah investasi	P52 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		S6.2 : Berkembangnya kawasan ekonomi khusus		S6.2. Tingkat perkembangan kawasan ekonomi khusus		
			O6.1.1 Terwujudnya kawasan ekonomi khusus di Pulau Seram dan Kepulauan Tanimbar yang produktif, menarik investasi, dan mendorong pemerataan pembangunan	O6.1.1 Tingkat pembangunan kawasan ekonomi khusus di Pulau Seram dan Kepulauan Tanimbar	P53 Perencanaan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					P54 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		S6 3: Meningkatnya Kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah		S6.3. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				S6.3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				S6.3. LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O6.3.1. Peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	O6.3.1 Kontribusi Sektor Unggulan : Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Terhadap PDRB.	P55 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					P56 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
					P57 Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Perikanan
					P58 Pengelolaan Perikanan Budidaya	
					P59 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					P60 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
					P61 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
					P62 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
		S6. 4 : Meningkatnya akses pembiayaan bagi masyarakat		S6.4. Persentase masyarakat yang mengakses pembiayaan		
			O6.4.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi	O6.4.1. Persentase masyarakat yang mengakses pembiayaan	P63 Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi UMKM
		S6. 4 : Inklusi Keuangan				
		S6.5 : Stabilitas ekonomi daerah		S6.5 Tingkat inflasi daerah		
			O6.5.1 Terjaganya kestabilan harga komoditas hasil bumi dan laut	O6.5.1. Tingkat inflasi daerah	P64 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					P65 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				O6.5.2. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		
		S6.6 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa		S6.6 Indeks Desa		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O6.6.1 Pemberdayaan desa dan BUMDes	O6.6.1. Jumlah desa penerima bantuan dan BUMDes yang berkembang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemdes
Misi 7 Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum	T7 : Meningkatnya harmonisasi sosial, Budaya dan penegakan hukum			T7 ; Indeks Kerukunan Umat Beragama		
				T7 : Indeks Pembangunan Kebudayaan		
				T7 : Indeks Demokrasi Provinsi		
		S7.1 : Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan Hukum oleh Masyarakat		S7.1. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		
			O7.1.1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	O7.1.1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	P67. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
			O7.1.2. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	O7.1.2. Persentase Penyelenggaraan Trantibum		SATPOL PP
			O7.1.3. Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat	O7.1.3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		SATPOL PP



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
			O7.1.4 Meningkatnya etika dan budaya politik	O7.1.4. Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	P68 Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kesbangpol
		S7. 2 : Meningkatnya Harmonisasi Sosial berbasis Norma Agama, Budaya dan Kearifan Lokal		S7.2. Indeks Harmoni		
			O7.1.1 Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	O7.1.1 Jumlah warisan Budaya yang dilestarikan	P69. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				O7.1.2 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang ditetapkan		
			O7.1.2 Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	O7.1.2. Persentase Ormas yang aktif	P70. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol
			O7.1.3. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	O7.1.3. Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	P71 Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket / OPD
		S7.3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa		S7.3. Persentase Desa Mandiri		
			O7.3.1. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	O7.3.1 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P72 Administrasi Pemerintahan Desa	Pemdes
				O7.3.1 Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		
			O7.4.1 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	O7.4.1 Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	P73 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemdes
				O7.4.1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
			O7.5.1 Meningkatnya kualitas penataan desa	O7.5.1. Persentase Fasilitas Penataan Desa	P78 Penataan Desa	



PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.1.1 Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah

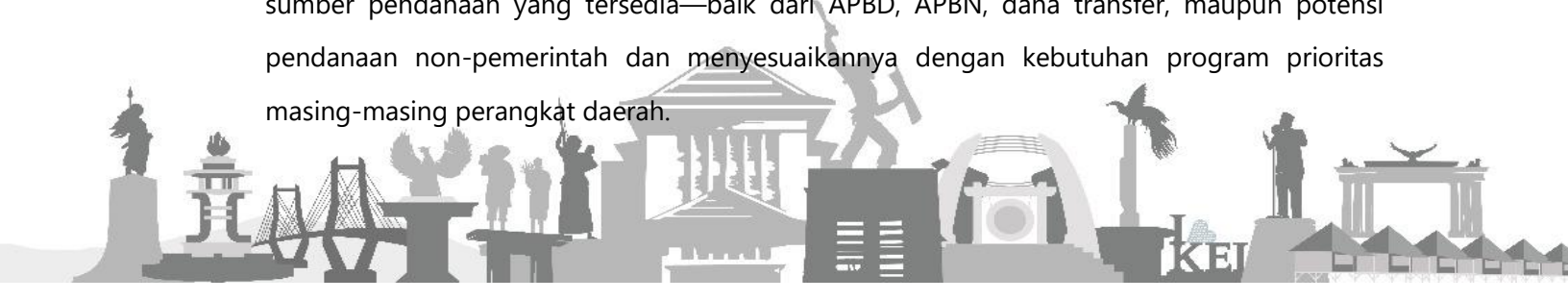
Dalam perumusan program perangkat daerah di Provinsi Maluku, beberapa hal penting menjadi pertimbangan utama agar program yang dirancang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara tepat. Pertama, perangkat daerah harus merujuk pada arah kebijakan pembangunan nasional seperti RPJMN, serta dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Program juga harus sejalan dengan visi dan misi Gubernur serta mempertimbangkan isu strategis yang bersifat lokal maupun global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penguatan konektivitas antarwilayah kepulauan.

Kedua, perumusan program harus mempertimbangkan karakteristik kewilayahan Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki keterbatasan akses, infrastruktur, dan layanan dasar di berbagai pulau kecil. Oleh karena itu, prinsip keadilan wilayah, inklusivitas, dan keberlanjutan menjadi sangat penting. Perangkat daerah perlu melakukan analisis berbasis data yang kuat, termasuk hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya dan usulan dari masyarakat melalui proses musrenbang, agar program yang dirumuskan bersifat solutif dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Ketiga, aspek kemampuan keuangan daerah serta potensi ekonomi lokal juga menjadi dasar pertimbangan penting. Perangkat daerah perlu menyusun program yang realistis, berorientasi hasil, dan berdampak luas, namun tetap sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks Maluku, pengembangan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan hilirisasi komoditas menjadi perhatian utama, diiringi dengan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah kepulauan.

4.1.2 Kerangka Pendanaan Dalam Program Perangkat Daerah

Pemetaan kerangka pendanaan dalam program perangkat daerah di Provinsi Maluku sangat penting untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dengan wilayah kepulauan yang tersebar dan tantangan geografis yang kompleks, pendanaan yang tepat sasaran menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan merata. Melalui pemetaan kerangka pendanaan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang tersedia—baik dari APBD, APBN, dana transfer, maupun potensi pendanaan non-pemerintah dan menyesuakannya dengan kebutuhan program prioritas masing-masing perangkat daerah.



Selain itu, pemetaan pendanaan membantu menghindari tumpang tindih anggaran antarprogram dan memperkuat efisiensi penggunaan dana publik. Dengan mengetahui porsi pembiayaan dari berbagai sumber, perangkat daerah dapat menyusun strategi pendanaan yang lebih realistis dan berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi antarstakeholder, termasuk sektor swasta dan lembaga donor. Hal ini juga memudahkan dalam menyusun rencana kerja yang terukur dan akuntabel, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah dan panjang Provinsi Maluku menuju 2045, pemetaan kerangka pendanaan berfungsi sebagai landasan perencanaan transformasi ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting untuk menjamin bahwa seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan tertinggal, tidak tertinggal dari arus pembangunan. Dengan pemetaan yang komprehensif, pemerintah daerah dapat lebih tanggap terhadap dinamika fiskal dan perubahan kebijakan nasional, serta memperkuat daya saing daerah melalui intervensi yang berbasis bukti dan sumber daya yang optimal.

4.1.3 Daftar Program Perangkat Daerah 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Maluku tahun 2025– 2029 didukung dengan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Provinsi Maluku. Rencana program yang ditetapkan menjadi program perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menjadi kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 7 (tujuh) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

4.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Rencana program perangkat daerah urusan pendidikan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Pengendalian Perizinan Pendidikan
4. Pengembangan Bahasa dan Sastra
5. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan



B. Kesehatan

Rencana program perangkat daerah urusan kesehatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
5. Program Akreditasi Layanan Kesehatan

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
9. Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
12. Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
13. Penatagunaan Tanah

C. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program perangkat daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

D. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program perangkat daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran

E. Sosial

Rencana program perangkat daerah urusan sosial yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial



2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

4.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Rencana program urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

C. Pangan

Rencana program perangkat daerah urusan pangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

E. Lingkungan Hidup

Rencana program perangkat daerah urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



3. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program perangkat daerah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program perangkat daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

I. Perhubungan

Rencana program perangkat daerah urusan perhubungan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayaran

J. Komunikasi dan Informatika

Rencana program perangkat daerah urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



F. Pengelolaan Perbatasan

Rencana program perangkat daerah unsur pengelolaan Perbatasan yang akan dilaksanakan adalah melalui Program Pengelolaan Perbatasan

G. Penghubung

Rencana program perangkat daerah unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah melalui Program Pelayanan Penghubung

H. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program perangkat daerah pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

I. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program perangkat daerah pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan strategis di Indonesia Timur memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian **83 Kegiatan Prioritas Utama (KPU)** sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan sasaran nasional, sehingga setiap langkah pembangunan Maluku menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan **Indonesia Emas 2045**. Untuk itu Maluku berkomitmen melalui 13 Kegiatan Prioritas Unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJMN akan didukung oleh Program – program unggulan yang telah dimuat dalam tabel 4.1 yang merupakan bagian dari Program daerah yang dilaksanakan pada Renstra Perangkat Daerah.



TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.321.715.858.519,00		1.360.486.834.001,00		1.370.271.291.884,00		1.402.980.173.206,00		1.462.781.409.449,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					848.438.298.239,00		850.500.046.438,00		852.839.304.247,00		895.393.304.246,00		940.078.136.641,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	848.438.298.239,00	100	850.500.046.438,00	100	852.839.304.247,00	100	895.393.304.246,00	100	940.078.136.641,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01. 0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					441.182.339.800,00		476.366.045.035,00		480.939.882.856,00		470.843.540.101,00		482.291.426.871,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	77,70	78,34	85	437.721.447.389,00	87	472.804.349.932,00	89	477.277.385.062,00	91	467.080.239.615,00	95	478.427.323.693,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	menengah (APS) (%)													
	Persentase anak usia 4-18 Tahun penyangang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	57,37	65,90	66		67		68		69		70		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SLB (%)	54,43	55,10	56,16		57,03		57,89		58,76		59,63		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SMA (%)	60,52	61,34	61,94		62,54		63,14		63,74		64,34		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SMK (%)	58,53	59,84	61,14		62,44		63,74		65,04		66,34		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SLB (%)	45,89	46,34	46,79		47,24		47,69		48,14		48,59		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SMA (%)	52,45	54,25	55,85		57,45		59,05		60,65		62,25		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SMK (%)	51,08	53,28	55,48		57,68		59,88		62,08		64,28		1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01. 0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KOMUNIKASI PENDIDIKAN
Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan Pertanian					3.460.892.411,00		3.561.695.103,00		3.662.497.794,00		3.763.300.486,00		3.864.103.178,00	3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					530.000.000,00		583.000.000,00		641.300.000,00		705.430.000,00		775.973.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	-	-	35	530.000.000,00	36	583.000.000,00	38	641.300.000,00	39	705.430.000,00	40	775.973.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01.0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					30.685.220.480,00		32.069.742.528,00		34.786.004.781,00		34.866.618.859,00		38.347.464.937,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan (%)	-	45	60	30.685.220.480,00	75	32.069.742.528,00	85	34.786.004.781,00	90	34.866.618.859,00	100	38.347.464.937,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase pemerataan guru (%)	-	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01.0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					410.000.000,00		451.000.000,00		496.100.000,00		545.710.000,00		600.281.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase layanan dan tidak lanjut pemberian perizinan pendidikan (%)	-	-	10	410.000.000,00	11	451.000.000,00	12	496.100.000,00	13	545.710.000,00	14	600.281.000,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01. 0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					470.000.000,00		517.000.000,00		568.700.000,00		625.570.000,00		688.127.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan Sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah (%)	-	-	3	470.000.000,00	7	517.000.000,00	10	568.700.000,00	12	625.570.000,00	15	688.127.000,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01. 0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					322.341.393.158,00		338.740.916.450,00		377.942.017.277,00		395.085.456.755,00		413.476.804.034,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					154.833.317.000,00		159.811.207.000,00		166.608.133.500,00		171.826.646.302,00		178.775.961.134,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	154.833.317.000,00	100	159.811.207.000,00	100	166.608.133.500,00	100	171.826.646.302,00	100	178.775.961.134,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					140.539.529.564,00		152.010.007.220,00		179.400.209.616,00		188.207.724.157,00		198.998.501.774,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup (Orang)	19,83	29,4	28	140.539.529.564,00	26,5	152.010.007.220,00	25,1	179.400.209.616,00	23,7	188.207.724.157,00	22	198.998.501.774,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	16,85	12,62	11,95		11,28		10,61		9,96		9,96		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	75	80	85		90		93		95		97		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria	3	4	6		8		11		11		11		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Kabupaten/Kota)													
	ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan ARV (%)	58	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase hipertensi dalam pengendalian (Persentase)	10	10	15		20		25		30		35		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					25.253.546.594,00		25.187.202.230,00		30.049.924.161,00		33.065.586.296,00		33.637.636.751,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	40	45	50	25.253.546.594,00	55	25.187.202.230,00	60	30.049.924.161,00	65	33.065.586.296,00	70	33.637.636.751,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					615.000.000,00		620.000.000,00		651.000.000,00		683.550.000,00		717.727.500,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	81	82	615.000.000,00	84	620.000.000,00	86	651.000.000,00	88	683.550.000,00	90	717.727.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.02.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.100.000.000,00		1.112.500.000,00		1.232.750.000,00		1.301.950.000,00		1.346.976.875,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%)	50	55	60	1.100.000.000,00	70	1.112.500.000,00	75	1.232.750.000,00	80	1.301.950.000,00	90	1.346.976.875,00	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					238.380.140.452,00		252.138.944.055,00		315.618.144.763,00		331.938.062.461,00		360.115.345.985,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					40.777.764.840,00		42.397.258.805,00		44.370.760.187,00		46.532.061.011,00		48.478.906.857,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	40.777.764.840,00	100	42.397.258.805,00	100	44.370.760.187,00	100	46.532.061.011,00	100	48.478.906.857,00	1.03.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan kinerja pelayanan publik														
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					30.356.455.119,00		32.541.940.800,00		45.908.428.000,00		47.884.931.000,00		50.270.770.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	26,64	37,11	39	30.356.455.119,00	41	32.541.940.800,00	43	45.908.428.000,00	45	47.884.931.000,00	47	50.270.770.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob (%)	8,32	21,14	22,2		23		24		26		27		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%)	4,32	16,01	17		18		19		19		20		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN					8.174.879.137,00		10.494.125.900,00		15.862.115.000,00		16.545.029.000,00		19.369.375.500,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (%)	5	16	19	8.174.879.137,00	22	10.494.125.900,00	23	15.862.115.000,00	26	16.545.029.000,00	28	19.369.375.500,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					5.000.000.000,00		5.250.000.000,00		5.512.500.000,00		5.788.125.000,00		6.077.531.250,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional (%)	-	2	22	5.000.000.000,00	24	5.250.000.000,00	25	5.512.500.000,00	26	5.788.125.000,00	28	6.077.531.250,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.510.000.000,00		1.568.968.700,00		4.636.940.926,00		4.836.575.900,00		5.077.555.500,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan	-	6	9,12	1.510.000.000,00	9,33	1.568.968.700,00	9,56	4.636.940.926,00	10,00	4.836.575.900,00	10,05	5.077.555.500,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman (%)													PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak (%)	-	-	55,1		55,72		55,95		56,19		56,44		1.03.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01. 0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.704.463.598,00		4.888.183.000,00		5.099.953.100,00		5.319.522.000,00		5.584.564.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	5	5	15	4.704.463.598,00	20	4.888.183.000,00	25	5.099.953.100,00	30	5.319.522.000,00	35	5.584.564.000,00	1.03.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01. 0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					40.991.000.000,00		43.959.555.000,00		48.078.010.500,00		52.590.186.550,00		55.219.695.878,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman	-	2	20	40.991.000.000,00	23	43.959.555.000,00	26	48.078.010.500,00	28	52.590.186.550,00	31	55.219.695.878,00	1.03.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam kondisi baik (%)													PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					14.563.043.395,00		15.131.762.000,00		15.787.313.300,00		16.467.007.000,00		17.287.466.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik (%)	16	16	18	14.563.043.395,00	20	15.131.762.000,00	22	15.787.313.300,00	24	16.467.007.000,00	26	17.287.466.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					22.007.753.777,00		22.867.205.000,00		23.857.877.900,00		24.885.035.000,00		26.124.917.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	17	17	19	22.007.753.777,00	20	22.867.205.000,00	21	23.857.877.900,00	24	24.885.035.000,00	27	26.124.917.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.10 - PROGRAM					68.761.636.336,00		71.446.928.000,00		104.542.215.000,00		109.043.088.000,00		124.476.097.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENYELENGGARA AN JALAN														
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	53,22	54,63	56,79	68.761.636.336,00	58,37	71.446.928.000,00	60,39	104.542.215.000,00	61,98	109.043.088.000,00	64,24	124.476.097.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					675.644.250,00		702.029.650,00		932.443.500,00		972.588.000,00		1.021.046.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)	11	17	25	675.644.250,00	30	702.029.650,00	45	932.443.500,00	50	972.588.000,00	60	1.021.046.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					857.500.000,00		890.987.200,00		1.029.587.350,00		1.073.914.000,00		1.127.421.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi (%)	91,6	33	33	857.500.000,00	33	890.987.200,00	50	1.029.587.350,00	60	1.073.914.000,00	75	1.127.421.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														1.03.0.00.0.00.01.0001 - LABORATORIUM PENGUJIAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAN PERALATAN
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.711.343.534,00		22.614.615.043,00		30.632.294.337,00		32.019.634.524,00		35.517.229.300,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.957.401.068,00		10.401.656.043,00		10.890.235.037,00		11.418.618.024,00		11.899.228.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	9.957.401.068,00	100	10.401.656.043,00	100	10.890.235.037,00	100	11.418.618.024,00	100	11.899.228.000,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					3.971.163.712,00		4.067.668.000,00		8.178.906.700,00		8.432.401.500,00		10.718.531.500,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	3.971.163.712,00	100	4.067.668.000,00	100	8.178.906.700,00	100	8.432.401.500,00	100	10.718.531.500,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi	0	0	0		0		0		0		0		1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)													
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					4.687.778.754,00		4.988.003.000,00		5.334.066.200,00		5.778.980.000,00		6.316.036.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	24,64	24,95	28,16	4.687.778.754,00	31,97	4.988.003.000,00	36,13	5.334.066.200,00	40,81	5.778.980.000,00	45,93	6.316.036.000,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.095.000.000,00		3.157.288.000,00		6.229.086.400,00		6.389.635.000,00		6.583.433.800,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	100	100	100	3.095.000.000,00	100	3.157.288.000,00	100	6.229.086.400,00	100	6.389.635.000,00	100	6.583.433.800,00	1.04.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.353.281.788,00		22.027.626.595,00		24.020.412.592,00		25.023.174.629,00		24.221.368.540,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.274.643.860,00		13.633.500.347,00		14.690.085.867,00		15.290.878.629,00		14.089.482.940,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	13.274.643.860,00	100	13.633.500.347,00	100	14.690.085.867,00	100	15.290.878.629,00	100	14.089.482.940,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.1.06.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.151.609.578,00		7.430.895.498,00		8.325.366.725,00		8.684.070.000,00		9.031.432.800,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	7.151.609.578,00	100	7.430.895.498,00	100	8.325.366.725,00	100	8.684.070.000,00	100	9.031.432.800,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraa n Trantibumlinmas (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	9,09	9,09	9,09		18,8		27,2		36,03		45,4		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	-	70	70,75		71,5		72,25		73		73,75		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA					768.000.000,00		797.992.000,00		832.563.000,00		868.407.000,00		911.674.800,00	
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)	100	100	100	768.000.000,00	100	797.992.000,00	100	832.563.000,00	100	868.407.000,00	100	911.674.800,00	1.05.1.06.0.00.02. 0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					159.028.350,00		165.238.750,00		172.397.000,00		179.819.000,00		188.778.000,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	159.028.350,00	100	165.238.750,00	100	172.397.000,00	100	179.819.000,00	100	188.778.000,00	1.05.0.00.0.00.01. 0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					23.218.624.542,00		24.379.555.769,00		25.598.533.558,00		26.878.460.236,00		28.222.383.246,50	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.524.256.069,00		16.300.468.872,00		17.115.492.316,00		17.971.266.932,00		18.869.830.278,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	15.524.256.069,00	100	16.300.468.872,00	100	17.115.492.316,00	100	17.971.266.932,00	100	18.869.830.278,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.06.0.00.0.00.01. 0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI- HITI-HALA-HALA
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					150.798.800,00		158.338.740,00		166.255.677,00		174.568.461,00		183.296.883,50	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	60	61	63	150.798.800,00	64	158.338.740,00	65	166.255.677,00	66	174.568.461,00	67	183.296.883,50	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial (%)	80	81	82		83		84		85		86		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Taraf Kesejahteraanny a (%)	70	71	72		73		74		75		76		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	70	71	72		73		74		75		76		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
														1.06.0.00.0.00.01. 0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI- HITI-HALA-HALA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					75.205.000,00		78.965.250,00		82.913.513,00		87.059.188,00		91.412.148,00	
Meningkatnya layanan penanganan warga negeri migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100	100	100	75.205.000,00	100	78.965.250,00	100	82.913.513,00	100	87.059.188,00	100	91.412.148,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
														1.06.0.00.0.00.01. 0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI- HITI-HALA-HALA
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.598.711.500,00		4.828.647.075,00		5.070.079.429,00		5.323.583.400,00		5.589.762.570,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	4.598.711.500,00	100	4.828.647.075,00	100	5.070.079.429,00	100	5.323.583.400,00	100	5.589.762.570,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)													
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
														1.06.0.00.0.00.01. 0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI- HITI-HALA-HALA
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.702.982.000,00		1.788.131.100,00		1.877.537.655,00		1.971.414.538,00		2.069.985.265,00	
Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	70	71	72	1.702.982.000,00	73	1.788.131.100,00	74	1.877.537.655,00	75	1.971.414.538,00	76	2.069.985.265,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar (%)	80	81	82		83		84		85		86		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang	90,00	90,10	90,20		90,30		90,40		90,50		90,60		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)													
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	80	81	82		83		84		85		86		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
														1.06.0.00.0.00.01. 0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI- HITI-HALA-HALA
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					693.320.000,00		727.986.000,00		764.385.300,00		802.604.565,00		842.734.793,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	693.320.000,00	100	727.986.000,00	100	764.385.300,00	100	802.604.565,00	100	842.734.793,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	70	71	72		73		74		75		76		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaanny a (%)	80	81	82		83		84		85		86		1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
														1.06.0.00.0.00.01. 0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI- HITI-HALA-HALA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					473.351.173,00		497.018.732,00		521.869.668,00		547.963.152,00		575.361.309,00	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	80	81	82	473.351.173,00	83	497.018.732,00	84	521.869.668,00	85	547.963.152,00	86	575.361.309,00	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS SOSIAL
														1.06.0.00.0.00.01. 0001 - PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI- HITI-HALA-HALA
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					15.428.189.984,00		16.109.515.944,00		16.861.325.978,00		17.672.046.830,00		18.426.882.104,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.168.189.984,00		14.800.311.644,00		15.495.501.078,00		16.247.326.830,00		16.931.177.304,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	14.168.189.984,00	100	14.800.311.644,00	100	15.495.501.078,00	100	16.247.326.830,00	100	16.931.177.304,00	2.07.3.32.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01. 0001 - BALAI PENGEMBANGA N KESELAMATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KERJA DAN HIPERKES
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					200.000.000,00		207.810.000,00		216.812.900,00		226.147.000,00		237.414.600,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	-	20	20	200.000.000,00	20	207.810.000,00	20	216.812.900,00	20	226.147.000,00	20	237.414.600,00	2.07.3.32.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01. 0001 - BALAI PENGEMBANGA N KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					250.000.000,00		259.763.000,00		271.016.600,00		282.684.000,00		296.768.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	-	0,18	250.000.000,00	0,21	259.763.000,00	0,25	271.016.600,00	0,28	282.684.000,00	0,30	296.768.000,00	2.07.3.32.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01. 0001 - BALAI PENGEMBANGA N KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					130.000.000,00		135.076.000,00		140.920.000,00		146.987.000,00		154.310.500,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di	8,9	-	0,48	130.000.000,00	0,51	135.076.000,00	0,54	140.920.000,00	0,57	146.987.000,00	0,60	154.310.500,00	2.07.3.32.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dalam Negeri (Persentase)													
														2.07.3.32.0.00.01. 0001 - BALAI PENGEMBANGA N KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					140.000.000,00		145.467.300,00		151.679.500,00		158.303.000,00		166.190.000,00	
Meningkatnya Pekerja Indonesia terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	-	-	250	140.000.000,00	250	145.467.300,00	250	151.679.500,00	250	158.303.000,00	300	166.190.000,00	2.07.3.32.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01. 0001 - BALAI PENGEMBANGA N KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJA AN					540.000.000,00		561.088.000,00		585.395.900,00		610.599.000,00		641.021.700,00	
Terlindunginya hak- hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak- Hak Dasarnya (Orang)	-	-	3.075	540.000.000,00	3.075	561.088.000,00	3.105	585.395.900,00	3.165	610.599.000,00	3.195	641.021.700,00	2.07.3.32.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01. 0001 - BALAI PENGEMBANGA N KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.750.410.893,00		9.180.784.469,00		9.632.939.840,00		10.108.045.034,00		10.604.884.671,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					6.020.714.378,00		6.321.750.100,00		6.637.837.605,00		6.969.729.484,00		7.318.215.959,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	6.020.714.378,00	100	6.321.750.100,00	100	6.637.837.605,00	100	6.969.729.484,00	100	7.318.215.959,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					132.333.600,00		138.950.280,00		145.897.785,00		153.192.675,00		160.852.305,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif (ARG) (%)	6,24	6,30	6,89	132.333.600,00	7,42	138.950.280,00	8,54	145.897.785,00	9,20	153.192.675,00	9,67	160.852.305,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55,72	56,26	58,80		59,31		59,84		59,88		60,45		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					551.773.229,00		578.420.444,00		606.337.399,00		635.670.253,00		666.461.460,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif (%)	100	100	100	551.773.229,00	100	578.420.444,00	100	606.337.399,00	100	635.670.253,00	100	666.461.460,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					901.657.680,00		943.735.033,00		987.916.259,00		1.034.306.577,00		1.083.016.342,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Nilai)	-	-	0,51	901.657.680,00	0,75	943.735.033,00	1,05	987.916.259,00	1,07	1.034.306.577,00	1,09	1.083.016.342,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					199.499.904,00		208.149.902,00		217.558.146,00		225.883.768,00		234.581.970,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Nilai)	12,90	20,96	22,58	199.499.904,00	24,08	208.149.902,00	25,58	217.558.146,00	27,62	225.883.768,00	36,18	234.581.970,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM					524.999.942,00		549.374.942,00		574.968.692,00		603.717.124,00		631.934.225,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)														
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)	65,43	65,62	65,92	524.999.942,00	66,17	549.374.942,00	66,39	574.968.692,00	66,58	603.717.124,00	66,77	631.934.225,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					419.432.160,00		440.403.768,00		462.423.954,00		485.545.153,00		509.822.410,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)	87,13	88,26	90,01	419.432.160,00	91,49	440.403.768,00	92,78	462.423.954,00	93,91	485.545.153,00	95,04	509.822.410,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	-	100		100		100		100		100		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9.742.817.372,00		10.167.110.676,00		11.604.370.354,00		12.120.249.041,00		12.544.171.904,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.071.317.372,00		8.430.923.676,00		8.720.198.354,00		9.089.757.541,00		9.362.332.654,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	8.071.317.372,00	100	8.430.923.676,00	100	8.720.198.354,00	100	9.089.757.541,00	100	9.362.332.654,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik														
														2.09.2.09.0.00.01.0001 - BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					75.000.000,00		77.929.000,00		81.305.100,00		84.805.500,00		89.030.800,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Cadangan Pangan (ton) (Ton)	12,46	6,396	48	75.000.000,00	50	77.929.000,00	52	81.305.100,00	54	84.805.500,00	54	89.030.800,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.147.000.000,00		1.191.910.000,00		2.240.676.900,00		2.336.403.000,00		2.452.161.700,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	76,9	76	78	1.147.000.000,00	79	1.191.910.000,00	79,5	2.240.676.900,00	80	2.336.403.000,00	80	2.452.161.700,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					184.500.000,00		191.000.000,00		198.552.000,00		206.308.000,00		216.608.500,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (%)	22,03	20,3	20,1	184.500.000,00	18,44	191.000.000,00	16,77	198.552.000,00	15,1	206.308.000,00	15,1	216.608.500,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					265.000.000,00		275.348.000,00		363.638.000,00		402.975.000,00		424.038.250,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	96,77	83,2	88	265.000.000,00	90	275.348.000,00	91	363.638.000,00	92	402.975.000,00	92	424.038.250,00	2.09.2.09.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					655.729.500,00		687.669.000,00		719.608.500,00		751.548.000,00		783.487.500,00	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					300.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		345.000.000,00		360.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Bidang Tanah)	-	-	220	300.000.000,00	1.200	315.000.000,00	1.000	330.000.000,00	1.200	345.000.000,00	1.200	360.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					355.729.500,00		372.669.000,00		389.608.500,00		406.548.000,00		423.487.500,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	100	100	100	355.729.500,00	100	372.669.000,00	100	389.608.500,00	100	406.548.000,00	100	423.487.500,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.033.358.585,00		8.145.822.500,00		8.476.489.820,00		9.821.167.600,00		9.186.436.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					6.691.439.000,00		6.751.097.000,00		7.021.141.000,00		7.301.986.000,00		7.594.066.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	6.691.439.000,00	100	6.751.097.000,00	100	7.021.141.000,00	100	7.301.986.000,00	100	7.594.066.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					1.000.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000.000,00		0,00	
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	-	1	1.000.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1	1.000.000.000,00	-	0,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					215.000.000,00		223.396.000,00		233.074.150,00		243.108.700,00		255.221.000,00	
Menurunnya Pencemaran dan /	Indeks Kualitas Air (poin)	56,55	-	72,83	215.000.000,00	73,03	223.396.000,00	72,23	233.074.150,00	73,43	243.108.700,00	73,63	255.221.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Kerusakan Lingkungan Hidup														LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	78,08	-	81,99		82,04		82,09		82,14		82,19		2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (poin)	92,7	-	88,23		88,43		88,63		88,83		89,03		2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)					200.000.000,00		208.000.000,00		218.000.000,00		229.320.000,00		240.786.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (IPKH) (Poin)	0	0,542	0,551	200.000.000,00	0,561	208.000.000,00	0,571	218.000.000,00	0,579	229.320.000,00	0,589	240.786.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					80.000.000,00		83.124.000,00		86.725.170,00		90.458.900,00		94.965.900,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	-	-	90	80.000.000,00	90	83.124.000,00	90	86.725.170,00	90	90.458.900,00	90	94.965.900,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN					366.919.585,00		381.248.500,00		397.765.500,00		414.890.500,00		435.562.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya Kepatuhan usaha dan / atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	88,89	-	33,33	366.919.585,00	33,33	381.248.500,00	33,33	397.765.500,00	33,33	414.890.500,00	33,33	435.562.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					115.000.000,00		119.491.000,00		124.668.000,00		130.035.000,00		136.513.900,00	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA (Kelompok)	2	2	2	115.000.000,00	2	119.491.000,00	2	124.668.000,00	2	130.035.000,00	2	136.513.900,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,00		103.900.000,00		108.400.000,00		113.066.900,00		118.700.000,00	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku Usaha (Kg/Orang)	120	20	30	100.000.000,00	30	103.900.000,00	40	108.400.000,00	40	113.066.900,00	50	118.700.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					150.000.000,00		156.000.000,00		162.240.000,00		168.729.600,00		175.478.000,00	
Meningkatnya Penilaian Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penghargaan)	-	-	3	150.000.000,00	3	156.000.000,00	3	162.240.000,00	3	168.729.600,00	3	175.478.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					35.000.000,00		36.366.000,00		37.950.000,00		39.583.000,00		41.555.200,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	-	-	100	35.000.000,00	100	36.366.000,00	100	37.950.000,00	100	39.583.000,00	100	41.555.200,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					80.000.000,00		83.200.000,00		86.526.000,00		89.989.000,00		93.588.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	-	20	80.000.000,00	25	83.200.000,00	25	86.526.000,00	30	89.989.000,00	30	93.588.000,00	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	-	10	13,50		17		20,50		24		27,50		2.11.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					5.348.620.000,00		5.820.540.000,00		6.360.650.000,00		6.952.425.000,00		7.605.716.250,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					4.848.620.000,00		5.051.020.000,00		5.556.120.000,00		6.111.730.000,00		6.722.910.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	4.848.620.000,00	100	5.051.020.000,00	100	5.556.120.000,00	100	6.111.730.000,00	100	6.722.910.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					145.000.000,00		150.660.000,00		157.190.000,00		163.660.000,00		172.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	30	10	20	145.000.000,00	30	150.660.000,00	40	157.190.000,00	50	163.660.000,00	80	172.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	23	-	55		60		65		70		75		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPI					180.000.000,00		187.030.000,00		195.130.000,00		203.530.000,00		213.670.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100	180.000.000,00	100	187.030.000,00	100	195.130.000,00	100	203.530.000,00	100	213.670.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					135.000.000,00		390.270.000,00		408.850.000,00		428.275.000,00		449.656.250,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	-	-	100	135.000.000,00	100	390.270.000,00	100	408.850.000,00	100	428.275.000,00	100	449.656.250,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					40.000.000,00		41.560.000,00		43.360.000,00		45.230.000,00		47.480.000,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	41.560.000,00	100	43.360.000,00	100	45.230.000,00	100	47.480.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.655.138.697,00		9.033.634.437,00		9.449.402.569,00		9.883.917.561,00		10.274.809.448,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					6.165.138.697,00		6.446.395.937,00		6.750.078.469,00		7.078.380.048,00		7.358.990.448,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	6.165.138.697,00	100	6.446.395.937,00	100	6.750.078.469,00	100	7.078.380.048,00	100	7.358.990.448,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					150.000.000,00		155.857.000,00		162.609.100,00		169.609.000,00		178.059.600,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	-	20	150.000.000,00	40	155.857.000,00	60	162.609.100,00	80	169.609.000,00	100	178.059.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					125.000.000,00		129.881.500,00		135.508.000,00		141.342.000,00		148.384.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa (Persentase)	100	10	20	125.000.000,00	40	129.881.500,00	60	135.508.000,00	80	141.342.000,00	100	148.384.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					100.000.000,00		103.905.000,00		108.406.000,00		113.073.000,00		118.706.700,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	56,25	-	1,7	100.000.000,00	1,7	103.905.000,00	1,7	108.406.000,00	1,7	113.073.000,00	6,7	118.706.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	0	-	1,7		1,7		1,7		1,7		8,3		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.115.000.000,00		2.197.595.000,00		2.292.801.000,00		2.381.513.513,00		2.470.668.700,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	-	20	2.115.000.000,00	40	2.197.595.000,00	60	2.292.801.000,00	80	2.381.513.513,00	100	2.470.668.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	33	-	50		67		83		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					388.480.000,00		403.650.000,00		421.150.000,00		439.270.000,00		461.150.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					115.000.000,00		119.490.000,00		124.670.000,00		130.030.000,00		136.510.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) (Angka)	19,4	-	18,4	115.000.000,00	17,4	119.490.000,00	16,4	124.670.000,00	15,4	130.030.000,00	14,4	136.510.000,00	2.12.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,41	-	2,40		2,39		2,38		2,37		2,36		2.12.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					112.000.000,00		116.370.000,00		121.420.000,00		126.640.000,00		132.950.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB (%)	59,0	59,0	60,3	112.000.000,00	61,6	116.370.000,00	63,0	121.420.000,00	64,2	126.640.000,00	65,5	132.950.000,00	2.12.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					161.480.000,00		167.790.000,00		175.060.000,00		182.600.000,00		191.690.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	-	-	65,5	161.480.000,00	68,5	167.790.000,00	72,0	175.060.000,00	74,5	182.600.000,00	77,5	191.690.000,00	2.12.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Indeks)	-	-	40,5		42,5		44,0		44,5		45,5		2.12.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kampung Keluarga	-	-	90,8		91,5		93,0		93,5		94,5		2.12.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEPENDUDUKA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berkualitas yang Mandiri (%)													N DAN PENCATATAN SIPIL
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11.086.056.809,00		11.568.042.030,00		13.802.804.681,00		14.449.763.941,00		15.091.516.091,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.816.696.809,00		9.210.058.630,00		9.642.666.781,00		10.110.519.041,00		10.536.071.091,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	8.816.696.809,00	100	9.210.058.630,00	100	9.642.666.781,00	100	10.110.519.041,00	100	10.536.071.091,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					549.260.000,00		570.709.800,00		1.295.434.500,00		1.351.207.000,00		1.418.530.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,672	0,701	0,756	549.260.000,00	0,790	570.709.800,00	0,812	1.295.434.500,00	0,835	1.351.207.000,00	0,875	1.418.530.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase)	25,14	25,14	26,35		27,56		29,98		31,19		32,10		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.720.100.000,00		1.787.273.600,00		2.864.703.400,00		2.988.037.900,00		3.136.915.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (%)	0,697	0,705	0,712	1.720.100.000,00	0,719	1.787.273.600,00	0,727	2.864.703.400,00	0,734	2.988.037.900,00	0,741	3.136.915.000,00	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.726.694.551,00		11.191.695.863,00		14.708.136.456,00		15.390.903.782,00		16.084.250.188,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.286.511.551,00		8.656.218.863,00		9.062.812.456,00		9.502.530.782,00		9.902.492.588,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	8.286.511.551,00	100	8.656.218.863,00	100	9.062.812.456,00	100	9.502.530.782,00	100	9.902.492.588,00	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.250.000.000,00		1.298.815.000,00		3.355.085.000,00		3.499.532.000,00		3.673.894.000,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Menu ju Infor matif	Menuju Informatif	1.250.000.000,00	Informatif	1.298.815.000,00	Informatif	3.355.085.000,00	Informatif	3.499.532.000,00	Informatif	3.673.894.000,00	2.16.2.20.2.21.01. 0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN					1.190.183.000,00		1.236.662.000,00		2.290.239.000,00		2.388.841.000,00		2.507.863.600,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
APLIKASI INFORMATIKA														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2,63	2,53	2,63	1.190.183.000,00	2,73	1.236.662.000,00	2,83	2.290.239.000,00	2,98	2.388.841.000,00	3,08	2.507.863.600,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					13.466.955.000,00		14.031.529.182,00		15.666.384.790,00		16.394.898.971,00		17.109.840.729,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.678.250.000,00		11.154.608.600,00		11.678.648.535,00		12.245.284.533,00		12.760.688.926,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	10.678.250.000,00	100	11.154.608.600,00	100	11.678.648.535,00	100	12.245.284.533,00	100	12.760.688.926,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					100.000.000,00		110.000.000,00		112.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	1,93	2,5	2,5	100.000.000,00	2,5	110.000.000,00	2,5	112.000.000,00	2,5	115.000.000,00	2,5	120.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	0,66	0	4,6	100.000.000,00	4,6	110.000.000,00	4,6	115.000.000,00	4,6	120.000.000,00	4,6	125.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					150.000.000,00		128.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	65,23	68,5	68,6	150.000.000,00	68,7	128.000.000,00	68,8	130.000.000,00	68,9	135.000.000,00	69	140.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.17.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					100.000.000,00		103.905.000,00		108.406.400,00		113.073.000,00		118.706.700,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian					100.000.000,00		103.905.000,00		108.406.400,00		113.073.000,00		118.706.700,00	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan (Koperasi)	60	30	30		30		30		30		30		2.17.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01. 0002 - PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	9,91	9,92	9,93	150.000.000,00	9,94	150.000.000,00	9,95	150.000.000,00	9,96	150.000.000,00	9,97	150.000.000,00	2.17.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.955.760.000,00		2.032.175.000,00		3.120.257.900,00		3.254.637.900,00		3.416.848.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	0	1,7	1,8	1.955.760.000,00	1,9	2.032.175.000,00	2,0	3.120.257.900,00	2,1	3.254.637.900,00	2,2	3.416.848.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	-	-	-		-		-		-		-		2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					232.945.000,00		242.840.582,00		252.071.955,00		261.903.538,00		278.597.103,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (%)	0	2,0	2,1	232.945.000,00	2,2	242.840.582,00	2,3	252.071.955,00	2,4	261.903.538,00	2,5	278.597.103,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8.892.778.309,00		9.228.185.622,00		13.152.032.328,00		13.697.012.273,00		14.349.366.056,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.171.114.709,00		8.478.348.622,00		11.919.710.328,00		12.411.636.773,00		12.999.948.356,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	8.171.114.709,00	100	8.478.348.622,00	100	11.919.710.328,00	100	12.411.636.773,00	100	12.999.948.356,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					150.369.900,00		156.242.000,00		263.010.800,00		274.334.000,00		288.002.500,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100	100	100	150.369.900,00	100	156.242.000,00	100	263.010.800,00	100	274.334.000,00	100	288.002.500,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					186.863.700,00		194.161.000,00		302.572.600,00		315.599.000,00		331.323.500,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Investor)	0	0	2	186.863.700,00	2	194.161.000,00	2	302.572.600,00	2	315.599.000,00	2	331.323.500,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					187.550.000,00		194.874.000,00		303.316.500,00		316.375.000,00		332.138.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha (Hari)	-	-	15	187.550.000,00	15	194.874.000,00	14	303.316.500,00	14	316.375.000,00	14	332.138.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					167.730.000,00		174.280.000,00		281.830.300,00		293.963.000,00		308.609.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	-	-	100	167.730.000,00	100	174.280.000,00	100	281.830.300,00	100	293.963.000,00	100	308.609.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					29.150.000,00		30.280.000,00		81.591.800,00		85.104.500,00		89.344.700,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (%)	-	-	72,50	29.150.000,00	75	30.280.000,00	77,50	81.591.800,00	80	85.104.500,00	82,50	89.344.700,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					16.875.049.002,00		17.572.522.647,00		20.761.721.282,00		21.697.377.255,00		22.716.200.432,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.076.019.836,00		7.391.720.388,00		7.738.918.882,00		8.114.403.255,00		8.455.938.732,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	7.076.019.836,00	100	7.391.720.388,00	100	7.738.918.882,00	100	8.114.403.255,00	100	8.455.938.732,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan kinerja pelayanan publik														
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					905.000.000,00		939.442.009,00		1.181.080.000,00		1.231.929.000,00		1.293.309.000,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	4	4,1	4,2	905.000.000,00	4,3	939.442.009,00	4,4	1.181.080.000,00	4,4	1.231.929.000,00	4,5	1.293.309.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					8.144.029.166,00		8.462.071.250,00		10.828.672.400,00		11.294.380.000,00		11.857.640.000,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	50	50	52	8.144.029.166,00	54	8.462.071.250,00	56	10.828.672.400,00	58	11.294.380.000,00	60	11.857.640.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					750.000.000,00		779.289.000,00		1.013.050.000,00		1.056.665.000,00		1.109.312.700,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	5	5	5,1	750.000.000,00	5,2	779.289.000,00	5,3	1.013.050.000,00	5,4	1.056.665.000,00	5,5	1.109.312.700,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					142.800.000,00		148.376.650,00		254.804.750,00		265.774.900,00		279.016.900,00	
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
-														
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARA					142.800.000,00		148.376.650,00		254.804.750,00		265.774.900,00		279.016.900,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
AN STATISTIK SEKTORAL														
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,3	2,35	2,40	142.800.000,00	2,45	148.376.650,00	2,50	254.804.750,00	2,55	265.774.900,00	2,60	279.016.900,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					229.498.980,00		238.461.400,00		748.792.000,00		781.029.800,00		819.944.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					229.498.980,00		238.461.400,00		748.792.000,00		781.029.800,00		819.944.000,00	
Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami) (Skor)	273	229	259	229.498.980,00	304	238.461.400,00	349	748.792.000,00	389	781.029.800,00	400	819.944.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.901.738.791,00		7.591.912.670,00		8.351.103.937,00		9.186.214.331,00		10.104.835.764,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.610.613.791,00		1.771.675.170,00		1.948.842.687,00		2.143.726.956,00		2.358.099.651,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	-	45	1.610.613.791,00	60	1.771.675.170,00	75	1.948.842.687,00	85	2.143.726.956,00	100	2.358.099.651,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01.0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.050.000.000,00		1.155.000.000,00		1.270.500.000,00		1.397.550.000,00		1.537.305.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan dan (Persentase)	-	-	100	1.050.000.000,00	100	1.155.000.000,00	100	1.270.500.000,00	100	1.397.550.000,00	100	1.537.305.000,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01. 0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					210.000.000,00		231.000.000,00		254.100.000,00		279.510.000,00		307.461.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	-	-	20	210.000.000,00	25	231.000.000,00	30	254.100.000,00	35	279.510.000,00	40	307.461.000,00	1.01.2.22.0.00.01. 0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01. 0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.312.500.000,00		1.443.750.000,00		1.588.125.000,00		1.746.937.500,00		1.921.631.250,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	-	-	100	1.312.500.000,00	100	1.443.750.000,00	100	1.588.125.000,00	100	1.746.937.500,00	100	1.921.631.250,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	-	-	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01.0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					2.718.625.000,00		2.990.487.500,00		3.289.536.250,00		3.618.489.875,00		3.980.338.863,00	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	-	50	2.718.625.000,00	52	2.990.487.500,00	54	3.289.536.250,00	56	3.618.489.875,00	58	3.980.338.863,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.01.0001 - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					9.678.801.485,00		9.832.987.152,00		10.595.066.301,00		11.101.006.055,00		11.573.980.400,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.035.330.485,00		9.164.387.352,00		9.597.501.701,00		10.060.494.055,00		10.481.625.600,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	9.035.330.485,00	100	9.164.387.352,00	100	9.597.501.701,00	100	10.060.494.055,00	100	10.481.625.600,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					511.161.000,00		531.122.900,00		754.132.600,00		786.600.000,00		825.791.800,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (%)	38,31	38,31	38,50	511.161.000,00	39	531.122.900,00	39,50	754.132.600,00	40	786.600.000,00	40,50	825.791.800,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					132.310.000,00		137.476.900,00		243.432.000,00		253.912.000,00		266.563.000,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	17	17	17	132.310.000,00	17	137.476.900,00	17	243.432.000,00	17	253.912.000,00	17	266.563.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					242.400.000,00		374.394.000,00		513.032.000,00		571.293.000,00		589.801.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					191.900.000,00		199.394.000,00		308.032.000,00		321.293.000,00		337.301.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase perangkat daerah yang	8	11	13	191.900.000,00	16	199.394.000,00	19	308.032.000,00	22	321.293.000,00	25	337.301.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	memiliki daftar arsip dinamis (%)													N DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					50.500.000,00		175.000.000,00		205.000.000,00		250.000.000,00		252.500.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai dengan NSPK	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan dimusnahkan (Nilai)	1	50	150	50.500.000,00	200	175.000.000,00	250	205.000.000,00	300	250.000.000,00	350	252.500.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					67.277.763.904,00		70.159.287.453,00		79.472.913.998,00		83.167.590.490,00		86.906.138.226,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					45.688.365.566,00		47.726.777.353,00		49.968.564.698,00		52.392.987.990,00		54.598.210.426,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	45.688.365.566,00	100	47.726.777.353,00	100	49.968.564.698,00	100	52.392.987.990,00	100	54.598.210.426,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01.0001 - BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					1.186.640.000,00		1.232.980.000,00		2.286.396.000,00		2.384.832.000,00		2.503.654.800,00	
Terwujudnya pengelolaan pulau- pulau kecil dan pesisir yang berkelanjutan	Luasan Kawasan Konservasi (Ha) (Ha)	2.111.176,3	2.053 .582, 18	2.370.729, 2	1.186.640.000,00	3.318.970, 89	1.232.980.000,00	3.920.894, 99	2.286.396.000,00	4.059.450, 13	2.384.832.000,00	4.221.670, 7	2.503.654.800,00	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					15.951.511.600,00		16.574.452.900,00		20.292.505.000,00		21.166.161.500,00		22.220.753.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	533.116,69	511.4 35,9	255.846	15.951.511.600,00	268.638,2 5	16.574.452.900,00	282.070,1 6	20.292.505.000,00	296.173,6 7	21.166.161.500,00	310.982,3 5	22.220.753.000,00	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.709.766.888,00		2.815.589.000,00		3.937.568.000,00		4.107.092.000,00		4.311.725.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	261.166,28	236.0 00	123.500	2.709.766.888,00	129.675	2.815.589.000,00	136.158	3.937.568.000,00	142.966	4.107.092.000,00	150.115	4.311.725.000,00	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN					1.214.333.850,00		1.261.756.200,00		2.316.419.000,00		2.416.148.000,00		2.536.531.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan	Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan (%)	80,62	90	45	1.214.333.850,00	47,25	1.261.756.200,00	49,61	2.316.419.000,00	52,09	2.416.148.000,00	54,70	2.536.531.000,00	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					527.146.000,00		547.732.000,00		671.461.300,00		700.369.000,00		735.264.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Angka)	82,8	79	40	527.146.000,00	41,48	547.732.000,00	43,55	671.461.300,00	45,73	700.369.000,00	48,01	735.264.000,00	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					12.739.690.535,00		13.295.807.100,00		15.211.967.310,00		15.929.863.886,00		16.630.122.866,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.534.690.535,00		11.004.701.600,00		11.521.606.410,00		12.080.622.886,00		12.589.096.666,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	10.534.690.535,00	100	11.004.701.600,00	100	11.521.606.410,00	100	12.080.622.886,00	100	12.589.096.666,00	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PARIWISATA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik														
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.065.000.000,00		1.106.590.500,00		2.154.531.000,00		2.247.290.000,00		2.359.259.000,00	
Meningkatnya daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan (Destinasi)	3	4	4	1.065.000.000,00	4	1.106.590.500,00	6	2.154.531.000,00	6	2.247.290.000,00	7	2.359.259.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					405.000.000,00		420.816.000,00		739.046.900,00		770.865.000,00		809.272.900,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	5	5	5	405.000.000,00	5	420.816.000,00	5	739.046.900,00	5	770.865.000,00	5	809.272.900,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					260.000.000,00		270.150.000,00		281.853.000,00		293.987.000,00		308.634.700,00	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1,92	1,90	1,92	260.000.000,00	1,94	270.150.000,00	1,96	281.853.000,00	1,98	293.987.000,00	2,00	308.634.700,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					475.000.000,00		493.549.000,00		514.930.000,00		537.099.000,00		563.859.600,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi (%)	0,17	0,36	0,66	475.000.000,00	0,96	493.549.000,00	1,26	514.930.000,00	1,56	537.099.000,00	1,86	563.859.600,00	3.26.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					68.700.940.242,00		72.761.933.390,00		81.627.328.914,00		86.646.819.937,00		91.953.297.994,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					47.366.408.104,00		49.479.686.690,00		51.803.810.414,00		54.317.277.937,00		56.603.493.795,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	47.366.408.104,00	100	49.479.686.690,00	100	51.803.810.414,00	100	54.317.277.937,00	100	56.603.493.795,00	3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					14.732.736.676,00		16.401.543.200,00		22.325.144.000,00		24.491.800.000,00		27.107.172.000,00	
Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Peningkatan Produksi Hortikultura (Angka)	16.512	16.33 7	16.675	14.732.736.676,00	17.004	16.401.543.200,00	17.409	22.325.144.000,00	17.873	24.491.800.000,00	18.380	27.107.172.000,00	3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Pternakan (Angka)	8.702	3.848	3.925		4.003		4.082		4.162		4.255		3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Angka)	142.810	157.3 98	160.298		163.360		166.456		169.635		172.877		3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	147.895	117.9 95	120.355		122.761		125.216		127.721		130.275		3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.768.685.000,00		4.954.912.500,00		5.169.573.500,00		5.392.139.000,00		5.660.799.000,00	
Petani memperoleh hasil dan nilai jual yang lebih baik	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	32.964,43	32.96 4,43	32.964,43	4.768.685.000,00	32.964,43	4.954.912.500,00	32.964,43	5.169.573.500,00	32.964,43	5.392.139.000,00	32.964,43	5.660.799.000,00	3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					493.116.000,00		533.468.000,00		676.164.000,00		723.817.000,00		776.161.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	50	63	75	493.116.000,00	89	533.468.000,00	92	676.164.000,00	94	723.817.000,00	96	776.161.000,00	3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	85	86	87		89		92		94		96		3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN					251.790.000,00		261.622.000,00		272.956.000,00		284.707.000,00		298.892.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					251.790.000,00		261.622.000,00		272.956.000,00		284.707.000,00		298.892.000,00	3.27.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERTANIAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	68,1	71,5	75,5		77,5		80,2		83,5		85,0		3.27.0.00.0.00.01.0002 - BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU
														3.27.0.00.0.00.01.0003 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					80.000.000,00		83.124.000,00		186.720.000,00		192.758.000,00		200.461.700,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Angka)	5	6	7	80.000.000,00	8	83.124.000,00	11	186.720.000,00	12	192.758.000,00	13	200.461.700,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.008.204.462,00		1.047.577.000,00		1.192.961.000,00		1.244.321.000,00		1.306.318.499,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Angka)	54,83	56,10	58,20	1.008.204.462,00	62,46	1.047.577.000,00	66,77	1.192.961.000,00	69,90	1.244.321.000,00	75,08	1.306.318.499,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					61.833.965.409,00		64.492.284.459,00		71.453.130.726,00		74.791.126.742,00		78.129.242.135,00	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					43.780.689.690,00		45.733.989.459,00		47.882.173.026,00		50.205.366.742,00		52.318.512.135,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	43.780.689.690,00	100	45.733.989.459,00	100	47.882.173.026,00	100	50.205.366.742,00	100	52.318.512.135,00	3.28.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEHUTANAN
														3.28.0.00.0.00.01. 0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					15.903.790.657,00		16.524.868.000,00		20.240.772.700,00		21.112.201.000,00		22.164.104.000,00	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) (%)	0,55	0,55	0,57	15.903.790.657,00	0,57	16.524.868.000,00	0,57	20.240.772.700,00	0,57	21.112.201.000,00	0,57	22.164.104.000,00	3.28.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KEHUTANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	30	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
														3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					1.994.910.428,00		2.072.816.000,00		3.162.616.000,00		3.298.776.000,00		3.463.135.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi (Kel) (Kelompok)	2	0	15	1.994.910.428,00	15	2.072.816.000,00	15	3.162.616.000,00	15	3.298.776.000,00	15	3.463.135.000,00	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
	Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Kel) (Kelompok)	18	28	14		14		14		14		14		3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
														3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					154.574.634,00		160.611.000,00		167.569.000,00		174.783.000,00		183.491.000,00	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota (Kegiatan)	-	-	4	154.574.634,00	4	160.611.000,00	4	167.569.000,00	4	174.783.000,00	4	183.491.000,00	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														3.28.0.00.0.00.01. 0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					11.882.891.802,00		12.398.866.204,00		14.671.589.262,00		15.359.035.542,00		15.942.568.090,00	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.332.881.802,00		9.749.273.504,00		10.207.209.262,00		10.702.452.542,00		11.152.919.090,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	9.332.881.802,00	100	9.749.273.504,00	100	10.207.209.262,00	100	10.702.452.542,00	100	11.152.919.090,00	3.29.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01. 0001 - BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					275.000.000,00		285.739.000,00		298.118.000,00		310.952.000,00		227.499.900,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Rp. Juta Per Tahun)	-	-	157	275.000.000,00	749	285.739.000,00	231	298.118.000,00	275	310.952.000,00	453	227.499.900,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Meter)	-	-	-		-		-		-		-		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					275.010.000,00		285.749.700,00		298.129.000,00		310.964.000,00		326.457.600,00	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batu Bara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (%)	0	0	0	275.010.000,00	0	285.749.700,00	0	298.129.000,00	0	310.964.000,00	0	326.457.600,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	-	-	10		1		1		1		1		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					1.250.000.000,00		1.298.815.000,00		2.355.083.000,00		2.456.476.000,00		2.578.868.500,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Milyar Rupiah)	-	-	223.597,25	1.250.000.000,00	213.870,5	1.298.815.000,00	204.143,75	2.355.083.000,00	194.417	2.456.476.000,00	184.690,25	2.578.868.500,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT (Rumah Tangga)	46	-	140		150		200		250		300		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,84	27,30	32,58		34,30		33,66		42,67		44,16		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					750.000.000,00		779.289.000,00		1.513.050.000,00		1.578.191.000,00		1.656.823.000,00	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	-	-	395,75	750.000.000,00	441,5	779.289.000,00	487,25	1.513.050.000,00	533	1.578.191.000,00	578,75	1.656.823.000,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,67	99,67	99,68		99,70		99,80		99,90		100		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.465.000.000,00		5.681.655.000,00		5.955.405.700,00		6.237.800.000,00		6.565.603.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
-														
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					85.000.000,00		88.000.000,00		92.000.000,00		96.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Terdaftar yang Difasilitasi (Jenis)	4	2-4	2-4	85.000.000,00	2-4	88.000.000,00	2-4	92.000.000,00	2-4	96.000.000,00	2-4	100.000.000,00	3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.01. 0001 - BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.000.000.000,00		4.156.208.000,00		4.336.266.000,00		4.522.955.000,00		4.748.308.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	1	1	1	4.000.000.000,00	1	4.156.208.000,00	1	4.336.266.000,00	1	4.522.955.000,00	1	4.748.308.000,00	3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.01. 0001 - BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK					550.000.000,00		571.478.000,00		596.236.000,00		621.905.000,00		652.891.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	2,78	3.5-4	3.5-4	550.000.000,00	3.5-4	571.478.000,00	3.5-4	596.236.000,00	3.5-4	621.905.000,00	3.5-4	652.891.000,00	3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.01. 0001 - BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					450.000.000,00		467.573.000,00		487.829.600,00		508.832.000,00		534.184.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	-	3.08- 3.09	3.15-3.17	450.000.000,00	3.22-3.26	467.573.000,00	3.29-3.34	487.829.600,00	3.36-3.43	508.832.000,00	3.43-3.51	534.184.000,00	3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Pelaku Usaha)	6	6	6		8		10		11		12		3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.01. 0001 - BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					315.000.000,00		323.396.000,00		358.074.100,00		393.108.000,00		430.220.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Kepatuhan Berusaha (%) (%)	0	90	91	315.000.000,00	92	323.396.000,00	93	358.074.100,00	94	393.108.000,00	95	430.220.000,00	3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
	Jumlah bahan berbahaya yang dipantau	4	4	4		4		4		4		4		3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	peredarannya (Jenis)													N DAN PERDAGANGAN
	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen (Kasus) (Kasus)	5	5	5		5		5		5		5		3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
	Jumlah sampel yang diuji (Sampel)	100	100	105		110		115		120		125		3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.01. 0001 - BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaks anakan (%)	0	50	60	65.000.000,00	70	75.000.000,00	80	85.000.000,00	85	95.000.000,00	90	100.000.000,00	3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					14.674.774.110,00		15.298.317.882,00		16.971.154.578,00		17.737.926.161,00		18.518.168.298,00	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.163.088.590,00		10.594.471.882,00		11.094.281.578,00		11.636.391.161,00		12.128.017.498,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	10.163.088.590,00	100	10.594.471.882,00	100	11.094.281.578,00	100	11.636.391.161,00	100	12.128.017.498,00	3.31.3.30.0.00.01. 0000 - DINAS PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik														
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4.511.685.520,00		4.703.846.000,00		5.876.873.000,00		6.101.535.000,00		6.390.150.800,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%) (%)	0	2,5	3	4.511.685.520,00	3,5	4.703.846.000,00	4	5.876.873.000,00	4,5	6.101.535.000,00	5	6.390.150.800,00	3.31.3.30.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.01.0001 - BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.000.000.000,00		1.359.763.000,00		1.471.016.000,00		1.291.294.000,00		515.772.000,00	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					700.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		0,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan (%)	-	-	100	700.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	800.000.000,00	-	0,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300.000.000,00		359.763.000,00		471.016.000,00		491.294.000,00		515.772.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	-	-	0,21	300.000.000,00	0,5	359.763.000,00	0,4	471.016.000,00	0,4	491.294.000,00	0,38	515.772.000,00	2.07.3.32.0.00.01. 0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01. 0001 - BALAI PENGEMBANGA N KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					232.332.421.693,00		245.362.076.325,00		260.302.327.749,00		275.826.290.804,00		291.671.553.657,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					115.950.948.751,00		122.379.299.634,00		130.016.343.047,00		138.592.125.516,00		147.125.526.051,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	89.003.101.251,00	100	92.738.927.509,00	100	97.414.306.841,00	100	102.732.377.477,00	100	107.682.419.584,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
														4.01.0.00.0.00.00. 0001 - BIRO PEMERINTAHAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAN OTONOMI DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pimpinan Daerah					2.747.847.500,00		3.020.372.125,00		3.320.036.206,00		3.649.548.039,00		4.011.886.467,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Layanan Administrasi Pimpinan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00. 0006 - BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Umum Daerah					24.200.000.000,00		26.620.000.000,00		29.282.000.000,00		32.210.200.000,00		35.431.220.000,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Layanan Umum Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00. 0005 - BIRO UMUM
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1.795.000.000,00		1.974.500.000,00		2.171.950.000,00		2.389.145.000,00		2.628.059.500,00	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah					1.795.000.000,00		1.974.500.000,00		2.171.950.000,00		2.389.145.000,00		2.628.059.500,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Organisasi yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00. 0003 - BIRO ORGANISASI
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					12.329.600.200,00		13.835.080.210,00		15.185.584.221,00		15.904.488.432,00		16.710.425.353,00	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah					12.329.600.200,00		13.835.080.210,00		15.185.584.221,00		15.904.488.432,00		16.710.425.353,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitasi	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00. 0001 - BIRO PEMERINTAHAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kerjasama Daerah (%)													DAN OTONOMI DAERAH
	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					94.474.174.525,00		99.197.883.251,00		104.157.777.414,00		109.365.666.284,00		114.833.949.598,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					94.474.174.525,00		99.197.883.251,00		104.157.777.414,00		109.365.666.284,00		114.833.949.598,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00.0004 - BIRO KESEJAHTERAA N MASYARAKAT
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					2.263.599.000,00		2.263.599.000,00		2.528.139.000,00		2.832.360.000,00		3.082.215.045,00	
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan					2.263.599.000,00		2.263.599.000,00		2.528.139.000,00		2.832.360.000,00		3.082.215.045,00	4.01.0.00.0.00.00.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 45) (%)	-	-	62,5		65		67,5		70		72,5		4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
	Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00.0002 - BIRO HUKUM
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN					1.352.001.217,00		1.366.307.230,00		1.379.246.287,00		1.392.948.937,00		1.406.705.728,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PEMBANGUNAN														
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan					1.352.001.217,00		1.366.307.230,00		1.379.246.287,00		1.392.948.937,00		1.406.705.728,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang Difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00. 0007 - BIRO PEREKONOMIA N DAERAH
	Return on Asset (ROA) BUMD Perangkat Daerah (IUP 45) (%)	-	2,49	2,66		2,83		3,00		3,17		3,34		4.01.0.00.0.00.00. 0007 - BIRO PEREKONOMIA N DAERAH
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					2.375.000.000,00		2.374.099.200,00		2.694.849.200,00		2.964.274.200,00		3.260.861.700,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					2.375.000.000,00		2.374.099.200,00		2.694.849.200,00		2.964.274.200,00		3.260.861.700,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00. 0008 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1.792.098.000,00		1.971.307.800,00		2.168.438.580,00		2.385.282.435,00		2.623.810.682,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan					1.792.098.000,00		1.971.307.800,00		2.168.438.580,00		2.385.282.435,00		2.623.810.682,00	4.01.0.00.0.00.00. 0000 - SEKRETARIAT DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.00.0008 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					138.801.014.102,00		145.089.278.012,00		152.930.689.663,00		160.121.922.646,00		168.116.015.528,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					79.265.269.536,00		83.228.533.012,00		87.389.959.663,00		91.759.457.646,00		96.347.430.528,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	79.265.269.536,00	100	83.228.533.012,00	100	87.389.959.663,00	100	91.759.457.646,00	100	96.347.430.528,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					59.535.744.566,00		61.860.745.000,00		65.540.730.000,00		68.362.465.000,00		71.768.585.000,00	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Ketetapan)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	25.862.510.448,00	Tepat Waktu	26.870.887.433,00	Tepat Waktu	29.182.769.005,00	Tepat Waktu	30.582.907.727,00	Tepat Waktu	31.775.852.242,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas	Persentase Penetapan	100	100	100	33.673.234.118,00	100	34.989.857.567,00	100	36.357.960.995,00	100	37.779.557.273,00	100	39.992.732.758,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 -



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penganggaran dan Pengawasan	Ranperda Tahun N (Persentase)													SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					24.402.804.931,50		26.149.636.399,23		26.563.193.079,80		28.300.418.166,86		29.291.949.872,02	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.322.918.396,50		14.307.131.008,23		14.528.644.189,80		15.397.735.888,36		15.744.133.481,14	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	13.322.918.396,50	100	14.307.131.008,23	100	14.528.644.189,80	100	15.397.735.888,36	100	15.744.133.481,14	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					6.154.709.025,00		6.671.069.014,00		6.604.540.690,00		6.951.173.672,00		7.298.732.361,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	6.154.709.025,00	100	6.671.069.014,00	100	6.604.540.690,00	100	6.951.173.672,00	100	7.298.732.361,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan	-	-	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Renstra PD (Persentase)													PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4.925.177.510,00		5.171.436.377,00		5.430.008.200,00		5.951.508.606,50		6.249.084.029,88	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	-	-	100	2.100.000.000,00	100	2.205.000.000,00	100	2.315.250.000,00	100	2.431.012.500,00	100	2.552.563.125,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembagunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	-	-	100	1.250.177.510,00	100	1.312.686.377,00	100	1.378.320.700,00	100	1.447.236.732,00	100	1.519.598.570,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))	-	-	0,29	1.575.000.000,00	0,31	1.653.750.000,00	0,33	1.736.437.500,00	0,35	2.073.259.374,50	0,37	2.176.922.334,88	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	-	822.214,73	1.007.016,22		1.191.817,71		1.376.619,20		1.561.420,69		1.746.222,18		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan SDA (Persentase)													
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	-	-	25,02		25,84		26,64		27,46		28,27		5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Total Kredit/PDRB (%)	-	-	30,45		31,61		32,75		33,91		35,06		5.01.5.05.0.00.01. 0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					389.284.481.438,00		402.218.227.607,98		432.827.476.978,00		452.069.652.956,95		472.294.749.611,20	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					67.698.454.662,00		67.963.148.950,00		72.000.151.015,00		75.637.653.095,00		77.095.472.267,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	67.698.454.662,00	100	67.963.148.950,00	100	72.000.151.015,00	100	75.637.653.095,00	100	77.095.472.267,00	5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	E	B	B		B		B		B		B		5.02.0.00.0.00.02. 0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02. 0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														5.02.0.00.0.00.02. 0001 - UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					310.922.463.089,00		323.074.831.099,98		347.081.239.060,00		362.032.696.513,01		380.070.992.938,54	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	17,48	18	18	304.222.784.537,91	18	316.096.818.205,81	18	339.622.637.354,78	18	354.239.599.226,96	18	371.896.603.812,73	5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	0,73	0,78	0,78		0,78		0,78		0,78		0,78		5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100	2.806.450.477,31	100	2.918.323.081,81	100	3.130.374.190,78	100	3.267.590.754,30	100	3.426.770.307,89	5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5	5	5	2.781.764.073,78	5	2.892.652.612,36	5	3.102.838.454,44	5	3.238.848.018,75	5	3.396.627.379,92	5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	93,90	93,90	93,90		93,90		93,90		93,90		93,90		5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	94,18	95,00	95,00	1.111.464.000,00	95,00	1.167.037.200,00	95,00	1.225.389.060,00	95,00	1.286.658.513,00	95,00	1.350.991.438,00	5.02.0.00.0.00.02. 0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
														5.02.0.00.0.00.02. 0001 - UPTD PELAYANAN PENDAPATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														AMBON KOTA AMBON
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.717.930.187,00		1.787.332.383,00		3.883.525.970,00		4.043.614.369,00		4.254.810.977,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	100	100	100	1.717.930.187,00	100	1.787.332.383,00	100	3.883.525.970,00	100	4.043.614.369,00	100	4.254.810.977,00	1.03.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	7,20	7,20	7,20		7,20		7,20		7,20		7,20		5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Efisiensi Keuangan dan Nilai Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase aset produktif terhadap total aset (%)	-	-	-		-		-		-		-		5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Rasio laba bersih terhadap aset (Rasio)	-:-	-:-	-:-		-:-		-:-		-:-		-:-		5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					8.945.633.500,00		9.392.915.175,00		9.862.560.933,00		10.355.688.979,94		10.873.473.428,66	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan					8.945.633.500,00		9.392.915.175,00		9.862.560.933,00		10.355.688.979,94		10.873.473.428,66	5.02.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Efektifitas pendapatan daerah (persentase) (%)	94,18	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		5.02.0.00.0.00.02. 0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
														5.02.0.00.0.00.02. 0001 - UPTD PELAYANAN PENDAPATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														AMBON KOTA AMBON
5.03 - KEPEGAWAIAN					11.234.518.792,00		13.116.072.558,00		12.460.268.929,00		11.837.255.483,00		11.245.392.708,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.060.863.750,00		9.536.944.850,00		9.060.097.607,00		8.607.092.727,00		8.176.738.090,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	8.060.863.750,00	100	9.536.944.850,00	100	9.060.097.607,00	100	8.607.092.727,00	100	8.176.738.090,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.173.655.042,00		3.579.127.708,00		3.400.171.322,00		3.230.162.756,00		3.068.654.618,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghrgaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	109,5	109,5	120	3.173.655.042,00	122	3.579.127.708,00	123	3.400.171.322,00	128	3.230.162.756,00	135	3.068.654.618,00	5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi (Nilai)	87	87	100		102		103		105		115		5.03.5.04.0.00.01. 0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier (Nilai)	55	55	60		61		64		67		75		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					16.342.146.000,00		17.011.716.000,00		18.707.176.000,00		19.452.887.000,00		20.249.486.000,00	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.000.000.000,00		12.500.000.000,00		13.000.000.000,00		13.500.000.000,00		14.000.000.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	12.000.000.000,00	100	12.500.000.000,00	100	13.000.000.000,00	100	13.500.000.000,00	100	14.000.000.000,00	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.342.146.000,00		4.511.716.000,00		5.707.176.000,00		5.952.887.000,00		6.249.486.000,00	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang menyelesaikan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	100	100	100	1.673.520.000,00	100	1.678.520.000,00	100	2.198.520.000,00	100	2.198.520.000,00	100	2.198.520.000,00	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	100	100	100	1.251.396.600,00	100	1.731.600.000,00	100	1.479.309.000,00	100	1.603.164.500,00	100	1.751.164.500,00	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	100	-	100	1.417.229.400,00	100	1.101.596.000,00	100	2.029.347.000,00	100	2.151.202.500,00	100	2.299.801.500,00	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.722.500.000,00		3.532.375.000,00		3.875.243.750,00		4.769.005.930,00		3.886.581.226,50	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					3.172.500.000,00		2.954.875.000,00		3.268.868.750,00		4.132.312.180,00		3.218.052.789,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	-	50	3.172.500.000,00	70	2.954.875.000,00	70	3.268.868.750,00	75	4.132.312.180,00	80	3.218.052.789,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					550.000.000,00		577.500.000,00		606.375.000,00		636.693.750,00		668.528.437,50	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	-	80	550.000.000,00	85	577.500.000,00	90	606.375.000,00	95	636.693.750,00	100	668.528.437,50	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					7.000.000.000,00		7.327.240.976,00		7.686.893.766,00		8.064.391.972,00		8.429.271.325,00	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					4.226.808.068,00		4.415.389.456,00		4.622.785.906,00		4.847.078.717,00		5.051.092.405,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	4.226.808.068,00	100	4.415.389.456,00	100	4.622.785.906,00	100	4.847.078.717,00	100	5.051.092.405,00	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					2.773.191.932,00		2.911.851.520,00		3.064.107.860,00		3.217.313.255,00		3.378.178.920,00	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase infrastruktur terbangun di kawasan perbatasan (Persentase)	62,38	-	69,05	2.773.191.932,00	72	2.911.851.520,00	74,50	3.064.107.860,00	77	3.217.313.255,00	80	3.378.178.920,00	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					10.593.865.800,00		11.123.559.090,00		11.679.737.045,00		12.168.849.869,00		12.876.910.092,00	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.325.420.986,00		8.741.692.036,00		9.178.776.638,00		9.637.715.469,00		10.119.601.243,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	8.325.420.986,00	100	8.741.692.036,00	100	9.178.776.638,00	100	9.637.715.469,00	100	10.119.601.243,00	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan kinerja pelayanan publik														
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					2.268.444.814,00		2.381.867.054,00		2.500.960.407,00		2.531.134.400,00		2.757.308.849,00	
Meningkatnya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penghubung (%)	100	100	100	2.268.444.814,00	100	2.381.867.054,00	100	2.500.960.407,00	100	2.531.134.400,00	100	2.757.308.849,00	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					27.505.340.000,00		28.862.546.000,00		32.552.011.000,00		33.882.605.000,00		35.576.052.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.353.340.000,00		19.271.010.000,00		20.234.560.000,00		21.246.280.000,00		22.308.600.000,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	100	100	100	18.353.340.000,00	100	19.271.010.000,00	100	20.234.560.000,00	100	21.246.280.000,00	100	22.308.600.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun	72	74	76		78		80		82		84		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Anggaran n-1 (%)													
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.502.000.000,00		7.877.100.000,00		8.528.741.000,00		8.684.500.000,00		9.118.730.000,00	
Menurunnya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	100	100	100	7.502.000.000,00	100	7.877.100.000,00	100	8.528.741.000,00	100	8.684.500.000,00	100	9.118.730.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.650.000.000,00		1.714.436.000,00		3.788.710.000,00		3.951.825.000,00		4.148.722.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Nilai Pencegahan Korupsi (%)	62,72	65	70	1.650.000.000,00	75	1.714.436.000,00	80	3.788.710.000,00	85	3.951.825.000,00	90	4.148.722.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					18.360.000.000,00		19.278.000.000,00		136.495.313.680,00		317.700.199.883,00		22.122.288.167,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.588.800.000,00		7.968.240.000,00		8.366.652.000,00		8.784.984.600,00		9.224.233.830,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	7.588.800.000,00	100	7.968.240.000,00	100	8.366.652.000,00	100	8.784.984.600,00	100	9.224.233.830,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan kinerja pelayanan publik														
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					4.625.700.000,00		4.856.985.000,00		5.099.834.250,00		5.354.825.962,00		5.622.567.260,00	
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	4.625.700.000,00	100	4.856.985.000,00	100	5.099.834.250,00	100	5.354.825.962,00	100	5.622.567.260,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.213.000.000,00		3.373.650.000,00		119.795.746.180,00		300.165.654.009,00		3.711.015.000,00	
Meningkatnya Etika dan Budaya politik	Persentase Kebijakan Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	3.213.000.000,00	100	3.373.650.000,00	100	119.795.746.180,00	100	300.165.654.009,00	100	3.711.015.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN					1.402.500.000,00		1.472.625.000,00		1.546.256.250,00		1.623.569.062,00		1.704.747.515,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ORGANISASI KEMASYARAKATA N														
Meningkatnya Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif (%)	71,64	67	68	1.402.500.000,00	69	1.472.625.000,00	70	1.546.256.250,00	71	1.623.569.062,00	72	1.704.747.515,00	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					357.000.000,00		374.850.000,00		393.592.500,00		413.272.125,00		433.935.731,00	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	100	100	100	357.000.000,00	100	374.850.000,00	100	393.592.500,00	100	413.272.125,00	100	433.935.731,00	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.173.000.000,00		1.231.650.000,00		1.293.232.500,00		1.357.894.125,00		1.425.788.831,00	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%)	100	100	100	1.173.000.000,00	100	1.231.650.000,00	100	1.293.232.500,00	100	1.357.894.125,00	100	1.425.788.831,00	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					3.208.120.278.709.50		3.336.233.968.611.21		3.689.077.348.124.80		4.010.563.841.653.81		3.893.861.992.787.22	



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.2.1 Indikator Makro

Indikator makro memiliki peran krusial dalam mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, termasuk Provinsi Maluku. Indikator-indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), dan ketimpangan pendapatan (gini ratio) menjadi tolok ukur objektif yang mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan memantau perkembangan indikator makro, pemerintah dapat mengetahui apakah arah pembangunan yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan strategis daerah maupun nasional.

Bagi Provinsi Maluku yang memiliki tantangan geografis sebagai daerah kepulauan dan ketimpangan wilayah yang cukup tinggi, indikator makro menjadi alat penting untuk memastikan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Misalnya, peningkatan IPM tidak hanya menunjukkan keberhasilan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli, tetapi juga mencerminkan seberapa besar akses layanan dasar telah menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil. Demikian pula, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran akan menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Selain sebagai alat evaluasi, indikator makro juga berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan ke depan. Pemerintah Provinsi Maluku dapat menggunakan data tren indikator ini untuk menyusun prioritas pembangunan, menyesuaikan alokasi anggaran, serta menyusun kebijakan afirmatif untuk wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal. Dengan demikian, indikator makro tidak hanya mencerminkan hasil, tetapi juga menjadi panduan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Tabel 4.1.1

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,34	6,07	6,85	7,62	8,4	9,17
2	PDRB Per Kapita	juta	32,2	34,8	38,73	42,65	46,58	50,5	54,43
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,28	0,3	0,28	0,29	0,29	0,3	0,3
4	Tingkat Kemiskinan	%	15,78	15,43	14,54	13,67	12,78	11,9	11,01
5	Rasio Gini	%	0,282	0,282 - 0,287	0,271-0,276	0,261- 0,265	0,250-0,254	0,239 – 0,243	0,228-0,232
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	Na	0,49	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	Na	42,88	49,38	58,91	68,44	77,97	86,29
8	IKLH Daerah	Angka	78,71	82,43	82,59	82,76	82,93	83,10	83,27
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	5,95	5,92	5,8	5,69	5,37	5,00



4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI MALUKU

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku,	Indeks	65,11	66 (B :Cukup Baik)	67 (B :Cukup Baik)	68 (B :Cukup Baik)	69 (B :Cukup Baik)	70 (BB : Baik)	71
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,78	15,43	14,54	13,67	12,78	11,9	11,01
3.	Indeks Modal Manusia	Indeks	na	0,49	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53
4.	Indeks Infrastruktur	Indeks	60,23	56,65	69,38	70,60	71,93	73,02	74,90
5.	Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku	Rasio	0,761	0,762	0,764	0,766	0,767	0,768	0,769
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,71	82,43	82,59	82,76	82,93	83,1	83,27
7.	Indeks Risiko Bencana	Angka	161,5	161,45	161,4	161,35	161,3	161,25	161,2
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	Na	42,88	49,38	58,91	68,44	77,97	86,29
9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,34	5,34	6,07	6,85	7,62	8,4	9,17
10.	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	na	60,07	61,9	63,73	65,57	67,4	69,23
11.	Indeks Williamson	Indeks	0,389	0,388	0,388	0,388	0,387	0,387	0,387



No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	76,47	76,5	76,53	76,56	76,59	76,62	76,65
13.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	na	60,71	61,31	61,91	62,51	63,11	63,71
14	Indesk Demokrasi Provinsi	Angka		70,5-76,69	70,55 - 77,19	70,6 - 77,69	70,65 -78,19	70,7 - 78,69	70,75 - 78,75



**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir
Pemerintah Provinsi Maluku**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	78,71	82,43	82,59	82,76	82,93	83,10	83,27	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	161,50	161,45	161,40	161,35	161,30	161,25	161,20	
3	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	42,88	49,38	58,91	68,44	77,97	86,29	
4	Persentase wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang terkonservasi	%	47,69	46,39	53,56	74,98	88,58	91,71	95,37	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,71	82,43	82,59	82,76	82,93	83,10	83,27	
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,71	82,43	82,59	82,76	82,93	83,10	83,27	
8	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Bidang Tanah	0	0	2.200	1.200	1.000	1.200	1.200	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	-	10	13,50	17,00	20,50	24,00	27,50	
10	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	12,468	6,396	48	50	52	54	54	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
11	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	0	40,39	41,25	44,12	47,27	52,00	58,54	
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	57,00	65,75	74,50	83,25	92,00	100	
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0	6	9,12	9,33	9,56	10,00	10,05	
14	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	76,90	76	78	79	79,5	80	80	
15	Persentase Penurunan Emisi GRK b) Tahunan	%	67,78	85,82	87,65	90,98	94,42	97,99	98,02	
16	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan PoU	%	31,66	28,96	27,64	26,84	25,56	24,53	23,41	
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Poin	-	-	0,551	0,561	0,571	0,579	0,589	
18	Intensitas Energi Primer	SBM/Milyar Rupiah	-	-	223.597,25	213.870,5	204.143,75	194.417	184.690,25	
19	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	-	-	395,75	441,5	487,25	533	578,75	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	%	76,47	76.5-76.69	76.53-76.80	76.56-76.83	76.59-76.86	76.62-76.89	76.65-76.92	
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	15,78	15,43	14,54	13,67	12,78	11,90	11,01	
3	Indeks Modal Manusia Provinsi Maluku	Indeks	-	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	-	60,71	61,31	61,91	62,51	63,11	63,71	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Indeks Demokrasi Provinsi	%	-	70.5-76.69	70.55-77.19	70.6-77.69	70.65-78.19	70.7-78.69	70.75-78.75	
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32,20	34,80	38,73	42,65	46,58	50,50	54,43	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	5,95	5,92	5,80	5,69	5,37	5,00	
8	Indeks Pendidikan	Indeks	0,471	0,473	0,475	0,477	0,479	0,481	0,483	
9	Indeks Kesehatan	Indeks	0,422	0,764	0,767	0,770	0,773	0,776	0,779	
10	Jumlah cabang olah raga yang meraih prestasi dalam kompetisi nasional dan internasional	Angka	11	4	4	4	7	4	4	
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,538	0,525	0,514	0,502	0,491	0,479	0,468	
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,68	71,16	71,51	71,85	72,2	72,54	72,89	
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,33	56,75	57,45	58,16	58,87	59,58	60,28	
14	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	48,56	48,57	48,58	48,59	48,60	48,61	48,62	
15	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun	%	-	10.57-10.59	10.70-10.72	10.83-10.85	10.96-10.98	11.11-11.12	---	
16	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	-	19.87-22.37	21.13-23.63	22.39-24.89	23.65-26.15	24.91-27.41	---	
17	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	-	15.55-18.05	16.55-19.05	17.55-20.05	18.55-21.05	19.55-22.05	---	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
18	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	0	50	52	54	56	58	
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	83,7	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	B (Perlu Perbaikan)	
20	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	6,31	6	6	7	7	7	7	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,73	93,78	93,92	94,06	94,20	94,34	95,47	
22	Harapan Lama Sekolah	%	-	14.21-14.22	14.27-14.29	14.33-14.36	14.39-14.43	14.48-14.50	---	
23	Indeks Partisipasi Olahraga	Persentase	0,320	0,320	0,330	0,340	0,350	0,360	0,370	
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	0	65,49	66,08	66,67	67,26	67,86	68,45	
25	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	6,53	7	7	7	7	7	7	
26	Skor Literasi/Numerasi	Skor	52,40	53,36	54,32	55,29	56,26	57,22	58,19	
27	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,96	69,62	70,14	70,59	70,97	71,31	71,65	
28	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	-	14,94	15,09	15,24	15,39	15,57	15,72	
29	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	-	73,81	74,92	76,05	77,16	78,28	79,39	
30	Penemuan Kasus TBC	%	61	90	90	90	90	90	90	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
31	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
32	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	58,55	58,55	59	59,5	60	60,5	61	
33	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Angka	-	-	625	1.250	1.875	2.500	3.125	
34	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	86	90	90	90	90	90	90	
35	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	43,17	35	38	41	45	47,09	63	
36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,6	98,6	98,7	98,8	98,9	99	100	
37	Persentase Fasilitasi Olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	
38	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	34,9	35	35,3	36	36,5	38	38,9	
39	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/Provinsi	Unit	0	4	6	8	10	12	12	
40	Prevelensi Balita Stunting	%	28,4	24,7	23,1	21,6	20,2	18,8	17,7	
41	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	189	187	168	151	135	121	118	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,72	56,26	58,80	59,31	59,84	59,88	60,45	
III	ASPEK DAYA SANGAT DAERAH									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,34	6,07	6,85	7,62	8,40	9,17	
2	Indeks Infrastruktur	Angka	43,72	54,00	56,07	57,84	59,75	61,78	64,24	
3	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Nilai	-	60,07	61,90	63,73	65,57	67,40	69,23	
4	Rasio Konektivitas Wilayah Provinsi Maluku	Rasio	0,671	0,762	0,764	0,766	0,767	0,768	0,769	
5	Indeks Wiliamson/Indeks Kesenjangan Wilayah	Indeks	0,389	0,388	0,388	0,387	0,387	0,387	0,387	
6	Inklusi Keuangan	(%)	-	86,30	87,11	87,92	88,73	89,54	90,35	
7	Indeks Desa	Indeks	-	0,6594	0,6726	0,6860	0,6998	0,7138	0,7280	
8	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	62,68	65,15	67,20	69,00	72,10	74,65	77,15	
9	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	%	-	11,5	11,32	11,15	10,97	10,80	10,62	
10	Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur transportasi	%	69,75	71,67	73,58	75,58	77,50	79,42	81,58	
11	Persentase wilayah yang terhubung oleh infrastruktur telekomunikasi	%	68,13	71,50	74,87	78,25	81,62	85,00	88,37	
12	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) yang masuk ke Provinsi Maluku	%	3,380	3,760	3,838	3,912	3,989	4,068	4,149	
13	Tingkat perkembangan kawasan ekonomi khusus	Angka	0	0	0	0	0	0	1	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,31	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,01	
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,45	1,50	1,58	1,61	1,70	1,76	1,80	
16	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,39	5,8	6,35	6,90	7,45	8,00	8,55	
17	Persentase masyarakat yang mengakses pembiayaan	%	7,39	7,46	7,54	7,61	7,69	7,77	7,84	
18	Tingkat Inflasi Daerah	%	1,28	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Penanaman Modal	Indeks	93	93,5	94	94,5	95	95,5	96	
20	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase	-	67,45	69,48	71,51	73,54	75,59	77,62	
21	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka	17,74	33,67	35,72	37,27	39,07	41,30	44,28	
22	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,68	103,36	103,88	104,36	104,88	105,36	105,88	
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1,44	1,51	1,55	1,60	1,63	1,68	1,72	
24	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,01	2,03	2,24	2,45	2,66	2,87	3,08	
25	Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Maluku	Persentase	-	0,14	1,68	0,16	0,17	0,18	0,19	
26	Rasio elektrifikasi	%	99,67	99,67	99,68	99,70	99,80	99,90	100	
27	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	95,05	101,5	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50	
28	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,45	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,50	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
29	Pertumbuhan dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian	%	9,56	10,05	10,15	10,23	10,73	10,4	10,45	
30	Jumlah Realisasi Investasi Provinsi Maluku	triliun rupiah	3,38	3,76	3,83	3,91	3,98	4,06	4,14	
31	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	0	5,8	6,0	6,3	6,5	6,8	7,1	
32	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	23,84	27,30	32,58	34,30	33,66	42,67	44,16	
33	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	%	53,75	54,83	55,93	56,75	57,83	58,93	59,75	
34	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,71	0,75	0,76	0,78	0,78	0,80	0,81	
35	Indeks Inovasi Daerah	Angka	46,71	47,15	50,00	51,25	51,55	52,35	54,00	
36	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
37	Jumlah Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase	22	5	5	7	7	10	10	
38	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2	2	3	3	3	3	3	
39	Persentase Desa Mandiri	%	8,63	15,25	15,67	16,08	16,33	16,50	16,50	
40	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	-	29,5	30,37	31,25	32,12	33,00	33,87	
41	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	Orang	402,843	422,985	444,134	466,341	489,658	514,141	539,848	
42	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2	2	3	3	3	3	3	
43	Persentase Koperasi Aktif	%	65,23	68,5	68,6	68,7	68,8	68,9	69	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
44	Nilai Transaksi Saham Per kapita Per Provinsi (Rupiah)	Nilai	-	822.214,73	1.007.016,22	1.191.817,71	1.376.619,20	1.561.420,69	1.746.222,18	
45	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	-	-	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	
46	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-	3.08-3.09	3.15-3.17	3.22-3.26	3.29-3.34	3.36-3.43	3.43-3.51	
47	Total Kredit/PDRB	(%)	-	-	30,45	31,61	32,75	33,91	35,06	
48	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	-	-	25,02	25,84	26,64	27,46	28,27	
49	Return on Asset (ROA) BUMD Perangkat Daerah (IUP 45)	%	-	2,49	2,66	2,83	3,00	3,17	3,34	
50	Jumlah Tamu Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	%	402.843	422.985	444.134	466.341	489.658	514.141	539.848	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	65,11	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	
2	Indeks Reformasi Birokrasi General	Nilai	-	60,75	62,72	64,75	66,75	68,75	70,75	
3	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Harmoni	Nilai	-	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
5	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	0	48,6	51,5	54,3	57,2	60,0	62,9	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	0	70	72,5	75	77,5	80	82,5	
7	Indeks Integritas Nasional	Persentase	67,43	67,43	68,12	68,81	69,50	70,19	70,88	
8	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	58.2:60.2	64.1:65.7	65.8:67.4	67.5:69.1	69.2:70.8	70.9:72.5	72.6:74.2	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,30	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	
10	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami)	Skor	273	229	259	304	349	389	400	
11	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha	Hari	0	0	15	15	14	14	14	
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	-	100	100	100	100	100	100	
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,63	2,53	2,63	2,73	2,83	2,98	3,08	
14	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan	%	-	45	60	75	85	90	100	
15	Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	-	70	70,75	71,5	72,25	73	73,75	
17	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (IUP 45)	%	-	-	62,5	65	67,5	70	72,5	
18	Persentase anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	57,37	65,90	66	67	68	69	70	
19	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	77,70	78,34	85	87	89	91	95	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Nilai Sakip	Nilai	72,15	74	75,5	77	78,5	80	81,5	
2	Dimensi Warisan Budaya	Nilai	-	-	58,35	58,37	58,39	58,41	58,43	
3	Skor Kemampuan Literasi SMK	%	58,53	59,84	61,14	62,44	63,74	65,04	66,34	
4	Skor Kemampuan Literasi SMA	%	60,52	61,34	61,94	62,54	63,14	63,74	64,34	
5	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Skor Kemampuan Numerasi SMK	%	51,08	53,28	55,48	57,68	59,88	62,08	64,28	
7	Skor Kemampuan Numerasi SLB	%	45,89	46,34	46,79	47,24	47,69	48,14	48,59	
8	Persentase pemerataan guru	%	-	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase layanan dan tidak lanjut pemberian perizinan pendidikan	%	-	-	10	11	12	13	14	
10	Skor Kemampuan Literasi SLB	%	54,43	55,10	56,16	57,03	57,89	58,76	59,63	
11	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	-	-	35	36	38	39	40	
12	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	%	-	-	3	7	10	12	15	
13	Skor Kemampuan Numerasi SMA	%	52,45	54,25	55,85	57,45	59,05	60,65	62,25	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	34	38	41	60	60	60	60	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	16,85	12,62	11,95	11,28	10,61	9,96	9,96	
5	Nilai Sakip	Nilai	62,1	63,5	65	66,5	68	69,5	71	
6	Average Length of Stay	%	4	4	4	3	3	3	3	
7	Cakupan Penerimaan PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis)	%	0	20	25	40	55	60	70	
8	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria	Kabupaten/ Kota	3	4	6	8	11	11	11	
9	ODHIV Baru yang ditemukan yang mendapat Pengobatan Arv	%	58	90	90	90	90	90	90	
10	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	80	81	82	84	86	88	90	
11	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	50	55	60	70	75	80	90	
12	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	40	45	50	55	60	65	70	
14	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup	Orang	19,83	29,4	28	26,5	25,1	23,7	22	
15	Cakupan penerimaan imunisasi bayi lengkap	Persentase	75	80	85	90	93	95	97	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	10	10	15	20	25	30	35	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	91,6	25	33	33	50	60	75	
2	Tingkat Kemantapan Jalan	%	53,22	54,63	56,79	58,37	60,39	61,98	64,24	
3	Nilai Sakip	Nilai	0	78,5	83,5	85,00	90,5	93,5	95,00	
4	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	11	17	25	39	45	50	60	
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	4,32	16,01	17	18	19	19	20	
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	8,32	21,14	22,20	23	24	26	27	
7	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	26,64	37,11	39	41	43	45	47	
8	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	16	16	18	20	22	24	26	
9	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	17	17	19	20	21	24	27	
10	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	5	5	15	20	25	30	35	
11	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian	%	-	6	9,12	9,33	9,56	10,00	10,05	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman									
12	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	-	2	22	24	25	26	28	
14	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak	%	-	-	55,1	55,72	55,95	56,19	56,44	
15	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	-	2	20	23	26	28	31	
16	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	%	5	16	19	22	23	26	28	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Nilai Sakip	Nilai	70,15	80,1	80,5	80,7	81	81,3	81,5	
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase	24,64	25,25	27,22	29,41	32,02	34,79	37,77	
3	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Nilai Sakip	Nilai	62,05	65,05	68,05	71,05	74,05	77,05	80,05	
2	Nilai Sakip	Nilai	60	62,1	64,1	66,1	68,1	70,1	72,1	
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Nilai SAKIP		60	61	62	63	64	65	66	
2	Persentase Masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial	%	70	71	72	73	74	75	76	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar di dalam panti	%	60	61	62	63	64	65	66	
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	70	71	72	73	74	75	76	
5	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	60	61	63	64	65	66	67	
7	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	70	71	72	73	74	75	76	
8	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	80	81	82	83	84	85	86	
10	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	80	81	82	83	84	85	86	
11	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	70	71	72	73	74	75	76	
12	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	70	71	72	73	74	75	76	
13	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	80	81	82	83	84	85	86	
14	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat sesuai Standar	%	80	81	82	83	84	85	86	
16	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana									
17	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	%	70	71	72	73	74	75	76	
19	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	90,60	
21	Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	80	81	82	83	84	85	86	
23	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Tingkat Produktivitas tenaga Kerja	Persentase	40,99	41,05	41,18	41,36	41,90	42,20	42,50	
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	0	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase	8,9	0,48	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	
4	Nilai Sakip	Nilai	61,50	61,50	62,50	63,50	64,50	65,70	66,00	
5	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	-	-	0,18	0,21	0,25	0,28	0,30	
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	-	-	3.075	3.075	3.105	3.165	3.195	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	-	-	250	250	250	250	300	
9	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	8,9	-	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	17,79	16,12	15,31	14,55	13,82	12,13	11,54	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Nilai Sakip	Nilai	62,5	64	65,5	67	68,5	70	71,5	
3	Rasio KDRT	%	2,90	2,89	2,24	2,22	2,18	2,07	1,76	
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	7,87	7,67	7,40	7,03	6,32	5,94	5,64	
5	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	18,08	18,09	19,00	19,21	19,35	19,40	19,45	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	65,43	65,62	65,92	66,17	66,39	66,58	66,77	
8	Persentase Anggaran Responsif (ARG)	%	6,24	6,30	6,89	7,42	8,54	9,20	9,67	
9	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Nilai	12,90	20,96	22,58	24,08	25,58	27,62	36,18	
10	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Nilai	87,13	88,26	90,01	91,49	92,78	93,91	95,04	
12	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
13	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Nilai	-	-	0,51	0,75	1,05	1,07	1,09	
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,72	56,25	58,80	59,31	59,84	58,88	60,45	
15	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6,24	6,30	6,89	7,42	8,54	9,20	9,67	
16	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Nilai Sapi	Nilai	50	55	60	65	70	75	75	
2	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	96,77	83,2	88	90	91	92	92	
3	Jumlah Cadangan Pangan (ton)	Ton	12,46	6,396	48	50	52	54	54	
4	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan	%	22,03	20,3	20,1	18,44	16,77	15,1	15,1	
5	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Jumlah Entitas Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA	Kelompok	2	2	2	2	2	2	2	
2	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	88,89	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
3	Persentase sampah dan jumlah limbah B3 terkelola	%	0	50	50	60	60	70	70	
4	Nilai SAKIP		61,50	61,60	61,70	61,80	61,90	61,90	61,90	
5	Persentase Penurunan Emisi GRK a) Kumulatif	%	-	97,39	97,66	97,95	98,22	98,5	99,05	
6	Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Pelaku Usaha	Kg/Orang	120	20	30	30	40	40	50	
7	Jumlah Penerima Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaa n	-	-	3	3	3	3	3	
8	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	-	-	100	100	100	100	100	
9	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	-	20	25	25	30	30	
10	Indeks Kualitas Udara	poin	92,7	-	88,23	88,43	88,63	88,83	89,03	
11	Indeks Kualitas Air Laut	poin	78,08	-	81,99	82,04	82,09	82,14	82,19	
12	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	-	1	-	-	1	-	
13	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	%	88,89	-	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH									
14	Indeks Kualitas Air	poin	56,55	-	72,83	73,03	72,23	73,43	73,63	
15	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	-	-	90	90	90	90	90	
16	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Akte Perkawian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	-	-	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	30	10	20	30	40	50	80	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	23	-	55	60	65	70	75	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Nilai Sakip	Nilai	68	68	68,5	69	69,5	70	70	
2	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persentase	0	-	1,7	1,7	1,7	1,7	8,3	
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	100	-	20	40	60	80	100	
5	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	56,25	-	1,7	1,7	1,7	1,7	6,7	
6	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	33	-	50	67	83	100	100	
7	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	Persentase	100	10	20	40	60	80	100	
8	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	0	-	20	40	60	80	100	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan	%	0	80	82,5	85	87,5	90	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	kependudukan dan pencatatan sipil									
2	Nilai Sakip	Nilai	60,1	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	
3	Kebijakan fasilitasi dan koordinasi layanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	%	0	80	82,5	85	87,5	90	100	
4	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB	%	59,0	59,0	60,3	61,6	63,0	64,2	65,5	
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	-	-	65,5	68,5	72,0	74,5	77,5	
6	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	-	-	40,5	42,5	44,0	44,5	45,5	
7	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,41	-	2,40	2,39	2,38	2,37	2,36	
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	-	-	90,8	91,5	93,0	93,5	94,5	
9	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	19,4	-	18,4	17,4	16,4	15,4	14,4	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,761	0,704	0,725	0,741	0,752	0,764	0,776	
2	Nilai Sakip	Nilai	62,5	64	65,5	67	68,5	70	71,5	
3	Konektivitas Darat	Rasio	0,672	0,701	0,756	0,790	0,812	0,835	0,857	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persentase	25,14	25,14	25,24	25,34	25,59	25,84	26,09	
5	Konektivitas Laut	Rasio	0,697	0,705	0,712	0,719	0,727	0,734	0,741	
6	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	
2	Nilai SAKIP	Skor	0	74,00	76,00	78,00	79,00	80,00	82,00	
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Nilai Sakip	Nilai	62,50	64,00	65,50	67,00	68,50	70,00	71,50	
2	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Koperasi	60	30	30	30	30	30	30	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	9,91	9,92	9,93	9,94	9,95	9,96	9,97	
4	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	0,66	0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
5	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	0	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	
7	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,93	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Nilai Sakip	Nilai	70,05	71	72	73	74	75	76	
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	-	-	100	100	100	100	100	
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	%	-	-	72,50	75	77,50	80	82,50	
6	Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investor	0	0	2	2	2	2	2	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Nilai Sakip	Nilai	64,25	65,20	66,15	67,10	68,5	69	70,1	
2	Persentase Fasilitas Pemuda	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Fasilitas Pramuka	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Persentase data statistik sektoral daerah yang tersedia	%	60	62	64	66	68	70	72	



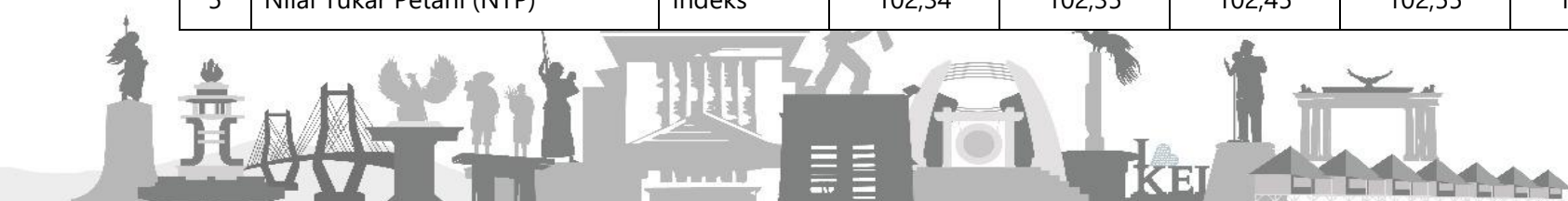
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	38,76	25	28,28	33,19	38,40	42,47	43,67	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	-	-	100	100	100	100	100	
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	-	-	100	100	100	100	100	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	-	-	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	-	-	45	60	75	85	100	
5	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	-	-	50	52	54	56	58	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,58	62,58	63	63,50	64	64,50	65	
2	Nilai Sakip	Nilai	76,35	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	%	38,31	38,31	38,50	39	39,50	40	40,50	
5	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	17	17	17	17	17	17	17	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	70,12	71,75	74,44	78,37	82,11	84,24	86,69	
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	%	70,47	72,5	75,1	80,05	83,7	85,05	88,1	
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	%	69,89	71,25	74	77,25	81,05	83,70	85,75	
4	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip dinamis	%	8	11	13	16	19	22	25	
5	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan dimusnahkan	Nilai	1	50	150	200	250	300	350	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	2.111.176,30	2.053.582,18	2.370.729,20	3.318.970,89	3.920.894,99	4.059.450,13	4.221.670,70	
2	Tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	80,62	90	45	47,25	49,61	52,09	54,70	
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	82,80	79	40	41,48	43,55	45,73	48,01	
4	Nilai SAKIP	Skor	62,01	64	66	68	72	76	81	
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	533.116,69	511.435,90	255.846,00	268.638,25	282.070,16	296.173,67	310.982,35	



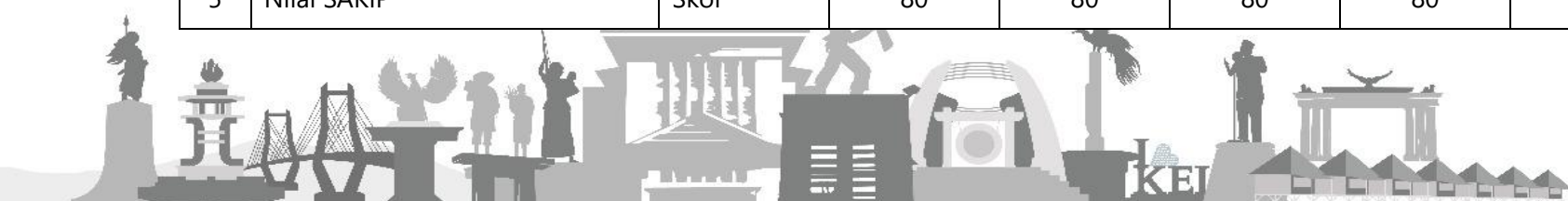
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	261.166,28	236.000,00	123.500,00	129.675,00	136.158,75	142.966,69	150.115,02	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Nilai Sakip	Nilai	-	65	66	67	68	69	70,1	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	1,92	1,90	1,92	1,94	1,96	1,98	2,00	
4	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	5	5	5	5	5	5	5	
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	%	0,17	0,36	0,66	0,96	1,26	1,56	1,86	
6	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola, ditata, dan dikembangkan	Destinasi	3	4	4	4	6	6	7	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	Angka	54,83	56,10	58,20	62,46	66,77	69,90	75,08	
2	Produksi Komoditas Pertanian	Ton	252.871,4	295.578	301.253	307.128	313.163	319.391	352.787	
3	Nilai Sakip	Nilai	70	70	70	70	80	80	90	
4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	9,56	10,05	10,15	10,23	10,73	10,4	10,45	
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	102,34	102,35	102,45	102,55	102,65	102,75	102,85	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Angka	147.895	117.995	120.355	122.761	125.216	127.721	130.275	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	50	63	75	89	92	94	96	
9	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Angka	8.702	3.848	3.925	4.003	4.082	4.162	4.255	
10	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	85	86	87	89	92	94	96	
11	Peningkatan Produksi Perkebunan	Angka	142.810	157.398	160.298	163.360	166.456	169.635	172.877	
12	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	68,1	71,5	75,5	77,5	80,2	83,5	85,0	
13	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Angka	5	6	7	8	11	12	13	
14	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	32.964,43	32.964,43	32.964,43	32.964,43	32.964,43	32.964,43	32.964,43	
15	Peningkatan Produksi Hortikultura	Angka	16.512	16.337	16.675	17.004	17.409	17.873	18.380	
BB	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
1	Jumlah kelompok usaha masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang terfasilitasi	Kelompok	2	28	29	29	29	29	29	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Nilai Sakip	Nilai	80	85	85	85	85	85	85	
3	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	30	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Terkelolanya DAS Lintas Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	4	4	4	4	4	
6	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	%	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	
7	Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Kel)	Kelompok	18	28	14	14	14	14	14	
8	Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi (Kel)	Kelompok	2	0	15	15	15	15	15	
BC	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Jumlah Rumah Tangga sasaran (RTS)	Unit	41	10	50	55	90	100	110	
2	Presentase Pemanfaatan Air Tanah Berkelanjutan	%	0	5	50	65	70	80	95	
3	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	23,84	29,59	31,96	34,33	36,70	37,07	41,44	
4	Persentase Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan, Izin Pertambangan Rakyat dan Surat Izin Pertambangan Buatan	%	80	70	75	80	85	90	95	
5	Nilai SAKIP	Skor	80	80	80	80	80	80	80	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT	Rumah Tangga	46	-	140	150	200	250	300	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Rp. Juta Per Tahun	-	-	157	749	231	275	453	
9	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Meter	-	-	-	-	-	-	-	
10	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Meter	-	-	10	1	1	1	1	
BD	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase Kepatuhan Berusaha (%)	%	0	90	91	92	93	94	95	
2	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	6	6	6	8	10	11	12	
3	Jumlah sampel yang diuji	Sampel	100	100	105	110	115	120	125	
4	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	0	50	60	70	80	85	90	
5	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen (Kasus)	Kasus	5	5	5	5	5	5	5	
6	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
7	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Terdaftar yang Difasilitasi		4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	2,78	3.5-4	3.5-4	3.5-4	3.5-4	3.5-4	3.5-4	
9	Jumlah bahan berbahaya yang dipantau peredarannya	%	4	4	4	4	4	4	4	
BE 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
1	Nilai Sakip	Nilai	70	70	70	70	70	70	70	
2	Rata-rata nilai investasi IKM (%)	%	0	7	7	7	7	7	7	
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (%)	%	0	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
4	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
BF 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
1	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi baru	Dokumen	0	0	1	1	1	1	0	
2	Persentase dokumen perencanaan kawasan terpadu.	%	0	0	100	100	100	100	0	
3	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%	-	-	100	100	100	100	-	
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	-	-	0,21	0,5	0,4	0,4	0,38	
BG 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai Sakip	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Reformasi Hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai LPPD	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Indeks Kualitas Kebijakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
8	Nilai SPM	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Organisasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Produk Hukum yang di fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
BH	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Nilai Sakip	Nilai	66	67	68	69	70	71	72	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Ketepatan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BI	5.01 - PERENCANAAN									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84,69	84,90	85,55	86,14	86,74	88,50	91,58	
2	Nilai Sakip	Nilai	80	81	82	83	84	85	86	
3	Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	-	-	100	100	100	100	100	
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	-	-	100	100	100	100	100	
8	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	-	-	100	100	100	100	100	
9	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
BJ	5.02 - KEUANGAN									
1	Efektifitas pendapatan daerah (persentase)	%	94,18	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
2	Nilai Sakip	Nilai	-	70	70	70	70	70	70	
3	Nilai Sakip	Nilai	60,1	62	64	66	68	69	70,1	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	E	B	B	B	B	B	B	
6	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	
7	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	
8	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penurunan SILPA	%	5	5	5	5	5	5	5	
11	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	17,48	18	18	18	18	18	18	
BK	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Sistem Merit	Poin	251,5	251,5	280	285	290	300	325	
2	Nilai Sakip	Nilai	71,1	75	80	82	85	88	90	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai Aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karier	Nilai	55	55	60	61	64	67	75	
5	Nilai Aspek Pengadaan, Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi	Nilai	87	87	100	102	103	105	115	
6	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Pengajian, Penghrgaan dan Disiplin, dan Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	109,5	109,5	120	122	123	128	135	
BL	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Nilai Sakip	Nilai	66,30	66,80	68	68,50	69	69,50	70,1	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
BM	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
BN	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN									
1	Nilai Sakip	Nilai	60	62	64	66	68	70	72	
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase infrastruktur terbangun di kawasan perbatasan	Persentase	62,38	62,73	69,5	72	74,5	77	80	
BO	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
1	Nilai Sakip	Nilai	65,85	66	67	68	69	70	71	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
BP	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Indeks Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
2	Nilai Sakip	Nilai	70	70	70	70	80	82	85	
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
BQ	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik oleh Pemerintah Daerah dan Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Konflik Sosial yang Berhasil Difasilitasi.	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitas Pendaftaran Ormas	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kebijakan Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Nilai Sakip	Nilai	62	64	65	66	68	70	72	
7	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
BR										
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	-	-	20	25	30	35	40	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis, karena menjadi pedoman utama penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun, sekaligus penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD. RPJMD ini tidak hanya memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas utama pembangunan, tetapi juga menetapkan target dan sasaran kinerja yang terukur. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan APBD, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan. Sebagai dokumen strategis, RPJMD memastikan pembangunan daerah Provinsi Maluku berjalan terarah, terukur, sinkron dengan RPJMN dan RPJPD, serta menjadi tahapan penting dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan daerah dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045

Secara substansial melalui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 Provinsi Maluku telah menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang disusun secara terarah, terukur, Strategis, dan berkesinambungan. Dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 yang berkomitmen untuk mencapai tujuan yaitu **Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045**. hal ini menggambarkan situasi yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2025-2030 dan menjadi pijakan utama dalam perumusan strategi pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Sapta Cita Lawamena, yaitu 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu, (1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel, (2) Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif, (3) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas, (4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah, (5) Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Eris, Responsif dan Akuntabel), (6) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah, (7) Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Melalui ke 7 misi ini Pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan daerah yang ada saat ini.

Dalam pelaksanaannya RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 merupakan dokumen yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)



Tahun 2025–2029 yang memuat 8 (delapan) arah pembangunan (Asta Cita) yang telah diselaraskan dengan 7 (Tujuh) misi (Sapta Cita) serta mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2045. Beberapa sasaran pembangunan nasional yang menjadi

rujukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Maluku ini antara lain: peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, penguatan ketahanan sosial dan budaya, Penurunan Kemiskinan dan ketimpangan, serta Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission. Dengan demikian, Dokumen RPJMD ini tidak hanya mencerminkan kepentingan dan karakteristik lokal Maluku, tetapi juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan visi Indonesia Emas 2045. keterkaitan dokumen perencanaan antara pusat dan daerah ini merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung berbagai program pemerintah pusat. Selain itu juga dokumen RPJMD Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara simultan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dapat dioperasionalkan kedalam Dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kera (Renja) Perangkat Daerah.

Kaidah Pelaksanaan dalam Pengendalian dan Evaluasi RPJMD, Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Kaidah pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh perangkat daerah dalam memastikan keterlaksanaan pembangunan yang efektif dan akuntabel.

Pengendalian RPJMD dilakukan melalui pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pelaporan realisasi capaian kinerja, sehingga setiap permasalahan, hambatan, maupun deviasi dari target dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang tepat.

Evaluasi RPJMD dilaksanakan secara tahunan dan akhir periode dengan tujuan menilai capaian indikator kinerja daerah, indikator makro pembangunan, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, serta sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan pada periode selanjutnya.

Melalui kaidah pelaksanaan ini, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kesinambungan dalam seluruh proses pembangunan. Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak hanya menjadi sarana untuk mengukur capaian, tetapi juga menjadi instrumen manajerial dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Kepala Daerah



bersama DPRD memegang peranan penting dalam memberikan dukungan politik, regulasi, serta alokasi anggaran yang memadai, sementara perangkat daerah bertanggung jawab untuk menerjemahkan RPJMD ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan rencana kerja tahunan. Selain faktor internal, keberhasilan RPJMD juga ditentukan oleh faktor eksternal, yaitu sinkronisasi dan sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta RPJMD Kabupaten/Kota, sehingga pembangunan daerah berjalan terpadu dan berkesinambungan. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan kunci untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Disamping itu, keberhasilan pencapaian target RPJMD sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid serta sistem informasi perencanaan yang terintegrasi. Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang konsisten, setiap capaian, deviasi, maupun kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat. Dengan demikian, RPJMD sebagai dokumen strategis pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, demi terwujudnya visi pembangunan Provinsi Maluku ***Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045***

GUVERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA

